

SOSIOLOGI

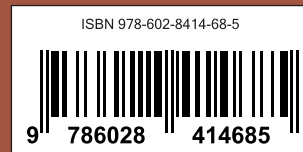
Bidang Khusus, Perkembangan, Pengertian,
Pendekatan, Kegunaan dan Objek Kajian

Buku yang tengah berada di tangan sidang pembaca yang budiman seperti bentuknya saat ini, merupakan hasil dari pengalaman penulis sebagai pengasuh mata kuliah Sosiologi pada S-1 Program Studi Pendidikan Sosiologi-Antropologi dan Program Studi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) serta pengasuh mata kuliah Individu, Masyarakat dan Perilaku Sosial pada Program Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.

Berdasarkan pengalaman itulah, penulis berupaya merangkum dan menampilkan sebuah buku yang dapat memandu dan memenuhi kebutuhan para mahasiswa yang kesulitan melihat posisi sosiologi khusus dalam ilmu sosiologi. Atau, mahasiswa dapat memahami berbagai perspektif dalam sosiologi yang menjadi akar teori sosiologi khusus.

TAHURA
MEDIA

Jl. Pramuka Km. 6
Kompleks Keluarga No. 6 RT. 02
Banjarmasin



SOSIOLOGI

Bidang Khusus, Perkembangan, Pengertian,
Pendekatan, Kegunaan dan Objek Kajian

Prof. Dr. H. Wahyu, MS



SOSIOLOGI

Bidang Khusus, Perkembangan, Pengertian,
Pendekatan, Kegunaan dan Objek Kajian

Editor: Dr. Mariatul Kiptiah, M.Pd

SOSIOLOGI

Bidang Khusus, Perkembangan, Pengertian,
Pendekatan, Kegunaan dan Objek Kajian

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Prof. Dr. H. Wahyu, MS

SOSIOLOGI

Bidang Khusus, Perkembangan, Pengertian,
Pendekatan, Kegunaan dan Objek Kajian

Editor: Dr. Mariatul Kiptiah, M.Pd

TAHURA
MEDIA

SOSIOLOGI: Bidang Khusus, Perkembangan, Pengertian, Pendekatan,
Kegunaan dan Objek Kajian

© Penulis

Penulis :

Prof. Dr. H. Wahyu, MS

Editor :

Dr. Mariatul Kiptiah, M.Pd

Desain Sampul & Tata letak :

Ibnu Teguh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

Cetakan Pertama, Juli 2021

328 hlm (xiv + 314 halaman) : 14 x 21 cm

ISBN :

Penerbit :

TAHURA MEDIA

Jl. Pramuka Km. 6

Kompleks Keluarga No. 6 RT 02 Banjarmasin

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta menganugrahkan tetesan ilmu, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan buku SOSIOLOGI: Bidang Khusus, Perkembangan, Pengertian, Pendekatan, Kegunaan dan Objek Kajian dengan baik dan lancar. Shalawat dan Salam selalu tercurah kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad SAW yang menganjurkan umatnya untuk mengajar, belajar dan mendengar serta menekankan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim.

Buku yang tengah berada di tangan sidang pembaca yang budiman seperti bentuknya saat ini, merupakan hasil dari pengalaman penulis sebagai pengasuh mata kuliah Sosiologi pada S-1 Program Studi Pendidikan Sosiologi-Antropologi dan Program Studi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) serta pengasuh mata kuliah Individu, Masyarakat dan Perilaku Sosial pada Program Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin. Sebenarnya, sudah banyak buku teks Sosiologi Umum dan Sosiologi khusus, seperti Sosiologi Pendidikan, Sosiologi Keluarga, Sosiologi Ekonomi, Sosiologi Politik, Sosiologi Hukum, dan sebagainya yang ditulis para ahli Indonesia dan asing dalam bahasa asing atau dalam bentuk alih bahasa. Misalnya, Sosiologi Umum: Soekanto (Sosiologi Suatu Pengantar), Sunarto (Sosiologi), Elly & Kolip (Pengantar Sosiologi), Narwoko dan Suyanto (Sosiologi), Anwar dan Adang (Sosiologi), Dirdjosisworo (Sosiologi), Horton & Hunt (Sosiologi), Giddens, dkk (Sosiologi), Sanderson (Sosiologi Makro). Sosiologi Khusus: Soekanto (Sosiologi Hukum), Elly & Kolip (Sosiologi Politik), Karsidi (Sosiologi Pendidikan), Suyanto (Sosiologi Ekonomi), Damsar

&Indrayani (Sosiologi Perkotaan), Damsar & Indrayani (Sosiologi Perdesaan), Sudarma (Sosiologi Komunikasi), Suyanto (Sosiologi Anak), Atmadja & Atmadja (Sosiologi Korupsi), Susilo (Sosiologi Lingkungan), Pudjiwati (Sosiologi Pembangunan), Ishomuddin (Sosiologi Agama), Djajadi, dkk (Sosiologi Industri), dan sebagainya. Di dalam buku ini ditulis hanya dasar-dasarnya saja, seperti bidang khusus, perkembangan, pengertian, pendekatan, kegunaan dan objek kajian dari sosiologi khusus. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap sosiologi khusus, maka para pembaca dapat mempelajari buku-buku sosiologi khusus yang telah beredar di pasaran. Makin banyak kita mempelajari sosiologi khusus, maka kita makin sadar bahwa objek kajian sosiologi tak dapat diterangkan hanya oleh satu disiplin sosiologi khusus. Sosiologi khusus hanyalah salah satu disiplin dalam ilmu sosiologi.

Berdasarkan pengalaman dan kenyataan itulah, penulis berupaya merangkum dan menampilkan sebuah buku yang dapat memandu dan memenuhi kebutuhan para mahasiswa yang kesulitan melihat posisi sosiologi khusus dalam ilmu sosiologi. Atau, mahasiswa dapat memahami berbagai perspektif teori dalam sosiologi yang menjadi akar teori sosiologi khusus. Jika ada yang bertanya, apakah penulis berhasil menyajikan rangkuman dan menampilkan sosiologi khusus dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dalam buku ini ?Terus terang, penulis belum tahu dan tentu saja para pembaca yang lebih tahu. Tetapi, penulis berharap Anda yang sedang membaca buku ini tidak kesulitan memahami isinya, sehingga dapat memberikan sumbangan berharga bagi perkembangan khazanah sosiologi khusus.

Di dalam buku ini banyak dikutip pendapat dari para ahli. Namun, perlu diakui bahwa tidak semua kutipan tampak secara eksplisit sumber rujukannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mohon maaf kepada pengarang yang pendapatnya dikutip di dalam buku ini tetapi tidak disertai

pencatatan sumbernya. Meskipun demikian, pada Daftar Pustaka sebagaimana lazimnya sebuah karangan ilmiah atau buku, nama-nama pengarang yang karyanya dijadikan acuan dalam penulisan buku ini disertakan pula.

Buku ini lahir dalam bentuk yang sekarang ini karena bantuan berbagai pihak. Bantuan itu memang banyak corah dan warnanya, serta berbagai pula kadarnya. Ucapan terima kasih yang tulus dan tidak ternilai harganya disampaikan kepada Saudari Dr. Mariatul Kiptiah, M.Pd yang telah bersusah payah mengedit bahasa tulisan-tulisan dalam buku ini. Dalam kesibukannya sebagai Ketua Program Studi PPKN FKIP ULM, pengajar, membimbing skripsi, melakukan penelitian, melakukan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan akademik dan non-akademik lainnya, beliau masih sempat dan menyempatkan diri untuk berkenan mencermati bagian demi bagian, kalimat demi kalimat, kata demi kata, bahkan ejaan dan tanda baca dalam setiap karangan serta menyusunnya dalam struktur pemaparan yang lebih sistematis. Demikian pula kepada penerbit buku ini, juga disampaikan terima kasih.

Kepada isteri tersayang, Ny. Nenden, anak-anak tercinta, Dadan dan Dian, menantu tercinta Ina dan Rico, cucu tercinta Alia, Nabila, Akbar dan Ilham yang tidak pernah putus asa, bahkan hari-hari ini mereka semakin mengerti dan memahami pelbagai kesibukan penulis dengan penuh kesetiaan dan ketabahan mengarungi lautan kehidupan yang penuh tantangan ke depan, penulis persembahkan buku ini untuk mereka. Kepada pelbagai pihak, terutama dosen-dosen di Program Studi PPKN dan Program Studi Pendidikan Sosiologi-Antropologi FKIP ULM Banjarmasin, yang tidak bisa disebutkan satu per satu, penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam dan tulus atas jasanya sehingga buku ini dapat terbit.

Akhirul kalam, penulis menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna. Tetapi terbesit harapan, semoga buku ini

betapapun kecilnya tetap memberikan sesuatu yang berarti kepada pembaca. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa materi yang disajikan dalam buku ini masih terdapat kekurangan, kelemahan dan kekhilafan, sehingga kritik dan saran membangun dari para pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan bagi isi buku ini ke depan. Semoga buku ini menjadi pendorong penulis untuk mendalami seluk beluk sosiologi khusus serta bermanfaat adanya bagi penulis dan pembaca yang budiman.

Banjarmasin, 2 Januari 2021

Wahyu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Perkembangan Sosiologi	1
B. Para Perintis Sosiologi	6
C. Perkembangan Sosiologi di Indonesia.....	42
BAB II RUANG LINGKUP SOSIOLOGI.....	47
A. Definisi Sosiologi.....	47
B. Objek Sosiologi	50
C. Sosiologi Sebagai Ilmu	53
D. Kegunaan Sosiologi.....	56
E. Peran Sosiologi.....	59
F. Perspektif dalam Sosiologi	61
G. Metode dalam Sosiologi	66
H. Bidang Sosiologi	69
BAB III SOSIOLOGI PENDIDIKAN	74
A. Perkembangan Sosiologi Pendidikan	74
B. Pengertian Sosiologi Pendidikan.....	78
C. Peranan Sosiologi Pendidikan	79
D. Objek Kajian Sosiologi Pendidikan.....	82
BAB IV SOSIOLOGI KELUARGA	85
A. Perkembangan Sosiologi Keluarga.....	85
B. Pengertian Sosiologi Keluarga	89
C. Metode Sosiologi Keluarga.....	92
D. Kegunaan Sosiologi Keluarga	93
E. Objek Kajian Sosiologi Keluarga	93

BAB V SOSIOLOGI EKONOMI	95
A. Perkembangan Sosiologi Ekonomi	95
B. Pengertian Sosiologi Ekonomi.....	103
C. Pendekatan Sosiologi Ekonomi	104
D. Kegunaan Sosiologi Ekonomi.....	106
E. Objek Kajian Sosiologi Ekonomi	106
BAB VI SOSIOLOGI AGAMA.....	110
A. Perkembangan Sosiologi Agama	110
B. Pengertian Sosiologi Agama	116
C. Pendekatan Sosiologi Agama	117
D. Kegunaan Sosiologi Agama	118
E. Objek Kajian Sosiologi Agama	119
BAB VII SOSIOLOGI KESEHATAN.....	121
A. Perkembangan Sosiologi Kesehatan	121
B. Pengertian Sosiologi Kesehatan.....	124
C. Pendekatan Sosiologi Kesehatan	125
D. Kegunaan Sosiologi Kesehatan.....	127
E. Objek Kajian Sosiologi Kesehatan.....	127
BAB VIII SOSIOLOGI HUKUM	130
A. Perkembangan Sosiologi Hukum.....	130
B. Pengertian Sosiologi Hukum	141
C. Pendekatan Hukum Sosiologis	143
D. Kegunaan Sosiologi Hukum	144
E. Objek Kajian Sosiologi Hukum	146
BAB IX SOSIOLOGI POLITIK.....	149
A. Perkembangan Sosiologi Politik.....	149
B. Pengertian Sosiologi Politik	156
C. Pendekatan dan Metode	158
D. Peranan Sosiologi Politik	163
E. Objek Kajian Sosiologi Politik	165

BAB X SOSIOLOGI PERKOTAAN	168
A. Perkembangan Sosiologi Perkotaan.....	168
B. Pengertian Sosiologi Perkotaan	173
C. Metode Sosiologi Perkotaan.....	174
D. Kegunaan Sosiologi Perkotaan	176
E. Objek Kajian Sosiologi Perkotaan	177
BAB XI SOSIOLOGI PERDESAAN.....	180
A. Perkembangan Sosiologi Perdesaan.....	180
B. Pengertian Sosiologi Perdesaan	182
C. Pendekatan Sosiologi Perdesaan	183
D. Peranan Sosiologi Perdesaan	184
E. Objek Kajian Sosiologi Perdesaan	186
BAB XII SOSIOLOGI KOMUNIKASI	189
A. Perkembangan Sosiologi Komunikasi	189
B. Pengertian Sosiologi Komunikasi	191
C. Pendekatan Sosiologi Komunikasi	193
D. Manfaat Sosiologi Komunikasi	193
E. Objek Kajian Sosiologi Komunikasi	194
BAB XIII SOSIOLOGI PARIWISATA	198
A. Perkembangan Sosiologi Pariwisata	198
B. Pengertian Sosiologi Pariwisata	202
C. Pendekatan Sosiologi Pariwisata	203
D. Manfaat Sosiologi Pariwisata	204
E. Objek Kajian Sosiologi Pariwisata	204
BAB XIV SOSIOLOGI INDUSTRI	206
A. Perkembangan Sosiologi Industri	206
B. Pengertian Sosiologi Industri	209
C. Pendekatan Sosiologi Industri	210
D. Manfaat Sosiologi Industri	211
E. Objek Kajian Sosiologi Industri	212

BAB XV SOSIOLOGI KAPITAL	215
A. Perkembangan Sosiologi Kapital	215
B. Pengertian Sosiologi Kapital	218
C. Pendekatan Sosiologi Kapital	221
D. Manfaat Sosiologi Kapital	222
E. Objek Kajian Sosiologi Kapital	223
BAB XVI SOSIOLOGI LINGKUNGAN	225
A. Perkembangan Sosiologi Lingkungan	225
B. Pengertian Sosiologi Lingkungan.....	230
C. Pendekatan Sosiologi Lingkungan	232
D. Manfaat Sosiologi Lingkungan.....	233
E. Objek Kajian Sosiologi Lingkungan.....	234
BAB XVII SOSIOLOGI PEMBANGUNAN	239
A. Perkembangan Sosiologi Pembangunan	239
B. Pengertian Sosiologi Pembangunan	242
C. Pendekatan Sosiologi Pembangunan	243
D. Manfaat Sosiologi Pembangunan	246
E. Objek Kajian Sosiologi Pembangunan	246
BAB XVIII SOSIOLOGI ORGANISASI	249
A. Perkembangan Sosiologi Organisasi.....	249
B. Pengertian Sosiologi Organisasi	253
C. Pendekatan Sosiologi Organisasi	254
D. Manfaat Sosiologi Organisasi	256
E. Objek Kajian Sosiologi Organisasi.....	257
BAB XIX SOSIOLOGI ANAK	260
A. Perkembangan Sosiologi Anak.....	260
B. Pengertian Sosiologi Anak	268
C. Pendekatan Sosiologi Anak.....	269
D. Manfaat Sosiologi Anak	271
E. Objek Kajian Sosiologi Anak	271

BAB XX	SOSIOLOGI KORUPSI	274
A.	Perkembangan Sosiologi Korupsi	274
B.	Pengertian Sosiologi Korupsi	278
C.	Pendekatan Sosiologi Korupsi	280
D.	Manfaat Sosiologi Korupsi	282
E.	Objek Kajian Sosiologi Korupsi	282
BAB XXI	SOSIOLOGI KONFLIK.....	285
A.	Perkembangan Sosiologi Konflik	285
B.	Pengertian Sosiologi Konflik	292
C.	Pendekatan Sosiologi Konflik	294
D.	Manfaat Sosiologi Konflik	298
E.	Objek Kajian Sosiologi Konflik	298
DAFTAR PUSTAKA.....	301	
BIODATA PENULIS.....	313	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Perkembangan Sosiologi

Sosiologi adalah ilmu yang paling muda dari ilmu-ilmu sosial yang dikenal. Awal mula perkembangan sosiologi bisa dilacak pada saat terjadinya Revolusi Perancis dan Revolusi Industri yang terjadi sepanjang abad 19. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Laeyendecker (Sunarto, 2004) bahwa kelahiran sosiologi erat kaitannya dengan: (1) tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad ke-15, (2) perubahan di bidang sosial dan politik, (3) perubahan berkenaan dengan reformasi Martin Luther, (4) meningkatnya individualisme, (5) lahirnya ilmu pengetahuan modern, (6) berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri, (6) revolusi Perancis dan revolusi industri.

Daftar kekuatan sosial yang mendorong pertumbuhan sosiologi, juga kita jumpai dalam buku Ritzer. Menurut Ritzer (2009) kekuatan sosial yang dipandang penting dalam perkembangan sosiologi yaitu:

1. Revolusi Politik. Rentetan revolusi yang dipicu oleh Revolusi Perancis tahun 1789 dan berlanjut sampai dengan abad ke-19 merupakan faktor langsung kelahiran sosiologi. Dampak yang ditimbulkan oleh revolusi ini terhadap masyarakat begitu besar dan berbagai perubahan positif pun muncul. Namun, yang menarik perhatian para teoretisi adalah efek negatif dari perubahan tersebut. Misalnya, munculnya kekacauan dan gangguan, khususnya di Perancis. Para teoretisi justru berusaha menemukan basis tatanan baru dalam masyarakat yang telah hancur akibat revolusi politik abad ke - 18 dan 19.

2. Revolusi Industri dan kelahiran Kapitalisme. Revolusi industri bukanlah peristiwa tunggal melainkan terdiri dari beberapa perkembangan yang saling terkait dan berpuncak pada transformasi dunia Barat dari sistem pertanian menuju industri besar-besaran. Para petani meninggalkan lahan pertanian dan beralih ke pekerjaan di sektor industri yang ditawarkan oleh pabrik-pabrik besar. Dalam ekonomi ini, yang menjadi kondisi ideal adalah pasar bebas tempat diperjualbelikannya bermacam-macam produk industri. Dalam sistem ini, hanya sedikit yang memperoleh laba besar, sementara itu mayoritas yang lain bekerja berjam-jam dengan upah rendah. Reaksi terhadap sistem industri dan kapitalisme ini secara umum berimbas dan mengarah pada gerakan buruh maupun berbagai gerakan radikal yang ditujukan untuk menghapuskan sistem kapitalis. Revolusi industri, kapitalisme dan reaksi terhadapnya memicu gejolak di tengah masyarakat Barat, dan ini mempengaruhi para sosiolog.
3. Kelahiran Sosialisme. Kelahiran sosialisme bertujuan mengatasi akibat sampingan dari sistem industri dan kapitalisme dapat digabungkan di bawah istilah sosialisme. Jadi, sosialisme sebagai solusi atas masalah-masalah industri. Marx adalah pendukung hancurnya sistem kapitalis dan digantikannya dengan sistem sosialis. Ideologi sosialisme dapat dibagi dalam sosialisme non-Marxis dan sosialisme Marxis. Lahirnya sosialisme diberbagai Negara Eropah abad 19, karena ketidakpuasan dengan terjadinya penderitaan, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sebagai akibat berkembangnya industrialisasi dan kapitalisme. Tujuannya adalah merombak masyarakat kearah persamaan hak dan pembatasan terhadap hak milik pribadi. Ada yang mengusulkan perombakan secara paksa dan ada pula yang menghendaki perubahan secara damai. Di Negara sosialis, asas sosialisme seperti penguasaan alat produksi dan

pengaturan distribusi komoditas ditetapkan oleh Negara. Pengaturan produksi dan distribusi komoditas di seluruh Negara dilaksanakan secara terpusat.

4. Feminisme. Ledakan karya-karya feminis pertama terjadi pada tahun 1780-an dan 1790-an dengan sejumlah debat seputar revolusi Amerika dan Perancis. Upaya yang jauh lebih terorganisasi dan terfokus pada tahun 1850-an sebagai bagian dari mobilisasi menentang perbudakan dan perjuangan bagi hak-hak politik kelas menengah dan mobilisasi besar-besaran memperjuangkan hak pilih perempuan dan legislasi reformasi industri dan sipil pada awal abad ke-20, khususnya era progresif di Amerika Serikat. Semua itu berdampak pada perkembangan sosiologi, khususnya karya sejumlah perempuan yang ada di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu karya mereka terdorong ke pinggir profesi ini, dianeksasi dan dikesampingkan, atau dihapus dari catatan publik sosiologi oleh sejumlah laki-laki yang mengorganisasi sosiologi sebagai basis kekuasaan profesional. Perhatian para feminis hanya ditempatkan di pinggiran sosiologi, atau teoretisi perempuan yang semakin terpinggirkan. Tokoh-tokoh pria yang menempati posisi sentral dalam profesi ini, mulai dari Spencer, Weber sampai Durkheim. Mereka memberikan tanggapan yang pada dasarnya konservatif terhadap argumen feminis di sekitarnya, walaupun para perempuan telah menulis teori sosiologi yang cukup signifikan.
5. Urbanisasi. Sebagai salah satu dampak Revolusi Industri, banyak orang pada abad ke-19 dan 20 tercerabut dari rumah mereka di desa dan pindah ke perkotaan. Migrasi besar-besaran ini terutama disebabkan oleh pekerjaan yang ditawarkan sistem industri di wilayah perkotaan. Namun, hal ini melahirkan kesulitan bagi mereka, karena harus menyesuaikan diri dengan kehidupan kota. Selain itu, ekspansi kota menimbulkan masalah-masalah perkotaan

yang seakan tiada ujungnya, kepadatan penduduk, polusi, kebisingan, lalu lintas, dan lain sebagainya. Sifat kehidupan kota dan masalah yang dihadapinya menarik perhatian beberapa sosiolog awal, khususnya Weber dan Simmel.

6. Perubahan di wilayah agama. Revolusi Industri dan urbanisasi membawa dampak besar pada religiositas. Ke dalam sosiologi, mereka memasukan tujuan yang sama sebagaimana tujuan agama mereka. Sementara bagi beberapa di antara mereka, misalnya Comte, sosiologi justru diubah menjadi agama baru. Bagi lainnya, sosiologi melahirkan dampak keagamaan yang tak terbantahkan. Durkheim menulis salah satu karya utamanya tentang agama. Sebagian besar karya Weber juga ditujukan bagi agama-agama dunia. Marx pun, menaruh minat pada religiositas, namun orientasinya jauh lebih kritis.
7. Timbulnya ilmu pengetahuan. Ketika sosiologi mulai berkembang, semakin banyak penekanan diberikan pada ilmu pengetahuan, bukan hanya di perguruan tinggi dan universitas, namun juga pada masyarakat secara keseluruhan. Teknologi yang dihasilkan ilmu pengetahuan menyebar ke segenap sektor kehidupan, dan ilmu pengetahuan memperoleh prestise yang lebih tinggi. Ilmu-ilmu yang dipandang sebagai ilmu paling sukses (fisika, biologi dan kimia) mendapat tempat terhormat di tengah-tengah masyarakat. Para sosiolog (khususnya Comte, Durkheim, Spencer, Mead dan Schutz) sejak awal menekuni ilmu pengetahuan, dan tidak jarang di antara mereka yang berkeinginan agar sosiologi mengikuti keberhasilan fisika dan ilmu biologi.

Berdasarkan pemikiran Laeyendecker dan Ritzer di atas, serta ahli lainnya, sepakat bahwa faktor yang melatarbelakangi kelahiran sosiologi adalah karena adanya krisis-krisis yang terjadi di dalam masyarakat. Pemikiran awal, revolusi industri

diharapkan akan mengubah pola kehidupan tradisional ke pola modern, dari sistem pemerintahan yang sewenang-wenang menjadi sistem pemerintahan yang adil dengan indikator adanya pengakuan atas persamaan hak-hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang setara; yang lazim disebut dengan istilah sistem pemerintahan yang demokratis. Singkatnya, revolusi diharapkan menghasilkan suatu tatanan sosial yang penuh keadilan, keterbukaan, persamaan dan kebebasan. Tetapi, kenyataan yang ada setelah revolusi justru sebaliknya. Revolusi justru mengundang kekhawatiran dari banyak pihak, terutama kekhawatiran terjerumus kehidupan masyarakat ke pola-pola yang lebih buruk, yaitu anarkis. Kekhawatiran tersebut menjadi kenyataan dengan keadaan sosial yang menjadi anarkis akibat hancurnya tatanan pemerintahan di Perancis.

Revolusi industri bukan hanya gagal mengubah kelas sosial yang mengotak-ngotakkan masyarakat, tetapi membuat pengkotak-kotakan tersebut menjadi semakin menjadi-jadi. Hal ini dapat dilihat dengan semakin membengkaknya kemiskinan di Negara tersebut, upah-upah yang jauh dari layak, dan pemegang modal yang semakin bergelimang kekayaannya. Akibat dari sistem sosial tersebut adalah konflik sosial yang jika dibiarkan akan menjadi revolusi jilid dua yang akan lebih mengerikan (Elly & Kolip, 2011)

Revolusi Perancis dan revolusi industri yang terjadi sepanjang abad 19, telah menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan sekaligus menjadi perhatian dari para pemikir di waktu itu. Para pemikir mulai mencari jawaban, terutama yang menyangkut persoalan; mengapa kehidupan masyarakat berubah menjadi pola-pola kehidupan seperti itu. Ada apa dibalik pola-pola kehidupan sosial tersebut, dan bagaimana caranya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam setiap kali muncul perubahan sosial. Manakala hal yang selama ini menjadi pegangan manusia yaitu keteraturan, kedamaian

dalam masyarakat mengalami krisis, maka mulailah orang melakukan renungan sosiologi. August Comte yang pertamakali memproklamirkan kehadiran sosiologi, yaitu ilmu yang mengkaji hubungan sosial kemasyarakatan.

B. Para Perintis Sosiologi

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai tokoh tertentu yang dianggap sebagai perintis. Di dalam sosiologi pun mengenal sejumlah orang yang dianggap sebagai perintis. Biasanya para ahli sosiologi membedakan antara para perintis awal yang hidup pada abad ke-18 dan 19 dan para tokoh sosiologi masa kini yang hidup di abad ke-20. Menurut Coser (1977), yang dianggap sebagai pemuka pemikiran sosiologi yaitu Saint-Simon, Comte, Spencer, Durkheim, Weber, Marx, Sorokin, Mead, Cooley. Sementara Inkeles (1965), berpendapat bahwa perintis utama sosiologi terdiri atas Comte, Spencer, Durkheim, dan Weber. Di sini akan diuraikan beberapa tokoh tertentu yang dianggap sebagai perintis sosiologi yaitu Comte, Spencer, Durkheim, Marx dan Weber.

1. Auguste Comte (1798-1857)

Comte memproklamirkan pertama kali nama *sociology* dalam bukunya yang tersohor *Positive Philosophy* yang terbit tahun 1838. Jadi, nama sosiologi memang merupakan hasil ciptaan Comte. Dalam sosiologi, tokoh yang sering dianggap sebagai “bapak” sosiologi ialah Comte. Istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin *socius* yang berarti “kawan” dan dalam bahasa Yunani *logos* berarti “kata” atau “berbicara”. Jadi, sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat.

Salah satu sumbangan penting dari Comte bagi perkembangan sosiologi adalah pemikirannya yang diutarakan Comte dalam bukunya “*Course de Philosophie Positive*”. Dalam buku ini Comte mengemukakan pandangannya mengenai “hukum kemajuan manusia” atau “hukum tiga jenjang”. Menurut

pandangan ini, sejarah manusia akan melewati tiga jenjang yang mendaki, yaitu tahap teologis, tahan metafisis dan tahap positif (Ritzer, 2014).

Pada tahap Teologis ini, manusia mempercayai adanya kekuatan-kekuatan di luar alam yang menjadi sebab adanya peristiwa-peristiwa, seperti kematian, bencana alam, peperangan, dan lain sebagainya. Kekuatan-kekuatan itu disebut dewa-dewa atau Allah, yang mempunyai kehendak atau rasio yang melampaui manusia. Pada tahap ini, terjadi perkembangan pemahaman terhadap kekuatan-kekuatan di luar alam tersebut. Menurut Comte, perkembangan pemahaman itu terjadi dalam tiga tahap. Pertama, pemahaman “animisme” yaitu menganggap benda-benda fisik memiliki jiwa, kekuatan, kehendak, dan hasrat. Pemahaman seperti ini disebutnya sebagai pemahaman yang paling primitive dan kekanak-kanakan. Kedua, pemahaman “politeisme”, yaitu kekuatan-kekuatan di luar alam diproyeksikan dalam rupa dewa-dewa. Jadi, para dewalah yang dianggap memiliki jiwa, kekuatan, kehendak dan hasrat. Ketiga, pemahaman “monoteisme”, yaitu pemahaman terhadap kekuatan di luar alam, di mana para dewa dipadukan menjadi satu kekuatan adimanusiawi yang kemudian disebut Allah atau Tuhan. Kini, hanya ada satu kekuatan, yaitu Allah, yang dianggap memiliki jiwa, kekuatan, kehendak, dan hasrat.

Pada tahap metafisis, pengetahuan manusia mengalami perkembangan sebagaimana anak-anak memasuki masa remaja. Masa ini dianggap sebagai masa kemajuan jika dikaitkan dengan pemikiran sebelumnya. Namun demikian, pemikiran orang masih terbelenggu oleh konsepsi filosofis yang abstrak dan universal. Manusia juga belum mencari sebab-sebab dan akibat-akibat dari fenomena yang dialami sehari-hari. Kekuatan di luar alam itu, kini diubah menjadi abstraksi-abstraksi metafisis. Misalnya, alam secara keseluruhan dianggap memiliki kekuatan, atau kekuatan berada pada alam itu sendiri. Di sini, tidak ada

lagi dewa-dewa atau Allah, yang ada hanyalah alam sebagai keseluruhan dan konsepsi-konsepsi metafisisnya. Pada tahap ini, manusia menganggap bahwa di dalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan tertentu yang pada akhirnya akan dapat diungkapkan. Di sini, manusia masih terikat oleh cita-cita tanpa verifikasi dan tidak ada usaha untuk menemukan hukum-hukum alam yang seragam.

Terakhir adalah “Tahap Positif” yang merupakan puncak dari perkembangan pengetahuan manusia. Jika diibaratkan pertumbuhan manusia, maka manusia pada tahap ini sudah mencapai kedewasaannya. Pada tahap ini, manusia tidak lagi mencari sebab-sebab peristiwa di luar yang bisa diamati. Semua mengacu pada fakta-fakta. Singkatnya, tahap ini berupaya meninggalkan spekulasi dan konsep yang tak berguna yang berasal dari imajinasi agar berpegang pada objektivitas ilmu pengetahuan yang disusun dari pengalaman, observasi. Dari sini, ilmu pengetahuan berkembang pesat dan mencapai kepastian kebenarannya.

Sumbangan lainnya, Comte memperkenalkan metode positif. Oleh karena itu, di kalangan teoretisi, Comte dianggap sebagai perintis positivisme. Ciri metode positif ialah bahwa objek yang dikaji harus berupa fakta dan bahwa kajian harus bermanfaat serta mengarah ke kepastian dan kecermatan. Sarana yang menurut Comte dapat digunakan untuk melakukan kajian ialah (1) pengamatan, (2) perbandingan, (3) eksperimen, atau (4) metode historis (Laeyendecker, 1983). Sehubungan dengan hal itu, metode positif menegaskan diri bahwa pengetahuan yang benar hanyalah pengetahuan yang berdasarkan fakta-fakta. Di luar fakta-fakta bukanlah pengetahuan, misalnya metafisika. Jadi, metode positif menolak pengetahuan yang bersifat metafisika. Dengan demikian, metode positif hanya mencukupkan diri pada hal-hal yang bisa diamati atau diobservasi secara indrawi. Lebih jauh, dalam pandangan metode positif, benar tidaknya sebuah pengetahuan tergantung pada objeknya, apakah

objek itu bisa diamati atau tidak, dan bisa diobservari secara indrawi atau tidak. Kalau tidak bisa diamati, misalnya Tuhan, etika, dan seni, maka itu bukanlah pengetahuan. Sebaliknya, yang bisa diamati, misalnya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan seluruh ilmu alam dianggap benar. Dari sini, ilmu pengetahuan berkembang pesat dan mencapai kepastian kebenaran, sehingga menjadi demikian penting dan sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan manusia.

Sumbangan pemikiran penting lainnya yang diberikan Comte ialah pembagian sosiologi ke dalam dua bagian besar yaitu statika sosial (*social statics*) dan dinamika sosial (*social dynamics*). Statika sosial, kajian terhadap tatanan sosial, stabilitas dan hukum-hukum yang mengaturnya dan dinamika sosial, kajian terhadap kemajuan dan perubahan sosial. Dengan memakai analogi dari biologi, Comte menyatakan bahwa hubungan antara statika sosial dengan dinamika sosial dapat disamakan dengan hubungan antara anatomi dan fisiologi. Dengan demikian, antara statika sosial dan dinamika sosial tidak bisa dipisahkan. Sebab, perubahan sosial tanpa tatanan sosial akan melahirkan anarki dan tatanan sosial tanpa perubahan akan menjadi stagnasi. Dengan mempelajari tatanan sosial, sosiologi dapat mengarahkan perubahan masyarakat ke dalam tatanan yang lebih baik. Jadi, sosiologi tidak hanya mengamati perilaku masyarakat dalam sebuah tatanan sosial, melainkan juga ikut membentuk tatanan masyarakat menjadi lebih baik (Ritzer, 2014).

2. Herbert Spencer (1820-1903)

Spencer adalah seorang berkebangsaan Inggris yang menguraikan materi sosiologi secara terperinci dan sistematis di dalam buku yang berjudul *The Principles of Sociology*. Spencer memberikan sumbangan pemikiran yang sangat fundamental tentang objek kajian sosiologi. Menurut Spencer (Soekanto, 2017) objek kajian sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Sebagai tambahan disebutkan asosiasi, masyarakat setempat, pembagian kerja, lapisan sosial,

sosiologi pengetahuan dan ilmu pengetahuan, serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan. Tidak lupa, dia menekankan bahwa sosiologi harus menyoroti hubungan timbal balik antara unsur-unsur masyarakat, seperti pengaruh norma-norma atas kehidupan keluarga, hubungan antara lembaga politik dengan lembaga keagamaan, Unsur-unsur masyarakat tadi mempunyai hubungan yang tetap dan harmonis serta merupakan suatu integrasi.

Spencer memberikan sumbangan teori tentang evolusi sosial (social evolution). Teori tersebut hingga saat ini masih banyak dianut para sosiolog dan mengalami banyak perkembangan. Dalam teori ini, dia menganggap bahwa perubahan masyarakat itu ekuivalensi dengan teori evolusi Darwin, yang mencakup empat tahap, yaitu: (1) Perjuangan untuk hidup (*struggle for life*), (2) Mereka yang bertahan hidup adalah mereka yang memiliki perlengkapan hidup yang paling baik (*survival of the fittest*), (3) Adanya seleksi alam, (*natural selection*), dan (4) Adanya kemajuan (*progress*). Menurut Darwin, sebagai penjelasannya bahwa hidup di bumi ini ditandai oleh adanya persaingan yang begitu ketat dan kejam, di mana yang paling kuat atau mereka yang memiliki peralatan yang paling efisien akan memiliki kesanggupan untuk bertahan termasuk dari seleksi alam, setelah itu baru mereka memperoleh kemajuan. Sebagai tambahan, dia menjelaskan bahwa terdapat kesamaan antara alam flora dan fauna dengan manusia; bahwa dunia manusia juga berkembang dari keadaan yang lebih sederhana dan primitif ke arah keadaan yang lebih modern dan serba rumit atau kompleks (Wulansari, 2013).

Spencer (Sanderson, 1993) mengembangkan teori evolusi sosial yang mirip dengan teori evolusi Darwin di atas. Ia berusaha memahami proses terjadinya segala sesuatu di alam semesta ini dengan mereduksinya ke dalam prinsip universal tunggal yang disebut “hukum evolusi”. Menurut hukum evolusi segala sesuatu di alam semesta ini memiliki kecenderungan berkembang dari

keadaan yang tidak tentu, kacau, dan seragam kepada keadaan yang dapat ditentukan, teratur dan beragam. Selanjutnya, Spencer mengatakan bahwa segala sesuatu cenderung berkembang dari bentuk yang sederhana dan tidak terspesialisasi menjadi bentuk yang lebih terspesialisasi dan kompleks. Kecenderung yang universal ini adalah sebagai kunci utama dalam melihat semua teka-teki besar alam semesta ini.

Spencer memberikan contoh, kosmologi yang melekat pada sifat alam semesta ini adalah evolusi masyarakat manusia. Begitu pula tentang kehidupan sosial ke alam materi, dikekang oleh hukum penggabungan dan penggandaan. Di bawah pengaruh yang demikian ini, keadaan yang semula homogen (serba sama, seragam) menjadi heterogen (serba berbeda). Penggabungan antara anasir-anasir tersebut memunculkan alam tetumbuhan dan badan manusia. Kemudian, penggabungan penginderaan-penginderaan menghasilkan pikiran; dan penggabungan pikiran akan menghasilkan suatu ilmu pengetahuan dan filsafat. Hukum yang demikian ini juga berperan dalam kehidupan masyarakat, di mana individu-individu jika bergabung akan menjadi keluarga; jika keluarga-keluarga bergabung akan menjadi kelompok; jika kelompok-kelompok bergabung akan menjadi desa; jika desa-desa bergabung akan menjadi kota; jika kota-kota bergabung akan menjadi satu kelompok asosiasi. Oleh karena itu, prinsip evolusi yang demikian ini disebut sebagai “hukum penggabungan materi”.

Jika ditarik suatu kesimpulan, teori evolusi Spencer ini adalah sesuatu yang melekat pada semua masyarakat. Perkembangan masyarakat akan selalu berubah secara linier dari tingkat peradaban yang primitif ke arah peradaban modern (industri) secara bertahap. Dengan demikian, evolusi sosial ini merupakan indikasi bagi kemajuan, bagi perbaikan secara umum dalam masyarakat untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia.

3. Emile Durkheim (1858-1917)

Durkheim berusaha untuk memisahkan sosiologi dari filsafat sosial dan menguatkan sosiologi sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang mandiri. Durkheim menulis buku *The Rules of Sociological Methods* untuk menegaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari fakta sosial. Ia menegaskan bahwa pokok bahasan sosiologi haruslah berupa studi atas fakta sosial.

Durkheim mendefinisikan fakta sosial sebagai seluruh cara bertindak, baku maupun tidak, yang dapat melakukan pemaksaan dari luar terhadap individu. Menurut Durkheim, cara bertindak, berpikir dan berperasaan yang bagaimanakah yang dapat mengendalikan individu, dapat memaksa individu? Contoh yang diberikan Durkheim mengenai fakta sosial ialah, antara lain hukum, moral, kepercayaan, adat istiadat, tata cara berpakaian, kaidah ekonomi. Fakta sosial tersebut mengendalikan dan dapat memaksa individu, karena bilamana individu melanggarnya, ia akan terkena sanksi. Fakta sosial seperti inilah yang menurut Durkheim menjadi pokok perhatian sosiologi. Durkheim membedakan dua tipe fakta sosial, yaitu material dan nonmaterial (Ritzer, 2009). Fakta sosial material, seperti gaya arsitektur, bentuk teknologi, hukum dan perundang-undangan, relatif mudah dipahami karena bisa diamati secara langsung. Sementara, fakta sosial nonmaterial, sering kali mengekspresikan kekuatan moral yang lebih besar, berada di luar individu, tetapi dapat memaksa mereka. Meski ia membahas keduanya dalam karyanya, perhatian utama lebih tertuju pada fakta sosial nonmaterial, misalnya moral, kultur, institusi sosial, ketimbang pada fakta sosial material, seperti birokrasi, hukum, dan perundang-undangan. Perhatiannya terhadap fakta sosial nonmaterial ini telah jelas dalam karyanya paling awal, *The Division of Labor in Society* (1968).

Dalam bukunya *The Division of Labor in Society*, Durkheim melacak perkembangan modern relasi individu dengan masyarakat. Dalam karya ini Durkheim terutama ingin menggunakan ilmu sosiologi untuk meneliti sesuatu yang sering dilihat sebagai krisis moral. Selama hidup di Prancis, Durkheim merasa adanya krisis moral. Revolusi Prancis telah menggiring orang untuk terpusat pada hak-hak individual yang sering mengekspresikan diri sebagai serangan terhadap otoritas tradisional dan keyakinan religious. Gejala ini terus berlanjut bahkan setelah pemerintahan revolusioner berakhir. Pada pertengahan abad ke-19, banyak orang yang merasa keteraturan masyarakat terancam karena mereka hanya memikirkan dirinya sendiri dan bukan masyarakat.

Buku *The Division of Labor in Society* (1968) merupakan suatu upaya Durkheim untuk mengkaji suatu gejala yang sedang melanda masyarakat tentang pembagian kerja. Durkheim mengemukakan bahwa di bidang perekonomian seperti di bidang industri modern terjadi penggunaan mesin serta konsentrasi modal dan tenaga kerja yang mengakibatkan pembagian kerja dalam bentuk spesialisasi dan pemisahan okupasi yang semakin rinci. Gejala pembagian kerja tersebut dijumpai di bidang perniagaan dan pertanian, dan tidak terbatas pada bidang ekonomi tetapi melanda pula pada bidang kehidupan lain: hukum, politik, kesenian, dan bahkan juga keluarga. Lebih khusus lagi, aspek yang menjadi perhatian Durkheim adalah pada pembagian kerja dalam kedua tipe masyarakat yaitu masyarakat tradisional dan modern. Pada masyarakat tradisional, di mana manusia hidup dengan cara yang hampir sama satu sama lain, solidaritas dicapai secara kurang lebih otomatis. Sangat sedikit peranan untuk dimainkan, atau cara hidup pun kurang bervariasi karena kebutuhan para anggota untuk memandang dunia juga kurang lebih sama. Mereka memiliki bersama aturan-aturan kolektif yang mengatur bagaimana berperilaku yang dipenuhi

tanpa kesukaran yang berarti. Pada masyarakat modern, memiliki pembagian kerja yang sangat kompleks. Ada beragam peranan dan cara untuk hidup sehingga solidaritas sosial menjadi jauh lebih sukar dicapai. Bagi Durkheim, ini adalah bahaya utama dari modernitas. Kekuatan yang memisahkan dan membagi-bagi orang begitu besar sehingga disintegritas sosial adalah ancaman yang nyata.

Durkheim mengamati perubahan sosial dari masyarakat tradisional menuju masyarakat industri (modern). Aspek yang menjadi perhatian Durkheim adalah pembagian kerja dalam kedua tipe masyarakat tersebut. Menurutnya, pembagian kerja pada masyarakat tradisional masih sangat sedikit, sedangkan pada masyarakat industri, pembagian kerjanya sangat kompleks. Selanjutnya, peningkatan pembagian kerja tersebut berimplikasi pada perubahan tipe solidaritas sosialnya. Pada masyarakat dengan sistem pembagian kerja yang rendah akan menghasilkan tipe solidaritas mekanik, sedangkan pada masyarakat dengan pembagian kerja yang kompleks akan menghasilkan tipe solidaritas organik. Secara singkat, solidaritas mekanik terbentuk karena adanya saling kesamaan antar anggota masyarakat, sedangkan solidaritas organik terbentuk karena adanya perbedaan antara anggota masyarakat. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan setiap anggota masyarakat saling bergantung satu sama lain. Menurut Durkheim, kedua tipe solidaritas sosial ini memiliki beberapa ciri, yaitu:

- a. Anggota masyarakat dengan tingkat pembagian kerja yang rendah (solidaritas mekanik), masih terikat satu sama lain atas dasar kesamaan emosional dan kepercayaan serta adanya komitmen moral. Perbedaan adalah sesuatu yang harus dihindari. Pada masyarakat dengan tingkat pembagian kerja yang tinggi (solidaritas organik), sangat memungkinkan terjadinya perbedaan dan masyarakat disatukan oleh saling ketergantungan fungsional.

- b. Solidaritas mekanik didasarkan pada kesadaran kolektif yang kuat, anggota masyarakat diharapkan mampu mempertahankan kesamaan, sedangkan pada solidaritas organik, otonomi individu sangat dihargai mengingat setiap individu menjalankan fungsinya yang berbeda-beda.
- c. Dari segi kontrol sosial, dalam solidaritas mekanik, nilai dan norma bersifat umum dan abstrak, hukuman yang berlaku lebih bersifat represif. Hukuman diberlakukan hanya semata-mata agar pelanggaran hukum jera dan mendapat hukuman yang sebanding dengan pelanggarnya. Pada solidaritas organik, hukum lebih bersifat restitutif, maksudnya hukum diberlakukan hanya semata-mata untuk mengembalikan masyarakat pada kondisi semula. Hukuman diberikan oleh individu yang memang diberi tugas untuk melakukan kontrol sosial, misalnya Polisi (Johnson, 1986).

Perbandingan antara masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik dan solidaritas organik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.

Perbandingan Karakteristik antara Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik

Kriteria	Solidaritas Mekanik	Solidaritas Organik
Pembagian kerja	Rendah	Tinggi
Kesadaran kolektif	Kuat	Lemah
Hukum dominan	Represif	Restitutif
Individualitas	Rendah	Tinggi
Konsensus terpenting	Pola normatif	Nilai abstrak dan umum
Penghukuman	Komunitas terlibat	Badan kontrol sosial
Saling ketergantungan	Rendah	Tinggi
Komunitas	Primitif/Perdesaan	Industri perkotaan
Pengikat	Kesadaran kolektif	Pembagian kerja

Sumber : Johnson (1986)

Durkheim memberikan sumbangan teori tentang bunuh Diri. Durkheim memilih studi bunuh diri karena persoalan ini relatif merupakan fenomena konkret dan spesifik. Usaha untuk menjelaskan sebab-sebab angka bunuh diri itu dilakukannya dengan mengumpulkan data kuantitatif, kemudian dianalisisnya dengan memakai teknik distribusi frekuensi dan tabel silang. Teknik ini hingga kini pun masih tetap digunakan untuk meneliti suatu gejala serta hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

Alasan utama Durkheim untuk melakukan studi bunuh diri ini adalah untuk menunjukkan kekuatan disiplin sosiologi. Durkheim percaya bahwa jika dia bisa memperlihatkan bahwa sosiologi mampu berperan dalam menjelaskan tindakan yang kelihatannya bersifat individualistis seperti bunuh diri, maka dengan mudah ia akan memperluas ranah sosiologi kepada fenomena-fenomena lain yang terbuka bagi analisis sosiologis.

Sebagai seorang sosiolog, sebenarnya, Durkheim tidak terlalu fokus mempelajari mengapa orang melakukan bunuh diri. Alasannya, masalah ini adalah wilayah garapan psikologi. Durkheim tertarik hanya untuk menjelaskan perbedaan angka bunuh diri, yaitu kenapa suatu kelompok memiliki angka bunuh diri lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lain. Durkheim menawarkan dua cara yang saling berhubungan untuk mengevaluasi angka bunuh diri, yaitu: (1) Membandingkan suatu tipe masyarakat atau kelompok dengan tipe yang lain, (2) Melihat perubahan angka bunuh diri dalam sebuah kelompok dalam suatu rentang waktu. Jika ada perbedaan dalam angka bunuh diri antara satu kelompok dengan kelompok yang lain atau dari satu periode dengan periode yang lain, maka menurut Durkheim perbedaan tersebut adalah akibat dari perbedaan faktor-faktor sosial, ringkasnya arus sosial.

Durkheim memulai Suicide (bunuh diri) dengan menguji dan menolak serangkaian pendapat alternatif tentang penyebab bunuh diri. Di antaranya adalah psikopatologi individu (Sakit

Jiwa), alkoholisme, ras, keturunan dan iklim. Di samping itu, Durkheim juga menguji dan menolak teori imitasi yang dikemukakan oleh seorang teoritikus yang sezaman dengannya, Psikolog Prancis bernama Gabriel Tarde (1843-1904). Teori imitasi mengatakan bahwa seseorang melakukan bunuh diri karena meniru tindakan orang lain. Durkheim berusaha dengan susah payah untuk mengalahkan teori imitasi tersebut. Durkheim mengatakan bahwa jika imitasi memang penting, maka kita akan menemukan bahwa bangsa-bangsa yang hidup berdekatan dalam sebuah negeri dengan angka bunuh diri yang tinggi juga akan memiliki angka bunuh diri yang tinggi, akan tetapi data membuktikan bahwa keduanya tidak saling berhubungan. Durkheim menyimpulkan bahwa faktor terpenting dalam perbedaan angka bunuh diri akan ditemukan dalam perbedaan level fakta sosial. Kelompok yang berbeda memiliki sentimen kolektif yang berbeda sehingga menciptakan arus sosial yang berbeda pula. Arus sosial itulah yang mempengaruhi keputusan seorang individu untuk bunuh diri. Dengan kata lain, perubahan dalam sentimen kolektif membawa perubahan dalam arus sosial, sehingga membawa perubahan pada angka bunuh diri.

Teori bunuh diri Durkheim bisa dilihat lebih jelas jika kita mencermati hubungan jenis-jenis bunuh diri dengan dua fakta sosial utamanya, yaitu integrasi dan regulasi. Integrasi merujuk pada kuat tidaknya keterikatan dengan masyarakat. Regulasi merujuk pada tingkat paksaan eksternal dirasakan individu. Menurut Durkheim, dua arus sosial tersebut adalah variabel yang saling berkaitan dan angka bunuh diri meningkat ketika salah satu arus sosial menurun dan yang lain meningkat. Oleh karena itu, Durkheim menyebutkan ada empat jenis bunuh diri, yaitu bunuh diri egoistis, bunuh diri altruistis, bunuh diri anomik dan bunuh diri fatalistik. Jika integrasi yang menurun, akibatnya adalah peningkatan bunuh diri egoistis. Bunuh diri fatalistik berkaitan dengan regulasi yang tinggi, sementara bunuh diri anomik adalah rendahnya regulasi. Teori bunuh diri

Durkheim ini bisa dilihat lebih jelas jika mencermati jenis-jenis bunuh diri, yaitu:

- a. Bunuh diri Egoistis (penulis: orang yang hanya mengejar kepentingan diri sendiri). Tingginya angka bunuh diri egoistis dapat ditemukan dalam masyarakat atau kelompok di mana individu tidak berinteraksi dengan baik dalam unit sosial yang luas. Lemahnya integrasi ini melahirkan perasaan bahwa individu bukan bagian dari masyarakat dan masyarakat bukan pula bagian dari individu. Durkheim percaya bahwa bagian paling baik dari manusia adalah moralitas, nilai dan tujuan kita berasal dari masyarakat. Sebuah masyarakat yang padu akan memberikan kita semua ini, dan dukungan moral umum bagi kita agar kuat melalui keterpurukan dan kekecewaan kecil sehari-hari. Tanpa ini, menurut Durkheim, besar kemungkinan kita akan bunuh diri ketika mengalami frustrasi yang paling kecil sekalipun.
- b. Bunuh diri Altruistis (penulis: mementingkan kepentingan umum/orang lain). Menurut Durkheim, bunuh diri altruistis terjadi ketika integrasi sosial sangat kuat. Salah satu contoh paling tepat bunuh diri massal dari pengikut Pendeta Jim Jones di Jonestown, Guyana, pada tahun 1978. Mereka memperoleh racun secara sembunyi-sembunyi lalu menenggaknya kemudian diikuti oleh anak-anak mereka. Mereka dengan terang-terangan melakukan bunuh diri karena memiliki integrasi yang sangat erat dalam sebuah kelompok sebagai pengikut fanatik dari Jones (Ritzer, 2009). Menurut Durkheim, penjelasan yang sama juga dapat dipakai dalam kasus seseorang yang mencari mati syahid. Contoh lain, seperti yang dilakukan oleh teroris pada peristiwa 11 September 2001 (Ritzer, 2009). Dari contoh di atas, secara umum, orang melakukan bunuh diri altruistis karena mereka merasa itu adalah tugas mereka. Durkheim berpendapat bahwa secara khusus, bunuh diri altruistis ini mungkin terjadi dalam militer yang memiliki tingkat integritas begitu kuat,

bahwa seorang individu akan merasa telah membawa aib bagi kesatuannya meski hanya karena kesalahan sepele. Menurut Durkheim, bunuh diri altruistik makin banyak terjadi jika makin banyak harapan yang tersedia, karena dia bergantung pada keyakinan akan adanya sesuatu yang indah setelah hidup di dunia ini. Di samping itu, ketika integrasi mengendur, seseorang akan melakukan bunuh diri karena tidak ada lagi kebaikan yang dapat dipakai untuk meneruskan kehidupan. Sebaliknya, ketika integrasi menguat, mereka melakukan bunuh diri justru demi kebaikan yang lebih besar.

- c. Bunuh diri Anomik (penulis: Penyimpangan dari yang biasa). Bunuh diri anomik terjadi ketika kekuatan regulasi masyarakat terganggu. Gangguan itu mungkin akan membuat individu merasa tidak puas karena lemahnya kontrol terhadap nafsu mereka, yang akan bebas berkeliaran dalam ras yang tidak pernah puas terhadap kesenangan. Angka bunuh diri anomik bisa meningkat terlepas dari apakah gangguan itu positif (misalnya peningkatan ekonomi) atau negatif (misalnya penurunan ekonomi). Kedua macam gangguan ini membuat kolektivitas masyarakat tidak mampu melancarkan otoritasnya terhadap individu untuk sementara waktu. Perubahan-perubahan semacam ini menempatkan orang dalam situasi di mana norma lama tidak lagi berlaku, sementara norma baru belum lagi dikembangkan. Periode gangguan ini melepaskan arus anomi, rasa ketercerabutan dari akar dan rasa kehilangan norma-norma mengikat, dan arus ini cenderung mempertinggi angka bunuh diri anomik. Kasus ini relatif mudah ditemui dalam suasana depresi ekonomi. Pabrik yang tutup karena depresi ekonomi menyebabkan para pekerjanya kehilangan pekerjaan, sehingga mereka lepas dari pengaruh regulatif yang selama ini mereka rasakan dari perusahaan maupun pekerjaan. Karena terputus dari struktur ini atau struktur-struktur lainnya (seperti keluarga, agama dan Negara) bisa membuat seorang individu amat rentan dengan pengaruh arus anomi.

- d. Bunuh diri Fatalistik (penulis: Putus asa). Bunuh diri fatalistik terjadi ketika regulasi meningkat. Durkheim menggambarkan, seseorang melakukan bunuh diri fatalistik, seperti seseorang yang masa depannya telah tertutup dan nafsu yang tertahan oleh disiplin yang menindas. Contoh klasik menurut Durkheim adalah budak yang menghabiskan hidupnya karena putus asa, karena regulasi yang menekan setiap tindakannya. Regulasi, tekanan, yang terlalu banyak akan melepaskan arus kesedihan, yang pada gilirannya, menyebabkan peningkatan angka bunuh diri fatalistik (Ritzer, 2009).

Moralitas. Teori sosiologi Durkheim tentang moralitas mempengaruhi hampir seluruh pemikiran moralitas sekarang. Moralitas, bagi Durkheim memiliki tiga komponen. Pertama, moralitas melibatkan disiplin. Kedua, moralitas menghendaki keterikatan dengan masyarakat. Ketiga, disiplin melibatkan otonomi (Ritzer, 2009).

Disiplin. Durkheim selalu mendiskusikan disiplin dari sudut pengekanan terhadap dorongan-dorongan hasrat hati seseorang. Ia menegaskan bahwa pengekanan itu penting karena kepentingan individu dan kepentingan kelompok tidak sama dan bisa saja terlibat dalam konflik. Disiplin menghadapkan seseorang dengan tanggungjawab moral dirinya, yang bagi Durkheim merupakan kewajiban sosial. Disiplin sosial juga menenangkan individu, karena membatasi atau mengekang keinginan manusia dan arena itu memberikan kesempatan bagi manusia untuk merasa cukup dan tenang sehingga tidak akan menuntut lebih.

Keterikatan. Masyarakat merupakan bagian paling penting dalam hidup kita. Kenyataannya, kita tidak bisa melepaskan diri dari masyarakat tanpa memutuskan diri kita dari diri kita sendiri. Masyarakat dan kita terdapat ikatan yang begitu kuat, karena kita adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat adalah tempat dari diri kita. Jadi, ketika masyarakat menuntut komitmen dan ketundukan kita terhadap kelompok, dia

sekaligus juga memaksa kita untuk mengejawantahkan diri kita sendiri, karena keterikatannya di masyarakat. Menurut Durkheim, dua elemen moralitas, yaitu disiplin dan keterikatan, saling menyempurnakan dan mendukung satu sama lain karena keduanya merupakan aspek yang berbeda dalam masyarakat. Disiplin adalah masyarakat yang dilihat sebagai sesuatu yang menuntut kita, sedangkan keterikatan adalah masyarakat yang dilihat sebagai bagian dari diri kita.

Otonomi. Pendapat Durkheim, otonomi baru bisa memiliki kekuatan penuh dalam modernitas ketika mitos dan simbol-simbol sistem moral terdahulu yang digunakan untuk menerapkan disiplin dan menciptakan keterikatan sudah mandul. Durkheim percaya bahwa saat ini mitos-mitos itu susah mati, hanya pemahaman ilmiahlah yang bisa memberikan landasan bagi otonomi moral.

Sumbangan pemikiran penting lainnya yang diberikan Durkheim ialah Pendidikan Moral. Upaya Durkheim yang paling konsisten dalam memperjuangkan reformasi masyarakat agar moralitas bisa ditegakkan adalah dengan menitik beratkan masalah pendidikan. Durkheim memberi tempat yang luas bagi pendidikan. Ia sejak awal mengadopsi pandangan relativis yang mendasarkan diri pada probabilitas ilmu pengetahuan pendidikan, bahwa setiap masyarakat mempunyai sistem pendidikan yang sesuai untuk mereka dan ikut berpartisipasi dalam mendefinisikan kekhasannya. Pendidikan didefinisikan oleh Durkheim sebagai proses di mana individu mendapatkan alat-alat fisik, intelektual, dan yang paling penting bagi Durkheim moral, karena moral diperlukan agar dapat berperan dalam masyarakat. Sementara tujuan pertama pendidikan adalah menghubungkan anak dengan masyarakat.

Sebelum Durkheim mulai reformasi pendidikan, ada dua pendekatan yang digunakan. Pendekatan pertama, pendidikan sebagai perpanjangan tangan Gereja. Kedua, pendidikan sebagai pencetak individu yang alami. Sebaliknya, Durkheim

berpendapat bahwa pendidikan akan menolong anak-anak mengembangkan sikap moral terhadap masyarakat. Dia percaya bahwa sekolah secara praktis adalah satu-satunya institusi yang akan memberikan landasan sosial bagi moralitas modern.

Bagi Durkheim, ruang kelas merupakan masyarakat kecil dan dia menyimpulkan bahwa kesadaran kolektif akan menciptakan kekuatan yang cukup untuk menanamkan sikap moral. Ruang kelas bisa memberikan pergaulan kolektif yang beragam dan penting dalam menciptakan representasi kolektif. Hal ini akan memungkinkan pendidikan untuk hadir dan memproduksi semua elemen moralitas. Durkheim, lalu menyimpulkan sejumlah prinsip pendidikan, yaitu: Pertama, Pendidikan akan memberi individu disiplin-disiplin yang mereka butuhkan untuk mengendalikan nafsu yang mengancam mereka. Kedua, pendidikan bisa mengembangkan suatu rasa pengabdian terhadap masyarakat dan sistem moralnya di dalam diri para murid. Terpenting bagi Durkheim, adalah peran pendidikan dalam pengembangan otonomi, di mana disiplin diinginkan secara sukarela dan keterikatan terhadap masyarakat lahir dari persetujuan yang mencerahkan (Ritzer, 2009).

4. Karl Marx (1818-1883)

Sumbangan Marx yang sangat fundamental teori tentang kerja. Bagi Marx, kerja adalah pertama dan utama. Kerja adalah suatu proses di mana manusia dan alam sama-sama terlibat, serta manusia dengan persetujuan dirinya sendiri memulai, mengatur dan mengontrol reaksi-reaksi material antara dirinya dengan alam. Pandangan Marx tentang kerja: *Pertama*, membedakan manusia dengan binatang. Kerja mewujudkan sesuatu hal di dalam realita yang sebelumnya hanya ada di dalam imajinasi. *Kedua*, kerja ini bersifat material. Ia bekerja dengan alam material untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan material. *Ketiga*, kerja ini tidak hanya mengubah alam, tetapi juga mengubah kita, termasuk kebutuhan, kesadaran (Ritzer, 2009).

Penggunaan istilah kerja oleh Marx, tidak dibatasi untuk aktivitas ekonomi belaka, melainkan mencakup seluruh tindakan-tindakan produktif, di mana kita mengubah dan mengolah alam material untuk tujuan kita. Berdasarkan sudut pandangan Marx, kerja merupakan respon terhadap pemenuhan kebutuhan kita. Misalnya, produksi mobil-mobil untuk memenuhi kebutuhan kita untuk transportasi jarak jauh dan membawa kita kepada kebutuhan akan jalan raya. Bahkan lebih dari itu, ketika mobil pertama kali ditemukan, hanya sedikit orang berpikir bahwa mereka membutuhkan mobil, tapi sekarang kebanyakan orang merasa bahwa mereka membutuhkannya. Perubahan yang sama juga terjadi pada komputer.

Bagi Marx, kerja adalah pengembangan kekuatan-kekuatan dan potensi-potensi kita yang sebenarnya. Kemudian, kerja juga merupakan aktivitas sosial. Kerja melibatkan orang lain, secara langsung dalam produksi-produksi, atau tidak langsung karena orang lain menyediakan alat-alat atau bahan-bahan mentah yang kita butuhkan untuk kerja kita, atau karena merekalah yang akan menikmati hasil kerja kita. Kerja tidak hanya menstransformasikan kemanusiaan secara individual, melainkan juga menstransformasikan masyarakat. Malah, bagi Marx, kemunculan manusia sebagai individu tergantung pada masyarakat. Hal ini berarti, jika seseorang baru bisa berkembang menjadi individu, jika berada dalam masyarakat.

Sumbangan berikutnya adalah teori alienasi. Menurut Marx, di dalam kapitalisme, kerja tidak lagi menjadi tujuan pada dirinya sendiri, melainkan tereduksi menjadi sarana untuk mencapai tujuan, yaitu memperoleh uang. Dengan demikian, kerja kita bukan lagi milik pribadi kita sehingga tidak bisa lagi menstrasformasikan kita. Dengan kata lain, kita dialienasikan (diasingkan) dari kerja kita, dan oleh karena itu, dialienasikan dari sifat dasar kita sebagai manusia (Ritzer, 2009).

Marx menggunakan konsep alienasi untuk menyatakan pengaruh produksi kapitalis terhadap manusia dan masyarakat. Hal penting yang patut dicatat di sini adalah sistem dua kelas, di mana kapitalis menggunakan dan memperlakukan para pekerja (cara, waktu kerja) dan alat produksi (alat-alat dan bahan mentah) sebagaimana produk-produk akhir dan para pekerja dipaksa menjual waktu kerja mereka kepada kapitalis agar mereka bisa bertahan. Menurut Marx, hasilnya, manusia hanya merasa aktif di dalam fungsi-fungsi hewaniannya, seperti makan, minum, punya keturunan. Sementara, di dalam proses kerjanya, mereka tidak lagi merasa diri mereka menjadi apa-apa, selain binatang. Betapa binatang telah menjadi manusia, dan betapa manusia telah menjadi binatang (Ritzer, 2009). Tentu saja makan, minum, punya keturunan dan sebagainya juga merupakan fungsi-fungsi dasar yang manusiawi. Tetapi, di sini terpisah dari jangkauan seluruh aktivitas kemanusiaan yang lain dan beralih kepada tujuan yang tunggal dan mendasar yang merupakan fungsi-fungsi kebinatangan. Menurut Marx, alienasi terdiri dari empat unsur dasar, yaitu :

- a. Para pekerja di dalam masyarakat kapitalis teralienasi dari aktivitas produktif mereka. Kaum pekerja, tidak memproduksi objek-objek untuk secara langsung memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Mereka bekerja untuk kapitalis. Aktivitas produktif menjadi milik para kapitalis, dan merekalah yang memutuskan apa yang harus dikerjakan, maka kita bisa melihat bagaimana pekerja teralienasi dari aktivitas tersebut. Menurut Marx, menjadi sarana-sarana yang membosankan dan mematahkan semangat demi sekedar memenuhi tujuan paling utama dalam kapitalisme, yaitu memperoleh cukup uang untuk bertahan hidup.
- b. Para pekerja teralienasi dari tujuan aktivitas-aktivitas produk. Produk kerja mereka tidak menjadi milik mereka, melainkan menjadi milik para kapitalis. Hak milik pribadi

adalah produk, hasil dan dampak-dampak yang punya nilai dan harga yang dihasilkan dari kerja yang teralienasi. Kapitalis akan menggunakan hak miliknya untuk menjual produk demi mendapatkan keuntungan. Jika para pekerja menginginkan produknya dari kerja mereka sendiri, mereka harus membelinya sama seperti orang lain. Bagaimanapun juga, kebutuhan para pekerja terpisah, mereka tidak bisa menggunakan produk-produk dari hasil kerja mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Marx mencontohkan, para pekerja di suatu pabrik roti bisa mati kelaparan jika mereka tidak memiliki uang untuk membeli roti yang ironisnya mereka buat sendiri.

- c. Para pekerja teralienasi dari sesama pekerja. Di dalam kapitalis, kooperasi ini dikacaukan, dan manusia dipaksa bekerja untuk kapitalis dan tidak saling kenal meskipun mereka bekerja berdampingan. Di sini teknologi justru melahirkan isolasi. Demi menghasilkan produktivitas yang maksimum dan untuk mencegah perkembangan hubungan-hubungan yang kooperatif, maka kapitalis mengadu seorang pekerja dengan pekerja lain untuk melihat mana yang bisa memproduksi lebih banyak, lebih cepat, atau lebih menyenangkan atasannya. Pekerja yang sukses akan diberi imbalan ekstra, sedangkan para pekerja yang kalah akan disingkirkan. Pada kasus lain, kedengkian adalah hal yang biasa terjadi sesama pekerja. Isolasi dan kedengkian pribadi sesama pekerja dalam kapitalisme membuat mereka teralienasi dari teman-teman mereka sesama pekerja.
- d. Para pekerja teralienasi dari potensi kemanusiaan mereka sendiri. Kerja tidak lagi menjadi transformasi dan pemenuhan sifat dasar manusia, akan tetapi membuat kita merasa kurang menjadi manusia dan kurang menjadi diri kita sendiri. Individu-individu menampakkan diri semakin kurang seperti manusia karena di dalam kerja, mereka tereduksi menjadi mesin-mesin. Bahkan senyum dan

penghormatan kita diprogramkan dan dibuat naskahnya. Kesadaran mati rasa dan akhirnya musnah seiring dengan semakin terkontrolnya hubungan-hubungan dengan manusia-manusia lain dan dengan alam. Hasilnya adalah banyak orang yang tidak mampu mengekspresikan kualitas-kualitas kemanusiaan mereka yang terdalam dan makin banyak pekerja yang teralienasi (Ritzer, 2009).

Marx juga memberikan sumbangan teori kapitalisme. Menurut Marx, kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana sejumlah besar pekerja, yang hanya memiliki sedikit hak milik, memproduksi komoditas-komoditas demi keuntungan sejumlah kecil kapitalis yang memiliki hal-hal berikut: komoditas-komoditas, alat-alat produksi, dan bahkan waktu kerja para pekerja karena mereka membeli para pekerja tersebut melalui gaji. Lebih jauh dari itu, kata Marx, bahwa kapitalisme lebih dari sekedar sistem ekonomi, akan tetapi kapitalisme adalah sistem kekuasaan. Artinya, bahwa kekuatan-kekuatan politik telah diubah menjadi relasi-relasi ekonomi. Para kapitalis bisa memaksa para pekerja dengan kewenangan mereka untuk memecat dan menutup pabrik-pabrik. Karena hal inilah, para kapitalis bebas untuk menggunakan paksaan yang kasar. Dengan demikian, kapitalisme tidak hanya menjadi sekedar sistem ekonomi, pada saat yang sama, kapitalisme juga merupakan sistem politis, suatu cara menjalankan kekuasaan, dan suatu proses eksploitasi atas pekerjaan (Ritzer, 2009).

Apa yang diutarakan di atas, di bawah kapitalisme, ekonomi tampil sebagai sebuah kekuatan. Dengan ekonomi, pekerja-pekerja bisa diberhentikan, upah dikurangi, pabrik-pabrik bisa ditutup. Kita tidak melihat semua ini sebagai keputusan-keputusan sosial dan politik. Tapi, hubungan-hubungan antara penderitaan para pekerja dan struktur-struktur ekonomi, jauh lebih relevan sebagai keputusan-keputusan ekonomi.

Kapitalisme, menurut Marx, hanya mengakui satu hukum saja yaitu hukum tawar-menawar di pasar bebas. Bebas dalam

arti benar-benar bebas, bebas dari berbagai aturan yang dibuat penguasa. Setiap orang bebas untuk membeli atau menjual di manapun ia suka. Bebas dari berbagai pembatasan produksi ketika orang mempunyai kebebasan dalam memproduksi barang yang disukainya. Bebas dari pembatasan tenaga kerja, yaitu bahwa siapapun boleh mencari pekerjaan yang disukainya serta tidak terikat pada satu tempat kerja. Kapitalisme benar-benar mengimplementasikan konsep kebebasan dan berupaya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (Magnis Suseno, 2000).

Perbedaan kapitalisme dengan sistem lain terletak pada nilai tukar. Suatu komoditas yang diproduksi, misalnya dijual kembali demi memperoleh keuntungan (uang) yang setinggi-tingginya. Jadi, dasar dari sistem ekonomi kapitalis adalah uang, sedangkan komoditas atau barang hasil produksi itu hanyalah merupakan sarana dalam upaya memperoleh keuntungan tadi. Dengan keuntungan tersebut, kaum kapitalis dapat bertahan di dalam persaingan pasar dan dapat menembus pasar bebas di seluruh dunia. Persaingan, akhirnya memberi dampak kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan juga perkembangan teknologi (Boedhi Oetoyo, 2015). Perkembangan kapitalisme sendiri ditandai oleh dua hal yang spesifik, yaitu pertama, kecenderungan untuk menyederhanakan kelas-kelas sosial, dan kedua adalah pembentukan proletariat sebagai golongan militan yang revolusioner (Magnis Suseno, 2000).

Menyederhanakan kelas-kelas sosial. Diawali dengan adanya persaingan yang memicu ongkos produksi serendah mungkin sehingga hasil produksi dapat dijual serendah-rendahnya demi mengalahkan para pesaing. Akibatnya, cepat atau perlahan, semua usaha yang tidak mengarah kepada perolehan keuntungan akan tersingkirkan. Hal ini terutama akan melanda bidang-bidang usaha kecil, karena mereka tidak dapat menyaingi usaha-usaha besar dalam segi apapun yang dijalankan dengan efisien

sangat tinggi. Berbagai bidang usaha kecil yang notabene tidak efisien akan tertelan oleh usaha-usaha besar. Di sini, semua usaha akan dijalankan secara kapitalistik. Dengan demikian, tidak ada lagi variasi pekerjaan, para ahli dan para tukang. Semua menjadi buruh biasa dan mereka menjadi semakin melarat karena sebagai buruh yang bekerja pada perusahaan besar, majikan mereka akan memberikan upah yang serendah-rendahnya. Kini, tidak ada lagi kelas nelayan, atau petani, yang ada adalah usaha produksi hasil nelayan atau pertanian yang dijalankan oleh pemilik modal. Akibatnya, yang tinggal hanyalah dua kelas sosial saja, yaitu para pemilik sarana produksi sebagai golongan minoritas yang kaya raya dan mengendalikan proses produksi serta kelas bawah, kaum buruh miskin dan tertindas yang merupakan golongan mayoritas.

Pembentukan proletariat sebagai golongan militan. Meskipun pada awalnya kaum buruh ini tidak menyadari keadaan yang mereka hadapi, lama kelamaan mereka menyadari juga situasi dan kondisi yang mereka hadapi sebagai golongan proletar yang tertindas. Tumbuhlah perasaan senasib yang mereka jadikan senjata untuk menghadapi kaum kapitalis demi memperjuangkan perbaikan nasib mereka melalui berbagai organisasi buruh. Mereka secara terbuka mendeklarasikan tujuan yang hendak dicapainya dengan menghancurkan berbagai kondisi sosial yang ada. Golongan proletar tidak akan kehilangan apapun kecuali ikatan kebersamaan (Giddens, 1971). Dengan demikian, tujuan perjuangan kaum buruh bukan lagi sekedar menuntut kenaikan upah dan perbaikan nasib, tetapi lebih besar dari itu, yaitu menghapuskan hak milik kaum kapitalis dan penguasaan sarana produksi. Perjuangan diawali dengan melakukan kudeta kepada pemerintah yang sah dengan mencanangkan apa yang mereka sebut “kediktatoran proletariat” (Magis Suseno, 2000).

Dengan demikian, golongan proletar menggunakan kekuasaan Negara untuk berbalik menindas kaum kapitalis

dan mencegah mereka menggunakan fasilitas Negara untuk menggagalkan revolusi proletariat demi mempertahankan *status-quo*. Jadi, kediktatoran proletariat itu adalah upaya kaum buruh yang telah berhasil menguasai Negara untuk mencegah revolusi balasan dari sisa-sisa kaum kapitalis. Dengan revolusi ini perbedaan kelas akan hilang dan terciptalah masyarakat tanpa kelas, tidak ada lagi kaum kapitalis atau borjuis, tidak juga ada diktatorisme proletar yang dulu bertugas menguasai kaum kapitalis. Dengan kata lain, menurut Marx, adalah penghapusan hak milik pribadi atas berbagai sarana produksi, penghapusan pembagian kerja, penghapusan kelas-kelas sosial dan penghilangan kekuasaan Negara (Boedhi Oetoyo, 2015).

Dalam ajarannya, Marx menegaskan kembali, bahwa dalam sistem kapitalisme akan menyebabkan kemampuan produksi berubah cepat dan hal ini juga akan mengubah struktur kelas dalam masyarakat menjadi berkurang, karena munculnya struktur atau kelas baru, yaitu golongan proletar. Golongan inilah yang menjual tenaga mereka untuk bertahan hidup. Ketika golongan ini tidak lagi menghasilkan barang-barang untuk mereka konsumsi sendiri, mereka membangun kekuatan-kekuatan yang semakin lama semakin besar dan kuat. Lawan dari golongan proletar adalah kaum penindas, yaitu kaum borjuis atau kaum kapitalis. Mereka ini adalah kelompok minoritas yang kaya raya, para pemilik modal dan sarana produksi tempat kaum proletar menggantungkan hidupnya. Kaum kapitalis, menurut Marx, harus mengembangkan alat produksi baru secara terus menerus. Hal ini berarti harus menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru yang akan diisi oleh berbagai produk yang dihasilkan. Manakala proses ini berjalan, hal ini juga akan memperkokoh kekuasaan kaum kapitalis di berbagai belahan dunia (Magnis Suseno, 2000). Bagi Marx, yakin benar, meskipun berbagai upaya golongan proletar dalam melakukan perlawanan terhadap kaum kapitalis atau kaum borjuis seringkali mendapatkan rintangan, namun

mereka ini ditakdirkan untuk menghancurkan kapitalisme. Kesadaran untuk memperjuangkan kebebasan ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya lancarnya komunikasi, pemerataan pendidikan, dan keterlibatan dalam kancah politik yang membuat mereka semakin pandai sehingga menumbuhkan kesadaran bersama untuk memperjuangkan nasib mereka demi terbebas dari berbagai penindasan dan kesengsaraan. Dalam berbagai pandangannya, tidak dapat dipungkiri bahwa Marx seolah-olah berharap kapitalisme itu runtuh, dan akan tercipta suatu masyarakat tanpa kelas.

Sumbangan teoritis Marx berikutnya adalah menghubungkan Proletariat, Kapitalis dan Komunis. Proletariat adalah para pekerja yang menjual kerja mereka dan tidak memiliki alat-alat produksi sendiri. Bagi Marx, percaya bahwa proletariat akan kehilangan ketrampilan mereka seiring dengan meningkatnya mesin-mesin yang menggantikan ketrampilan mereka. Proletariat hanya memproduksi demi pertukaran, maka mereka juga adalah sebagai konsumen. Mereka tidak memiliki sarana-sarana untuk memproduksi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, maka mereka harus menggunakan upah yang mereka peroleh untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, proletariat tergantung sepenuhnya pada upahnya untuk bertahan hidup. Hal inilah yang membuat proletariat tergantung pada orang yang memberi upah.

Orang yang memberi upah itu adalah kapitalis atau borjuis. Kaum kapitalis akan memperkerjakan golongan proletar hanya apabila mereka dapat mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itulah mengapa kaum kapitalis sering dijuluki dengan lintah darat, penghisap darah kaum proletar. Akan tetapi, Marx berkeyakinan bahwa kontradiksi internal yang semakin tajam di dalam kapitalisme akan menyebabkan ambruknya kapitalisme yang pada gilirannya diganti oleh sosialisme (Turner, dkk, 2001).

Selanjutnya, Marx menegaskan, bahwa tujuan utama komunisme adalah menghancurkan hak milik pribadi kaum

kapitalis atau borjuis. Selain itu, juga menghancurkan kekuasaan kaum kapitalis atau borjuis, sehingga mereka tidak dapat lagi mengontrol dan menguasai sarana produksi (Turner,dkk, 2001). Dengan kata lain, pemberontakan kaum proletar ini terjadi karena dalam proses produksi, kaum kapitalis ini memperalatkan golongan proletar. Untuk menghapuskan kelas-kelas yang ada, semua sarana produksi harus dibebaskan dari kepemilikan pribadi dan menjadi milik umum, milik bersama. Atas perlakuan kaum kapitalis itu, Marx yakin benar bahwa golongan proletar yang terdapat di dalam semua masyarakat, dengan penindasan, penderitaan yang diterima, serta keterasingan mereka akibat penindasan itu pada akhirnya akan mencetuskan revolusi komunis di seluruh dunia. Untuk mencapai tujuan ini, semua sarana produksi itu harus dijadikan produksi bersama yang dikontrol oleh seluruh anggota masyarakat dan hal ini dimungkinkan dilakukan di bawah komunisme. Dengan demikian, modal dan alat-alat produksi lainnya dapat digunakan sebagai sarana untuk memperluas, memperkaya dan mempromosikan keberadaan golongan proletar itu. Perubahan drastis ini, menurut Marx harus dilakukan melalui suatu revolusi (Boedhi Oetoyo, dkk, 2015).

Menurut Marx, inilah revolusi final dalam suatu masyarakat. Berbeda dengan revolusi sebelumnya, tidak akan ada kelas pengeksploitasi yang baru. Kekuasaan oleh golongan proletar berarti pemerintahan sendiri oleh kaum pekerja. Masyarakat kelas dihapus, dengan segala kejahatannya, dan masa baru di mana terwujud kebebasan manusia dimulai dalam masyarakat komunis. Di sinilah akhirnya, terwujud suatu masyarakat yang berlimpah, di mana semua orang menikmati, dan semua orang bebas untuk hidup dan bekerja secara kreatif, jauh lebih bebas dari sebelumnya. Manusia menentukan nasibnya sendiri dan membangun sejarahnya sendiri. Kesetaraan membawa emansipasi. Menurut Marx, setiap orang mungkin mengerjakan sesuatu hari ini, lalu mengerjakan yang berbeda besok, berburu

pagi hari, memancing sore, memelihara ternak malam hari, lalu berdebat setelah makan malam. Itulah yang tergambar dalam pikiranku, tanpa aku menjadi pemburu, nelayan, peternak atau tukang berdebat (Jones, dkk, 2016).

Lanjut Marx, hanya pada masyarakat komunis manusia dapat mengembangkan potensinya untuk kreatif dan berbuat kebaikan. Karena itu, ia mengemukakan beberapa hal yang harus dilakukan oleh golongan proletar, antara lain:

- a. Menghapuskan kepemilikan atas tanah,
- b. Menarik pajak secara intensif,
- c. Menghapuskan semua hak waris,
- d. Merampas barang-barang milik imigran dan pemberontak,
- e. Mengelola perbankan secara terpusat oleh Negara,
- f. Mengelola komunikasi dan transportasi secara terpusat oleh Negara,
- g. Menguasai semua pabrik dan sarana produksi lainnya oleh Negara,
- h. Adanya kewajiban yang sama untuk semua pekerja,
- i. Mengusahakan kombinasi antara (sistem) pertanian dan industri manufaktur untuk menghapus perbedaan kota dan desa,
- j. Menyediakan pendidikan gratis untuk semua anak-anak dan sekaligus menghapuskan pekerjaan anak (Boedhi Oetoyo, dkk, 2015).

5. Max Weber (1864-1920)

Weber sebelumnya adalah seorang mahasiswa hukum, dan menjalani kerja akademik pertamanya sebagai dosen ilmu hukum. Di samping itu, karier awalnya juga didominasi oleh minat pada bidang sejarah. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, ia lebih dekat dengan sosiologi. Ia mulai mengabdikan diri sepenuhnya pada bidang sosiologi pada tahun 1909, ketika Weber mulai menulis karya besarnya, yaitu *Economy and Society* (Ritzer, 2009).

Ketika beralih ke bidang sosiologi yang relatif baru, ia berusaha mengklarifikasi hubungannya dengan bidang sejarah yang telah mapan. Menurut Weber, merasa bahwa setiap bidang memerlukan bidang lainnya, namun menurut hemat dia, sosiologi bertugas melayani sejarah. Weber menjelaskan perbedaan antara sosiologi dan sejarah. Sosiologi berusaha merumuskan konsep tipe dan keseragaman umum proses-proses empiris. Sementara sejarah, berorientasi pada analisis kausal dan penjelasan atas tindakan, struktur dan kepribadian individu yang memiliki signifikansi kultural (Ritzer, 2009). Kendati ada perbedaan dari kedua ilmu tersebut, tetapi sosiologi berorientasi pada pengembangan konsep sehingga ia dapat melakukan analisis kausal terhadap fenomena sejarah. Dengan demikian, kita dapat memandang Weber sebagai sosiolog historis. Bagi Weber, sejarah terdiri dari sejumlah peristiwa empiris dan tidak mungkin ada generalisasi pada level empiris. Sementara sosiologi harus memisahkan dunia empiris dari dunia konseptual yang mereka bangun. Dengan konsep-konsep ini, sosiologi dapat mengembangkan generalisasi, namun generalisasi-generalisasi tersebut bukanlah sejarah dan tidak boleh dicampuradukan dengan realita empiris. Komitmen Weber pada studi spesifik terhadap fenomena empiris menjadikannya menarik bagi perkembangannya disiplin sosiologi, terutama di Amerika Serikat. Sumbangan Weber ini, menjadi penting dan acuan bagi dikembangkannya teori sosiologi yang membahas interaksi sosial. Namun, yang perlu juga dikemukakan di sini ialah bahwa pendekatan sosiologi yang diusulkan Weber dalam tulisan ini ternyata tidak menjadi tuntutan baginya untuk melihat masyarakat.

Singkat kata, Weber percaya bahwa sejarah terdiri dari bentangan fenomena spesifik yang tiada habisnya. Untuk mempelajari fenomena ini, perlu dikembangkan beragam konsep yang didesain agar berguna bagi penelitian tentang dunia nyata. Tugas sosiologi adalah mengembangkan konsep-konsep ini, yang digunakan sejarah dalam analisis kausal tentang fenomena historis spesifik. Dalam hal ini, Weber berusaha mengkombinasikan yang

spesifik dan yang umum dalam upayanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang mengkaji hakikat kehidupan sosial yang begitu kompleks (Ritzer, 2009).

Sumbangan pemikiran Weber dalam sosiologi tentang *Verstehen* (pemahaman). Menurut Weber, sosiologi memiliki kelebihan daripada ilmuwan alam. Kelebihan tersebut terletak pada kemampuan sosiolog untuk memahami fenomena sosial. Sementara ilmuwan alam tidak dapat memperoleh pemahaman serupa tentang perilaku atom atau ikatan kimia (Ritzer, 2009). Kata pemahaman dalam bahasa Jerman adalah *verstehen*. Pemakaian istilah *verstehen* ini secara khusus oleh Weber dalam penelitian historis. Pemikiran Weber tentang *verstehen* lebih sering ditemukan di kalangan sejarawan Jerman pada zamannya dan berasal dari bidang yang dikenal dengan hermeneutika (Martin, dalam Ritzer, 2009). Hermeneutika adalah pendekatan khusus terhadap pemahaman dan penafsiran tulisan-tulisan maupun struktur dasar teks. Weber dan lainnya, seperti Wilhelm Dilthey, berusaha memperluas gagasannya dari pemahaman teks kepada pemahaman kehidupan sosial.

Weber menolak gagasan bahwa *verstehen* hanya melibatkan intuisi, keterlibatan berdasarkan simpati atau empati. Baginya, *verstehen* melibatkan penelitian sistematis dan ketat dan bukannya sekedar merasakan teks atau fenomena sosial, tetapi prosedur studi yang rasional (Ritzer, 2009). Ada perbedaan penafsiran tentang konsep *verstehen* dari Weber ini. Ada yang menafsirkan *verstehen* itu sebagai penggunaan intuisi oleh peneliti. Ada juga yang menafsirkan *verstehen* bertujuan untuk memahami kebudayaan. Selain itu, ada juga yang melihat *verstehen* sebagai alat untuk mempelajari kebudayaan dan bahasa pada masyarakat tertentu.

Beragam penafsiran atas *verstehen* dari Weber. Penafsiran *verstehen* pada level budaya selaras dengan teori-teori skala besar, misalnya fungsionalisme struktural. Sementara itu,

pandangan pada level individu sesuai untuk teori skala kecil, misalnya interaksionalisme simbolis. Bagi Weber *verstehen* ada pada konteks budaya dan sosial kultural dari tindakan membawa kita pada pandangan bahwa *verstehen* adalah alat bagi analisis level makro.

Sumbangan berikutnya adalah teori Tindakan Sosial. Dalam teori tindakannya, tujuan Weber tak lain adalah memfokuskan perhatian pada individu, pola dan regulitas tindakan, dan bukan pada kolektivitas. Ia mengakui bahwa untuk beberapa tujuan kita mungkin harus memperlakukan kolektivitas sebagai individu. Untuk menafsir tindakan subjektif, kolektivitas-kolektivitas ini harus diperlakukan semata-mata sebagai resultan dan mode organisasi dari tindakan individu tertentu. Dari teori Weber ini, tampaknya bahwa Weber hampir tidak dapat mengelak lagi, sosiologi tindakan pada akhirnya berkuat pada individu, bukan kolektivitas. Dengan kata lain, perhatian Weber pada teori-teori tindakan berorientasi tujuan dan motivasi pelaku. Namun, tidaklah berarti bahwa ia hanya tertarik pada kelompok kecil, dalam hal interaksi spesifik antar individu belaka.

Weber menggunakan suatu klasifikasi dari empat tipe tindakan, yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya, yaitu:

- a. *Traditional rationality* (rasionalitas tradisional). Rasionalitas ini bertujuan untuk memperjuangkan nilai yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat. Rasionalitas ini kadangkala disebut sebagai tindakan irasional.
- b. *Affective rationality* (rasionalitas afektif). Rasionalitas ini merupakan tipe rasionalitas yang bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut.
- c. *Value oriented rationality* (rasionalitas yang berorientasi pada nilai). Rasionalitas ini merupakan sebuah rasionalitas

masyarakat yang melihat nilai sebagai potensi atau tujuan hidup, meskipun tujuan itu tidak nyata dalam kehidupan keseharian.

- d. *Instrumental rationality* (rasionalitas instrumental). Rasionalitas ini sering disebut juga dengan “tindakan” atau “alat”. Pada tipe rasionalitas ini, manusia tidak hanya menentukan tujuan yang ingin dicapai, namun ia secara rasional telah mampu menentukan alat (instrument) yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Rasionalitas ini merupakan tipe rasionalitas yang tertinggi menurut Weber (Johnson, 1994; Ritzer, 2009).

Hubungan keempat tipe rasionalitas tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: *Tradisional rationality* dan *affektive rationality* merupakan wujud tindakan irasional dalam diri manusia. Kemudian, *value oriented rationality* dan *instrumental rationality* merupakan wujud keberhasilan tindakan rasional dalam diri manusia.

Harus dicatat bahwa meskipun Weber membedakan empat tipe tindakan, ia sepenuhnya sadar bahwa tindakan tertentu biasanya terdiri dari kombinasi dari keempat tipe tindakan tersebut. Selain itu, Weber berargumen bahwa sosiologi harus memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memahami tindakan yang lebih memiliki variasi rasional ketimbang memahami tindakan yang didominasi oleh perasaan atau tradisi.

Sumbangan Weber yang sangat fundamental dalam sosiologi adalah Etika Protestan dan Perkembangan Kapitalisme Barat. Dalam karyanya *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism* (1940), merupakan salah satu bukunya yang terkenal. Dalam buku tersebut dikemukakan tesisnya yang sangat terkenal, yaitu mengenai kaitan antara Etika Protestan dengan munculnya Kapitalisme di Eropah Barat. Weber sebenarnya hidup tatkala Eropah Barat sedang menjurus ke arah pertumbuhan kapitalisme modern. Situasi demikian ini barangkali yang mendorongnya

untuk mencari sebab-sebab hubungan antara tingkah laku agama dan ekonomi, terutama di masyarakat Eropah Barat yang mayoritas pemeluknya agama Protestan. Apa yang menjadi bahan perhatian Weber dalam hal ini sesungguhnya juga sudah menjadi perhatian Marx, di mana pertumbuhan kapitalisme modern pada waktu itu telah menimbulkan keguncangan-keguncangan hebat di lapangan kehidupan sosial masyarakat Eropah Barat. Marx dalam persoalan ini mengkhususkan perhatiannya terhadap sistem produksi dan perkembangan teknologi, yang menurut beliau akibat perkembangan itu telah menimbulkan dua kelas masyarakat, yaitu kaum borjuis, jumlahnya kecil, tetapi memiliki modal, menguasai alat-alat produksi satu pihak dan kaum proletar di pihak lain, yang jumlahnya besar, tidak memiliki modal, tidak menguasai alat-alat produksi. Kaum borjuis secara terus menerus berusaha untuk memperoleh untung yang lebih besar, mengembangkan modalnya yang sudah mereka miliki, tetapi kaum proletar mendapatkan pembagian upah yang tidak sebanding dengan pekerjaannya atau pemaksimalan jam kerja dengan upah yang amat rendah.

Muncul dan berkembangnya Kapitalisme di Eropah Barat berlangsung secara bersamaan dengan perkembangan Sekte Calvinisme dalam agama Protestan. Tambahan pula, perkembangan kapitalisme merupakan sebuah wujud perkembangan rasionalitas manusia. Rasionalitas ini dimotori semangat untuk maju yang didasari doktrin agama (Protestan). Baginya, kapitalisme merupakan sebuah tipe masyarakat ideal yang telah mampu menggunakan rasionalitasnya. Etika Protestan, menurut Weber merupakan motor penggerak perkembangan kapitalisme di Barat ini. Etika Protestan mengajarkan pada para pemeluknya bahwa untuk dapat mencapai kesuksesan di dunia, manusia harus memiliki semangat, bekerja keras dan harus hidup hemat. Pandangan ini bagi umat Protestan muncul karena kepanikan di kalangan manusia akan nasib dirinya setelah

mengalami kematian. Bagi umat Protestan, Tuhan hanya akan memberikan peluang kepada hambanya yang mau bekerja keras.

Bekerja dalam pandangan agama Protestan ini dianggap sebagai sebuah tugas suci. Bekerja juga dimaknai sebagai sebuah prasyarat untuk mencapai keselamatan, sehingga orang yang tidak mau bekerja keras dianggap sebagai orang yang melanggar aturan agama, melanggar perintah Tuhan dan mengingkari agamanya. Jadi, ajaran Calvinisme ini mengharuskan umatnya untuk berusaha dan bekerja keras, mewajibkan hidup sederhana dan melarang segala bentuk kemewahan, apalagi digunakan untuk berpoya-poya. Akibat ajaran Calvinisme, para penganut agama ini menjadi semakin makmur karena keuntungan yang mereka perolehnya dari hasil usaha tidak dikonsumsi, melainkan ditanam kembali dalam usaha mereka. Melalui cara seperti itulah, kapitalisme di Eropah Barat berkembang.

Hubungan antara semangat kapitalisme dan etika Protestan memiliki konsistensi logis dan pengaruh motivasional yang bersifat mendukung secara timbal balik. Hubungan semacam itu disebut sebagai *elective affinity*. Hubungan tersebut mengantarkan kapitalisme mentransformasikan diri dalam bentuk modern, yang bercirikan: tata buku/akuntansi rasional, hukum rasional, teknik rasional, dan masa buruh menerima upah di pasar bebas karena mereka perlu untuk memperoleh penghasilan (Damsar & Indrayani, 2016). Dengan kata lain, karakteristik kapitalisme modern sangat jauh berbeda dengan bentuk-bentuk kapitalisme kuno dan bahkan kapitalisme dalam abad pertengahan. Menurut Weber, karakteristik dari spirit kapitalisme modern adalah sebagai berikut:

- a. Usaha-usaha ekonomi diorganisir dan dikelola secara rasional di atas landasan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan sehingga perusahaan-perusahaan dapat berkembang dengan pesat.
- b. Berkembangnya kepemilikan/kekayaan pribadi. Kekayaan milik pribadi tidak dibatasi oleh Negara.

- c. Berkembangnya produksi untuk pasar. Produksi dilakukan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan sendiri, tetapi untuk kebutuhan pasar.
- d. Produksi untuk masa dan melalui massa. Artinya, Produksi diupayakan untuk menjangkau kebutuhan masyarakat luas.
- e. Produksi untuk uang. Artinya, produksi berorientasi pada profit yang berupa uang.
- f. Antusiasme, etos kerja, dan efisiensi maksimal. Mereka yang tidak memiliki *vocational ethics* akan mengalami keruntuhan, dan mereka yang memiliki itu dengan baik akan berhasil meningkatkan prestasi hidupnya. *Vocational ethics* merupakan tingkah laku yang menonjol dari spirit kapitalisme modern (Boedhi Oetoyo, dkk, 2015).

Weber juga memberikan sumbangan teori Kekuasaan dan Birokrasi. Weber mencatat bahwa kekuasaan selalu hadir di setiap institusi sosial. Parkin (Jones, dkk, 2016) menggambarkan bagaimana tipologi kekuasaan dari Weber untuk mengidentifikasi cara-cara memperoleh legitimasi oleh yang berkuasa:

- a. Tradisional (*traditional authority*). Kekuasaan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat tradisional. Kekuasaan jenis ini mengambil keabsahannya atas dasar tradisi yang dianggap suci. Jenis kekuasaan yang berdasarkan tradisi dapat dibedakan ke dalam dua jenis kekuasaan, yaitu: patriarkhalisme dan patrimonialisme. Patriarkhalisme adalah suatu jenis kekuasaan didasarkan pada senioritas. Mereka yang lebih tua atau senior dianggap secara tradisi memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Sementara, patrimonialisme adalah jenis kekuasaan yang mengharuskan seorang pemimpin bekerjasama dengan kerabat-kerabatnya atau dengan orang-orang dekat yang memiliki loyalitas pribadi kepadanya. Contoh patriarkhalisme, kekuasaan ayah dan ibu di dalam rumah tangga, anak tertua terhadap

anggota keluarga yang lebih muda, pangeran atas pegawai rumah. Contoh dari patrimonialisme, seorang raja yang mengangkat para pejabat bawahannya dari kalangan keluarga atau kerabat dekat kerajaan sendiri.

- b. Kharismatik (*charismatic authority*). Kekuasaan kharismatik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang karena kualitas yang “luar biasa” yang dimilikinya. Apakah kualitas itu sungguh-sungguh ada (dimiliki) atau hanya berdasarkan dugaan orang belaka. Pihak si tertakluk menjadi tunduk dan patuh karena kepercayaan kepada kualitas luar biasa yang dimiliki orang tersebut. Para dukun, ahli guna-guna, penyihir, pemimpin suku, pemimpin partai, pada kondisi-kondisi tertentu dapat berlaku dengan kekuasaan kharistik ini.
- c. Legal rasional (*rational-legal authority*). Kekuasaan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat modern. Kekuasaan ini dibangun atas dasar legitimasi (keabsahan) yang menurut pihak yang berkuasa merupakan haknya. Organisasi-organisasi modern misalnya, terutama yang bersifat politis merupakan tipe dari kekuasaan jenis ini. Si pemegang kekuasaan dalam memberikan perintah berdasarkan peraturan yang telah disepakati bersama. Keabsahan untuk membuat peraturan dan menjalankannya selalu berdasarkan pada konstitusi yang ditafsirkan secara resmi. Perintah-perintah yang diberikan berdasarkan norma-norma yang tidak bersifat pribadi atau perseorangan (Ritzer, 2009; Boedhi Oetoyo, dkk, 2015; Jones, dkk, 2016).

Kekuasaan yang telah diuraikan di atas, memiliki beragam bentuk struktural, namun bentuk yang paling menarik perhatian Weber adalah birokrasi, yang ia pandang sebagai tipe paling murni dari dijalankannya kekuasaan legal (Ritzer, 2009). Menurut Weber, dari sudut pandang teknis murni, birokrasi mampu mencapai tingkat efisiensi tertinggi, dan dalam hal ini secara

formal dikenal sebagai sarana paling rasional untuk menjalankan kekuasaan terhadap manusia. Birokrasi membuka kemungkinan bagi tingginya tingkat kalkulabilitas hasil bagi kepala organisasi dan bagi mereka yang bertindak dalam kaitan dengan ini. Akhirnya, birokrasi lebih tinggi dalam hal efisiensi intensif dan cakupan operasinya dan secara formal dapat diterapkan pada segala macam tugas administrative (Ritzer, 2009). Singkatnya, birokrasi ditandai dengan sebuah cara pengaturan organisasi, misalnya tatakelola administrasi dan cara organisasi yang didasarkan pada rasionalisasi pekerjaan. Dalam realisasinya, pelaksanaan tugas terbagi menjadi beberapa fungsi yang dikhususkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan. Demikian pula dalam hal karier, diatur dengan kriteria-kriteria kualifikasi dan rentang waktu objektif kedinasan dan sebagainya, dan bukan dengan kriteria yang sifatnya individual. Weber menyakini bahwa birokrasi ini tidak hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan kapital, tetapi juga terdapat pada organisasi lainnya, seperti organisasi pemerintahan, partai politik, kemasyarakatan dan keagamaan.

Weber membedakan tipe ideal birokrasi dengan tipe ideal birokrat. Birokrasi sebagai struktur dan birokrat sebagai posisi dalam struktur-struktur tersebut. Selanjutnya, Weber mengatakan bahwa tipe ideal birokrasi adalah sebuah tipe organisasi. Unit dasarnya adalah badan yang diorganisasi secara hierarkis dengan aturan, fungsi, dokumen tertulis dan cara-cara mempraktekannya. Pada akhirnya, Weber mengatakan bahwa kita dapat saja membangun tipe ideal birokrasi yang berpusat pada pikiran dan tindakan individu dalam birokrasi. Ia menyebutkan beberapa ciri utama tipe ideal birokrasi, yaitu:

- a. Terdiri dari rangkaian organisasi fungsi-fungsi resmi (badan) yang terikat oleh aturan.
- b. Setiap badan memiliki ranah kompetensi spesifik. Badan tersebut membawa serta serangkaian kewajiban untuk

melakukan berbagai fungsi, kekuasaan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, dan cara-cara pemaksaan yang diperlukan bagi dilakukannya pekerjaan tersebut.

- c. Badan-badan tersebut terorganisasi ke dalam sistem hierarkis.
- d. Badan-badan tersebut mungkin membawa serta kualifikasi teknis yang mengharuskan persiapannya memperoleh pelatihan yang tepat.
- e. Staf yang mengisi badan-badan tersebut tidak memiliki sarana produksi yang terkait dengannya, anggota staf dibekali dengan manfaat benda-benda yang mereka perlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- f. Pegawai tidak diizinkan mengubah posisi, ia tetap menjadi bagian dari organisasi.
- g. Tindakan, keputusan, dan aturan administratif dirumuskan dan dicatat secara tertulis (Ritzer, dkk, 2009).

C. Perkembangan Sosiologi di Indonesia

Perkembangan sosiologi di Indonesia telah dibahas dalam beberapa tulisan terdahulu, antara lain Selo Sumardjan (1965), Koentjaraningrat (1975), Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar (1975), Soerjono Soekanto (1975), Kamanto Sunarto (1989) dan tulisan sosiologi lainnya yang beredar di Indonesia. Di sini akan disajikan, disadur dari Soerjono Soekanto dan tulisan sosiologi lainnya.

Pada mulanya, belum pernah ada kajian-kajian tentang masyarakat yang terangkum dalam satu konsep ilmu pengetahuan yang dinamakan sosiologi di Indonesia. Akan tetapi, para pujangga dan pemimpin Indonesia banyak di antara mereka yang telah memasukan unsur-unsur sosiologi ke dalam ajaran-ajarannya. Misalnya, ajaran “Wulang Reh” yang ditulis oleh Sri Paduka Mangkunegoro IV dari Keraton Surakarta. Di dalamnya diajarkan tentang pola-pola hubungan antara anggota-anggota masyarakat Jawa yang berasal dari golongan-golongan

yang berbeda. Di dalam pola-pola hubungan tersebut, banyak mengandung aspek sosiologi. Hal yang sama juga ditemukan dalam ajaran Ki Hajar Dewantoro, pelopor utama yang meletakkan dasar-dasar bagi pendidikan di Indonesia, tentang dasar-dasar Kepemimpinan dan Keluarga yang terangkum dalam konsep “Ing ngarsa sung tuladha (di depan memberikan contoh yang baik), ing madya mangun karsa (di tengah memberikan semangat), dan tut wuri handayani (di belakang memberikan dorongan atau semangat). Konsep tersebut dengan nyata dipraktekkan dalam organisasi pendidikan Taman Siswa. Beliau, secara tidak langsung merupakan peletak dasar konsep sosiologi.

Selain itu, unsur-unsur sosiologi juga dapat ditemukan dalam karya-karya peneliti para sarjana (kebanyakan) orang Belanda, sebelum perang dunia kedua, seperti karya Snouck Hurgronje, C.van Valenhoven, Ter Har, Duyvendak, dan lain-lain yang objek penulisannya adalah keadaan sosiokultural masyarakat Indonesia. Hasil-hasil karya mereka pada saat itu masih bersifat nonsosiologis dan tidak sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa deskripsi keadaan sosiokultural masyarakat Indonesia tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tetapi konsep penelaahan ilmiah tersebut belum menjadi ilmu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai ilmu pembantu bagi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Dengan kata lain, sosiologi pada saat itu belum dianggap cukup penting untuk dipelajari dan dipergunakan sebagai ilmu pengetahuan, terlepas dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Sebelum Perang Dunia Kedua, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta adalah satu-satunya lembaga di Indonesia yang memberikan kuliah sosiologi. Di sini, pembelajaran sosiologi dalam lembaga pendidikan tersebut belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri, melainkan hanya sebagai pelengkap bagi mata kuliah di bidang hukum. Para pengajar yang memberikan kuliah-kuliah pun bukanlah sarjana-sarjana yang secara khusus

membidangi disiplin ilmu sosiologi, karena pada waktu itu belum ada spesialisasi sosiologi, baik di Indonesia maupun di negeri Belanda. Sosiologi yang diajarkan dalam kuliah tersebut juga masih berupa filsafat sosial dan teoretis.

Ironisnya, pada tahun 1934-1935 mata kuliah sosiologi pada Sekolah Tinggi Hukum tersebut justru dihilangkan, sebab para Guru Besar yang memegang mata kuliah hukum tersebut berpendapat bahwa pengetahuan tentang bentuk dan susunan masyarakat serta proses-proses yang terjadi di dalam masyarakat tidak diperlukan dalam pendidikan hukum. Dalam pandangan para Guru Besar, yang perlu diketahui adalah hukum positif, yaitu peraturan-peraturan yang berlaku dengan sah pada suatu waktu dan suatu tempat tertentu. Singkatnya, dalam pembelajaran di bidang hukum yang terpenting adalah perumusan peraturannya dan sistem-sistem untuk menafsirkannya.

Setelah Perang Dunia Kedua, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Prof. Mr. Soenario Kolopaking untuk pertama kalinya memberikan kuliah sosiologi (1948) pada Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta yang kemudian dilebur dalam Universitas Gajar Mada (UGM) Yogyakarta. Di Universitas tersebut sosiologi diajarkan sebagai ilmu pengetahuan dalam jurusan Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri, Hubungan Luar Negeri dan Publisistik. Pada tahun 1950, mulailah ada beberapa orang Indonesia yang memperdalam pengetahuannya tentang sosiologi, bahkan ada di antaranya yang mempelajari ilmu tersebut secara khusus, yang akhirnya mereka menjadi cikal bakal tumbuhnya sosiologi di Indonesia. Perkembangan dari beberapa ilmuwan sosial tersebut adalah diterbitkannya buku sosiologi yang berjudul Sosiologi Indonesia, yang ditulis dalam bahasa Indonesia oleh Mr. Djody Gondokusumo. Isinya memuat beberapa pengertian elementer dari sosiologi yang teoretis dan bersifat sebagai filsafat. Buku tersebut pada saat itu mendapat sambutan baik, karena mulai terasa pada golongan terpelajar akan pentingnya ilmu pengetahuan

yang dapat membantu mereka di dalam usah-usahanya memahami perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat dalam masyarakat Indonesia. Perkembangan selanjutnya, yaitu setelah revolusi fisik, sekitar tahun 1950 menyusul terbit buku sosiologi karya Bardosono. Selanjutnya, Hasan Shadily menulis sebuah buku yang berjudul Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, yang memuat bahan-bahan sosiologi yang modern. Buku lainnya, hasil karya Mayor Polak, seorang warga Negara Indonesia bekas anggota Pangreh Praja Belanda, yang telah mendapatkan pelajaran sosiologi sebelum Perang Dunia Kedua pada Universitas Leiden di Negeri Belanda, yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas dan buku sosiologi khusus yang berjudul Pengantar Sosiologi Pengetahuan, Hukum dan Politik, terbit tahun 1967.

Para ahli sosiologi yang telah berperan, memelopori penyebaran dan pengembangan sosiologi di Indonesia ialah Selo Sumardjan, Harsja W. Bachtiar, Mely G. Tan (UI & YIIS). Tokoh lainnya Soedjito Sosrodihardjo (UGM), Sajogyo (IPB). Beberapa di antara hasil penelitian para ahli sosiologi itu terhadap masyarakat Indonesia ialah: *Social Change in Jogjakarta* (disertasi Selo Sumardjan, 1962); *The Chinese of Sukabumi* (Mely G. Tan, 1963); *Masyarakat Transmigran Spontan di Daerah Wai Sekampung, Lampung* (disertasi, Sajogyo, 1957); *The Formation of the Indonesian Nation* (disertasi, Harsja W. Bachtiar, 1973); *Perubahan Struktur Masyarakat di Jawa* (Soedjito Sosrodihardjo, 1967); *Some Aspects of the Social Origin of Indonesian Political Decision Makers* (Soelaeman Soemardi, 1956). Dari hasil karya para ahli sosiologi tersebut nampak bahwa mereka tidak hanya menyebarkan teori dan metodologi sosiologi, tetapi juga mempergunakan pengetahuan sosiologi mereka untuk meneliti masyarakat Indonesia (Sunarto, 1989).

Pada dewasa ini buku sosiologi yang ditulis baik para ahli Indonesia maupun buku impor yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sudah banyak, seperti *Setangkai Bunga*

Sosiologi (Selo Sumardjan & Soelaeman Soemardi); *Sosiologi Hukum* (Satjipto Rahardjo); *Sosiologi Suatu Pengantar* (Soerjono Soekanto); *Pengantar Sosiologi* (Kamanto Sunarto); *Sosiologi Hukum* (Soedjono Dirdjosisworo); *Pengantar Sosiologi* (Elly M. Setiadi & Usman Kolip); *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto); *Sosiologi Perubahan Sosial* (Nanang Martono); *Sosiologi Untuk Universitas* (Yesmir Anwar & Adang) dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa perkembangan sosiologi di Indonesia pada mulanya sebagai ilmu pembantu bagi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Akan tetapi, di tahun-tahun berikut, seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, bisa diramalkan bahwa perkembangan sosiologi juga akan semakin ragam dan makin penting. Pada saat ini, sosiologi menempati tempat yang penting dalam daftar kuliah di beberapa perguruan tinggi. Bahkan ada beberapa perguruan tinggi di Indonesia pada saat ini membuka Jurusan atau Program Studi Sosiologi. Misalnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Hasanuddin, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Sumatera Utara, beberapa Perguruan Tinggi Swasta, dan lain-lain. Dari jurusan atau program Studi itulah diharapkan sumbangan dan dorongan lebih besar untuk mempercepat dan memperluas perkembangan sosiologi di Indonesia untuk kepentingan pendidikan dan masyarakat (umum).

BAB II

RUANG LINGKUP SOSIOLOGI

A. Definisi Sosiologi

Sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *Socius* yang berarti “kawan”, “teman”, sedangkan *Logos* berarti “cerita”. Kata sosiologi, diungkapkan pertama kali dalam buku yang berjudul “Cours De Philosophie Positive” karangan August Comte (1798-1857). Jadi, berdasarkan sudut etimologi ini, sosiologi berarti “Berbicara mengenai Masyarakat” atau “Ilmu Pengetahuan yang mempelajari bagaimana kita hidup berkawan atau bermasyarakat”. Pada dasarnya sangat sulit untuk merumuskan batasan sosiologi yang mencakup keseluruhan pengertian, sifat dan hakekat sosiologi. Biasanya suatu batasan hanya dapat dipergunakan sebagai pegangan sementara saja.

Sebagai referensi, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang batasan sosiologi menurut para ahli, di antaranya:

1. Piritim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari: hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya); hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala nonsosial (misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya); dan ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial.
2. Roucek dan Warren mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.
3. William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial.

4. J.A.A van Doorn dan C.J. Lammers berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.
5. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama, umpamanya pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Salah satu proses sosial yang bersifat tersendiri ialah dalam hal terjadinya perubahan-perubahan di dalam struktur sosial.
6. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatiannya pada segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.
7. Max Weber berpendapat bahwa sosiologi sebagai ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial.
8. Paul B. Horton mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut.
9. William Kornblum mendefinisikan bahwa sosiologi sebagai upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi.
10. Allan Johnson mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat di dalamnya mempengaruhi sistem itu.

11. P.J. Bouman sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang kehidupan manusia dalam hubungan kelompok.
12. Mayor Polak mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni hubungan di antara manusia dan kelompok, kelompok dan kelompok, baik kelompok formal maupun kelompok material atau baik kelompok statis maupun kelompok dinamis.
13. Hasan Shadily mendefinisikan sosiologi adalah ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakat (tidak sebagai individu yang terlepas dari golongan atau masyarakatnya) dengan ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan atau agamanya, tingkahlaku serta keseniannya atau yang disebut kebudayaan yang meliputi segala segi kehidupan.
14. Soediman Kartohardiprodjo sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala dalam pergaulan hidup manusia, termasuk di dalamnya hubungan-hubungan hukum, akibat hukum dan sebagainya, dilihatnya sebagai gejala-gejala masyarakat.
15. Soedjono Dirdjosisworo sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pergaulan hidup manusia (masyarakat) beserta gejala-gejalanya sebagaimana adanya.
16. Elly&Kolip sosiologi adalah ilmu yang berobjek pada pola-pola hubungan antarmanusia.
17. Narwoko&Suyanto sosiologi tidak hanya merupakan suatu kumpulan subdisiplin segala bidang kehidupan, melainkan merupakan suatu studi tentang masyarakat.
18. Yesmil Anwar&Adang sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat dan hubungan sosial yang terjadi di dalamnya (adanya proses individu bergaul/proses sosial) baik itu dari segi norma (hukum, etika), adat, kebiasaan, serta budaya. Selain itu, sosiologi juga

mempelajari hubungan timbalbalik antara struktur sosial dan proses sosial yang dapat memperjelas kenyataan (fakta yang terjadi) dalam masyarakat dalam hubungan kebudayaan dan kemasyarakatan pada umumnya (Bouman, 1976; Soedjono D, 1980; Narwoko&Suyanto, 2004; Elly&Kolip, 2011; Wlansari, 2013; Anwar&Adang, 2017; Soekanto, 2017).

Dari berbagai definisi tersebut dapat dilihat bahwa terdapat berbagai definisi sosiologi yang berbeda satu dengan yang lainnya, akan tetapi bisa ditemukan simpul-simpul persamaan di antara mereka, yaitu sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari:

1. Manusia yang hidup dalam kelompok yang disebut masyarakat;
2. Pola-pola hubungan antara manusia baik secara individu maupun kelompok (manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok);
3. Hubungan manusia dengan lembaga-lembaga sosial(seperti norma-norma dan kaidah-kaidah sosial);
4. Pola-pola kehidupan manusia kaitannya dengan kondisi lingkungannya (seperti ekonomi, politik, hukum, agama, sosial-budaya).

B. Objek Sosiologi

Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antarmanusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat (Soekanto, 2017). Masyarakat sebagai bidang kajian sosiologi, juga dikaji oleh berbagai disiplin keilmuan lainnya, seperti ilmu antropologi, geografi, sejarah, ekonomi, psikologi, politik, hukum, dan sebagainya. Akan tetapi, masing-masing ilmu itu mempunyai pandangan sendiri, berdasarkan pengertian dan metode yang digunakannya.

Sosiologi mempelajari masyarakat, tapi mengkhususkan penelaahannya pada pola-pola hubungan antara manusia baik secara individu maupun kelompok. Antropologi, mempelajari

tentang manusia dengan aneka warna bentuk fisik, masyarakat dan kebudayaannya. Geografi, mempelajari fisik alamiah bumi, gejala dan proses alam serta kehidupannya. Gejala dan proses kehidupan melibatkan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia sebagai penghuni bumi tersebut. Sejarah, penelaahannya pada menggambarkan atau rekonstruksi peristiwa, kisah, maupun cerita, yang benar-benar telah terjadi pada masa lalu. Pada umumnya, para ahli sejarah sepakat untuk membagi sejarah pada tiga hal, yakni sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai cerita (Ismaun, 1993). Ekonomi, mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan, dengan memilih penggunaan sumber daya produksi yang sifatnya langka atau terbatas. Dengan kata lain, ilmu ekonomi, bagaimana orang memilih penggunaan sumber daya produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi dan menyalurkan ke berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsi. Psikologi, mempelajari pada gejala proses mental dan proses perilaku. Proses mental, seperti masalah pikiran, akal, ingatan, perasaan, keinginan, kognisi, berpikir logis, keputusan, dan sebagainya. Proses perilaku, seperti gerak tangan, cara bicara, perubahan kejiwaan, dan sebagainya. Politik, memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kekuasaan mencakup tiga hal, yakni perjuangan untuk meraih kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau mempengaruhi orang lain dan mempertahankan kekuasaan. Hukum, mempelajari hubungan-hubungan hukum dan akibat-akibat hukum sebagai gejala masyarakat dalam usahanya menciptakan ketertiban dan keadilan.

Ciri-ciri di atas inilah kiranya yang dapat memudahkan bagi kita untuk membedakan sosiologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, yang memiliki sasaran penelitian yang sama yaitu masyarakat. Jadi, masyarakat sebagai bidang kajian sosiologi

pada dasarnya dapat juga dikaji dari berbagai aspek lainnya. Ini terbukti dari beragamnya definisi yang diberikan terhadap masyarakat. Beberapa definisi masyarakat menurut para ahli di antaranya:

1. Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
2. Selo Semardjan, menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.
3. P.J. Bouman, masyarakat adalah suatu bentuk pergaulan hidup yang akrab antara manusia, dipersatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka.
4. A. Lysen, masyarakat adalah hubungan antara kekuatan-kekuatan dari bentuk-bentuk masyarakat dan dengan kehidupan individu.
5. Ridwan Halim, masyarakat adalah sekelompok orang-orang tertentu yang mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu dan tunduk pada peraturan-peraturan hukum tertentu pula (P.J. Bouman, 1976; Wulansari, 2013; Soekanto, 2017).

Dari definisi di atas, walaupun terdapat perbedaan satu dengan lainnya, tetapi pada dasarnya isinya sama, yaitu masyarakat mencakup unsur-unsur sebagai berikut: (1) Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, (2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama, (3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, dan (4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama (Soekanto, 2017).

Dari paparan tersebut jelas bahwa manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Apabila dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan, misalnya, manusia tidak akan mungkin

bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Tampaknya para ahli ilmu sosial telah sepakat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berhubungan dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Dalam hubungan antara manusia ini akan menghasilkan produk-produk itu sendiri, di antaranya adalah nilai-nilai sosial, norma-norma yang dianut oleh anggota-anggota masyarakat tersebut. Dengan demikian, substansi dari batasan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat, yang di dalamnya terdapat pola-pola hubungan antarmanusia baik individu maupun kelompok serta akibat yang ditimbulkannya berupa nilai dan norma sosial yang dianut oleh anggota masyarakat tersebut. Jadi, masyarakat yang menjadi objek sosiologi adalah kesatuan hidup manusia di dalam masyarakat desa, masyarakat kota, dan lainnya sebagai kesatuan yang paling mudah diamati.

C. Sosiologi Sebagai Ilmu

Apakah sosiologi benar-benar merupakan suatu ilmu (*science*)? Sejak awal, para perintis sosiologi menganggapnya demikian, tetapi apakah anggapan tadi benar?. Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu berusaha merumuskan apakah yang dimaksud dengan ilmu (*science*)?. Sebagai referensi, perlu kita kemukakan pengertian ilmu (*science*) menurut para ahli, di antaranya:

1. Soekanto (2017) menyatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, yang selalu dapat diperiksa dan ditelaah (dikontrol) dengan kritis oleh setiap orang lain yang ingin mengetahuinya.
2. Horton & Hunt (1987) menyatakan bahwa suatu ilmu sekurang-kurangnya dapat dirumuskan dalam dua cara, yaitu: (1) suatu ilmu adalah suatu kerangka pengetahuan yang tersusun dan teruji yang diperoleh melalui suatu penelitian ilmiah, (2) suatu ilmu adalah suatu metode untuk

menemukan suatu kerangka pengetahuan yang tersusun dan teruji.

Dari batasan di atas, ada beberapa poin yang harus dipenuhi oleh pengetahuan agar menjadi ilmu pengetahuan, di antaranya: (1) pengetahuan, (2) tersusun secara sistematis, (3) menggunakan pemikiran, dan (4) dapat diuji secara kritis oleh orang lain atau umum. Bila rumusan itu kita terima, maka sosiologi adalah suatu ilmu, sejauh sosiologi mengembangkan suatu kerangka pengetahuan, tersusun secara sistematis, menggunakan pemikiran dan teruji yang didasarkan pada penelitian ilmiah. Sebagai tambahan, sejauh sosiologi meninggalkan mitos, dongeng dan angan-angan dan mendasarkan kesimpulannya pada bukti-bukti ilmiah, maka sosiologi adalah suatu ilmu. Bila ilmu kita definisikan sebagai suatu metode ilmiah, maka sosiologi adalah suatu ilmu, sejauh sosiologi menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara berpikir dalam mencari pengetahuan. Metode ilmiah ini sebagai perpaduan antara rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah koheren, logis dan sistematis, dengan logika deduksi sebagai sendi pengikatnya. Sementara, empirisme adalah objektif dan berorientasi kepada fakta sebagaimana adanya. Kebenaran keilmuan bukan saja merupakan kesimpulan rasional yang koheren dengan sistem pengetahuan yang berlaku, tetapi juga harus sesuai dengan kenyataan yang ada.

Semua gejala sosial di bidang sosiologi, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, wabah penyakit tertentu, bunuh diri, disorganisasi jiwa, perceraian, kejahatan, disorganisasi keluarga, kenakalan anak-anak remaja, pekerja seks komersial (PSK), dan sebagainya dapat ditelaah secara ilmiah, jika kita bersedia menggunakan metode ilmiah. Dewasa ini, problema sosial tersebut tidak cukup dijelaskan oleh dongeng (folklore), kebiasaan dan dugaan, tetapi yang lebih tepat melalui pendekatan metode ilmiah. Kerangka dasar prosedur metode ilmiah ini dapat dilakukan dalam 7(tujuh) langkah sebagai berikut: (1) Sadar akan adanya masalah dan perumusan masalah, (2) Penetapan

teori sebagai acuan, (3) Perumusan hipotesis, (4) Pengamatan dan pengumpulan data yang relevan, (5) Penyusunan atau klasifikasi data, (6) Analisis data, (7) Tes dan pengujian kebenaran (verifikasi) dari hipotesis. Dengan demikian, sosiologi adalah suatu ilmu, sejauh sosiologi dalam memperoleh pengetahuan menggunakan prosedur ilmiah.

Sosiologi sebagai ilmu juga memiliki sifat-sifat. Ada empat sifat untuk menentukan sosiologi itu disebut ilmu, yaitu:

1. **Teoritis.** Sosiologi selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil pengamatan dan pengumpulan data. Abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi sebuah teori. Teori biasanya dirumuskan dalam kalimat ilmiah, yang sering disebut dengan istilah proposisi. Contoh penelitian hubungan pendidikan keluarga Tionghoa dengan jiwa dagang. Pendidikan keluarga adalah sebab, dan jiwa dagang adalah akibat. Sebagaimana kita ketahui, orang Tionghoa sudah berjiwa dagang, maka pendidikan di dalam keluarganya cenderung menekankan nilai-nilai yang berhubungan dengan dagang, seperti kerja keras, hemat, ulet, semangat, rajin, dan lain-lain. Pendidikan keluarga Tionghoa demikian, lalu mereka cenderung untuk menjadi pedagang. Dengan demikian, hasil penelitian ini proposisinya berbunyi sebagai berikut: “Pendidikan keluarga ikut menentukan semangat dagang”. Ini adalah sebuah teori (kecil) yang bersifat empiris.
2. **Empiris.** Sosiologi itu didasarkan pada pengamatan, pengumpulan data dan penalaran. Pengamatan dan pengumpulan data, berarti semua yang berhubungan dengan pancaindra manusia, yang dialami dalam kehidupan sosial. Sifat empiris ini dihubungkan dengan sifat ilmu yang dapat dites dengan fakta. Fakta tidak dapat disangkal kebenarannya, karena dapat kita lihat sendiri dengan mata atau dengan

- pancaindra yang kita miliki. Sementara, penalaran berarti semua yang berhubungan dengan akal budi manusia atau bersifat rasional. Rasional adalah koheren, logis dan sistematis, dengan logika deduksi sebagai sendi pengikatnya.
3. Kumulatif. Kumulatif berasal dari kata latin “cumulare”, yang berarti menimbun, menumpuk, makin lama makin besar. Sosiologi itu bersifat kumulatif, berarti teori sosiologi yang ada sekarang, seperti teori fungsionalisme, konflik, sistem, tindakan, interaksionalisme simbolik, pertukaran, etnometodologi, dan lain-lain, tidak sekaligus jadi. Dia dibentuk dengan dasar teori lama yang disempurnakan, ditambah, diperluas, diperbaiki, dan lalu makin lama makin baik atau makin sempurna.
 4. Tidak untuk menilai. Sosiologi dalam usahanya menggambarkan dan menjelaskan masyarakat atau individu, sama sekali tidak bermaksud untuk menilai baik-buruknya fakta tertentu atau moral baik atau tidak baik. Sosiologi hanya mau menjelaskan perilaku sosialnya secara analitis. Contoh, seorang ahli sosiologi melihat bahwa dalam suatu masyarakat tertentu kebiasaan pelanggaran lalu lintas atau kenakalan anak-anak remaja itu sudah sedemikian merajalelanya. Dia ingin meneliti mengapa sampai terjadi demikian. Ahli sosiologi itu tidak akan mengatakan bahwa pelanggaran lalu lintas atau kenakalan anak-anak remaja itu jelek dalam analisisnya. Baik atau buruknya sesuatu itu bukan urusan sosiologi; ada cabang ilmu lain yang membicarakan apakah sesuatu itu baik atau buruk, yaitu etika.

D. Kegunaan Sosiologi

Sosiologi bukanlah ilmu terapan, sebagaimana ilmu pertanian, teknik, keperawatan, tetapi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari gejala sosial atau kenyataan sosial di masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu

pengetahuan murni dan terapan. Ilmu pengetahuan murni adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak hanya untuk mempertinggi mutunya, tanpa menggunakannya dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan terapan adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mempergunakan dan menerapkan ilmu pengetahuan tersebut dalam masyarakat dengan maksud membantu kehidupan masyarakat. Tujuan sosiologi adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang masyarakat, dan bukan untuk mempergunakan pengetahuan tersebut untuk masyarakat (Seokanto, 2017). Jadi, sosiologi ini ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala sosial atau kenyataan sosial, yang hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat, tapi sosiologi sendiri bukanlah suatu ilmu pengetahuan terapan. Hal ini bukan berarti bahwa sosiologi tidak mempunyai kegunaan sama sekali untuk masyarakat. Berikut ini ada beberapa kegunaan sosiologi:

1. Kehidupan Masyarakat. Tidak semua proses sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat berjalan secara normal, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Gejala-gejala abnormal atau patologis di dalam kajian sosiologi dinamakan problema-problema sosial, seperti sakit jiwa, bunuh diri, perceraian, penyalahgunaan obat-obat terlarang, kenakalan anak-anak remaja, tawuran antarpelajar atau antarmahasiswa, tindakan anarkis suporter bola, dan lain-lain. Sosiologi membahas problema sosial sebagai langkah analisis untuk mencari dan menelaah data tentang berbagai problema sosial di dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai sumber dan mencari sumber dari problema sosial ini sehingga dapat dicari langkah solusinya. Dalam hal ini, sosiologi memberikan data yang akurat kepada pihak yang berwenang untuk dijadikan sebagai data dan pedoman dalam mencari penyelesaian dari persoalan yang

muncul tersebut. Jadi, sosiologi tidak memberikan penilaian atas tindakan manusia apakah itu berlawanan dengan moral atau tidak, tetapi sosiologi hanyalah menyajikan data secara akurat, tajam dan terpercaya.

2. Pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang direncanakan untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang telah dicapai sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sosiologi bukanlah ilmu terapan, tetapi sosiologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari gejala sosial, yang dapat memberi masukan secara objektif bagi perencanaan pembangunan. Menurut Soerjono D (1982), tidak disangsikan lagi bahwa setiap pembangunan membutuhkan sosiologi sebagai sarana bagi penyusunan program yang lebih mantap. Dalam pembangunan biasanya melalui tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Menurut Soekanto (2017), pada tahap perencanaan, sosiologi dapat berguna di dalam mengadakan identifikasi-identifikasi tahap kebutuhan-kebutuhan sosial, pusat perhatian sosial, stratifikasi sosial, pusat-pusat kekuasaan serta sistem dan saluran-saluran komunikasi sosial. Pada tahap pelaksanaan, sosiologi dapat berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat serta mengamati proses perubahan yang terjadi. Pada tahap evaluasi, dapatlah diadakan suatu analisis terhadap efek-efek sosial dari pembangunan. Dengan demikian, kegunaan sosiologi dalam pembangunan yaitu mengidentifikasi hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan pembangunan itu sendiri, seperti dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

E. Peran Sosiolog

Apa sebenarnya tugas seorang sosiolog? Apakah hanya terbatas mengamati gejala sosial atau fakta sosial di masyarakat?. Di berbagai Negara telah muncul pengakuan yang kuat terhadap sumbangan dan peran sosiolog di berbagai bidang kehidupan. Menurut Horton & Hunt (1987); Elly & Usman (2011) dewasa ini beberapa profesi yang umumnya diisi oleh para sosiolog adalah: (1) Ahli riset, (2) Konsultan kebijakan, (3) Teknisi, (4) Guru atau Pendidik.

1. **Ahli Riset.** Sosiologi adalah ilmu yang mengkaji gejala sosial dan fakta sosial yang sejajar dengan ilmu-ilmu lainnya. Kegiatan para sosiolog tidak ubahnya dengan kegiatan yang dilakukan oleh ilmuwan lainnya, yaitu melakukan penelitian, pengamatan, dan percobaan (eksperimen) yang menggunakan metode ilmiah tertentu sesuai dengan bidang yang dikaji. Dalam kegiatan penelitiannya, sosiolog lebih banyak menggunakan angket, wawancara dan pengamatan tentang perilaku masyarakat, terutama yang menyangkut sikap, perilaku, opini dan budayanya. Dengan keakuratan data yang dilaporkan oleh para sosiolog, maka laporan ini dapat digunakan untuk mengambil suatu langkah kebijakan publik, sehingga hasil kebijakan publik yang digulirkan akan tepat pada sarannya. Dengan demikian, tepat atau tidak tepatnya suatu kebijakan publik yang dibuat oleh yang berwenang akan sangat tergantung dari hasil laporan penelitian yang dibuat oleh para sosiolog.
2. **Konsultan Kebijakan.** Banyak gejala-gejala penyakit masyarakat yang tidak terselesaikan. Hal ini disebabkan oleh kurang pahamiannya pembuat kebijakan publik dalam menangani persoalan ini. Misalnya, masalah maraknya anak-anak jalanan di kota-kota besar, di lampu merah, stasiun-stasiun kereta api, di terminal bus, di tempat keramaian dan diberbagai tempat-tempat umum lainnya. Salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi masalah itu, mereka dimasukan ke panti asuhan. Tujuannya

agar anak-anak jalanan ini memperoleh kehidupan yang layak, seperti gizi makanan yang cukup, pendidikan dan ketrampilan yang baik untuk masa depannya. Akan tetapi, kenyataannya setelah anak-anak ditampung justru banyak yang lari untuk kembali ke dunia asal mereka yaitu menjadi anak gelandangan lagi. Tentu kebijakan menampung mereka di tempat-tempat yang menurut kita layak baginya, tetapi bagi anak-anak jalanan tersebut tempat penampungan justru dianggap sebagai tempat yang merampas kebebasannya. Untuk itulah perlu diketahui terlebih dahulu tentang karakter kejiwaan anak-anak tersebut sebelum ditampung di tempat penampungan tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan para ahli di bidang ini, yaitu sosiolog. Sosiolog akan menelaah tentang suatu persoalan dari berbagai sudut pandangan ilmiah. Persoalan masyarakat harus dilihat dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik, pendidikan, agama, adat-istiadat dan lain-lain. Setelah diketahui akar masalahnya, maka temuan-temuan ini berguna bagi pemerintah dalam melakukan program pembangunan. Akhirnya, melalui hasil penelitian para sosiolog akan dihasilkan suatu kebijakan dalam pembangunan yang tepat sasaran.

3. Teknisi. Teknisi adalah orang-orang yang memberikan metode atau cara di dalam proses suatu bidang pekerjaan tertentu. Teknisi ini merupakan orang-orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, yang sering kali diminta untuk ikut andil dalam suatu perencanaan pekerjaan tertentu. Begitu juga, para sosiolog, sebagai salah satu ilmuwan yang memiliki bidang keahlian kajian pada gejala sosial yang didalamnya terdapat perilaku masyarakat, perubahan sosial, lembaga sosial, tentu akan sangat berguna bagi perencana dalam bidang pembangunan.
4. Guru atau pendidik. Kegiatan mengajar adalah salah satu karir utama bagi sosiolog. Para sosiolog melakukan kegiatan mengajar yaitu dalam usaha terus belajar mengembangkan

teori dan menerapkannya dalam proses belajar mengajar pada setiap harinya. Sebagai guru atau pendidik, para sosiolog juga berusaha memberitahukan atau mengkomunikasikan ilmu pengetahuan tersebut kepada anak didiknya atau masyarakat. Sebagai contoh, persoalan sosial yang menjadi kajian sosiologi antara lain: kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, kenakalan anak-anak remaja, pelanggaran terhadap norma masyarakat, lingkungan hidup, harus disajikan dan dikomunikasikan kepada anak didiknya atau masyarakat secara objektif, dalam arti data yang diungkapkan ini bersifat apa adanya tanpa rekayasa dan bebas dari pendapat pribadi. Para sosiolog hanya menyajikan data berdasarkan bukti-bukti empiris. Mereka tidak memihak kepada siapapun kecuali hanya berpihak pada kebenaran faktual.

Di luar profesi yang telah disebutkan di atas, masih adakah peluang lain yang bisa diisi oleh para sosiolog? Jawabannya adalah masih, dan bahkan boleh dibilang masih sangat banyak. Misalnya di bidang jurnalistik, jajaran birokrasi, perusahaan atau sektor industri. Karir atau pekerjaan apa pun yang dimasuki sosiolog, niscaya akan bisa dilalui dan dikerjakan dengan sukses karena ilmu yang dipelajari akan sangat membantu mereka untuk memahami peran yang bermacam-macam dengan wawasan yang lebih luas. Persoalannya sekarang tinggal bagaimana para sosiolog terus berusaha meningkatkan kualitasnya dan berusaha memnuhi tuntutan perkembangan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

F. Perspektif dalam Sosiologi

Untuk menelaah sesuatu, kita harus mulai dengan membuat beberapa asumsi tentang sifat-sifat yang akan kita pelajari. Demikian pula dalam mengkaji sosiologi. Perspektif sosiologi adalah asumsi kerja dari sifat-sifat objek kajian sosiologi. Menurut Horton & Hunt (1987) perspektif kadang-kadang disebut asumsi kerja, pendekatan atau paradigma. Sementara, paradigma menurut Ritzer (1985) adalah pandangan yang

mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Jadi, paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasi informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Dari rumusan di atas, terkandung pengertian bahwa dalam satu paradigma tertentu terdapat kesamaan pandangan tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari cabang ilmu itu serta kesamaan metode serta instrument yang digunakan sebagai peralatan analisis. Sebaliknya, dalam satu cabang ilmu pengetahuan nampaknya dimungkinkan terdapatnya beberapa paradigma. Artinya, dimungkinkan terdapatnya beberapa komunitas ilmuwan yang masing-masing berbeda titik tolak pandangannya tentang apa yang (menurutnya) menjadi pokok persoalan yang mestinya dipelajari dan diselidiki oleh cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Menurut Horton & Hunt (1987), dalam sosiologi terdapat beberapa perspektif, yaitu: (1) Perspektif Evolusionis, (2) Perspektif Interaksionis, (3) Perspektif Fungsionalis, dan (4) Perspektif Konflik.

1. Perspektif Evolusionis. Perspektif evolusionis adalah perspektif teoretis yang paling awal dalam sosiologi. Teori ini didasarkan pada karya Comte (1798-1857) dan Spencer (1820-1903). Sosiologi memusatkan perhatiannya pada pola-pola perubahan dan perkembangan yang muncul di dalam masyarakat. Masyarakat adalah realitas sosial yang dinamis, di mana sifat dinamis tersebut ditunjukkan dalam berbagai gejala perubahan, baik perubahan sosial maupun budaya. Berdasarkan dari sifat dinamis masyarakat tersebut, maka tidak ada satu pun kehidupan sosial yang tidak mengalami perubahan, sebab perubahan merupakan gejala yang serba

hadir dalam setiap kehidupan sosial. Perubahan dalam objek kajian sosiologi, selain mengarah pada perubahan yang lebih baik (linier), tetapi juga mengarah pada titik kehancuran, seperti hancurnya peradaban Yunani, Kerajaan Majapahit, dan sebagainya. Dengan kata lain, perubahan itu sendiri akan menghasilkan pola-pola kehidupan yang berbentuk integrasi sosial dan konflik sosial.

2. Perspektif Interaksionis. Perspektif ini tidak menyarankan teori-teori besar tentang masyarakat, karena istilah masyarakat, Negara, dan lembaga masyarakat adalah abstraksi konseptual saja, sedangkan yang dapat ditelaah secara langsung hanyalah orang-orang dan interaksinya saja. Para ahli interaksi simbolik, seperti Mead (1863-1931) dan Cooley (1846-1929) memusatkan perhatiannya terhadap interaksi antara individu dan kelompok. Mereka menemukan bahwa orang-orang berinteraksi terutama dengan menggunakan simbol-simbol yang mencakup tanda, isyarat dan yang paling penting melalui kata-kata tertulis dan lisan. Suatu kata baru akan memiliki makna bila orang sepakat bahwa bunyi tersebut mengandung suatu arti khusus. Kata-kata seperti ya, tidak, pergi, datang dan sebagainya, adalah simbol-simbol karena melekatnya suatu arti pada setiap kata tersebut. Demikian juga, orang-orang dapat bereaksi terhadap makna yang mereka hubungkan dengan benda-benda dan kejadian-kejadian sekitar mereka. Contoh, lampu lalu lintas, antrian pada loket karcis, peluit seorang polisi, peluit seorang wasit sepak bola, seorang laki-laki mendekat dan mengulurkan tangan kanannya, seorang laki-laki mendekat dan tangan mengepal, dan sebagainya. Semua itu merupakan simbol-simbol karena melekatnya suatu arti pada setiap kalimat tersebut. Perspektif interaksionis simbolis memusatkan perhatiannya pada suatu makna atau arti. Jadi, sosiologi memusatkan perhatiannya pada interaksi sosial, sebab interaksi sosial merupakan salah satu gejala

sosial yang selalu mewarnai kehidupan masyarakat sebagai wujud dari sifat manusia sebagai makhluk sosial, yang selalu berhubungan dengan manusia lain. Interaksi dalam konsep sosiologi adalah hubungan manusia dengan manusia di dalam kehidupan sosial. Pola-pola hubungan tersebut akan menghasilkan produk interaksi, yaitu nilai-nilai dan norma yang dijadikan sebagai pedoman dalam pergaulan sosial.

3. Perspektif Fungsionalis. Dalam perspektif ini, masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerjasama secara terorganisir atau teratur berdasarkan seperangkat peraturan dan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil dengan suatu kecenderungan ke arah keseimbangan. Sosiologi memandang masyarakat sebagai objek kajian sosiologi sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi dan memiliki seperangkat aturan dan nilai yang dianut masyarakat. Dengan demikian, di dalam masyarakat tidak ada satu pun unsur sosial yang mampu berdiri sendiri, tetapi unsur sosial dan lainnya saling memiliki hubungan ketergantungan. Para ahli terkemuka fungsionalis, seperti Parsons (1937), Davis (1937) dan Merton (1957), mengatakan bahwa setiap kelompok atau lembaga (misalnya sekolah, perguruan tinggi, kantor dinas) melaksanakan tugas dan terus menerus, karena hal itu fungsional. Sekolah misalnya, dikatakan fungsional, karena mendidik anak-anak, mengambil tanggung jawab orang tua murid. Demikian juga, perguruan tinggi mempersiapkan calon-calon pegawai. Jadi, sekolah atau perguruan tinggi menjadi fungsional atau disfungsional, dilihat bermanfaat atau tidak bermanfaat untuk masyarakat. Demikian juga, dalam suatu Negara demokratis, partai politik adalah fungsional. Sebaliknya, pemboman, pembunuhan, terorisme, konflik adalah gangguan fungsional, berarti disfungsional. Singkatnya, perspektif fungsionalis memusatkan perhatiannya pada masyarakat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerjasama secara terorganisasi

dan teratur. Kelompok atau lembaga adalah fungsional, apabila kelompok atau lembaga tersebut dalam prakteknya membantu untuk memenuhi kebutuhan suatu masyarakat atau bermanfaat bagi masyarakat.

4. Perspektif Konflik. Perspektif konflik secara luas terutama didasarkan pada karya Marx (1818-1883), yang melihat pertentangan dan eksploitasi kelas sebagai penggerak utama kekuatan-kekuatan dalam sejarah. Perspektif konflik ini, untuk jangka waktu yang lama diabaikan oleh para sosiolog, tetapi kemudian dibangkitkan kembali oleh Mills (1956), Coser (1956), Dahrendorf (1959), Collins (1975), dan ahli lainnya. Para teoretisi konflik melihat masyarakat sebagai berada dalam konflik yang terus menerus di antara kelompok dan kelas. Marx, memusatkan perhatiannya pada pertentangan antara kelas untuk pemilikan atas kekayaan yang produktif, sedangkan para teoretisi konflik modern berpandangan sedikit lebih sempit. Mereka melihat perjuangan meraih kekuasaan dan penghasilan sebagai suatu proses yang berkesinambungan, terkecuali satu hal, di mana orang-orang muncul sebagai penentang. Sosiologi memandang pertentangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dari produk interaksi itu sendiri. Dalam pandangan sosiologi, masyarakat selain dipandang hal yang stabil, kerjasama, saling memiliki hubungan ketergantungan, keseimbangan yang serasi, konsensus, dan lainnya, juga merupakan arena konflik. Artinya, dalam setiap kehidupan sosial akan terdapat perselisihan dan pertikaian yang disebabkan oleh banyaknya keanekaragaman sosial. Namun dipihak lain, terdapat juga kerjasama atau integrasi yang tidak kalah pentingnya di dalam mengisi setiap gerak kehidupan sosial itu sendiri. Dengan demikian, konflik dan integrasi merupakan gejala yang selalu hadir dalam setiap kehidupan masyarakat.

G. Metode dalam Sosiologi

Objek kajian sosiologi dan ilmu-ilmu sosial pada umumnya adalah gejala-gejala sosial (*social phenomena*) atau kenyataan-kenyataan sosial (*social fact*). Di sini manusia tidak dilihat sebagai kenyataan fisik atau biologis, tetapi manusia dilihat sebagai makhluk sosial (*social being*). Manusia sebagai makhluk sosial, ia senantiasa terkait sebagai warga dari suatu lingkungan sosial; menjadi bagian yang tak terpisahkan dari konteks sosial di mana ia hidup. Gejala sosial atau kenyataan sosial, seperti kemiskinan, kenakalan anak-anak remaja, kejahatan, kedisiplinan, konflik, gotong royong, penerimaan atau penolakan terhadap hal-hal baru, dan sebagainya, baru dipahami apabila diketahui peta hubungan yang saling berjalanan dalam konteks sosial, di mana gejala sosial atau kenyataan sosial tersebut terjadi. Salah satu cara yang dapat dilakukan melalui penelitian sosial (sosiologi) yaitu suatu penyelidikan yang sistematis dan metodis atas suatu masalah sosial dengan maksud menemukan solusi atas masalah tersebut dan menambah khasanah pengetahuan sosial. Untuk kepentingan itu, sosiologi mempunyai cara kerja atau metode yang juga dipergunakan oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Pada dasarnya terdapat dua jenis cara kerja atau metode, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif.

Metode kuantitatif dapat dikonstruksi sebagai strategi penelitian yang menekankan kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data dengan pendekatan deduktif untuk hubungan antara teori dan penelitian dengan penempatan pengujian teori. Jadi, metode kuantitatif merupakan sebuah penyelidikan masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Sebaliknya, metode kualitatif dapat dikonstruksi sebagai suatu strategi penelitian yang biasanya menekankan kata-kata daripada kuantifikasi

dalam pengumpulan dan analisis data, menekankan pendekatan induktif untuk hubungan antara teori dan penelitian, yang tekanannya pada penempatan penemuan teori. Jadi, metode kualitatif merupakan sebuah penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah (Silalahi, 2006).

Menurut Soekanto (2017), di dalam metode kualitatif termasuk di dalamnya ada metode historis, metode komparatif dan metode studi kasus. Metode historis adalah usaha untuk mempelajari dan menggali fakta-fakta dan menyusun kesimpulan mengenai peristiwa-peristiwa masa lampau. Dalam penelitian ini, peneliti dituntut menemukan fakta, menilai dan menafsirkan fakta yang diperoleh secara sistematis, objektif untuk memahami masa lampau. Temuan masa lampau tersebut dapat dijadikan bahan untuk masa sekarang dan meramalkan peristiwa yang akan datang. Metode historis, di samping digunakan dalam penelitian sejarah dan purbakala, bisa juga dalam penelitian sosiologi, seperti masyarakat, kelompok, konflik sosial, perubahan sosial, masalah sosial. Ada dua sumber yang bisa digunakan dalam metode historis, yakni sumber primer (utama) dan sumber sekunder (kedua). Sumber utama, antara lain dokumen, peninggalan langsung dari peristiwa dan catatan saksi mata. Misalnya, notulen rapat, rekaman kejadian, saksi mata, dan lain-lain. Sumber kedua adalah sumber dari tangan kedua, seperti buku-buku, artikel, hasil penelitian, ensiklopedia, dan lain-lain. Peneliti, biasanya berusaha keras untuk mendapatkan sumber utama agar hasil penelitiannya bisa lebih dapat dipercaya. Baik dalam sumber pertama maupun sumber kedua, peneliti dituntut untuk menilai fakta dan memberi interpretasi atas dasar pemikiran yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, peneliti harus mempunyai latar belakang pengetahuan yang relevan dengan

masalah yang ditelitinya. Namun harus dijaga bahwa dalam memberikan penilaian dan interpretasi tetap berpegang kepada fakta dan makna yang ada di dalamnya, bukan kepada pandangan si peneliti itu sendiri.

Metode komparatif, ingin mencari jawaban secara mendasar sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Contoh, perbandingan antara bermacam-macam masyarakat beserta bidang-bidangnya untuk memperoleh perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan dan sebabnya. Persamaan dan persamaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang perilaku masyarakat, misalnya perilaku masyarakat masa silam dan masa sekarang, juga untuk mengenali masyarakat yang mempunyai tingkat peradaban yang berbeda atau yang sama. Contoh lain, penghidupan masyarakat kota dan desa, dengan membandingkan pengaruh sebab akibat dari makanan, rekreasi, waktu kerja, ketenangan kerja, dan sebagainya. Metode komparatif ini bersifat *ex post facto*. Artinya, data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan selesai. Peneliti dapat melihat akibat dari suatu fenomena dan menguji hubungan sebab akibat dari data yang tersedia.

Metode studi kasus, pada dasarnya mempelajari secara intensif seseorang individu yang dipandang mengalami suatu kasus tertentu. Dalam sosiologi, misalnya kenakalan anak-anak remaja, dan lain-lain. Terhadap kasus tersebut, peneliti mempelajarinya secara mendalam dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Mendalam, artinya mengungkapkan semua variabel yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut dari berbagai aspek yang mempengaruhi dirinya. Tekanan utama dalam studi kasus adalah mengapa individu melakukan apa yang ia lakukan dan bagaimana tingkah lakunya dalam kondisi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Untuk mengungkapkan persoalan itu, peneliti perlu mencari data yang berkenaan dengan pengalaman

individu tersebut pada masa lalu, sekarang, lingkungan yang membentuknya, dan kaitan variabel-variabel yang berkenaan dengan kasusnya. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti orang tuanya, teman dekatnya, guru, bahkan dari dirinya. Teknik memperoleh data sangat komprehensif, seperti observasi perilakunya, wawancara, analisis dokumenter, tes, dan lain-lain bergantung pada kasus yang dipelajari. Setiap data dicatat secara cermat, kemudian dikaji, dihubungkan satu sama lain, bila perlu dibahas dengan peneliti lain sebelum menarik kesimpulan-kesimpulan. Kelebihan metode studi kasus dari metode lainnya adalah, bahwa peneliti dapat mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh. Namun, kelemahannya, informasi yang diperoleh sifatnya kasus, artinya hanya untuk kasus yang bersangkutan dan belum tentu dapat digunakan untuk kasus yang sama pada tempat yang berbeda. Dengan demikian, generalisasi informasi pada studi kasus sangat terbatas penggunaannya. Metode studi kasus bukan untuk menguji hipotesis, namun sebaliknya hasil studi kasus dapat menghasilkan hipotesis yang dapat diuji melalui penelitian lebih lanjut.

H. Bidang Sosiologi

Dalam ilmu pengetahuan, apabila teori-teori dalam ilmu pengetahuan tersebut meningkat semakin dalam dan tinggi, maka akan timbul spesialisasi-spesialisasi ilmu pengetahuan. Demikian pula dalam sosiologi, tampak kecenderungan bahwa ilmu tersebut dalam mempelajari berbagai persoalan sosiologis dewasa ini dipusatkan pada masalah-masalah khusus, seperti politik, agama, hukum, pendidikan, keluarga, dan akhir-akhir ini juga pada ekonomi, terutama ekonomi pembangunan. Juga, telah diketahui luas, sosiologi dalam pelaksanaan penelitian saling mengambil hasil-hasil penyelidikan ilmu-ilmu sosial lainnya, sehingga erat hubungannya antara ilmu sosial yang satu dengan yang lainnya. Pada akhirnya, tumbuh ilmu-ilmu pengetahuan yang merupakan rangkaian antara sosiologi dan ilmu-ilmu sosial

lain tersebut, seperti sosiologi politik, sosiologi hukum, sosiologi ekonomi, sosiologi agama, sosiologi pendidikan, sosiologi keluarga, dan sebagainya, yang dapat dianggap sebagai ilmu-ilmu pengetahuan bagian dari sosiologi.

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh akan disebutkan cabang-cabang dan bagian-bagian sosiologi menurut pendapat para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Roucek dan Warten (Soekanto, 2017) yaitu:
 - 1) *Social organization (community, social stratification, institution, social structure, industrial, occupations, military, comparative, primitive);*
 - 2) *Social Disorganization (criminology, juvenile delinquency, drug addiction, prostitution, alcoholism, proverty and dependency);*
 - 3) *Social Change (social control, social process, social movements, technological changes, social mobility);*
 - 4) *Interpersonal relations (group dynamic, small group analysis, leadership, sociometry, socialization);*
 - 5) *Public Opinion and Community (public opinion measurement, propaganda analysis, market research, mass communications, attitude studies, morale studies);*
 - 6) *Applied sociology (penology and corrections, regional and community planning, marriage and family counseling, human relations in industry, personal selection and training, housing, social legislation, health and welfare, problems of the aged, recreation, sociodrama and psychodrama, youth and child welfare);*
 - 7) *Area Studies (Latin America, Eastern Europe and USSR, Central Europe, Near East, Far East, Southeast Asia, Underdeveloped Areas);*
 - 8) *Intergroup relations (race and ethnic, labor management, international, religions);*
 - 9) *Population (vital statistics, international migration, labor force, population characteristics);*

- 10) *Family (marriage and marital relations, parent-child relations, child development, consumer problems);*
 - 11) *Rural urban (rural, urban, community analysis, human ecology, regional studies);*
 - 12) *Social Psychology (personality development, personality and culture, social psychiatry, mental health, collective behavior);*
 - 13) *Research Methodology (social statistics, survey methods, experimental design, research administration, test and measurement, case study and life history);*
 - 14) *Theory (systematic, comparative, history of theory, social thought);*
 - 15) *Interdisciplinary specialities (Educational Sociology, Political Sociology, Sociology of Religion, Sociology of Law, Sociologi of Knowledge, Sociology of Science, Sociology of war, Sociology of Art and Literature, Sociology of Medicine);*
 - 16) *General Sociology (Eastern Europe and USSR, Central Europe, Near East, Far East, Southeast Asia, Underdevelop Areas).*
2. Menurut Merton (Soedjono, 1985), beberapa ilmu-ilmu pengetahuan bagian dari sosiologi sebagai berikut:
 - 1) *Political Sociology;*
 - 2) *The Sociology of Law;*
 - 3) *The Sociology of Education;*
 - 4) *The Sociology of religion;*
 - 5) *The Sociology of The family;*
 - 6) *The Sociology of Art;*
 - 7) *The Sociology of Science;*
 - 8) *The Sociology of Medicine;*
 - 9) *The Sociology of Economic.*
 3. Menurut Horton & Hunt (1987), sosiologi dibagi dalam berbagai bidang khusus, yaitu:

- 1) Sosiologi terapan;
- 2) Perilaku Kelompok (Kolektif);
- 3) Masyarakat (komunitas);
- 4) Sosiologi Komparatif;
- 5) Kejahatan dan Kenakalan;
- 6) Sosiologi Budaya;
- 7) Demografi;
- 8) Perilaku Menyimpang;
- 9) Organisasi Formal dan Kompleks;
- 10) Ekologi Manusia;
- 11) Sosiologi Industri;
- 12) Hukum dan Masyarakat;
- 13) Waktu luang, Olah raga, rekreasi dan Kesenian;
- 14) Perkawinan dan Keluarga;
- 15) Sosiologi Matematis;
- 16) Sosiologi Kesehatan;
- 17) Metodologi dan Statistika;
- 18) Sosiologi Militer;
- 19) Sosiologi politik;
- 20) Hubungan Ras dan Suku Bangsa;
- 21) Sosiologi Perdesaan;
- 22) Perubahan Sosial;
- 23) Kontrol Sosial;
- 24) Organisasi sosial;
- 25) Psikologi Sosial;
- 26) Teori Sosiologi;
- 27) Sosiologi pendidikan;
- 28) Sosiologi Ilmu Pengetahuan;
- 29) Sosiologi pekerjaan dan Keahlian;
- 30) Sosiologi Agama;
- 31) Sosiologi Kelompok;
- 32) Stratifikasi dan Mobilitas;
- 33) Sosiologi Perkotaan.

4. Menurut Bouman (1976), deretan terpenting bidang sosiologi adalah:
 - 1) Sosiologi Hukum;
 - 2) Kriminologi;
 - 3) Sosiologi Ekonomi;
 - 4) Aspek-aspek sosial masalah penduduk;
 - 5) Sosiologi Agama;
 - 6) Sosiologi Kesenian;
 - 7) Sosiologi Kebudayaan;
 - 8) Sosiologi Ilmu Pengetahuan.

Dari paparan di atas, nampaknya sosiologi sebagai salah satu dari ilmu-ilmu sosial yang bersifat umum dan mampu menjadi pengikat bagi interdisiplin ilmu-ilmu sosial lainnya. Demikian juga, dengan adanya ilmu-ilmu pengetahuan yang khusus, para ahli diharapkan mempunyai hasrat ingin menyelidiki sedalam-dalamnya hubungan antara seluruh ilmu pengetahuan yang khusus tadi, yang dilakukan dengan penelitian. Pada bab-bab berikutnya akan dibahas bidang-bidang sosiologi secara terbatas.

BAB III

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

A. Perkembangan Sosiologi Pendidikan

Ditinjau dari usianya, lapangan penelitiannya, struktur dan prosesnya, sosiologi pendidikan merupakan disiplin yang masih sangat muda. Munculnya sosiologi pendidikan tidak lepas dari perubahan tatanan sosial kehidupan masyarakat Eropa pada sekitar awal abad ke-20. Perkembangan tersebut merupakan efek dari revolusi sosial di berbagai penjuru wilayah Eropa yang memicu akselerasi perubahan arah perkembangan masyarakat Eropa. Era transisi perubahan sosial tersebut menimbulkan konsekuensi-konsekuensi logis yang tak terduga-duga ke datangnya, antara lain merebaknya keragu-raguan akan nilai dan tatanan normatif yang telah mapan mengalami erosi jika tidak dilakukan penguatan orientasi. Bantuan ilmu sosiologi dengan segala komponen konsepsionalnya mendapat sambutan positif dari kalangan praktisi pendidikan, sebagai wujud alternatif untuk memperkuat ketahanan sosial melalui pendidikan. Manifestasi tersebut ditandai dengan kelahiran sosiologi pendidikan sebagai produk keilmuan baru (Karsidi, 2007).

Lester F. Ward dapat dikatakan sebagai pencetus gagasan timbulnya keilmuan baru yaitu sosiologi pendidikan. Gagasan tersebut muncul dengan idenya tentang evolusi sosial yang realistis dan memimpin perencanaan kehidupan pemerintah (Vembriarto, 1993). Ward, ketika diangkat menjadi Presiden American Sociological Association pada tahun 1883, ia menyampaikan pidato pengukuhan dengan menekankan bahwa sumber utama perbedaan kelas sosial dalam masyarakat Amerika adalah perbedaan dalam memiliki kesempatan,

khususnya kesempatan dalam memperoleh pendidikan. Orang berpendidikan lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk maju dan memiliki kehidupan yang lebih bermutu. Pendidikan dipandang sebagai faktor pembeda antara kelas-kelas sosial yang cukup merisaukan. Untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut, ia mendesak pemerintah agar menyelenggarakan wajib belajar. Usulan itu dikabulkan dan wajib belajar di USA berlangsung 11 tahun, sampai tamat Senior High School (Natawidjaja, et al, 2007).

Dalam berbagai literatur, buah pikiran Ward dijadikan landasan untuk lahirnya *Educational Sociology* sebagai cabang ilmu yang baru dalam sosiologi pada awal abad ke-20. Ia sering dijuluki sebagai bapak Sosiologi Pendidikan. Fokus kajian *Educational Sociology* adalah penggunaan pendidikan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan sosial dan sekaligus memberikan rekomendasi untuk mendukung perkembangan pendidikan itu sendiri. Kelahiran cabang ilmu baru ini mendapat sambutan luas di kalangan Universitas USA. Hal itu terbukti dari adanya 14 Universitas yang menyelenggarakan perkuliahan *Educational Sociology* pada tahun 1914. Selanjutnya, pada tahun 1923 dibentuk organisasi profesional bernama National Society for the study of Educational Sociology dan menerbitkan *journal of educationan Sociology*. Pada tahun 1948, organisasi profesional yang mandiri itu bergabung ke dalam seksi pendidikan dari American Sociological Society (Natawidjaja, et al, 2007).

Pada tahun 1928, Robert Angel mengkritik *Educational Sociology* dan memperkenalkan nama baru yaitu *Sociology of Education* dengan fokus perhatian pada penelitian dan publikasi hasilnya, sehingga *Sociology of Education* bisa menjadi sumber data dan informasi ilmiah serta studi akademis yang bertujuan mengembangkan teori dan ilmu sendiri. Dengan dukungan dana penelitian yang memadai, berhembuslah angin segar dan menarik para sosiolog untuk melakukan penelitian dalam

bidang pendidikan. Dengan demikian, maka nama *Educational Sociology* diubah namanya menjadi *Sociology of Education* dan *journal of Educational Sociology* menjadi *journal of the Sociological of Education*. Kemudian, Seksi *Educational Sociology* dalam American Sociological Society pun berubah menjadi seksi *Sociology of education* yang berlaku sampai sekarang (Anwar & Adang, 2017).

Beberapa tokoh penting yang dipandang berjasa dalam meletakkan fondasi sosiologi pendidikan. Diantaranya Durkheim, Weber dan Menheim.

1. Durkheim (1858-1917). Pandangan Durkheim terhadap pendidikan sebagai suatu *social thing* (ikhtiar sosial). Atas dasar pandangan ini, ia mengatakan bahwa pendidikan itu bukanlah hanya satu bentuk, baik dalam arti ideal maupun aktualnya, tetapi bermacam-macam. Keragaman bentuk dimaksud sebenarnya mengikuti banyaknya perbedaan lingkungan di masyarakat sendiri. Durkheim mengatakan bahwa pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kesadaran diri sendiri dan kesadaran sosial menjadi suatu panduan stabil, disiplin dan utuh serta bermakna. Dalam konteksantisipasi terhadap arus deras transformasi yang berlangsung dalam perkembangan masyarakat modern, ia menegaskan bahwa pendidikan harus melakukan perubahan dan penyesuaian. Untuk itu, para pelaku pendidikan harus memandang penting pendekatan sosiologis.
2. Weber (1864-1920). Weber memandang pendidikan di masyarakat, selain sebagai alat transfer keahlian teknis, tetapi juga sebagai suatu bagian dalam proses mempengaruhi manusia. Terlebih lagi jika pendidikan dihadapkan kepada kecenderungan perkembangan masyarakat yang sangat beragam sesuai dengan tahap pertumbuhannya. Menurut Weber, keadaan dan peran pendidikan pada masyarakat pra industri jauh berbeda dengan masyarakat modern dewasa

ini. Pendidikan pada masyarakat pra industri menempatkan orang pada status sosial tertentu, sedangkan pada masyarakat maju justru merupakan alat untuk mobilitas sosial vertikal. Weber menegaskan, penggunaan pendekatan sosiologis terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan tidak saja dapat membawa nilai positif di dalam perumusan tujuan pendidikan, akan tetapi dapat pula membantu pada pengembangan konten dan metodologi.

3. Menheim (1893-1947). Menheim memandang bahwa pendidikan sebagai salah satu elemen dinamis dalam sosiologi. Dalam statemennya, ia menyatakan bahwa ahli sosiologi tidak memandang pendidikan semata-mata sebagai alat merealisasikan cita-cita abstrak suatu kebudayaan atau sebagai alat transfer keahlian teknis, akan tetapi sebagai suatu bagian dalam proses mempengaruhi manusia. Terlebih lagi, jika pendidikan dihadapkan kepada kecenderungan perkembangan masyarakat yang sangat beragam sesuai dengan tahap pertumbuhannya.

Pelopor sosiologi pendidikan dalam arti formal ialah John Dewey (1859-1952). Tahun 1889, ia telah menerbitkan buku *School and Society*. Dalam buku tersebut dijelaskan pendapatnya mengenai hubungan antara pendidikan dengan struktur masyarakat. Kemudian, sosiologi pendidikan dikuliahkan pertama kali oleh Henry Suzzalo tahun 1910 di teacher College, University Columbia. Pada tahun 1917, terbit *texbooks* sosiologi pendidikan yang pertama kali karya Walter R. Smith dengan judul *Introduction to Education Sociology*. Pada tahun 1916, di University New York dan Columbia didirikan jurusan sosiologi pendidikan. Sementara, di Indonesia, baru pada tahun 1967, sosiologi pendidikan diberikan atau diajarkan pertama kali di IKIP Negeri Yogyakarta jurusan Dikdaktik Kurikulum (Vembriarto, 1993; Ahmadi, 2004).

B. Pengertian Sosiologi Pendidikan

Ditinjau dari segi etimologi, istilah sosiologi pendidikan terdiri atas dua perkataan, yaitu sosiologi dan pendidikan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial (Soemardjan & Soemardi, dalam Soekanto, 2017). Sementara pendidikan adalah usaha sadar dan terencana melalui proses pembelajaran agar peserta didik menjadi dewasa. Jadi, sosiologi pendidikan menjadi masalah sentralnya, yaitu aspek-aspek sosiologi ada di dalam pendidikan. Mengapa di dalam pendidikan terdapat aspek-aspek sosiologis?, karena situasi pendidikan adalah situasi hubungan dan pergaulan sosial antar pendidik dengan anak didik, pendidik dengan pendidik, pendidik dengan pegawai, anak didik dengan anak didik. Hubungan-hubungan dan pergaulan-pergaulan sosial ini merupakan suatu unit keluarga, ialah keluarga sekolah. Dalam keluarga sekolah terdapat hubungan-hubungan dan pergaulan-pergaulan sosial yang timbal balik satu sama lain, saling pengaruh mempengaruhi dan terjadi interaksi sosial. Dengan demikian jelaslah, bahwa di dalam sosiologi pendidikan akan berlaku dan kerjasama antara aspek-aspek sosiologis dan aspek-aspek pendidikan di dalam seluruh proses pendidikan, yang meliputi tujuan, kurikulum, pengorganisasian bahan ajar, metode, media, evaluasi, guru, siswa, kelas, norma, hubungan-hubungan sosial, interaksi sosial, sosialisasi, perubahan sosial, sistem sosial, organisasi sekolah, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Berikut ini definisi sosiologi pendidikan menurut beberapa ahli:

1. F.G. Fairchild, dalam bukunya *Dictionary of Sociology*, Sosiologi Pendidikan ialah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental.
2. S. Nasution, Sosiologi Pendidikan ialah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses

pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik.

3. F. G. Robbins, Sosiologi Pendidikan ialah sosiologi khusus yang bertugas menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan.
4. F. G. Robbins dan Brown, Sosiologi Pendidikan ialah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasikan pengalaman. Sosiologi pendidikan mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya.
5. E. G. Payne, Sosiologi Pendidikan ialah studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu sosiologi yang diterapkan.
6. Elwood, sosiologi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari proses belajar dan mempelajari antara orang yang satu dan orang lain.
7. Ary H. Gunawan, sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis atau pendekatan sosiologis (Ahmadi, 2004; Elly & Usman, 2011; Rifai, 2011).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik struktur, hubungan-hubungan sosial, dinamika proses pendidikan, ataupun aspek-aspek lainnya melalui analisis atau pendekatan sosiologis.

C. Peranan Sosiologi Pendidikan

Sosiologi pendidikan memegang peranan atau manfaat penting dalam mempelajari masalah-masalah pendidikan melalui analisis atau pendekatan sosiologis. Menurut Nasution (1999), ada beberapa konsep tentang peranan sosiologi pendidikan, antara lain sebagai berikut: (1) Analisis proses sosiologi, (2) Analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat, (3) Analisis

interaksi sosial di sekolah dan antar sekolah dengan masyarakat, (4) Alat kemajuan dan perkembangan sosial, (5) Dasar untuk menentukan tujuan pendidikan, (6) Sosiologi terapan, dan (7) Latihan bagi petugas pendidikan. Menurut Payne, sosiologi pendidikan mempunyai peranan untuk memberi kepada guru-guru (termasuk para peneliti dan siapa pun yang terkait dalam bidang pendidikan) latihan-latihan yang efektif dalam bidang sosiologi sehingga dapat memberikan sumbangannya secara cepat dan tepat kepada masalah pendidikan. Menurut pendapatnya, sosiologi pendidikan tidak hanya berkenaan dengan proses belajar dan sosialisasi yang terkait dengan sosiologi saja, tetapi juga segala sesuatu dalam bidang pendidikan yang dapat dianalisis sosiologi. Seperti sosiologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan teknik mengajar yaitu metode sosiodrama, bermain peranan (*role playing*) dan sebagainya. Dengan demikian, sosiologi pendidikan bermanfaat besar bagi para pendidik, selain berharga untuk menganalisis pendidikan, juga bermanfaat untuk memahami hubungan antara manusia di sekolah dan di masyarakat. Sosiologi pendidikan tidak hanya mempelajari masalah-masalah sosial dalam pendidikan saja, melainkan juga hal-hal pokok lain, seperti tujuan pendidikan, bahan ajar, kurikulum, strategi belajar, evaluasi, sarana belajar, dan sebagainya. Sosiologi pendidikan adalah analisis ilmiah atas proses sosial dan pola-pola sosial yang terdapat dalam sistem pendidikan (Anwar & Adang, 2017).

Peranan di atas menunjukkan bahwa sosiologi pendidikan dapat dijadikan instrumen oleh para guru atau pendidik dan siapa pun yang terakit dalam bidang pendidikan untuk dapat berinteraksi dan dikomunikasikan kepada masyarakat. Dengan kata lain, sosiologi pendidikan dapat memberikan penjelasan yang relevan dengan kondisi kekinian masyarakat, sehingga setiap individu sebagai anggota masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan berbagai fenomena yang muncul dalam

masyarakat. Peranan sosiologi pendidikan pada dasarnya untuk mempercepat dan meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Sosiologi pendidikan tidak akan keluar dari upaya-upaya agar pencapaian tujuan dan fungsi pendidikan tercapai menurut pendidikan itu sendiri.

Jika belum cukup jelas tentang peranan sosiologi pendidikan, mari kita kemukakan peranan sosiologi pendidikan yang lebih rinci menurut Gunawan (2000), sebagai berikut:

1. Menganalisis proses sosialisasi anak, baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dalam hal ini harus diperhatikan pengaruh lingkungan dan kebudayaan masyarakat terhadap perkembangan pribadi anak. Misalnya, anak yang terdidik dengan baik dalam keluarga yang religious, setelah dewasa/tua akan cenderung menjadi manusia yang religious pula. Anak yang terdidik dalam keluarga intelektual akan cenderung memilih/mengutamakan jalur intelektual pula, dan sebagainya.
2. Menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Banyak orang/pakar yang beranggapan bahwa pendidikan memberikan kemungkinan besar bagi kemajuan masyarakat, karena dengan memiliki ijazah yang semakin tinggi akan lebih mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi pula (serta penghasilan yang lebih banyak pula, guna menambah kesejahteraan sosial). Di samping itu, dengan pengetahuan dan ketrampilan yang banyak dapat mengembangkan aktivitas serta kreativitas sosial.
3. Menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Berdirinya suatu lembaga pendidikan dalam masyarakat sering disesuaikan dengan tingkatan daerah di mana lembaga pendidikan itu berada. Misalnya, perguruan tinggi bisa didirikan di tingkat propinsi atau minimal kabupaten yang cukup animo mahasiswanya serta tersedianya dosen yang bonafid. TK dan SD bisa berdiri di tingkat desa atau

kelurahan, sedangkan SMP/SMA bisa didirikan di tingkat kecamatan atau kabupaten.

4. Membantu menentukan tujuan pendidikan. Sejumlah pakar berpendapat bahwa tujuan pendidikan nasional harus bertolak dan dapat dikembalikan kepada falsafat hidup bangsa. Seperti di Indonesia, Pancasila sebagai filsafat hidup dan kepribadian bangsa Indonesia harus menjadi dasar untuk menentukan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan lainnya. Dinamika tujuan pendidikan nasional terletak pada keterkaitan dengan (dulu GBHN, yang setiap 5 tahun sekali ditetapkan dalam Sidang Umum MPR), sekarang RPJPN, dan disesuaikan dengan era pembangunan yang ditempuh serta kebutuhan masyarakat.

D. Objek Kajian Sosiologi Pendidikan

Menurut Brookover (1977) objek kajian sosiologi pendidikan dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain, yang meliputi:
 - a. Hubungan antara sistem pendidikan dengan proses sosial dan perubahan kebudayaan;
 - b. Fungsi sistem pendidikan formal di dalam proses pembaharuan sosial;
 - c. Hubungan antara sistem pendidikan di dalam proses pengendalian sosial;
 - d. Hubungan sistem pendidikan dengan publik opini;
 - e. Hubungan antara pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status;
 - f. Keberartian pendidikan sebagai simbol terpercaya di dalam kebudayaan demokratis.
2. Hubungan sekolah dengan komuniti sekitarnya, meliputi:
 - a. Analisis terhadap struktur kekuasaan di masyarakat beserta implikasinya terhadap sekolah;

- b. Analisis terhadap hubungan antara sistem sekolah dengan sistem-sistem sosial lainnya di masyarakat;
 - c. Struktur masyarakat beserta pengaruhnya terhadap organisasi sekolah.
3. Hubungan antar manusia dalam sistem persekolahan, meliputi:
 - a. Ciri budaya sekolah, terutama yang jelas-jelas berbeda dengan budaya di luar sekolah;
 - b. Ciri pola stratifikasi di dalam persekolahan;
 - c. Hubungan antara guru dengan murid;
 - d. Analisis terhadap klik dan struktur kelompok kekeluargaan di dalam sistem persekolahan;
 - e. Ciri pola kepemimpinan struktur kekuasaan di dalam bermacam-macam sekolah.
 4. Pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik, meliputi:
 - a. Peranan sosial guru;
 - b. Ciri kepribadian guru;
 - c. Dampak kepribadian guru terhadap perilaku anak didik;
 - d. Peranan sekolah di dalam pertumbuhan, penyesuaian atau penyimpangan anak didik;
 - e. Ciri-ciri perilaku yang timbul karena tingkat keotoriteran dan kedemokrasian di lingkungan sekolah.

Nasution (1983), yang juga sebagai pakar pendidikan, mengemukakan bahwa objek kajian Sosiologi pendidikan meliputi pokok-pokok sebagai berikut:

1. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat, meliputi:
 - a. Fungsi pendidikan dalam kebudayaan.
 - b. Hubungan antara sistem pendidikan dengan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan.
 - c. Fungsi sistem pendidikan dalam proses perubahan sosial dan kultural, atau usaha mempertahankan status quo.

- d. Hubungan pendidikan dengan sistem tingkat/status sosial.
 - e. Fungsi sistem pendidikan formal bertalian dengan kelompok rasial, kultural, dan sebagainya.
2. Hubungan antara manusia dalam sekolah (analisis struktural sosial di sekolah), antara lain:
- a. Hakekat kebudayaan sekolah, sejauh ada perbedaannya dengan kebudayaan di luar sekolah;
 - b. Pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah, yang antara lain meliputi berbagai hubungan antara berbagai unsur di sekolah, kepemimpinan dan hubungan kekuasaan, stratifikasi sosial dan pola interaksi informal, seperti terdapat dalam klik serta kelompok-kelompok murid lainnya;
3. Pengaruh sekolah terhadap kelakuan dan kepribadian semua pihak di sekolah. Selain perkembangan pribadi anak, juga kepribadian guru merupakan pokok perhatiannya, seperti:
- a. Peranan sosial guru-guru;
 - b. Hakekat kepribadian guru;
 - c. Pengaruh kepribadian guru terhadap kelakuan anak;
 - d. Fungsi sekolah dalam sosialisasi murid.
4. Sekolah dalam masyarakat. Menganalisis pola-pola interaksi antara sekolah dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dalam masyarakat di sekitar sekolah, antara lain:
- a. Pengaruh masyarakat atas organisasi sekolah;
 - b. Analisis proses pendidik yang terdapat dalam sistem-sistem sosial dalam masyarakat luar sekolah;
 - a. Hubungan antara sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan;
 - b. Faktor-faktor demografis dan ekologi dalam masyarakat yang bertalian dengan organisasi sekolah, yang perlu untuk memahami sistem pendidikan dalam masyarakat serta integrasinya di dalam keseluruhan kehidupan masyarakat.

BAB IV

SOSIOLOGI KELUARGA

A. Perkembangan Sosiologi Keluarga

Menelusuri perkembangan sosiologi keluarga sebagai suatu disiplin ilmu bukanlah pekerjaan mudah. Literatur atau bahan bacaan yang komprehensif untuk dijadikan rujukan sangat terbatas. Untuk itulah, menelusuri perkembangan sosiologi keluarga sebagai acuan pokoknya menggunakan buku Goode (1991) tentang Sosiologi keluarga serta Suhendi dan Wahyu (2001) tentang Pengantar Studi Sosiologi Keluarga dan bahan bacaan lainnya seperti yang diuraikan di bawah ini.

Di dalam masyarakat senantiasa ditemukan adanya satuan-satuan sosial. Setiap satuan sosial memiliki bentuk dan sifatnya masing-masing. Salah satu satuan sosial tersebut adalah berupa kelompok primer atau kelompok utama, yang umumnya dikenal dengan keluarga. Keluarga disebut kelompok utama karena mereka adalah satuan sosial paling kecil yang membentuk satuan sosial yang lebih besar yaitu masyarakat. Oleh karena itu, keluarga dan masyarakat memiliki ikatan kehidupan bersama, dan bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada masyarakat tanpa kehadiran keluarga di dalamnya (Soemanto, 2014).

Sosiologi keluarga berusaha mempelajari komunitas keluarga secara ilmiah. Fokus sosiologi keluarga adalah kehidupan keluarga dan hasil interaksi sosial dari kehidupannya itu. Secara umum, keluarga adalah sebuah organisasi yang terdiri dari unsur-unsur, seperti orang tua (ayah, ibu) dan anak-anak. Dalam kehidupan rutin atau sehari-harinya, ayah, ibu dan anak-anak memiliki hubungan yang bersifat dinamis di antara satu dengan lainnya. Status dan peranan ayah, ibu dan anak berbeda, namun

dalam kehidupan sehari-hari, mereka saling membutuhkan. Kalau ditelusuri lebih jauh, di dalam keluarga itu ada berbagai elemen-elemen sosial, misalnya norma, nilai, status dan peranan. Elemen-elemen tersebut menjadi pengikat dan sekaligus pemelihara keteraturan di dalam keluarga. Durkheim (Soemanto, 2014), mengemukakan cara pandang dalam memahami keluarga secara fungsional. Ia berpendapat, bahwa kehidupan normal keluarga-keluarga di masyarakat dapat kita lihat dari hubungan-hubungan fungsional menurut peran ayah, ibu dan anak. Sejauh mana peranan-peranan dan hubungan-hubungan sosial dari unsur-unsur keluarga tersebut berlangsung. Semua ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, dalam mewujudkan tujuan yang dikehendaki.

Sementara Goode (1991), cara pandang memahami keluarga dari segi emosional. Ia berpendapat, bahwa pengertian emosional yang sangat mendalam mengenai hubungan keluarga bagi hampir semua anggota masyarakat yang telah diobservasi sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Para ahli filsafat dan analisis sosial telah melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga, dan bahwa keanehan-keanehan suatu masyarakat tertentu dapat digambarkan dengan menjelaskan hubungan kekeluargaan yang berlangsung di dalamnya. Menurut Goode (1991), karya etika dan moral yang tertua menerangkan bahwa masyarakat kehilangan kekuatannya jika anggotanya gagal dalam melaksanakan tanggungjawab keluarganya. Confusius, umpamanya, berpendapat bahwa kebahagiaan dan kemakmuran akan tetap ada dalam masyarakat jika saja semua orang bertindak benar sebagai anggota keluarga dan menyadari bahwa orang harus mentaati kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Bersamaan dengan itu, banyak tulisan Ibrani kuno, terutama tertuju kepada pentingnya mentaati aturan-aturan keluarga. Demikian juga di India, kesusastaan tertulis yang mula-mula sekali (Rig-veda, pada akhir abad ke 2 SM dan undang-undang Manu, pada permulaan tahun masehi) banyak menaruh perhatian pada keluarga.

Dari masa ke masa, banyak perencana sosial atau ahli filsafat yang berkhayal membangun masyarakat baru-utopia-di mana definisi mengenai peran keluarga diharapkan mampu berfungsi sebagai sarana pemecah masalah sosial yang sudah kronis (Goode, 1991). Karya Plato berjudul Republik, adalah orang pertama yang mendorong pembentukan suatu masyarakat di mana semua orang, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk aktif berperan serta, dan mencapai kedudukan tinggi dalam masyarakat bersandar pada prestasi kerja (Goode, 1991).

Studi tentang keluarga mulai menarik perhatian para sosiolog sejak pertengahan abad 19. Pada masa itu, studi keluarga menekankan pada perkembangan pranata keluarga. Pada saat itu, banyak teori tentang sistem keluarga yang diperkenalkan. Selain itu, pandangan sosiologi keluarga diwarnai oleh pandangan Social Darwinism yang mempunyai dua ciri, yaitu unilinear dan monogami. Unilinear, suatu faham bahwa semua peradaban tumbuh melalui fase perkembangan yang sama menuju era yang sama. Monogami, sistem keluarga akan menuju pada bentuk yang sama. Dua ciri sosial Darwinism terletak pada analisisnya yang senantiasa mempertentangkan dua kutub yang dibentuknya sendiri, yaitu perbedaan antara kaum yang beradab dan primitif, modern dan tradisional serta desa dan kota (Suhendi dan Wahyu, 2001).

Namun, pada paruh pertengahan abad ke-19 dan awal abad 20, studi tentang keluarga beralih tekanan, yaitu pada masalah-masalah sosial yang dikaitkan dengan perubahan keluarga. Tokoh yang terpenting pada abad ini ialah Frederic Le Play (1806-1882). Konsep penting dari Le Play bahwa perubahan keluarga dirumuskan dalam tiga tipe keluarga, yaitu the patriarchal, the unstable or nuclear family, dan the stem family (Nisbet, 1976). Le Play dengan karyanya *Les Ouvrier Europeans* (The Europeans Wokers, 1855) dianggap sebagai tokoh konservatif, karena dia

selalu menentang ide-ide yang terkandung dalam industrialisme dan Revolusi Perancis, seperti demokrasi, sekularisasi, dan teknologi.

Engels sebagai tokoh kedua pada abad ke 19, dalam karyanya *The Origin of Family, Private Property and the State*, dianggap mewakili tokoh radikal yang memiliki kesamaan pandangan dengan Le Play. Konsepnya yang dalam studi perubahan keluarga adalah *privatization of the family* memperlihatkan adanya persamaan dengan pandangan konservatisme. Oleh karena itulah, dua tokoh ini merasa cemas menyaksikan hilangnya kekuasaan dan wibawa keluarga, gereja dan kerukunan hidup. Ia bereaksi sangat keras terhadap gejala yang disebutnya sebagai *atomistic family* (keluarga terpisah) karena desakan teknologi, industrialisasi dan pembagian kerja (Suhendi dan Wahyu, 2001).

Pada abad 20 tokoh-tokoh baru bermunculan, sebut saja misalnya Carla Zimmerman, pendukung pandangan Le Play. Dalam pandangannya, keluarga mengalami beberapa pergeseran. Ia menggunakan *cydical theory* (teori putaran, siklus) dalam mengkaji keluarga. Mula-mula keluarga berada dalam bentuk keluarga perwalian (*trustee family*), keluarga rumah tangga (*domestic family*), dan keluarga terpisah (*atomistic family*). Dalam keluarga perwalian, dominasi Negara atas keluarga masih sangat lemah. Oleh karena itu, keluarga bertanggungjawab untuk mengawasi para anggotanya. Dalam keluarga rumah tangga, fungsi keluarga sebagian besar sudah diambil alih oleh Negara. Keluarga telah berbagi kekuasaan dengan Negara. Itulah sebabnya keluarga yang atomistik kekuasaannya menjadi sangat terbatas karena dominasi Negara semakin kuat. Proses perubahan ini akan terus berlanjut pada setiap fase sejarah yang dimulai pada masa Yunani, Romawi, dan masa sekarang (Suhendi dan Wahyu, 2001).

Zimmerman, kelihatannya cukup berhasil menuangkan berbagai perubahan dalam keluarga melalui pertumbuhan urbanisasi dan industrialisasi. Ia berpendapat, bahwa perubahan

dalam keluarga dipandang ada kaitannya baik langsung atau tidak langsung dengan kehidupan perkotaan dan industrialisasi. Dalam masyarakat perkotaan dan industrialisasi, di mana diperkirakan bahwa setiap orang hidup tanpa ikatan apapun atau tidak dikenal, ternyata sering juga berinteraksi dengan anggota-anggota keluarga lainnya.

Sejak Revolusi Perancis tahun 1789 adalah perubahan mendalam pada hubungan kekeluargaan. Sejak Perang Dunia ke II, pemimpin-pemimpin Negara yang sedang menuju tahap industrialisasi telah mengeluarkan undang-undang baru, jauh sebelum adanya pendapat umum, bertujuan membentuk pola-pola keluarga yang lebih sesuai dengan tuntutan kehidupan kota dan industri (Goode, 1991). Menurut Goode (1991), perubahan-perubahan dalam keluarga diakibatkan oleh industrialisasi dan kehidupan perkotaan. Dengan kata lain, kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam industrialisasi dan kehidupan perkotaan telah menggerogoti pola-pola keluarga. Bahkan, Goode menyebutkan bahwa putusnya hubungan dalam sistem keluarga besar merupakan pengorbanan yang paling mahal yang diberikan oleh keluarga terhadap pertumbuhan industri.

Berdasarkan uraian singkat, terlihat bahwa kajian keluarga secara evolusi mengalami perubahan dan pergeseran antara satu kurun waktu dengan kurun waktu lainnya. Seluruh pemikiran mengenai studi keluarga yang berkembang di Eropa telah meletakkan dasar bagi perkembangan pemikiran selanjutnya. Hal ini memiliki arti penting bagi perkembangan studi sosiologi keluarga ke depan.

B. Pengertian Sosiologi Keluarga

Sebelum kita memahami pengertian sosiologi keluarga, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang pengertian sosiologi dan keluarga. Berikut ini definisi sosiologi yang dikemukakan beberapa ahli (Soemanto, 2014):

1. Piritim Sorokin. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya gejala ekonomi, keluarga dan moral). Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala nonsosial. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain.
2. Roucek dan Warren. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.
3. Selo Sumardjan dan Soelaiman Soemardi. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial.
4. Paul B. Horton. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut.
5. Seorjono Soekanto. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.

Sementara pengertian keluarga yang dikemukakan beberapa ahli:

1. Murdock. Keluarga adalah suatu kelompok sosial yang dicirikan oleh tempat tinggal bersama, kerjasama dari dua jenis kelamin, paling kurang dua darinya atas dasar pernikahan dan satu atau lebih anak yang tinggal bersama mereka melakukan sosialisasi (Abustam, 1992).
2. Ahmadi (2002), keluarga adalah suatu sistem kesatuan yang terdiri dari anggota-anggota yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain.
3. Suparlan (1993), keluarga adalah hubungan antara anggota dijiwai oleh suasana kasih sayang dan rasa tanggungjawab.
4. Kartono (1992), keluarga adalah kelompok sosial yang paling intim, yang diikat oleh relasi seks, cinta, kesetiaan dan

pernikahan, di mana perempuan berfungsi sebagai isteri dan laki-laki berfungsi sebagai suami.

5. Vembriarto (1982), keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang mempunyai hubungan emosi dan tanggungjawab dan memelihara yang menimbulkan motivasi dan bertanggungjawab.

Dari definisi sosiologi dan keluarga di atas, maka dapat dirumuskan pengertian sosiologi keluarga menurut beberapa ahli:

1. Soemanto (2014), sosiologi keluarga adalah ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang mempelajari pembentukan keluarga, hubungan dan pengaruh timbal balik dari aneka macam gejala sosial terkait dengan hubungan antar dan inter manusia dalam kelompok (keluarga), sistem dan kelembagaan sosial dengan individu dan/atau sebaliknya, struktur sosial, proses-proses dan perubahan sosial, tindakan sosial, perilaku sosial serta aspek-aspek kelompok maupun produk kehidupan kelompok.
2. Suhendi dan Wahyu (2001), sosiologi keluarga adalah cabang sosiologi umum yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara anggota keluarga dan keluarga dengan struktur sosial, proses sosial dan perubahan sosial.

Dari dua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi keluarga adalah sebagai bagian dari sosiologi umum yang membahas dan menganalisis fenomena keluarga, dengan bantuan konsep-konsep sosiologi (seperti interaksi, peran, pola hubungan, sistem dan perubahan). Definisi di atas dapat dibedakan dengan sosiologi umum. Sosiologi umum bertugas mempelajari masyarakat dalam pengertian luas, maka sosiologi keluarga bertugas menerangkan masyarakat keluarga secara khusus. Sebagai contoh, interaksi dan komunikasi antar anggota di dalam keluarga; peran-peran sosial, sebagai suami-isteri, ayah-ibu, anak laki-laki-perempuan, saudara laki-laki-perempuan, memelihara adat-istiadat, tatak rama, sopan santun di dalam keluarga.

C. Metode Sosiologi Keluarga

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai metode tertentu yang dipergunakan untuk menyelidiki objeknya. Demikian pula, metode untuk menyelidiki keluarga. Seseorang yang akan mempelajari sosiologi keluarga dengan baik, harus mengetahui pula tata cara kerja atau metode yang dipergunakan sosiologi keluarga dalam menyelidiki gejala sosial yang timbul dalam keluarga.

Secara garis besarnya, metode dalam sosiologi keluarga tidak berbeda dengan metode ilmu-ilmu lainnya:

1. Metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode kerja ilmiah yang mengutamakan bahan atau informasi yang nantinya akan dikaji berdasarkan tingkat kualitas data. Dengan metode ini sukar didapat indikator atau skala pengukuran berdasarkan angka-angka yang sifat eksak (tepat/pasti). Alat yang digunakan dalam metode ini wawancara (*interview*), yaitu metode tanya jawab antara peneliti dan informan. Di samping itu, alat yang digunakan metode observasi partisipasi, yaitu metode penelitian di mana peneliti ikut melibatkan diri dalam kehidupan yang diteliti, tetapi ia tidak mempengaruhi kehidupan yang diteliti.
2. Metode Kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode ilmiah yang menggunakan angka-angka sebagai data ilmiah. Dengan metode ini, gejala-gejala sosial dapat ditelaah melalui angka-angka, skala dan rumusan lain yang sedikit banyak menggunakan statistik. Alat yang digunakan dalam metode ini adalah pertanyaan (*questionary*), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada objek yang dipelajari, dan dalam hal ini adalah responden. Contohnya, penelitian untuk mempelajari hubungan antaranggota keluarga dalam sebuah keluarga.
3. Metode fungsionalis. Metode fungsionalis adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kegunaan lembaga-lembaga kemasyarakatan (keluarga) dan struktur sosial dalam masyarakat (keluarga). Metode ini didasarkan pada asumsi

bahwa unsur-unsur yang membentuk masyarakat (keluarga) mempunyai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, masing-masing mempunyai fungsi tersendiri terhadap masyarakat (keluarga) (Soekanto, 1986).

D. Kegunaan Sosiologi Keluarga

Dilihat dari kegunaannya, sosiologi keluarga memberi kontribusi yang tidak kecil bagi lembaga keluarga. Sosiologi keluarga bermaksud membantu lembaga keluarga dalam mengatasi masalah-masalah atau membina sebuah keluarga. Kegunaan sosiologi keluarga yaitu:

1. Memberikan arahan dalam membentuk maupun membina sebuah keluarga;
2. Memberikan pengetahuan tentang pola-pola interaksi dan komunikasi dalam keluarga, sehingga dapat menciptakan sebuah harmonisasi dan meminimalisir konflik yang terjadi dalam keluarga;
3. Memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai, norma, kebiasaan, sehingga menjadi unsur kebudayaan yang penting dalam sebuah keluarga;
4. Memberikan pengetahuan tentang peranan masing-masing dalam keluarga, seperti misalnya peranan sebagai suami, isteri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, kakak atau adik laki-laki atau perempuan.

E. Objek Kajian Sosiologi Keluarga

Sosiologi keluarga berusaha mempelajari komunitas keluarga secara ilmiah. Keluarga merupakan komunitas primer yang penting dalam masyarakat. Komunitas primer artinya suatu kelompok dengan kedekatan antara anggota-anggotanya sangat erat. Jadi, fokus sosiologi keluarga adalah kehidupan keluarga dan hasil interaksi sosial dari kehidupannya itu. Menurut Suhendi dan Wahyu (2001), objek kajian sosiologi keluarga dititik beratkan pada empat aspek, yaitu:

1. Pola hubungan dalam keluarga (Kerjasama spontan, merupakan kerjasama yang serta-merta; kerjasama langsung, merupakan hasil perintah orang tua terhadap anaknya; kerjasama kontrak adalah kerjasama atas dasar tertentu; kerjasama tradisional merupakan kerjasama sebagai bagian atau unsur dari sistem sosial);
2. Sistem keluarga. Sistem keluarga di sini meliputi proses pembentukan keluarga (sistem pelamaran dan perkawinan); membina kehidupan dalam keluarga (hak dan kewajiban suami, isteri, dan anak); pendidikan dan pengasuhan anak; putusannya hubungan keluarga (perceraian) dan pengaturan harta apabila seseorang meninggal);
3. Pola-pola keluarga (besar kecilnya keluarga; organisasi keluarga; aktivitas keluarga; nilai-nilai keluarga);
4. Faktor eksternal keluarga. Faktor eksternal meliputi seluruh lingkungan di luar keluarga. Faktor-faktor tersebut dikaji, karena satu sama lain saling memiliki hubungan pengaruh dan timbal balik. Faktor-faktor tersebut ialah: Kedudukan sosial ekonomis; Lingkungan sosial (pendidikan, tempat bekerja, tetangga dan sebagainya); Lembaga-lembaga sosial.

BAB V

SOSIOLOGI EKONOMI

A. Perkembangan Sosiologi Ekonomi

Aktivitas ekonomi yang berkembang di masyarakat, seperti aktivitas produksi, pengolahan, pemasaran dan berbagai lembaga perekonomian yang ada, sebenarnya sudah sejak lama menjadi fokus perhatian sosiologi klasik. Tokoh-tokoh sosiologi klasik, seperti Marx, Weber dan Durkheim telah jauh-jauh hari menaruh perhatian pada keterkaitan ekonomi dengan kelas sosial, agama, birokrasi, dan aspek-aspek sosial lainnya. Namun demikian, perhatian sosiologi terhadap persoalan dan fenomena ekonomi cenderung menurun selama abad ke-20, dan baru mulai kembali muncul di era kebangkitan perkembangan sosiologi Marxis dan Weberian pada tahun 1970-an (Suyanto, 2017).

Kebangkitan dan puncak perkembangan sosiologi ekonomi terjadi sekitar 1980-an, terutama di Amerika Serikat, yang juga merupakan tempat di mana sosiologi ekonomi paling berkembang. Akan tetapi, sosiologi juga berkembang pesat di Eropa. Sosiologi ekonomi juga tampaknya populer di Amerika Latin dan Asia, namun penerimaan dan pelembagaannya tidak sebaik di Amerika Serikat dan Eropa. Pada tahun itu, lahir sosiologi ekonomi baru (*new economic sociology*) yang tidak hanya menaruh perhatian pada aspek produksi dan kehidupan di dunia industri, namun menaruh perhatian pada persoalan sosial ekonomi yang makin luas. Salah satu tokoh yang terkenal pada tahun 1980-an adalah Mark Granovetter. Granovetter (1985) dalam artikelnya yang terkenal “Economic and Social Structure”, mengenalkan istilah pendekatan dan dengan antusias mendukung penggunaan analisis jaringan dalam sosiologi ekonomi (Turner, 2012; Suyanto, 2017).

Granovetter, yang oleh banyak orang disebut sebagai sang simbol sosiologi ekonomi karena artikelnya yang sangat berpengaruh (Turner, 2012). Sama halnya dengan Harrisson C. White, pembimbing tesis Granovetter di Universitas Harvard dan tokoh yang sangat berpengaruh dalam sosiologi ekonomi, yang terus memperdalam analisisnya tentang pasar, yang kembali ke awal tahun 1980-an. Karya White tentang “Markets from Networks” merupakan kontribusinya yang paling penting dalam bidang sosiologi ekonomi (Turner, 2012).

Dalam satu dekade terakhir, sosiologi ekonomi baru makin berkembang pesat dan merambah wilayah kajian yang sangat luas, yang meliputi banyak fenomena ekonomi yang substantif. Dalam perkembangan sosiologi ekonomi baru nyaris semua aspek aktivitas ekonomi dikaji, baik ditingkat individu, kelompok, komunitas dan kelembagaan. Sosiologi organisasi, pasar, dan lembaga ekonomi lainnya, konsumsi dan waktu luang, isu-isu makro, seperti perkembangan kapitalisme, analisis komparatif sistem perekonomian, dan dampak perekonomian terhadap kebudayaan dan agama merupakan beberapa wilayah kajian sosiologi ekonomi baru yang terus berkembang hingga sekarang (Abercrombie, dalam Suyanto, 2017).

Di era 1980-an, arus utama kajian sosiologi ekonomi banyak dipengaruhi Granovetter, dan lebih berfokus pada tiga konsep penting, yaitu pelekatan, jaringan dan konstruksi sosial ekonomi. Tetapi, di luar Amerika, tepatnya di Perancis lahir pemikiran baru yang dipelopori Pierre Bourdieu (2000), yang memiliki penekanan dan pendekatan yang lebih struktural terhadap fenomena ekonomi. Dengan konsep-konsepnya yang menarik, seperti habitus, ranah, kepentingan dan modal, Bourdieu tidak terlalu tertarik pada bagaimana ekonomi pemerintah bekerja, melainkan ia lebih tertarik pada bagaimana manusia menjalankan hidupnya sebagai bagian dari ekonomi, yang berjuang dan melawan struktur ekonomi yang ada (Turner, 2012; Suyanto,

2017). Tambahan pula, menurut Turner (2012), sepuluh hingga 15 tahun terakhir dalam bidang sosiologi ekonomi ditandai dengan pertumbuhan yang dinamis, dan terjadi sejumlah perkembangan baru. Beberapa topik baru juga diajukan, seperti kekayaan, kewirausahaan, dan peran hukum dalam ekonomi.

Tokoh-tokoh yang dikenal sebagai “the founding fathers of economic sociology”, sebagai peletak fondasi dasar dan memberikan kontribusi konsep-konsep penting dalam perkembangan sosiologi ekonomi adalah Karl Marx (1818-1883), Max Weber (1864-1920), dan Emile Durkheim (1858-1917). Berikut adalah uraian singkat atau deskripsi teorinya dari masing-masing tokoh tersebut.

1. Karl Marx (1818-1883)

Marx adalah salah satu teoretisi sosial yang banyak memberikan sumbangan konseptual dan fondasi bagi perkembangan sosiologi ekonomi. Dalam pandangan Marx, modernitas identik dengan perkembangan ekonomi. Meski Marx mengakui berbagai keberhasilan dan kemajuan yang dicapai dalam era ekonomi kapitalis di bidang produksi, tetapi Marx acap kali melontarkan kritik yang tajam tentang efek samping yang ditimbulkan perkembangan ekonomi kapitalis. Sistem kapitalis menuntut pemilik modal terus-menerus mengakumulasi modal/kekayaannya. Hasil modal yang sudah terkumpul tersebut kemudian diinvestasikan lagi untuk mengembangkan teknik produksi sehingga lebih efisiensi ataupun mengembangkan perusahaan baru. Akumulasi modal tersebut menyebabkan keuntungan yang diperoleh menjadi kian besar. Apabila permintaan melebihi barang yang tersedia di pasar, kapitalis meningkatkan jumlah barang dagangannya. Hal ini dapat dicapai dengan mudah berkat kemajuan teknologi. Dari sisi penggunaan tenaga kerja, kemajuan teknologi banyak tenaga kerja terampil tidak digunakan. Berkat kemajuan teknologi, produktivitas tetap meningkat dan biaya produksi (terutama tenaga kerja) semakin

ditekan seminimal mungkin. Upah yang diperoleh seorang buruh tidak lagi mencukupi kebutuhan, bahkan yang paling minimum.

Kelas borjuis dinilai Marx telah melahirkan alienasi dan eksploitasi yang merugikan kelas buruh atau pekerja yang terpaksa harus menerima nasib memperoleh upah yang rendah dan tidak sesuai dengan nilai yang mereka hasilkan. Jadi, kapitalisme telah menyebabkan manusia mengalami alienasi karena hasil kreativitas produsen menjadi terasing/diasingkan dari produsen itu sendiri. Marx mendeskripsikan keterasingan sebagai bentuk dehumanisasi dalam proses produksi, yaitu keterasingan seorang buruh dari produksi yang dihasilkan, dari pekerja (buruh) yang lain, dan bahkan dari dirinya (Harper, 2007). Sebagai ilustrasi, seorang buruh pabrik mobil terasing dari produksi yang dihasilkannya, karena upah yang didapat tidak pernah cukup untuk membeli mobil, bahkan untuk menyewa sekalipun. Buruh yang bekerja di pabrik juga terasing dengan buruh-buruh lain, karena sistem produksi yang ada membuatnya terpisah. Upah yang diperoleh bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar sehingga hal ini hakikatnya ia terasing dari dirinya.

Menurut McLellan (1873), manusia mengalami alienasi dalam tiga arti. *Pertama*, manusia teralienasi dari produk kerjanya sendiri dalam arti bahwa ia hanya sekedar embel-embel dari proses produksi, sebagai pelayan mesin atau orang yang memindah-mindahkan kertas di kantor. *Kedua*, manusia juga teralienasi dari dirinya sendiri dalam arti bahwa ia kerja karena terpaksa, dan sebagai akibatnya manusia diubah menjadi hewan, “karena ia hanya merasa senang apabila melakukan fungsi-fungsi hewani, yakni makan, minum, dan memiliki anak-anak”. *Ketiga*, manusia teralienasi dari sesamanya. Hubungan yang ada di tempat kerja mempengaruhi hubungan dalam kehidupan di luar kerja.

Pada akhirnya, kapitalisme telah merusak hubungan antarmanusia menjadi sistem dua kelas, yaitu di satu sisi ada kelas proletar yang tidak memiliki aset produksi dan tak pula

memiliki modal, sedangkan di sisi lain ada sekelompok kecil kelas borjuis, yang menguasai aset, modal, dan juga menentukan serta mensubordinasi tenaga kerja yang berasal dari kelas proletar (Suyanto, 2017). Dalam sistem produksi yang berbasis kelas, kelas proletar yang tidak memiliki sarana produksi dan modal melakukan pekerjaan produktif untuk kepentingan kelas borjuis, kelas minoritas, yang memiliki sarana produksi dan modal. Produksi barang material selalu terjadi dengan melakukan eksploitasi tenaga kerja mayoritas. Jadi, hubungan antarkelas (borjuis-proletar) merupakan hubungan konflik (Jones, 2009).

Ringkasnya, kajian dan pemikiran Marx tentang ekonomi produksi sebagai basis masyarakat dapat dijelaskan melalui tiga penjelasan berikut:

- a. Aktivitas produksi adalah kodrat manusia;
- b. Aktivitas produktif secara logika merupakan awal sebelum aktivitas yang lain. Dalam hal ini, manusia tidak dapat berbuat sesuatu sebelum kebutuhan-kebutuhan fisik minimalnya terpenuhi. Sebagai contoh, seseorang tidak akan melakukan aktivitas berolahraga, sebelum ia memenuhi kebutuhan makan.
- c. Struktur aktivitas produktif mempunyai konsekuensi bagi bentuk-bentuk aktivitas sosial yang lain. Sebagai contoh, seorang pejabat di pemerintahan dan seorang petani hidup dengan perbedaan yang mencolok. Seorang pejabat, sesudah jam kerja dapat menghabiskan waktu luangnya untuk bermain Tennis, sedangkan para petani menghabiskan waktunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Cuff et al, 2006).

2. Max Weber (1864-1920)

Teori sosiologi ekonomi Weber mendasarkan diri pada pemahaman interpretatif (*verstehen*) tentang tindakan sosial. Menurut Weber, tindakan sosial adalah makna subjektif tindakan individu (aktor). Tindakan ekonomi merupakan perilaku

seseorang yang diorientasikan kepada pemanfaatan dan juga perilaku dari orang lain. Weber mendefinisikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial. Suatu tindakan disebut tindakan sosial jika diperhitungkan oleh orang lain dalam masyarakat. Menurut Weber, ada empat tipe tindakan sosial, yaitu:

- a. Tindakan tradisional, yaitu tindakan yang tidak berdasarkan pemikiran, melainkan hanya karena tradisi dan kebiasaan. Contoh, pemberian salam yang dilakukan oleh seseorang dengan membungkukkan badannya.
- b. Tindakan afektif, yaitu tindakan yang berdasarkan emosi atau motif sentimental. Contoh, tindakan seorang pemuda yang berasal dari keluarga kaya mencintai gadis yang berasal dari keluarga sederhana.
- c. Tindakan yang berorientasi nilai (*wert-rational*), atau sering disebut rasionalitas nilai adalah tindakan yang berorientasi pada tujuan, tetapi mungkin bukan pilihan rasional. Contoh, agama dalam hal ini menjadi sumber utama rasionalitas nilai.
- d. Tindakan rasionalitas instrumental, yaitu perilaku yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang didasarkan pada pilihan rasional. Contoh, sebuah perusahaan yang menerapkan sebuah strategi dagang dengan terlebih dahulu melakukan studi yang mendalam mengenai berbagai aspek pasar (Haryanto, 2011; Suyanto, 2017).

Di mata Weber, modernitas identik dengan rasionalitas, karena di masyarakat modern semakin ditandai dengan banyaknya tindakan yang rasional instrumental. Jadi, ciri yang paling signifikan masyarakat modern adalah rasionalisasi kehidupan sosial. Rasionalisasi merupakan proses di mana setiap wilayah hubungan manusia akan mengalami kalkulasi dan administrasi. Weber menemukan rasionalisasi dalam semua bidang sosial, politik, agama, organisasi ekonomi, administrasi Universitas, laboratorium, dan bahkan notasi musik (Suyanto, 2017). Apa pun profesi seseorang di masyarakat, baik pengusaha,

pedagang, buruh, petani, ilmuwan, maupun pegawai, bertindak sesuai dengan logika tersebut. Sebagai contoh, pedagang yang menimbun barang yang sangat dibutuhkan banyak orang di saat terjadinya kelangkaan barang; iklan yang tidak mengindahkan etika atau moral, semata-mata hanya bertujuan menarik minat konsumen, dan lain-lain. Fenomena ini menunjukkan berapa rasionalitas instrumental kian menggejala di masyarakat, suatu yang sangat memprihatinkan. Pada akhirnya, manusia tidak lagi mampu mengungkapkan karakteristik manusia yang manusiawi.

Sumbangan berikutnya dari Weber adalah tulisan klasiknya yang sekaligus menjadi bagian dari tesis besarnya tentang pengaruh etika keagamaan terhadap kehidupan ekonomi. Pemikiran Weber tentang hal ini adalah bahwa perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang tumbuh di masyarakat. Dalam membangun tesisnya ini, Weber melakukan studi mendalam terhadap sejumlah agama besar di berbagai Negara. Penelitiannya tersebut dilandasi pertanyaan mendasar, yaitu mengapa pada masyarakat non-Barat, perkembangan ilmiah, kesenian, politik, maupun ekonomi tidak mengikuti jalur rasionalitas yang unik di Barat.

Dalam mengembangkan tesisnya ini, Weber meneliti hampir semua agama, termasuk agama-agama di Cina, India, Israel Kuno. Tesis ini kemudian dikenal sebagai “the Protestant ethic and the Spirit of Capitalism”. Inti tesis Weber adalah bahwa perkembangan kapitalisme di dunia Barat terutama dipengaruhi oleh etika protestan yang melandasi perilaku masyarakatnya. Etika protestan menekankan pada praktek keagamaan yang rasional dan inovatif.

Weber menemukan bahwa teologi Protestan, terutama sekte Calvinis, mendorong orang untuk melakukan aktivitas keduniaannya secara rasional di satu sisi, dan di sisi lain etika tersebut juga mendorong orang untuk mewujudkan kehidupan yang asketik-sederhana, rajin beribadah, dan hidup hemat. Sikap

hidup seperti ini dikembangkan masyarakat untuk memperoleh perkenan Tuhan, sehingga mereka merasa menjadi insan yang memang dipilih Tuhan. Kerja, bagi para penganut etika Protestan dilakukan karena dianggap sebagai “calling” atau tugas suci dari Tuhan. Para penganut Calvinis yakin bahwa hidup harus diupayakan melalui kerja keras, dan mereka yakin bahwa hidup memang harus didedikasikan kepada efisiensi dan rasionalitas agar kerja manusia menjadi maksimal sebagaimana dikehendaki Tuhan (Suyanto, 2017).

3. Emile Durkheim (1858-1917)

Sumbangan terbesar Durkheim bagi perkembangan sosiologi ekonomi adalah karyanya yang berjudul *The Division of Labor in Society*. Dalam bukunya ini, Durkheim mengembangkan konsepnya mengenai tipe ideal masyarakat. Terdapat dua tipe ideal dalam hal ini, yaitu masyarakat tradisional (primitif) yang ditandai dengan solidaritas mekanik dan masyarakat modern yang ditandai dengan solidaritas organik. Individu dalam masyarakat primitif cenderung menduduki posisi-posisi yang sangat umum, melaksanakan tugas yang beraneka macam, demikian pula tanggungjawab yang diembannya. Sebaliknya, individu pada masyarakat modern cenderung untuk mengerjakan pekerjaan yang khusus (spesialisasi) dengan tugas dan tanggungjawab yang khusus pula (Haryanto, 2011).

Durkheim menolak pandangan pandangan kelompok utilitarian yang menyatakan bahwa individualisme bisa menjadi dasar kestabilan masyarakat. Modernitas di mata Durkheim identik dengan munculnya solidaritas organik dan melemahnya hati nurani kolektif. Meskipun solidaritas organik membawa serta kebebasan yang lebih besar dan produktivitas yang lebih tinggi, tetapi modernitas dalam pandangan Durkheim juga menyebabkan melemahnya moralitas dan melahirkan situasi yang anomi (Suyanto, 2017).

Perubahan masyarakat selalu bergerak dari masyarakat primitif (solidaritas mekanik) ke masyarakat modern (solidaritas organik). Durkheim menerangkan bahwa perubahan dari solidaritas mekanik menjadi solidaritas organik dimulai dengan adanya penambahan penduduk disertai oleh kepadatan moral, yaitu penambahan penduduk disertai penambahan komunikasi dan interaksi antara para anggota. Menurut Durkheim, transisi ke arah solidaritas organik, ditandai dengan melemahnya moralitas. Pada saat itu, terjadi kevakuman nilai-nilai dan norma-norma sehingga orang mengalami kebingungan mengenai apakah suatu perilaku boleh dilakukan atau tidak. Kondisi ini disebut sebagai anomie, yaitu ketiadaan panduan moral bagi perilaku orang di masyarakat. Anomie ini berkaitan dengan solidaritas organik serta menurunnya kekuatan *collective conscience*. Hal ini selanjutnya membawa dampak yang luas, termasuk munculnya perilaku bunuh diri anomie.

B. Pengertian Sosiologi Ekonomi

Tidak ada definisi tunggal tentang sosiologi ekonomi yang umum diterima, dan alasannya adalah bahwa istilah tersebut digunakan oleh ekonom dan juga sosiolog. Suyanto (2017) menjelaskan ada perbedaan antara ilmu ekonomi dan sosiologi ekonomi. Ilmu ekonomi memandang perilaku atau tindakan ekonomi yang dilakukan aktor bersifat rasional, yakni selalu bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan bagi para individu dan memaksimalkan keuntungan bagi para pemilik perusahaan. Sebaliknya, sosiologi ekonomi, justru memandang tindakan ekonomi tidak selalu bersifat rasional, tetapi bisa bersifat spekulatif-rasional, bahkan tradisional. Dalam kajian sosiologi ekonomi, tindakan ekonomi dipahami dalam konteks hubungannya dengan aspek-aspek sosial budaya masyarakat.

Sebagai referensi, di bawah ini dikemukakan tentang definisi sosiologi ekonomi menurut para ahli, di antaranya:

1. Damsar (2002), Sosiologi ekonomi, sebagai studi tentang bagaimana cara orang, kelompok atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka, dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Cara yang dimaksud di sini berkaitan dengan semua aktivitas orang, kelompok dan masyarakat yang berhubungan dengan proses produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi jasa dan barang-barang langka. Sementara, pendekatan sosiologis yang digunakan, yaitu berupa kerangka acuan, variabel-variabel dan model-model yang digunakan para sosiolog dalam memahami dan menjelaskan kenyataan sosial atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam memahami fenomena perilaku ekonomi masyarakat.
2. Swedberg (2012) sosiologi ekonomi, sebagai bagian dari sosiologi yang membahas dan menganalisis fenomena ekonomi, dengan bantuan konsep-konsep dan metode-metode sosiologi (Turner, 2012). Fenomena ekonomi meliputi: konsumsi dan produksi, produktivitas dan inovasi teknologi, pasar, kontrak, uang, tabungan, organisasi ekonomi (seperti bank, perusahaan asuransi, koperasi), kehidupan dalam tempat kerja, pembagian kerja dan segregasi pekerjaan, kelas ekonomi, ekonomi internasional, ekonomi dan masyarakat luas, pemerintah, gerakan sosial, nilai budaya, dampak dari faktor-faktor gender dan etnik terhadap ekonomi, kekuatan ekonomi, ideologi ekonomi (Holton, 1992, dalam Damsar, 2002).
3. Kesler (2007), sosiologi ekonomi, adalah segala aktivitas ekonomi pada dasarnya “terlekat” dalam struktur sosial yang lebih luas yang tidak dapat direduksi dalam motif atau preferensi agen juga struktur imperatif, seperti kapitalisme (Haryanto, 2011).

C. Pendekatan Sosiologi Ekonomi

Pendekatan di sini adalah sudut pandang yang dipakai oleh para ahli sosiologi ekonomi untuk mempelajari masalah-masalah yang menjadi objek perhatian sosiologi ekonomi. Untuk lebih mudah

memahami pendekatan ini, penulis membandingkan sudut pandang sosiologi ekonomi dengan ilmu ekonomi. Menurut Smelser dan Swedberg (1994), perbedaan titik tolak dalam cara pandang antara para ahli sosiologi ekonomi dengan ilmu ekonomi yaitu: (1) konsep aktor, (2) konsep tindakan ekonomi, (3) hambatan pada tindakan ekonomi, (4) hubungan ekonomi dan masyarakat, (5) tujuan analisis, dan (6) penerapan metode.

1. Konsep Aktor. Ilmu ekonomi berfokus pada individu, sedangkan sosiologi ekonomi, berfokus pada kelompok, institusi dan masyarakat;
2. Konsep tindakan ekonomi. Ilmu ekonomi berfokus pada tindakan rasional yang memaksimalkan keuntungan, sedangkan sosiologi ekonomi berfokus pada tipe tindakan ekonomi, spekulatif-rasional dan tradisional;
3. Hambatan pada tindakan ekonomi. Ilmu ekonomi berfokus pada hambatan tindakan ekonomi berupa selera, kelangkaan sumber daya dan teknologi, sedangkan sosiologi ekonomi berfokus pada aktor-aktor yang memudahkan, menghambat dan membatasi tindakan ekonomi dalam pasar;
4. Hubungan ekonomi dan masyarakat. Ilmu ekonomi berfokus pada pertukaran ekonomi pasar, sedangkan sosiologi ekonomi berfokus pada bagian integral masyarakat;
5. Tujuan Analisis. Ilmu ekonomi berfokus pada prediksi dan eksplanasi, sedangkan sosiologi ekonomi pada deskripsi dan eksplanasi;
6. Penerapan Metode. Ilmu ekonomi berfokus pada hipotesis dengan model-model matematika dan penggunaan data statistik resmi, sedangkan sosiologi ekonomi berfokus pada beragam metode, seperti metode historis, metode perbandingan dengan penggunaan data yang diolah sendiri (Suryadi, 2009).

D. Kegunaan Sosiologi Ekonomi

Dalam pengertian sederhana, sosiologi ekonomi merupakan studi yang mempelajari cara orang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang dan jasa dengan menggunakan pendekatan analisis sosiologi. Artinya, sosiologi ekonomi mengaplikasikan perspektif sosiologis untuk memahami realitas ekonomi. Dari sini, kita memperoleh sebuah gambaran tentang kegunaan sosiologi ekonomi, yaitu:

1. Dapat membedakan pendekatan yang digunakan dalam sosiologi ekonomi dan ilmu ekonomi, baik konsep aktor, konsep tindakan ekonomi, hambatan pada tindakan ekonomi, hubungan ekonomi dan masyarakat, tujuan analisis maupun penerapan metode (Smelser dan Swedberg, dalam Suryadi, 2009).
2. Dapat menjelaskan berbagai fenomena sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat, seperti gaya hidup, perilaku konsumen, dan lain-lain, yang tidak selalu mampu atau bahkan gagal dijelaskan oleh sosiologi dan ilmu ekonomi (Suyanto, 2017).
3. Dapat mengaplikasikan perspektif sosiologis terhadap fenomena ekonomi, seperti bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka (Damsar, 2002).
4. Peran yang dijalankan institusi-institusi, norma-norma, dan interaksi-interaksi sosial dalam kehidupan ekonomi (Swedberg, dalam Turner, 2012).

E. Objek Kajian Sosiologi Ekonomi

Objek kajian sosiologi ekonomi telah lama menjadi agenda pembicaraan ilmiah antara para sosiolog dan para ekonomi. Weber dari pihak sosiologi, juga dikenal sebagai ekonom, telah memberi garis batas bahwa sosiologi ekonomi memperhatikan tindakan ekonomi sejauh ia mempunyai dimensi sosial dan selalu melibatkan makna serta berhubungan dengan kekuasaan (Damsar,

2002). Sementara, Schumpeter, juga dipandang sebagai sosiolog, membuat pembagian kerja di antara kedua bidang ilmu tersebut dengan memberikan batasan bahwa sosiologi ekonomi berkaitan dengan konteks institusional dari ekonomi, sedangkan ilmu ekonomi berkaitan dengan ekonomi itu sendiri (Damsar, 2002).

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas perbedaan pandangan para ahli tentang objek kajian sosiologi ekonomi. Namun, tampaknya para ahli telah sepakat bahwa objek kajian sosiologi ekonomi merupakan irisan (*instersection*) dari sosiologi dan ilmu ekonomi. Sosiologi ekonomi dalam operasinya mengaplikasikan tradisi pendekatan sosiologi terhadap fenomena ekonomi. Berikut ini objek kajian sosiologi ekonomi menurut beberapa ahli:

1. Philipus & Aini (2004). Sosiologi ekonomi memusatkan perhatiannya pada tiga hal:
 - a. Analisis sosiologis terhadap proses ekonomi, misalnya dalam proses pembentukan harga pelaku ekonomi;
 - b. Analisis hubungan dan interaksi antara ekonomi dan instansi lain dari masyarakat, misalnya hubungan antara ekonomi dan agama;
 - c. Studi tentang perubahan institusi dan parameter budaya yang menjadi konteks bagi landasan ekonomi masyarakat, misalnya semangat kewirausahaan di kalangan santri (Suryadi, 2009).
2. Swedberg (2012). Para ahli sosiologi ekonomi ingin terus meneliti topik-topik baru, seperti:
 - a. Keuangan, hukum, stratifikasi, dan studi sejarah-komparatif;
 - b. Studi etnografi dan budaya terhadap uang dan keuangan;
 - c. Pendekatan sosiologis terhadap hukum dan ekonomi;
3. Dobbin (2007), tiga bidang garapan sosiologi ekonomi, yaitu:
 - a. *Power* (kekuasaan);
 - b. *Institutions* (institusi-institusi);
 - c. *Social networks* (jejaring sosial) (Haryanto, 2011).

4. Haryanto (2011), kajian sosiologi ekonomi meliputi :
 - a. Sistem-sistem ekonomi: perekonomian pasar kapitalis, perekonomian pasar sosialis, perekonomian campuran, dan implikasi pilihan sistem ekonomi bagi Negara;
 - b. Manusia dan perilaku ekonomi: motif-motif perilaku ekonomi, moral ekonomi dan rasionalitas tindakan ekonomi, keterlekatan perilaku ekonomi dalam hubungan sosial, teori pertukaran sosial, teori pilihan rasional;
 - c. Masyarakat dan ekonomi: dimensi-dimensi sosiologis organisasi ekonomi; organisasi kerja dan hubungan kerja; ekonomi, struktur sosial politik dan perkembangan ekonomi; uang dan monetisasi; konsumerisme dan budaya konsumen; modal sosial;
 - d. Negara dan ekonomi: kebijakan Negara dalam bidang ekonomi; strategi-strategi pembangunan ekonomi dan implikasinya; ekonomi kerakyatan dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia; contoh kasus: dimensi sosio-ekonomi kebijakan publik dalam penanggulangan penyakit TBC;
 - e. Ekonomi informal: pengertian dan definisi ekonomi informal; hubungan ekonomi informal dengan ekonomi formal; aspek-aspek sosial budaya perkembangan ekonomi informal;
 - f. Etika ekonomi dan bisnis: pengertian etika ekonomi; pengertian etika bisnis; urgensi persoalan etika bisnis.
5. Suyanto (2017), kajian sosiologi ekonomi di era masyarakat post-modernisme:
 - a. Sosiologi ekonomi kontemporer di era masyarakat post-modernisme;
 - b. Teori kritis: pijakan kajian sosiologi ekonomi di era post-modernisme;
 - c. Kapitalisme, neoliberalisme dan globalisasi;

- d. Masyarakat konsumen;
- e. Gaya hidup (life style) dan budaya konsumen;
- f. Globalisasi, Mcdonalisasi dan Glokalisasi;
- g. Komoditas dan komodifikasi;
- h. Hiper-realitas, simulakra, dan konsumsi dalam masyarakat post-modern;
- i. Iklan, gaya hidup dan perilaku konsumsi;
- j. Waktu senggang dan konsumsi berlebih;
- k. Memahami perubahan perilaku ekonomi masyarakat post-industrial.

BAB VI

SOSIOLOGI AGAMA

A. Perkembangan Sosiologi Agama

Sebelum Durkheim dan Weber menjadikan agama sebagai satu fokus analisis utama pada sosiologi, para antropolog telah melakukan gerakan intelektual penting tentang agama. Karya komparatif klasik tentang agama dalam masyarakat primitif atau praindustri, telah dihasilkan oleh antropolog Inggris, seperti James Frazer (1890), William Robertson Smith (1894), Edward Tylor (1891), dan Andrew Lang (1899). Mereka berpendapat bahwa agama merupakan suatu fenomena kultural dan semacamnya, yang terbuka bagi analisis kultural dan sosiohistoris. Dorongan tambahan, datang dari psikologi, terutama penganut pragmatisme Amerika, yaitu William James (1898). Ia berpendapat bahwa agama dapat dipelajari secara objektif dan ilmiah, yaitu melalui konsekuensi-konsekuensi praktis yang kasat mata (Dillon, dalam Turner, 2012).

Berbagai studi mereka pada dasarnya telah berkontribusi sebagai landasan bagi lahirnya sosiologi agama. Dengan kata lain, penerbitan karya mereka terus membayangkan lahirnya sosiologi agama. Warisan mereka yang diturunkan kepada generasi berikut bahwa agama dapat dipelajari secara ilmiah sebagai suatu fenomena sosial, kultural, dan historis yang menarik.

Fenomena agama sudah mulai tumbuh sekitar pertengahan abad ke-19 oleh sejumlah sarjana Barat terkenal, seperti Edward B. Tylor (1832-1917), Herbert Spencer (1820-1903), Friedrich H. Muller (1823-1917), Sir James G. Fraser (1854-1941). Tokoh-tokoh tersebut lebih tertarik kepada agama-agama primitif. Namun, pengkajian masalah agama secara ilmiah dan terbina baru mulai

tahun 1990. Mulai saat itu hingga menjelang 1950 munculah buku-buku sosiologi agama yang sering disebut sosiologi agama klasik (Ishomuddin, 2002; Anwar & Adang, 2017). Periode klasik ini dikuasai oleh dua sosiolog yang terkemuka yaitu Emile Durkheim (1858-1917) dan Max Weber (1864-1920). Dua sarjana tersebut lazim dipandang sebagai pendiri sosiologi agama. Di bawah ini diuraikan secara singkat pokok-pokok pikiran tentang agama dari tokoh terkemuka tersebut.

1. Emile Durkheim (1858-1917)

Durkheim merupakan salah seorang teoretisi yang sangat terkenal dan mempunyai pengaruh kuat di dalam sosiologi agama. Namun, uraiannya tentang agama banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir sosial sebelumnya. Salah seorang dari pemikir itu adalah Robertson Smith, yang melakukan studi tentang agama Semit kuno. Smith menerbitkan karyanya dalam sebuah buku yang berjudul “Kuliah tentang agama-agama Smith” (1889) (Raho, 2013).

Dalam kaitan dengan kehidupan beragama, Smith lebih mengutamakan praktek-praktek keagamaan dari pada kepercayaan-kepercayaan. Menurut Smith, hal yang paling penting di dalam agama adalah praktek-praktek kehidupan beragama, seperti upacara-upacara keagamaan dan bukan terutama kepercayaan. Praktek-praktek merupakan hal yang utama, sedangkan kepercayaan adalah nomor dua. Agama juga membangkitkan perasaan sebagai satu komunitas dan kesatuan di dalam kelompok. Ritus-ritus yang dibuat secara berulang-ulang memperkuat rasa kesatuan di dalam kelompok. Smith menentang pandangan yang mengatakan bahwa agama muncul karena kesadaran pribadi seseorang akan pentingnya keselamatan bagi dirinya. Bagi Smith, agama tidak mempunyai hubungan dengan menyelamatkan jiwa-jiwa, tetapi merupakan upaya untuk konsolidasi atau penguatan kelompok.

Durkheim mengembangkan pemikiran Smith tersebut dan mendasarkan analisisnya pada data ketika ia membuat studi tentang suku Arunta di Australia. Di dalam bukunya yang terkenal “The Elementary Forms of Religious Life”, ia mengatakan bahwa tujuan utama dari studinya adalah untuk melihat dari dekat agama yang paling primitif dan paling sederhana pada suku-suku Australia tersebut. Menurut Durkheim, agama yang paling primitif dan paling sederhana itu adalah totemisme (Raho, 2013; Jones, et al, 2016).

Durkheim menentang anggapan yang dominan pada waktu itu, yakni agama adalah ilusi dan tidak benar, seperti yang diungkapkan oleh Marx dan Feuerbach. Bagaimana mungkin agama bisa bertahan lama di dalam sejarah umat manusia kalau agama itu adalah ilusi dan merupakan satu kesalahan. Mungkin kepercayaan-kepercayaan atau praktek-praktek pada agama tertentu kelihatan ganjil, tetapi menurut Durkheim, orang harus bisa melihat hal-hal itu sebagai simbol-simbol dalam mengungkapkan relasinya dengan wujud tertinggi, Orang juga mestinya menangkap makna dari simbol-simbol itu agar mereka bisa memberikan apresiasi terhadap apa yang mereka ungkapkan (Raho, 2013).

Durkheim memberikan contoh agama yang paling primitif dan paling sederhana pada suku-suku asli di Australia. Praktek-praktek keagamaan pada suku-suku asli di Australia dengan menggunakan simbol binatang atau tumbuhan totem yang sakral. Totem itu diwakili oleh gambar yang diukir pada kayu atau batu. Karena gambar-gambar itu mewakili binatang atau tumbuhan totem yang sakral, maka gambar-gambar itu pun dianggap sakral. Gambar-gambar itu dikelilingi oleh larangan-larangan atau tabu-tabu dan diperlakukan dengan sangat hormat. Menurut Durkheim, simbol-simbol totem ini merupakan lambang dari suku itu sendiri dan sama seperti bendera merupakan lambang untuk suatu Negara. Jadi, penyembahan totem di

dalam totemisme ini, sesungguhnya bukan dialamatkan kepada binatang, tumbuhan, atau gambar-gambar tertentu, melainkan pada sesuatu kekuatan impersonal dan tak bernama yang berada di balik makhluk-makhluk yang dijadikan totem itu.

Bagi Durkheim, agama tidak lain daripada kekuatan kolektif masyarakat yang berada di atas individu-individu. Dengan demikian, tidak benar kalau dikatakan bahwa agama adalah sebuah ilusi atau dari kodrat yang tidak benar. Tambahan, menurut Durkheim, agama sebetulnya lahir dari upacara-upacara. Hanya dengan berpartisipasi dalam upacara-upacara agama, kekuatan moral bisa dirasakan dan sentimen-sentimen sosial diperkuat dan diperbaharui. Di samping itu, ritus-ritus dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan kelompok dan menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, Durkheim mengklaim agama sebagai sentimen sosial yang berguna untuk mempertahankan ketuhan kelompok. Pandangannya ini tentu saja berbeda dari pandangan Marx yang melihat agama sebagai candu bagi masyarakat (Raho, 2013).

2. Max Weber (1864-1920)

Di dalam bukunya yang berjudul “The Social Psychology of the World Religions”, Weber menguraikan pendekatan psikologis terhadap agama. Di dalam buku tersebut, ia menolak pemikiran yang mengatakan bahwa dalam menghubungkan agama dengan faktor-faktor sosial, seseorang harus menggunakan pendekatan yang bersifat reduksionis. Ia menolak tesis yang mengatakan bahwa agama adalah sebuah ilusi seperti yang dikatakan oleh Marx dan Feuerbach. Weber juga tidak bisa menerima teori-teori tentang agama yang mengatakan bahwa agama merupakan satu bentuk pelarian dari penderitaan dan kesulitan hidup, walaupun ia mengakui adanya hubungan antara agama dan penderitaan (Raho, 2013).

Dalam buku yang berbeda, yang berjudul “Sosiologi Agama” (1965), Weber memulai analisisnya dengan menggunakan

apa yang dianggapnya merupakan bentuk yang paling dasar dari kepercayaan dan tingkah laku keagamaan dalam agama-agama pada masyarakat sederhana. Weber mengamati, bahwa motivasi tingkah laku keagamaan pada masyarakat sederhana umumnya adalah keinginan untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan. Kepercayaan dan tingkah laku keagamaan serta tindakan-tindakan magis tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan hampir selalu terarah pada tujuan-tujuan ekonomis, yakni kesejahteraan hidup secara material. Percaya atau tidak, menurut Weber, dalam masyarakat-masyarakat seperti itu, orang-orang terobsesi dengan persoalan kehidupan sehari-hari dan di dalam situasi yang demikian mereka melakukan tindakan-tindakan magis yang bersifat manipulatif untuk memperoleh keuntungan ekonomis dan bisa keluar dari kesulitan atau penderitaan tersebut.

Weber sering kali membuat perbedaan antara tindakan magis dan tingkah laku keagamaan. Menurut dia, tindakan magis umumnya bersifat manipulatif dan cenderung memaksa dewa-dewi atau roh-roh halus untuk melakukan apa yang diinginkannya. Sementara itu, tingkah laku keagamaan atau agama terarah kepada penyembahan dewa-dewi itu. Magis juga menganggap dewa-dewi dan roh-roh sebagai bagian dari dunia ini atau berada di dalam objek-objek atau benda-benda yang berada di dalam dunia ini. Sementara agama, memiliki konsep yang lebih transendental terhadap dewa-dewi ini. Menurut Weber, pada masyarakat asli cenderung terarah kepada hal-hal yang bersifat magis (Raho, 2013).

Sumbangan pemikiran Weber sangat penting di dalam karyanya tentang rasionalitas. Ia menunjukkan bagaimana kebudayaan dan civilisasi Barat berbeda dari budaya dan civilisasi Timur. Weber percaya bahwa dunia Barat lebih bersifat rasional di dalam pendekatannya terhadap segala sesuatu di dalam kehidupan. Dalam kehidupan keagamaan, rasionalitas berarti menghilangkan aspek-aspek magis

dalam praktek kehidupan keagamaan dan mengembangkan ajaran-ajaran agama ke dalam satu sistem doktrin yang bersifat formal. Dalam upaya mengembangkan agama ke dalam sistem doktrin yang bersifat formal dikembangkanlah bermacam disiplin ilmu yang berhubungan dengan agama. Setiap agama pada umumnya memiliki sejumlah disiplin ilmu yang berusaha mendalami ajaran-ajaran agama agar bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual.

Sumbangan berikutnya dari Weber tentang “Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme”. Di dalam bukunya itu, Weber ingin mengetahui apakah agama telah turut mempengaruhi penyebaran semangat kapitalisme di sebagian besar dunia. Menurut Weber, salah satu faktor penting dalam proses perkembangan kapitalisme di Eropa Barat adalah faktor agama. Karena itu, Weber berpendapat bahwa ada hubungan yang sangat erat antara semangat kapitalisme modern dan agama, khususnya Calvinisme. Motivasi dan orientasi ekonomi ini berasal dari ajaran Calvinisme dan cara pandang Calvinisme. Ajaran Calvinisme ini mengharuskan umatnya untuk berusaha dan bekerja keras, mewajibkan hidup sederhana dan melarang segala bentuk kemewahan, apalagi digunakan untuk berpoya-poya. Akibat ajaran Calvinisme, para penganut agama ini menjadi semakin makmur karena keuntungan yang mereka perolehnya dari hasil usaha tidak dikonsumsi, melainkan ditanam kembali dalam usaha mereka. Melalui cara seperti itulah, kapitalisme di Eropa Barat berkembang. Orang-orang yang mengalami keberhasilan dalam bidang ekonomi tersebut pada umumnya adalah orang-orang Protestan. Hal ini menunjukkan kemungkinan akan adanya hubungan antara agama dan kemajuan ekonomi.

Weber sering menyatakan bahwa kapitalisme yang dimaksudnya adalah kapitalisme rasional. Ia membedakan kapitalisme ini dengan jenis kapitalisme lainnya yang pernah ada di dalam sejarah dan dalam banyak kebudayaan. Menurut Weber, ciri-ciri kapitalisme rasional, pengusaha-pengusaha selalu berjuang untuk memperbesar keuntungan secara terus menerus

dan semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan bukan semata-mata hal itu dipandang kebijakan melainkan karena mereka melihatnya sebagai satu kewajiban agama. Dalam usaha mencari keuntungan itu, mereka menanamkan kembali keuntungan yang ada ke dalam bentuk usaha baru dan bukannya dihabiskan. Menurut Weber, dalam model kapitalisme lainnya, keuntungan sering kali digunakan untuk konsumsi barang-barang mewah. Uang yang dihabiskan untuk membeli barang-barang mewah menyebabkan kerugian yang luar biasa karena uang yang dibelanjakan itu tidak bisa ditanamkan kembali dalam bentuk usaha baru yang bisa mendatangkan keuntungan (Raho, 2013).

B. Pengertian Sosiologi Agama

Secara sederhana, sosiologi agama adalah suatu cabang sosiologi umum yang mempelajari masyarakat agama secara sosiologis. Agama merupakan sesuatu kekuatan yang berpengaruh dan paling dirasakan di dalam kehidupan manusia. Agama mempengaruhi manusia dalam segala aspek kehidupannya di masyarakat. Ada hubungan antara agama dan masyarakat bersifat timbal balik. Di satu pihak, agama memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Di pihak yang lain, kehidupan masyarakat mempengaruhi agama. Bahkan, kehidupan masyarakat memberi bentuk kepada pelaksanaan kehidupan agama. Jadi, agama dalam perspektif sosiologi yaitu memusatkan perhatian pada manusia yang mempraktekkan kehidupan beragama itu.

Berikut ini definisi sosiologi agama menurut beberapa ahli:

1. H. Goddjin-W. Goddjin, sosiologi agama ialah bagian dari sosiologi umum yang mempelajari suatu ilmu budaya empiris, profan, dan positif yang menuju kepada pengetahuan umum, yang jernih dan pasti dari struktur, fungsi-fungsi dan perubahan-perubahan kelompok keagamaan, dan gejala-gejala kekelompokan keagamaan (Ishomuddin, 2002; Anwar & Adang, 2017).

2. D. Hendropuspito (1997), sosiologi agama adalah suatu cabang sosiologi umum yang mempelajari masyarakat agama secara sosiologis guna mencapai keterangan-keterangan ilmiah dan pasti, demi kepentingan masyarakat agama itu sendiri dan masyarakat luas pada umumnya.
3. Raho (2013), sosiologi agama merupakan satu cara pandang tentang agama yang memusatkan perhatian pada manusia yang mempraktekkan kehidupan beragama itu. Secara substantif, berusaha menetapkan batas-batas atau kategori-kategori dari sebuah fenomena yang menyebabkannya disebut agama dan yang membedakannya dari fenomena lain yang bukan agama. Secara fungsional, menekankan apa yang dibuat agama untuk seorang individu, kelompok atau masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi agama berusaha mencari keterangan-keterangan ilmiah tentang masyarakat agama khususnya. Dengan kata lain, sosiologi agama berusaha mendeskripsikan, memahami dan menjelaskan bagaimana agama berlaku dalam masyarakat. Masyarakat agama tidak lain adalah suatu persekutuan hidup (baik dalam lingkup sempit maupun luas) yang unsur konstitutif utamanya adalah agama dan nilai-nilai keagamaan. Singkatnya, sosiologi agama ini, menganalisis seberapa jauh agama dan nilai-nilai keagamaan memainkan peranan dan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian pemeluk-pemeluknya, atau seberapa jauh agama dan nilai-nilai keagamaan mempengaruhi tingkah laku para pemeluknya.

C. Pendekatan Sosiologi Agama

Agama adalah sesuatu yang bersifat sangat pribadi atau individual. Karena penghayatan yang bersifat pribadi itu, kadang-kadang agama itu sulit dianalisis dengan menggunakan perspektif sosiologis yang selalu bersifat sosial. Jadi, agama di satu sisi bersifat individual, tetapi di pihak lain agama juga bersifat sosial.

Dalam sosiologi terdapat dua pendekatan studi tentang agama, yaitu:

1. Empiris. Sifat empiris itu tampak dalam kenyataan bahwa di dalam studi sosiologis tentang agama, para sosiolog berusaha mendasarkan interpretasinya pada data. Mereka berusaha menjelaskan tentang kenyataan sosial yang disebut agama itu didasarkan pada pengalaman-pengalaman konkret. Sosiolog hanya berurusan dengan fakta-fakta yang dapat diukur, diobservasi dan diuji.
2. Objektif. Sifat objektif tampak dalam kenyataan bahwa interpretasi-interpretasi sosiologis tentang agama menurut apa adanya (*das sein*) dan bukan menurut apa yang seharusnya (*das sollen*). Para sosiolog sama sekali tidak bermaksud untuk menilai, menerima, atau menolak isi dari agama-agama itu. Bahkan, demi objektivitas studinya, mereka mengesampingkan pendapat-pendapat pribadinya tentang agama dan berusaha untuk seobjektif mungkin mengamati dan menafsirkan fenomena keagamaan yang sedang diteliti. Menurut perspektif sosiologis, tidak ada agama yang superior atau inferior terhadap agama yang lain (Raho, 2013).

D. Kegunaan Sosiologi Agama

Seperti yang telah dijelaskan di muka dalam definisi, sosiologi agama adalah cabang dari sosiologi umum. Sebagaimana sosiologi positif, sosiologi agamapun bermaksud membantu para pemimpin agama dalam mengatasi masalah-masalah sosio-religius yang tidak kalah beratnya dengan masalah-masalah sosial nonkeagamaan. Dalam bidang teoritis, misalnya, para ahli keagamaan memerlukan konsep-konsep dan resep-resep ilmiah praktis yang sulit diperoleh dari teologi, maka sosiologi agama dapat memberikan sumbangannya.

Kegunaan sosiologi agama antara lain:

1. Memberikan pengetahuan tentang pola-pola interaksi sosial keberagaman yang terjadi dalam masyarakat;

2. Membantu untuk mengontrol atau mengendalikan setiap tindakan dan perilaku keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Membantu meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai, norma, tradisi dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat serta memahami perbedaan yang ada;
4. Membantu menciptakan suatu tertib sosio-religius yang ideal, misalnya pengorganisasian kehidupan paroki yang harmonis dan efisien;
5. Membantu meningkatkan pengertian tentang hakekat fenomena agama di berbagai kelompok masyarakat maupun pada tingkat individu;
6. Membantu untuk menentukan masalah teologi yang mana yang paling berguna bagi masyarakat, baik dalam arti sekuler maupun religius (Ishomuddin, 2002; Anwar & Adang, 2017).

E. Objek Kajian Sosiologi Agama

Objek kajian sosiologi agama yaitu masyarakat agama dalam perwujudan sosial. Sosiologi agama memusatkan perhatiannya terutama untuk memahami makna yang diberikan oleh suatu masyarakat kepada sistem agamanya sendiri, dan berbagai hubungan antaragama dengan struktur sosial lainnya, juga dengan berbagai aspek budaya yang bukan agama seperti magic, ilmu pengetahuan dan teknologi. Singkatnya, objek kajian sosiologi agama, bukanlah agama sebagai sebuah ajaran (dogma dan moral), tetapi agama sebagai sebuah pengertian fenomena sosial.

Dalam berbagai literatur, objek kajian sosiologi agama hampir tidak ada perbedaan yang sangat berarti. Namun demikian, perlu dikemukakan objek kajian sosiologi agama menurut beberapa ahli:

1. Keith A. Robert, objek kajian sosiologi agama yaitu:
 - a. Kelompok-kelompok dan lembaga keagamaan, yang meliputi pembentukannya, kegiatan demi kelangsung hidupnya, pemeliharaannya dan pembaharuannya;

- b. Perilaku individu dalam kelompok-kelompok tersebut atau proses sosial yang mempengaruhi status keagamaan dan perilaku ritual;
 - c. Konflik antarkelompok, misalnya Katolik lawan Protestan, Kristen dengan Islam dan sebagainya (Anwar & Adang, 2017).
2. Raho (2013), objek kajian sosiologi agama yaitu:
- a. Studi sosiologis tentang agama;
 - b. Agama dalam perspektif Marx;
 - c. Agama dalam perspektif Durkheim;
 - d. Agama dalam perspektif Weber;
 - e. Agama dan sistem makna;
 - f. Agama, integrasi sosial dan konflik;
 - g. Agama dan perubahan sosial.
3. Ishomuddin (2002), objek kajian sosiologi agama yaitu:
- a. Masyarakat agama (seperti kelompok-kelompok keagamaan, institusi-institusi religius yang mempunyai ciri pola tingkah laku tersendiri);
 - b. Masyarakat agama (seperti struktur dan fungsinya, pengaruhnya terhadap masyarakat luas, stratifikasi sosial, kesadaran dan kohesi kelompok religius yang mempunyai sifat tersendiri, perubahan-perubahan yang disebabkan oleh agama, kerukunan antargolongan agama, konflik-konflik antarkelompok agama, fenomena jenuhnya organisasi lembaga-lembaga keagamaan).

BAB VII

SOSIOLOGI KESEHATAN

A. Perkembangan Sosiologi Kesehatan

Sosiologi kesehatan merupakan cabang yang masih relatif baru dalam sosiologi. Cabang sosiologi ini semula dikenal dengan nama sosiologi medis. Sosiologi medis ini mula-mula berkembang di Amerika Serikat melalui beberapa tahap sejak tahun 1920-an.

Sosiologi medis oleh Robert Straus diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sosiologi mengenai bidang medis dan sosiologi dalam bidang medis. Menurutnya, sosiologi mengenai bidang medis menyajikan kajian sosiologis terhadap bidang medis. Kajian ini dilakukan oleh para sosiolog dengan tujuan pengembangan ilmu dan teori sosiologi. Posisi para sosiolog dalam hal ini ada di luar bidang medis. Sosiologi dalam bidang medis, merupakan penerapan keahlian sosiolog maupun ahli ilmu sosial lain di dalam bidang medis (Sunarto,2014)

Sosiologi kesehatan juga membedakan antara sosiologi mengenai kesehatan dan sosiologi dalam kesehatan. Menurut Wilson sosiologi mengenai kesehatan adalah pengamatan dan analisis dengan motif masalah sosiologi, sedangkan dalam kesehatan merupakan penelitian dan pengajaran yang dimotivasi oleh adanya masalah kesehatan (Anwar dan Adang, 2017).

Selain oleh sosiologi, masalah kesehatan dipelajari pula oleh disiplin ilmu lain, seperti antropologi kesehatan, ekonomi kesehatan. Di samping itu, masalah kesehatan juga dikaji oleh cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti ilmu hukum, ilmu politik, ilmu sejarah dan psikologi (Rosmalia dan Sriani, 2017).

Sehubungan dengan klasifikasi sosiologi kesehatan di atas, maka Sunarto (2014) memberikan contoh sosiologi mengenai kesehatan dan sosiologi dalam kesehatan sebagai berikut. Apabila dalam rangka upaya penanggulangan HIV/AIDS Departemen Kesehatan RI menugaskan sosiolog dan ahli ilmu sosial lain (seperti antropolog, psikolog dan ahli kesehatan masyarakat) untuk melakukan suatu telaah cepat (rapid assessment) di tempat-tempat prostitusi di mana telah ditemukan sejumlah kasus HIV/AIDS untuk mengetahui faktor sosial budaya yang mendorong penyebaran HIV/AIDS. Agar temuannya dapat dijadikan masukan bagi kebijakan pemerintah, maka kegiatan ini termasuk dalam bidang sosiologi dalam kesehatan. Namun, bilamana penelitian terhadap orang yang berperilaku berisiko tinggi terhadap penularan HIV/AIDS serta jaringan sosial yang terjalin antara mereka dengan berbagai pihak yang terlibat di dunia prostitusi tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep dan teori sosiologi mengenai organisasi atau mobilitas sosial, maka kegiatan ini merupakan kegiatan sosiologi mengenai kesehatan.

Ke mana kecenderungan perhatian para sosiolog kesehatan: ke sosiologi mengenai kesehatan ataukah ke sosiologi dalam kesehatan? Setelah mempelajari 90 makalah sosiologi kesehatan yang diterbitkan dalam jurnal sosiologi kesehatan di Amerika Serikat antara 1975 dan 1977 serta buku-buku sosiologi kesehatan yang diterbitkan di sana dalam periode yang sama, Wolinsky (1980) sampai pada kesimpulan bahwa orientasi para sosiolog kesehatan lebih tertuju pada masalah kesehatan, bukan pada masalah sosiologi kesehatan sehingga sosiologi kesehatan cenderung miskin teori (Sunarto, 2014; Anwar dan Adang, 2017).

Masalah yang disebutkan Wolinsky ini merupakan satu di antara sejumlah alasan yang mendorong sejumlah sosiolog untuk menjadikan sosiologi kesehatan suatu disiplin yang lebih bercirikan sosiologi. Sosiologi kesehatan diharapkan berkembang sebagai subdisiplin sosiologi yang berbeda dengan sosiologi medis.

Dalam hal apa sajakah sosiologi kesehatan berbeda dengan sosiologi medis. Twaddle (1982), merinci sejumlah dimensi yang membedakan sosiologi kesehatan dengan sosiologi medis, yaitu sebagai berikut:

1. Ilmu yang dipakai. Sosiologi kesehatan, ilmu-ilmu sosial dan humaniora, sedangkan sosiologi medis, ilmu-ilmu biologi, psikologi dan ilmu-ilmu sosial.
2. Satuan analisis. Sosiologi kesehatan, masyarakat dan struktur sosial, sedangkan sosiologi medis, individu, kelompok, dan organisasi sebagai satuan analisis.
3. Masalah kesehatan yang dikaji. Sosiologi kesehatan, masalah pembatasan kebebasan memilih serta dikurangnya keefektifan pribadi, sedangkan sosiologi medis, penyakit.
4. Peranan utama dalam penyembuhan. Sosiologi kesehatan, substitusi dokter, praktisi kesehatan masyarakat, penyembuh awam, pendidik, ahli gizi, dan politikus, sedangkan sosiologi medis, dokter, professional lain, dan pasien.
5. Cara penyembuhan. Sosiologi kesehatan, latihan, gizi, pengendalian lingkungan, dan perubahan sosial, sedangkan sosiologi medis, pengobatan, operasi, penggunaan zat kimia, dan perubahan kegiatan.
6. Kajian utama. Sosiologi kesehatan, tercapainya kesehatan, kesejahteraan, serta penurunan morbiditas dan mortalitas dalam populasi, sedangkan sosiologi medis, tercapainya penyembuhan dan perawatan individu.
7. Organisasi utama yang dikaji. Sosiologi kesehatan, rumah sakit, rawat jalan, serta perawatan mandiri, badan legislatif, sekolah, dan organisasi informal, sedangkan sosiologi medis, rumah sakit, rawat jalan, serta perawatan mandiri.

Twaddle menyimpulkan bahwa dengan terjadinya pergeseran-pergeseran dalam ketujuh dimensi tersebut di atas, maka sosiologi medis telah bergeser menjadi sosiologi kesehatan. Menurutnya, pergeseran tersebut mencakup:

1. Perkembangan menjadi disiplin mandiri yang tidak lagi menjadi pelengkap bidang medis;
2. Alih fokus dari masalah mikro, seperti interaksi dan individu ke masalah makrososiologis, yaitu sistem dan institusi;
3. Alih fokus dari penyembuhan oleh dokter ke pencerahan melalui sistem;
4. Beralihnya pendekatan dukungan teknis bagi penyembuhan penyakit ke pendekatan kritis terhadap kesehatan;
5. Peralihan dari pendekatan biopsikologis ke sikap sosial-budaya.

Pandangan Twaddle mengenai pergeseran sosiologi medis ke sosiologi kesehatan ini bersumber pada kecenderungan yang diamatinya di lapangan. Dalam kenyataannya mulai banyak terbit bahan pustaka yang berorientasi pada sosiologi kesehatan, bukan lagi pada sosiologi medis. Di perguruan tinggi pun mulai banyak ditawarkan mata kuliah sosiologi kesehatan (Sunarto, 2014).

Namun, perlu diketahui, sebagaimana telah disebutkan di atas, sosiologi kesehatan merupakan bidang ilmu yang masih muda. Hingga kini pengajaran dan penelitian di bidang sosiologi medis tetap dominan. Hal ini dapat kita lihat dari judul dan isi buku-buku dan jurnal-jurnal nasional maupun internasional serta nama-nama mata ajar yang dimuat di internet, dan pergeseran dimensi yang disebutkan oleh Twaddle baru merupakan titik-titik awal suatu proses perjalanan yang masih akan panjang.

B. Pengertian Sosiologi Kesehatan

Sosiologi kesehatan merupakan subdisiplin ilmu dari bidang sosiologi. Sosiologi kesehatan ini mempelajari interaksi antara masyarakat dan kesehatan. Kajian utamanya, untuk melihat bagaimana kehidupan sosial memiliki dampak terhadap morbiditas dan mortalitas. Di samping itu, sosiologi kesehatan mempelajari kesehatan dan keadaan sakit berkaitan dengan institusi sosial, seperti keluarga, pekerjaan dan sekolah.

Berikut ini definisi sosiologi kesehatan menurut beberapa ahli:

1. Suriani (2019), Sosiologi kesehatan dapat didefinisikan sebagai studi sosiologis tentang kesehatan. Secara spesifik, sosiologi kesehatan mempelajari bagaimana hubungan antara pola-pola kehidupan sosial terhadap angka kelahiran atau kematian dan sebaliknya. Sosiologi kesehatan juga mempelajari bagaimana hubungan antara berbagai institusi sosial yaitu keluarga, sekolah, pekerjaan, agama, ras, dan lainnya mempengaruhi kesehatan dan mendasari pengambilan keputusan terkait cara penanganan kesehatan.
2. Rosmalia dan Sriani (2017), Sosiologi kesehatan adalah penerapan konsep dan metode disiplin sosiologi dalam mendeskripsikan, menganalisis dan memecahkan masalah kesehatan. Dengan kata lain, sosiologi kesehatan merupakan penerapan ilmu sosial dalam mengkaji masalah kesehatan.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi kesehatan sebagai bagian dari sosiologi yang membahas dan menganalisis fenomena kesehatan, dengan bantuan konsep-konsep dan metode sosiologi.

C. Pendekatan Sosiologi Kesehatan

Dalam upaya memahami suatu gejala sosial dalam masyarakat, maka studi-studi dalam sosiologi dilakukan dengan menggunakan dua macam pendekatan (Sarwono, 1993), yaitu:

1. Pendekatan Emik. Pendekatan ini menguraikan suatu gejala sosial sesuai dengan pandangan si pelaku sendiri, memahami perilaku individu atau masyarakat dari sudut pandang si pelaku sendiri (individu tersebut atau anggota masyarakat yang bersangkutan). Misalnya, ada orang yang menggunakan pengobatan alternatif dengan menggunakan cara metafisika. Maka makna pengobatan dan keakurasian model pengobatan tersebut bukan menurut peneliti,

melainkan harus diungkap menurut pengguna atau pelaku layanan pengobatan tradisional.

2. Pendekatan Etik. Pendekatan ini yaitu upaya menguraikan suatu gejala sosial atau interaksi sosial dari sudut pandang orang luar atau sudut pandang observer (menganalisis perilaku atau gejala sosial dari pandangan orang luar serta membandingkannya dengan budaya lain). Jika seseorang sedang melakukan pengamatan ilmiah, maka pengalaman dan pengetahuan ilmiah yang dimiliki dijadikan sebagai alat ukur atau standar dalam menjelaskan masalah interaksi sosial.

Dengan demikian, maka pendekatan etik bersifat lebih objektif, dapat diukur dengan ukuran dan indikator tertentu, sedangkan pendekatan etik relatif lebih subjektif dan banyak menggunakan kata-kata atau bahasa dalam menggambarkan perasaan individu yang menjadi objek kajian. Studi-studi sosiologi biasanya menggunakan kedua pendekatan ini guna memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang gejala yang diselidiki. Jika studi ini menggunakan informan untuk memperoleh informasi, maka informan itu dapat memberikan informasi yang bersifat etik (misalnya siapa saja yang datang dalam gotong royong), maupun etik (misalnya apa makna upacara kremasi bagi penganut agama Hindu-Bali).

Dalam mengembangka sosiologi kesehatan ini, seorang dokter atau tenaga kesehatan dapat mengembangkan sikap verstehen, yaitu kemampuan untuk menyelami apa yang dirasakan oleh pasien atau masyarakat itu sendiri. Setelah memahami apa yang dialami oleh pasien, kemudian pada tahap selanjutnya dianalisis berdasarkan ilmu kesehatan yang sudah dimilikinya. Dengan demikian, penerapan ilmu sosiologi kesehatan dapat disebut sebagai upaya membangun pendekatan terpadu antara etik dan etik, sehingga layanan kesehatan lebih bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

D. Kegunaan Sosiologi Kesehatan

Sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara masyarakat dan kesehatan, sosiologi kesehatan mempunyai kegunaan, yaitu:

1. Mampu menganalisis sifat, karakter atau perilaku individu, kelompok, atau masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan dan penyakit.
2. Menganalisis faktor-faktor sosial yang berhubungan dengan kesehatan dan penyakit di masyarakat.
3. Menambah kemampuan untuk melakukan penilaian klinis tentang kesehatan dan penyakit secara lebih rasional, sehingga promosi kesehatan dapat berjalan lebih efektif.
4. Membantu pemerintah atau pihak terkait lainnya dalam penerapan kebijakan, peningkatan kemampuan penanggulangan, dan peningkatan kualitas kesehatan di masyarakat.

E. Objek Kajian Sosiologi Kesehatan

Menurut Suriani (2019), objek kajian sosiologi kesehatan yaitu:

1. Penyakit dan kesehatan
Kajian mengenai kesehatan selalu berhubungan dengan penyakit. Sering kali orang dikatakan sehat pada level tertentu, apabila tidak menderita suatu penyakit pada level tertentu. Subdisiplin ini konsen pada pembahasan bagaimana seseorang atau masyarakat bisa dikatakan sehat atau sakit. Sebagai contoh, orang dikatakan sakit apabila tidak dapat menjalankan peran sosial sebagaimana mestinya.
2. Pelayanan kesehatan
Bagaimana masyarakat memilih atau terpaksa memilih pelayanan kesehatan yang ada merupakan salah satu kajian dalam subdisiplin ini. Pelayanan kesehatan tidak hanya dilihat sebagai prosedur teknis dalam menangani pasien dan berapa biayanya, namun juga peran institusi sosial yang menyediakannya, dari negara, rumah sakit, hingga keluarga.

3. **Kriminalitas dan kekerasan**
Kriminalitas dalam kacamata sosiologi kesehatan dapat dilihat sebagai pemicu stress suatu masyarakat atau output dari kondisi masyarakat itu sendiri. Kriminalitas dan kekerasan merupakan masalah sosial yang berhubungan erat dengan adanya suatu penyakit baik dalam tataran individual ataupun kolektif.
4. **Kondisi mental**
Bagaimana aspek mental seseorang mempengaruhi perilakunya sehingga berdampak pada stabilitas sosial masyarakat dan sebaliknya masuk dalam ruang lingkup sosiologi kesehatan. Diskusi yang cukup sering dibahas berangkat dari definisi “normal”. Apakah suatu kondisi normal benar-benar dapat direfleksikan pada perilaku yang dipraktikkan oleh mayoritas, sehingga konsekuennya, individu yang tidak ikut arus dapat dikatakan tidak normal atau menyimpang.
5. **Intervensi kesehatan berbasis masyarakat**
Ruang lingkup ini membahas tentang bagaimana kolektivitas dan integrasi sosial menjadi determinan kondisi kesehatan suatu masyarakat dan juga menentukan pilihannya dalam menyelesaikan problem kesehatan. Intervensi untuk menangani masalah kesehatan didasari oleh pengetahuan akan kondisi sosial masyarakat tersebut.
6. **Pengetahuan dan kekuasaan**
Sosiologi kesehatan menaruh perhatian pada hubungan yang timpang antar aktor sosial di bidang kesehatan, misalnya relasi antara dokter dan pasien. Dokter dilengkapi pengetahuan akan suatu penyakit yang diderita pasien melalui pemahaman terhadap gejalanya, sedangkan pasien seringkali ditempatkan pada posisi yang tidak tahu apa-apa. Relasi yang timpang ini rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

7. Kebijakan kesehatan masyarakat
Subdisiplin ini juga mendiskusikan tentang bagaimana memformulasikan kebijakan terkait kesehatan masyarakat yang tetap sasaran. Tidak hanya apa saja bentuk kebijakannya, tetapi juga siapa aktor yang mengeksekusinya, siapa target intervensinya, apa hendak yang mungkin ditimbulkannya dan lain sebagainya.
8. Distribusi informasi medis
Informasi menjadi salah satu elemen mempengaruhi seberapa tinggi pengetahuan seseorang terhadap suatu kondisi kesehatan atau penyakit yang dialaminya. Informasi tentang obat-obatan, penyakit dan kesehatan bisa menjadi wilayah dominasi aktor-aktor tertentu, seperti apoteker, dokter, tabib, sampai dukun. Kini di era internet, informasi tersebar luas sehingga berpotensi mengubah distribusi pengetahuan di bidang kesehatan.

BAB VIII

SOSIOLOGI HUKUM

A. Perkembangan Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah satu cabang dari sosiologi, yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Karena itu harus dipahami bahwa sosiologi hukum bukanlah suatu cabang dari studi ilmu hukum, melainkan cabang dari studi sosiologi. Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat (Soekanto, 1987).

Sejak awal perkembangannya, sosiologi hukum lahir dari hasil pemikiran para ahli, baik di bidang ilmu hukum maupun sosiologi. Hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu, akan tetapi juga berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir yang pada garis besarnya mempunyai pendapat-pendapat yang tidak banyak berbeda (Soekanto, 1976). Sebagaimana kita ketahui, selama ini yang melahirkan sosiologi hukum bukanlah dari kalangan ilmuwan sosiologi, melainkan dari kalangan ilmuwan di bidang ilmu hukum. Kalaupun mereka seorang yang ahli di bidang sosiologi, tetapi dalam saat bersamaan mereka juga seorang ahli hukum atau yang menyelesaikan studinya di bidang hukum. Nama-nama seperti Max Weber, Eugen Erlich dapat kita majukan sebagai contoh. Demikian pula halnya di Indonesia, seperti Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo, dan penulis sosiologi hukum lainnya. Mereka-mereka ini tidak dibesarkan dengan latar belakang sosiologi, tetapi dibesarkan dengan latar belakang ilmu hukum (Chairuddin, 1991).

Persoalan menarik, mengapa kalangan ahli hukum ini tertarik untuk melihat hukum dari kacamata sosiologi? Memang untuk menjawab ini tidak mudah. Namun dapat diberikan jawaban sementara bahwa sekalipun dari sudut kacamata ilmu hukum bahwa hukum itu dapat dilihat sebagai perangkat peraturan-peraturan, pada sisi lain tak dapat diabaikan adanya kenyataan berupa hakekat sosial dari tata hukum. Hukum lahir sebagai hasil dari proses sosial. Hukum dalam masyarakat berfungsi sebagai kontrol sosial atau alat pengendalian sosial. Keadaan yang demikian ini mau tidak mau, suka atau tidak suka telah mengajak keterlibatan sosiologi. Karena itu, dalam setiap perubahan sosial, termasuk di dalamnya perubahan hukum, dan sering kali berakibat kepada perubahan struktur masyarakat secara keseluruhan. Hal ini merupakan salah satu objek kajian sosiologi (Chairuddin, 1991).

Ditinjau dari sudut sejarahnya, istilah sosiologi hukum untuk pertama kali dipergunakan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Terbentuknya sosiologi hukum pada dasarnya merupakan hasil-hasil pemikiran para ahli hukum dan sosiologi. Sosiologi hukum merupakan refleksi dari inti pemikiran-pemikiran para ahli tersebut. Di samping itu, juga pengaruh dari filsafat hukum (Soekanto, 1979). Beberapa madzhab dan aliran filsafat hukum telah memberikan masukan pada sosiologi hukum, yang pengaruhnya terasa hingga kini. Masukan yang diberikan tadi mempunyai pengaruh yang langsung maupun tidak langsung dan kerangkanya adalah sebagai berikut:

1. Aliran hukum alam (Aristoteles, Aquinas, Grotius):
 - a. Hukum dan moral;
 - b. Kepastian hukum dan keadilan sebagai tujuan dari sistem hukum, atau bahkan sebagai syarat utama dari hukum.
2. Madzhab Formalisme (Austin, Kelsen):
 - a. Logika hukum;

- b. Fungsi keajegan daripada hukum;
 - c. Peranan formal dari petugas hukum (kedaulatan).
3. Madzhab kebudayaan dan sejarah (Von Savigny, Maine):
 - a. Kerangka budaya dari hukum, termasuk hubungan antara hukum dan sistem nilai-nilai;
 - b. Hukum dan perubahan-perubahan sosial.
 4. Aliran Utilitarianisme dan *sociological jurisprudence* (Bentham, Jhering, Ehrlich, Pound):
 - a. Konsekuensi-konsekuensi sosial dari hukum;
 - b. Penggunaan yang tidak wajar dari pembentuk undang-undang;
 - c. Klasifikasi tujuan-tujuan makhluk hidup dan tujuan-tujuan sosial.
 5. Aliran *sociological jurisprudence* (Ehrlich, Pound) dan Legal realism (Holmes, Llewellyn, Frank):
 - a. Hukum sebagai mekanisme pengendali sosial;
 - b. Faktor-faktor politis dan kepentingan dalam hukum, termasuk hukum dan stratifikasi sosial;
 - c. Hubungan antara kenyataan hukum dengan hukum yang tertulis;
 - d. Hukum dan kebijaksanaan-kebiaksanaan hukum;
 - e. Segi perikemanusiaan dari hukum;
 - f. Studi tentang keputusan-keputusan pengadilan dan pola-pola perikelakuannya (Soekanto, 1979).

Penyebutan istilah sosiologi hukum yang pertama kali oleh Anzilotti ini kurang berarti, karena istilah tersebut tidak ada penjelasan selanjutnya mengenai perkembangannya sejak saat itu. Sementara itu, pandangan atau uraian yang lebih substansial sifatnya bagi perkembangan sosiologi hukum datang dari Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Max Weber, Karl Llewellyn, dan Emile Durkheim (Salman & Susanto, 2004). Untuk menghindari penonjolan tokoh tertentu, sementara yang lain tersembunyi, maka dipandang baik kalau beberapa tokoh di atas yang telah

berjasa dalam meletakkan fondasi sosiologi hukum dibahas. Setidaknya, tokoh tersebut menjadi rujukan oleh penerus atau sebaliknya sebagai sanggahan oleh pembaru dalam pemikiran sosiologi hukum pada masa berikutnya.

Berikut beberapa tokoh yang dipandang berjasa dalam meletakkan fondasi sosiologi hukum (Salman & Susanto, 2004), yaitu:

1. Roscoe Pound (1870-1964)

Pound, seorang ahli hukum dari Amerika dan mantan Dekan Harvard Law School. Ia merupakan salah seorang tokoh dari aliran *sociological jurisprudence* dan sebagai pembentuk ilmu hukum sosiologi (*sociological jurisprudence*, bukan *sociology of law*). Pound memberikan dan mengembangkan konsep-konsep baru untuk mempelajari hukum dalam masyarakat. Berkembangnya terkonologi serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomis, menimbulkan gagasan Pound untuk menjelaskan proses hukum sebagai suatu bentuk rekayasa sosial (*social engineering*). Menurut Pound, teori kepentingan merupakan inti sosiologi hukum. Ia berpendapat bahwa kepentingan merupakan suatu keinginan atau permintaan yang ingin dipenuhi manusia, baik secara pribadi, melalui hubungan antara pribadi atau melalui kelompok. Pound membedakan antara kepentingan pribadi, kepentingan umum maupun kepentingan sosial. Di dalam kepentingan sosial, tercakup antara lain kepentingan akan keamanan umum, kehidupan pribadi, perlindungan terhadap moral, konservasi sumber-sumber daya sosial dan alam, serta kepentingan dalam perkembangan ekonomi, politik dan kebudayaan.

Pokok pemikiran Pound berikutnya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses. Suatu pembentukan hukum, interpretasinya maupun penerapannya hendanya dihubungkan dengan fakta-fakta sosial. Pound sangat menekankan pada efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pound membedakan

pengertian law in books di satu pihak dan *law in action* di lain pihak. Perbedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantif maupun hukum ajektif. Ajarannya tersebut menonjolkan apakah hukum yang diterapkan sesuai dengan pola-pola perilaku. Ajarannya tersebut dapat diperluas lagi sehingga mencakup masalah-masalah keputusan pengadilan serta pelaksanaannya, dan juga antara isi suatu peraturan dengan efek-efeknya yang nyata. Dari uraian ini tampaknya sudah jelas bahwa hukum merupakan suatu objek yang sangat penting bagi para sosiolog yang menaruh perhatian terhadap gejala-gejala hukum sebagai gejala sosial.

Berbicara mengenai penerapan hukum, Pound berpendapat bahwa dalam mengadili sesuatu perkara menurut hukum terdapat tiga langkah yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan di antara banyak kaidah di dalam sistem hukum, atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, mencapai suatu kaidah untuk perkara itu (yang mungkin atau tidak mungkin dipakai satu kaidah untuk perkara lain sesudahnya) berdasarkan bahan yang sudah ada menurut suatu cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum.
 - b. Menafsirkan kaidah yang dipilih atau diterapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk dan berkenaan dengan kekuasaannya yang dimaksud.
 - c. Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsir demikian.
2. Eugen Ehrlich (1862-1922)

Ehrlich, seorang ahli hukum dan sosiolog dari Austria yang hidup di zaman Weber, dan seringkali dianggap sebagai pembentuk ilmu hukum sosiologis (sociological jurisprudence). Bagi Ehrlich, hukum hanya dapat dipahami dalam fungsinya di masyarakat. Titik pokok dalam pendekatan Ehrlich adalah bahwa

ia meremehkan perbedaan antara hukum dan norma-norma sosial lainnya yang bersifat memaksa. Perbedaan ini adalah nisbi dan lebih kecil daripada yang dinyatakan, karena sifat memaksa yang pokok di bidang hukum tidak berbeda dengan norma-norma sosial lainnya, adalah paksaan sosial bukan kekuasaan Negara. Kepatuhan suku dan keluarga pada agama memberikan alasan-alasan untuk mentaati norma-norma sosial, termasuk sebagian besar norma-norma hukum. Banyak norma-norma hukum tidak pernah diungkapkan dalam ketentuan-ketentuan hukum, bahkan juga dalam sistem-sistem yang berkembang. Bagi Ehrlich, secara historis, Negara adalah sumber hukum yang pokok. Perkembangannya jauh kebelakang dan Negara bagi dia selamanya adalah alat masyarakat, walaupun dalam kondisi-kondisi modern makin berkuasa hukum di Negara sosialis. Menurut Ehrlich, perlindungan oleh Negara dengan alat-alat paksa yang khusus adalah tidak perlu, juga kalau perlindungan itu diberikan. Badan yang sebenarnya dari ketentuan-ketentuan hukum selalu didasarkan atas fakta-fakta hukum sosial.

Tujuan pokok teori-teori yang dikemukakan oleh Ehrlich adalah meneliti latar belakang aturan-aturan formal yang dianggap sebagai hukum. Aturan-aturan tersebut merupakan norma-norma sosial aktual yang mengatur semua aspek kemasyarakatan yang olehnya disebut sebagai hukum yang hidup (*living law*). Hukum yang hidup adalah hukum yang dilaksanakan dalam masyarakat, sebagai hukum yang diterapkan oleh Negara. Ehrlich berpendapat bahwa proses peradilan merupakan suatu pengecualian apabila dibandingkan dengan kontrak-kontrak serta transaksi-transaksi yang terjadi sehari-hari. Ia menyatakan bahwa hanya sebagian kecil; segi kehidupan diadili oleh pejabat-pejabat resmi yang berfungsi menyelesaikan perkara atau perselisihan. Apabila seseorang ingin mempelajari hukum yang hidup, maka yang bersangkutan harus meneliti perjanjian-perjanjian perkawinan, kontrak, kontrak jual beli, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Ehrlich beranggapan bahwa hukum

tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Hukum sendiri tidak akan mungkin efektif, oleh karena ketertiban terletak pada pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh Negara.

Bagi Ehrlich, tertib sosial didasarkan pada faktaditerimanya hukum yang didasarkan pada aturan dan norma sosial yang tercermindalam sistem hukum. Secara konsekuen, ia beranggapan bahwa mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan sistem hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran itu harus ada pada setiap anggota profesi hukum yang bertugas mengembangkan hukum yang hidup (*living law*) dan menentukan ruang lingkup hukum positif dalam hubungannya dengan hukum yang hidup.

3. Max Weber (1864-1920)

Weber adalah seorang sosiolog dan ahli hukum Jerman, yang memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Peranan Weber dalam perkembangan sosiologi tidak hanya bersifat historis, akan tetapi ia merupakan seorang tokoh ilmuwan yang tetap berpengaruh dalam sosiologi kontemporer. Di samping itu, Weber menempati posisi penting di antara para ahli mengenai hukum dalam masyarakat.

Weber berpendapat bahwa hukum merupakan suatu tertib memaksa yang mempunyai dukungan potensial dari kekuatan Negara. Ia membedakan hukum dari norma-norma lainnya seperti adat istiadat dan konvensi yang mempunyai sanksi-sanksi yang berbeda. Selanjutnya, Weber membedakan antara sistem hukum yang didasarkan pada rasional formal dan rasional substantif. Pertama, didasarkan pada sistematisasi norma-norma umum dan pola keteraturan procedural, sedangkan yang kedua didasarkan pada pertimbangan keadilan terhadap putusan kasus-kasus individual. Sistem hukum yang didasarkan pada

rasionalitas formal didasarkan pada prosedur hukum yang dapat dikendalikan oleh golongan intelektual.

Dengan mempertimbangkan adanya rasionalitas formal dan substantif, Weber mengidentifikasi tiga tipe administrasi keadilan, yaitu keadilan kahdi, empiris, dan rasional. Keadilan Kahdi, diterapkan dalam peradilan Syariat, yang didasarkan pada persepsi keagamaan. Keadilan empiris, dilaksanakan atas dasar analogi, preseden maupun penafsirannya. Weber berpendapat bahwa hukum modern bersifat rasional, sedangkan hukum tradisional dan bersahaja bersifat irasional. Keadilan rasional, didasarkan pada prinsip-prinsip birokrasi yang sifatnya universal. Sistem hukum rasional berorientasi pada kontrak, dan bukan pada status. Rasional tersebut didasarkan pada ciri-ciri konkret yang dapat diamati dari fakta kasus yang sedang ditangani. Suatu masyarakat modern merupakan masyarakat yang didasarkan pada rasionalitas tersebut.

Selanjutnya, Weber beranggapan bahwa hukum modern masyarakat Barat semakin melembaga melalui birokratisasi Negara. Weber berpendapat bahwa pengakuan terhadap hukum sebagai ilmu rasional didasarkan pada postulat-postulat fundamental dan logis tertentu. Contohnya, bahwa hukum merupakan sistem prinsip-prinsip hukum yang lengkap, dan bahwa setiap keputusan judicial yang kongkret menyangkut penerapan proposisi hukum yang abstrak pada situasi-situasi konkret.

Weber juga menyoroti perbedaan antara hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif dimaksudkan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah yang dapat diterapkan secara umum terhadap semua warga masyarakat, sepanjang mereka tunduk pada suatu sistem hukum umum. Hukum subjektif mencakup kemungkinan-kemungkinan bagi seorang warga masyarakat untuk meminta bantuan kepada alat-alat pemaksa agar kepentingan material dan spiritualnya dapat dilindungi.

Pemikiran lainnya, Weber juga menekankan pada pelaksanaan hukum oleh suatu kekuasaan yang terpusat. Ia berpendapat bahwa seorang sosiolog tugasnya bukan untuk menilai suatu sistem hukum, akan tetapi hanya memahaminya saja. Hal ini dapat dipahami karena sosiologi hanya terbatas mengungkapkan apa yang ada, berlainan dengan ilmu hukum yang memberikan penilaian terhadap suatu kejadian.

Konsepsi Weber tentang hukum memungkinkan usaha-usaha untuk menemukan kelompok kecil sampai dengan kelompok besar seperti Negara. Sebenarnya, Weber tidak menganggap hukum sebagai perintah (*command*), akan tetapi sebagai suatu ketertiban (*order*). Dengan demikian, ia tidaklah memandang hukum semata-mata sebagai pelaksanaan suatu kekuasaan yang terpusat. Weber, sebetulnya lebih mengutamakan intisari hukum sebagai wewenang (*authority*).

4. Karl N. Llewellyn (1893-1962)

Llewellyn menganalisis perkembangan hukum di dalam kerangka hubungan antara pengaturan-pengaturan hukum dengan perubahan-perubahan keadilan sosial. Hukum merupakan bagian kebudayaan yang antara lain mencakup kebiasaan, sikap-sikap, maupun cita-cita yang ditransmisikan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Secara lebih tepat lagi, hukum merupakan suatu bagian kebudayaan yang telah melembaga. Lembaga-lembaga sosial terorganisir dan harapannya terwujud di dalam aturan-aturan eksplisit yang wajib ditaati serta didukung oleh para ahli.

Llewellyn beranggapan bahwa hukum dapat dianalisis dari perspektif kelembagaan, sehingga dapat dipahami baik oleh para ahli hukum maupun para ahli sosiologi. Suatu lembaga hukum dapat dianalisis dengan cara mengamati interaksinya, kaidah-kaidahnya maupun standar-standarnya. Ia mendeskripsikan fungsi lembaga hukum dalam kerangka pekerjaan-pekerjaan hukum. Pekerjaan-pekerjaan hukum menurut Llewellyn mencakup:

- a. Menyelesaikan kasus-kasus sengketa;
- b. Penyaluran perilaku, kebiasaan dan harapan-harapan, untuk mencegah atau mengurangi timbulnya sengketa;
- c. Menyalurkan kembali perilaku, membentuk kebiasaan baru serta harapan-harapan yang sesuai dengan kondisi-kondisi kehidupan pribadi maupun kelompok yang berubah tanpa menimbulkan sengketa baru;
- d. Mengadakan alokasi kekuasaan dan mengaturnya dalam kasus darurat, keraguan atau pembaharuan (Soekanto, 1985).

Llewellyn merupakan salah seorang ahli pikir modern mengenai hukum yang termasuk golongan realisme hukum. Mereka pada dasarnya meninggalkan hukum pada pekerjaan-pekerjaan praktis untuk menyelesaikan problema-problema dalam masyarakat. Kaum realisme tersebut mendasarkan pemikirannya pada konsep radikal mengenai proses peradilan. Menurut mereka, hakim lebih layak untuk disebut sebagai pembuat hukum daripada menemukannya. Hakim harus selalu melakukan pilihan, asas mana yang akan diutamakan dan pihak mana yang dimenangkan. Keputusan hakim sering mendahului ditemukan dan digarapnya peraturan-peraturan hukum yang menjadi landasannya. Aliran realisme ini selalu menekankan pada hakikat manusiawi dari tindakan tersebut.

Llewellyn mengemukakan, bahwa pendekatan hukum hendaknya konsep hukum menyinggung hukum yang berubah-ubah dan hukum yang diciptakan oleh pengadilan. Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Masyarakat berubah lebih cepat dari hukum dan oleh karenanya selalu ada kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana hukum itu menghadapi problema-problema sosial yang ada. Llewellyn juga menekankan bahwa untuk keperluan studi, untuk sementara harus ada pemisahan antara “is” dan “ought”. Ia tidak mempercayai adanya suatu anggapan bahwa peraturan-peraturan dan konsep-konsep hukum itu sudah mencukupi untuk

menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh pengadilan. Hal ini merupakan masalah utama bagi golongan realis dalam pendekatan mereka terhadap hukum. Sehubungan hal di atas, ia juga menolak teori tradisional bahwa peraturan hukum itu merupakan faktor utama dalam mengambil keputusan. Mempelajari hukum hendaknya dalam lingkungan yang lebih sempit, sehingga lebih nyata. Peraturan-peraturan hukum meliputi situasi-situasi yang banyak dan berlain-lainan, oleh karena itu ia bersifat umum, tidak konkret dan tidak nyata. Hendaknya hukum tersebut dinilai dari efektivitasnya dan kemanfaatannya untuk menemukan efek-efek tersebut (Dias, 1976).

5. Emile Durkheim (1858-1917)

Durkheim adalah seorang sosiolog Perancis terkemuka, yang menjelaskan pokok-pokok pikirannya mengenai hukum dalam masyarakat, di dalam bukunya mengenai pembagian kerja dalam masyarakat. Ia memperkembangkan sosiologi dengan ajarannya yang klasik. Pada awalnya, ia tidak mempunyai perhatian terhadap hukum. Namun, pada tahap selanjutnya, ia melihat adanya keterkaitan hukum dengan kehidupan bermasyarakat.

Di dalam teori-teorinya tentang masyarakat, Durkheim menelaah perkembangan tertib sosial melalui lembaga sosial dan ekonomi. Atas dasar telaah tersebut, ia mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan hukum dengan menegaskan bahwa hukum merupakan ukuran bagi adanya tipe-tipe solidaritas, yaitu solidaritas mekanis akan dapat ditemukan pada masyarakat yang relatif bersahaja dan homogeny. Kesatuan dan persatuan dalam masyarakat tersebut pada umumnya didasarkan pada hubungan antar pribadi serta kebiasaan, gagasan maupun sikap. Solidaritas jenis jenis ini ditimbulkan dari kesamaan yang mengaitkan individu dengan masyarakatnya. Di dalam masyarakat seperti itu, terdapat kesamaan antara para anggotanya mengenai kebutuhan-kebutuhan, pola perilaku, kepercayaan dan sikap. Perasaan kesamaan ini tidak hanya menarik para anggota

menjadi satu, melainkan sekaligus juga menjadi landasan berdirinya masyarakat. Dengan demikian, serangan terhadap masyarakatnya akan dihadapi dengan kesadaran bersama pula yang berupa penindakan terhadap serangan tersebut, dalam hal ini berupa pemidanaan.

Durkheim merumuskan hukum sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Berat ringannya sanksi senantiasa tergantung dari sifat pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan peran sanksi-sanksi tersebut dalam masyarakat. Dengan demikian, kaidah-kaidah hukum dapat diklasifikasikan menurut jenis-jenis sanksi yang menjadi utama dari kaidah hukum tersebut. Di dalam masyarakat dapat ditemukan dua macam kaidah hukum, yaitu yang represif dan restitutif.

B. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang dari sosiologi umum sebagaimana halnya sosiologi pendidikan, sosiologi keluarga, sosiologi ekonomi, sosiologi politik, sosiologi agama, sosiologi industri, dan lainnya, yang secara analitis dan empiris untuk mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya (Salman, 1985; Soekanto, 1993). Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat (Wignjosebroto, 1994). Memberikan satu rumusan yang tepat tentang sosiologi hukum yang dapat mencakup semua persoalan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Sebab, selalu ada saja dalam setiap rumusan atau definisi tidak dapat mewakili persoalan atau keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan pengertian sosiologi hukum ini, penulis mengambil beberapa pendapat menurut beberapa ahli:

1. Johnson (1994), sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi

perwujudan lahiriah, di dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif (organisasi-organisasi yang baku, adat istiadat sehari-hari dan tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan inovatif) dan juga dalam materi dasarnya (struktur keruangan dan kepadatan lembaga-lembaga hukumnya secara demografis).

2. Adam Podgorecki, Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin teoritis dan umum, yang mempelajari keteraturan dari berfungsinya hukum. Tujuan utama dari sosiologi hukum adalah untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien (Soekanto, 1993);
3. Selznick, Sosiologi hukum merupakan kegiatan-kegiatan ilmiah untuk menemukan kondisi-kondisi sosial yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan hukum, serta cara-cara untuk menyesuaikannya (Soekanto, 1993);
4. Black, Pusat perhatian sosiologi hukum adalah pengembangan suatu teori umum tentang hukum, yang membahas semua jenis pengendalian sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Teori itu harus membahas hubungan antara hukum dengan lain-lain aspek kehidupan sosial, seperti misalnya, stratifikasi, lain-lain bentuk pengendalian sosial, pembagian kerja, integrasi sosial, dan seterusnya (Soekanto, 1993).
5. Soekanto (1993), sosiologi hukum menyoroti hubungan timbal balik antara hukum dengan proses-proses sosial lainnya dalam masyarakat.
6. Wignjosubroto (1994), sosiologi hukum menjelaskan dan menganalisis hukum dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat secara deskriptif bukan preskriptif.

Dari beberapa definisi tersebut dapat dilihat bahwa walaupun terdapat berbagai definisi yang berbeda satu dengan yang lain, akan tetapi bisa ditemukan simpul-simpul persamaan di antara mereka, yaitu sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji hukum dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Sosiologi hukum mempelajari hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku dan diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi hukum tidak akan merasa puas hanya mempelajari hukum sebagai aturan-aturan tertulis saja, tetapi hendaknya mempelajari kehidupan hukum sebagaimana adanya di dalam masyarakat.

C. Pendekatan Hukum Sosiologis

Anwar & Adang (2017), menyebutkan pendekatan hukum itu terdiri dari tiga bagian, yaitu: (1) Pendekatan hukum normatif, (2) Pendekatan hukum sosiologis, dan (3) Pendekatan hukum holistik-visioner. Pendekatan hukum normatif, lebih melihat hukum sebagai bangunan norma yang harus dipahami dengan menganalisis teks atau bunyi undang-undang atau peraturan-peraturan tertulis. Dalam rangka mempelajari teks-teks normatif tersebut, maka yang menjadi sangat penting untuk menggunakan logika hukum (*legal reasoning*) yang dibangun atas dasar asas-asas, dogma-dogma, doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip hukum terutama yang berlaku secara universal dalam hukum (modern).

Pendekatan hukum sosiologis, melihat hukum sebagai bangunan sosial (*social institution*) yang tidak terlepas dari bangunan sosial lainnya. Hukum tidak dipahami sebagai teks dalam undang-undang atau peraturan-peraturan tertulis, tetapi sebagai kenyataan sosial yang manifest dalam kehidupan. Hukum tidak dipahami secara tekstual normatif, tetapi secara kontekstual. Sejalan dengan itu, maka pendekatan hukum tidak hanya dilandasi oleh sekedar logika hukum, tetapi juga dengan logika sosial. Pendekatan ini, diharapkan dapat menjelaskan berbagai fonemena hukum yang ada melalui alat bantu logika ilmu-ilmu sosial. Berbagai praktek-praktek hukum yang tidak sesuai dengan aturan normatif, disparitas hukum, terjadinya *deviant behavior, anomaly hukum*, ketidakpatuhan (*disobedience*), pembangkangan hukum, *violent*, kriminalisme dan sebagainya akan lebih mudah dijelaskan melalui pendekatan ini.

Pendekatan hukum holistik-visioner, diperlukan adanya pergeseran paradigma, di mana kedua pendekatan di atas dapat digunakan secara sinergis dan komplementer. Artinya, pendekatan terhadap hukum tidak hanya mengambil salah satu, tetapi harus mengambil keduanya secara utuh sehingga akan dapat dilakukan analisis secara holistik dan komprehensif. Pendekatan hukum yang positivistik saja akan menyebabkan hukum akan teraliansi dari basis sosial di mana hukum itu berada. Pendekatan ini semata mungkin akan dapat memperoleh nilai kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum. Sebaliknya, pendekatan hukum empiris, sosiologis, realisme, atau konteks sosial saja akan menyebabkan seolah-olah hukum tertulis menjadi tidak diperlukan, tetapi hanya melihat realitas hukum yang terjadi. Jika pendekatan ini dipakai sebagai satu-satunya alat dalam memahami hukum, maka sangat dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum bahkan dikhawatirkan tidak diperlukan lagi adanya hukum atau undang-undang sehingga lebih lanjut dapat terjadinya anarkisme hukum.

D. Kegunaan Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum mempunyai peranan sangat penting dalam memberi pengetahuan tentang mengkaji pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya, dan pada akhirnya mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hukum tidak dapat ditegakkan. Dalam menjalankan fungsinya, hukum sering kali mendapatkan hambatan dari berbagai faktor. Lahirnya sosiologi hukum diharapkan dapat membantu menemukan faktor-faktor yang menjadi hambatan. Sosiologi hukum mengkaji hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat tidak selalu sesuai dengan hukum positif yang tertulis dalam peraturan (UU). Rahardjo (1997), mengemukakan bahwa dalam suasana kemajemukan Indonesia yang begitu besar, maka cara-cara penegakkan hukum yang hanya merujuk kepada kata-kata undang-undang, serta pembuatan hukum yang tidak bertolak dari data sosiologis masyarakat Indonesia,

akan dapat menimbulkan persoalan lebih besar daripada yang ingin diselesaikannya. Singkatnya, sosiologi hukum yang bekerja melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai hal-hal yang terjadi dalam dunia empiris, sosiologis, atau kontekstual akan sangat membantu pengambilan keputusan yang berkualitas.

Berkaitan dengan hal ini, Soekanto (2012) mengemukakan bahwa sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan dalam hal:

1. Pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial;
2. Mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendali sosial maupun sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu;
3. Mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

Kegunaan-kegunaan umum tersebut, secara terinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada taraf organisasi dalam masyarakat:
 - a. Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan, dan penegakan hukum;
 - b. Dapat diidentifikasi unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum;
 - c. Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakannya.
2. Pada taraf golongan dalam masyarakat:
 - a. Pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menentukan dalam pembentukan dan penerapan hukum;
 - b. Golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya malah dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu;

- c. Kesadaran hukum daripada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.
3. Pada taraf individual:
 - a. Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan warga masyarakat;
 - b. Kekuatan, kemampuan dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya;
 - c. Kepatuhan dari warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajib-kewajiban hak, maupun perilaku yang teratur.

E. Objek Kajian Sosiologi Hukum

Objek kajian sosiologi hukum sebenarnya sampai hari ini belum jelas batasnya atau lapangannya. Artinya, apa yang telah dicapai oleh sosiologi hukum sampai saat ini bukanlah berarti pencerminan dari sosiologi hukum secara keseluruhan. Menurut Soekanto (2012), beberapa persoalan yang pada umumnya selalu mendapat sorotan dari para ahli sosiologi hukum adalah:

1. Hukum dan sistem sosial masyarakat.
2. Persamaan dan perbedaan sistem hukum.
3. Sifat hukum yang dualistis.
4. Hukum dan kekuasaan.
5. Hukum dan nilai sosial budaya.
6. Kepastian hukum dan kesebandingan.
7. Peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat.

Dalam usaha memahami objek kajian sosiologi hukum, Adi (2012), memberikan deskripsi tentang objek kajiannya sebagaimana apa adanya, yaitu:

1. Sosiologi hukum mempelajari hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku dan diperlukan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, hukum dipelajari dalam kaitannya dengan persoalan kontrol sosial dan sanksi. Hukum merupakan dasar

yang dipakai penguasa pemerintah untuk mengendalikan perilaku-perilaku warga masyarakat agar keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terwujud.

2. Sosiologi hukum mempelajari masalah sosialisasi hukum, yakni suatu proses untuk menjadikan warga-warga masyarakat menyadari akan adanya kaidah-kaidah suatu hukum. Selain itu, juga agar mereka sanggup mentaatinya dan melaksanakan ketentuan kaidah-kaidah tersebut.
3. Sosiologi hukum mempelajari stratifikasi sosial dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukum. Hukum yang secara normatif diidealkan tidak pernah memandang bulu, seringkali tidak dapat menghindarkan diri dari tindakan-tindakan diskriminatif. Hal ini berkaitan dengan adanya stratifikasi sosial di dalam masyarakat, yang pada kenyataannya memberikan perlakuan yang berbeda antara strata yang satu dengan strata yang lainnya. Masalah kesenjangan antara apa yang diidealkan dan diharuskan dengan apa ada dalam kenyataan, merupakan kajian sosiologi hukum.
4. Sosiologi hukum dalam kaitannya dengan apa yang ada dalam kenyataan tadi, mempelajari aspek struktural hukum; aparat pengada (lembaga legislatif dan eksekutif), pelaksana (badan yudikatif), dan penegak hukum (lembaga eksekutif). Selain itu, juga mempelajari organisasi, birokrasi, proses hukum dan peradilan.
5. Sosiologi hukum mempelajari (selain struktur dan fungsi hukum) perubahan-perubahan. Dalam hal ini, mempelajari hubungan antara perubahan masyarakat dan perubahan pranata hukum dan sebaliknya; hubungan antara upaya pendayagunaan hukum dan perubahan sosial. Dalam hal ini sosiologi hukum dilihat dari fungsinya sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat (social engineering) dan sebagai sarana kontrol sosial dalam rangka mempertahankan status-quo yang sudah ada.

Dari dua pendapat ahli di atas, objek kajian sosiologi hukum dengan kacamata penglihatan deskriptif. Artinya hanya ingin mengetahui dan memahami hal-hal objek kajiannya tanpa memberikan penilaian apa-apa tentang baik-buruknya. Jadi, sosiologi hukum hanya memberikan deskripsi tentang keadaan kualitas dan atau kuantitas dari objek kajiannya sebagaimana apa adanya; apakah kualitas tertentu ada atau tidak ada dalam objeknya itu, dan kalau ada, berapa besar kualitasnya. Dengan kata lain, sosiologi hukum mengkaji objeknya hanya terbatas pada eksistensi dan fungsi/disfungsi hukum dalam masyarakat serta seluk beluk mekanisme bekerjanya.

Meskipun sosiologi hukum mengkaji objeknya hanya secara deskriptif tanpa preskripsi (menilai), tetap mempunyai kegunaan atau manfaatnya. Data yang dinarasikan atau dipaparkan dari hasil kajian itu, diserahkan kepada mereka yang memerlukannya sebagai bahan untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan (jalan keluar) yang dapat dilakukan. Gambaran yang lebih nyata dan lengkap serta penjelasan yang diberikan sosiologi hukum akan sangat membantu pengambilan keputusan yang berkualitas. Sebaliknya, langkah-langkah dalam dunia praktis akan menjadi cacat apabila hanya bertolak dari pandangan subjektif para pengambil keputusan.

BAB IX

SOSIOLOGI POLITIK

A. Perkembangan Sosiologi Politik

Kapan sosiologi politik itu lahir? Akar-akar sosiologi politik sesungguhnya dapat ditelusuri jauh ke belakang pada pemikiran sejumlah pemikir sosiologi atau pemikiran ilmu politik klasik. Karya sosiologi politik pertama yang bersifat ilmiah dapat ditemui dalam buku Montesquieu yang berjudul *spirit of Law* (1748). Keilmiahannya itu dapat dilihat dari pernyataan: “Di sini kita laporkan apa yang ada dan bukannya apa yang seharusnya ada” (Duverger, 2005). Selanjutnya, nama-nama seperti Karl Marx (1818-1883) dan Max Weber (1864-1920) secara khusus dianggap memiliki sumbangan terbesar bagi peletak dasar-dasar sosiologi politik (Bendix & Lipset, dalam Suryadi, 2007). Sebenarnya, kedua tokoh sosiologi klasik itu tidak secara jelas menjelaskan tentang sosiologi politik, tetapi teori-teori dan konsep-konsep mereka tersebut dapat memberikan suatu pemahaman yang mendalam tentang sosiologi politik dengan berdasarkan teori sosiologi klasik. Persamaan kedua tokoh tersebut dalam menjelaskan teorinya adalah: memberikan analisis secara makro; penjelasan bersifat komparasi sejarah; mengemukakan adanya perubahan sosial. Teorinya dapat diterapkan di semua tipe masyarakat (Anwar & Adang, 2017). Walaupun teori yang dikembangkan Marx banyak mendapatkan kritik, namun lebih dari itu, yang terpenting, Marx telah memberikan sumbangan bagi muncul dan berkembangnya sosiologi politik, yang tercermin pada teori umumnya tentang dialektika materialisme dan teori-teori, khususnya mengenai perjuangan kelas, aliansi dan sebagainya; yang dapat merangsang timbulnya karya-karya lain dalam bidang

sama yang mendapatkan pengembangan di sana-sini (Basrowi, dkk, 2012).

Pada awal perkembangannya, konsep sosiologi politik mengalami perdebatan serius dikalangan ilmuwan sosial. Setidaknya ada dua pemikiran yang bisa diklasifikasikan secara ekstrim dalam melihat sosiologi politik. Pertama, sosiologi politik dianggap sebagai ilmu tentang Negara. Kedua, sosiologi politik dianggap sebagai ilmu tentang kekuasaan (Duverger, 2007; Maran, 2001; Anwar & Adang, 2017). Sosiologi politik sebagai studi Negara ada dua arti Negara. Pertama, Negara bangsa (*nation-state*), yang mengacu pada masyarakat nasional. Kedua, Negara pemerintah (*governmant-state*), yang mengacu pada penguasa dan pemimpin dari masyarakat nasional tersebut. Sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan, memfokuskan pada perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah. Dalam setiap kelompok manusia, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, mulai dari yang rapuh hingga yang paling stabil terdapat orang yang memerintah dan mereka yang mematuhiinya, terdapat mereka yang membuat keputusan dan orang-orang yang mentaati keputusan yang bersangkutan.

Senada dengan pendapat para ahli di atas, Suryadi (2007) mengemukakan bahwa dari segi perkembangan kedua disiplin ilmu tersebut sangat terlihat perbedaan wilayah kajiannya. Seperti sosiologi lebih berfokus pada aspek masyarakat, sedangkan politik lebih berfokus pada aspek kekuasaan, Negara, pemerintahan, kehidupan politik, fakta-fakta politik, kelembagaan politik, perilaku politik. Selanjutnya, Suryadi menjelaskan, bahwa sangat terlihat sosiologi dan ilmu politik yang berbasis tradisional dianggap kurang mampu menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat. Untuk penjelasan yang komprehensif dan dapat dijadikan sumbangan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan masyarakat, maka dilakukan pertemuan dua wilayah ilmu tersebut, sehingga menghasilkan pendekatan sosiologi politik.

Kedua konsep di atas tidak dengan sendirinya memperjelas pengertian sosiologi politik. Namun, kedua konsep tersebut paling tidak menjadi dasar teoritis bagi pembicaraan tentang sosiologi politik. Oleh karena itu, merumuskan teori sosiologi politik merupakan tantangan sekaligus peluang bagi ahli sosiologi politik kontemporer.

Menurut Suryadi (2007), sosiologi politik mulai tersusun benang merahnya, yaitu pendekatan, teori dan topik kajiannya, ketika awal tahun 1950-an. Seperti Reinhard Bendix dan Seymour Martin Lipset, mulai memelopori penerbitan sejumlah karya penting (Orum, 1978). Mereka bukan saja mulai memperkenalkan, tetapi juga mengembangkannya, seperti mengkaji hubungan antara kekuasaan dan struktur masyarakat. Kemudian, fokus sosiologi politik mulai memperoleh penajaman, dengan telaahan tentang bagaimana persoalan sosial mempengaruhi proses politik, atau melihat persoalan politik dengan sudut pandang masyarakat (Sulistyo, 1990). Tak mengherankan bila kemudian muncul karya-karya yang dapat digolongkan dalam bidang sosiologi politik. Karya-karya itu berupa penelitian mengenai hubungan antara masalah-masalah politik dan masyarakat, antara struktur sosial dan struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dengan tingkah laku politik (Maran, 2001).

Banyak tokoh-tokoh atau pemikir sosiologi dan ilmu politik yang telah memberikan sumbangan-sumbangan yang sangat penting dalam bidang sosiologi politik, seperti Marx, Weber, Mosca, Pareto, dan Michels. Di antara tokoh-tokoh tersebut, ada dua tokoh yang sangat menonjol, yaitu: Karl Marx (1818-1883) dan Max Weber (1864-1920) (Rush & Althoff, 1997).

1. Karl Marx (1818-1883)

Sumbangan Marx sangat besar dan bervariasi, yang dapat digolongkan dalam tiga bidang, yaitu teori umum, teori khusus dan metodologi (Rush & Althoff, 1997; Maran, 2001). Teori

umum, berfokus pada determinisme ekonomi dan dialektika materialisme. Teori khusus, berfokus pada perjuangan kelas dan alienasi (keterasingan, rasa asing diri). Metodologi, berfokus pada upaya untuk mengembangkan sosialisme ilmiah.

Teori umum Marx berfokus pada konflik material yang bersumber dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang saling bertegangan. Menurut Marx, ciri utama masyarakat bukannya stabilitas dan kesalingtergantungan, melainkan konflik dan persaingan. Setiap masyarakat, baik di masa lalu maupun di masa sekarang ditandai dengan konflik sosial, yaitu antara kaum borjuis, yang memiliki sarana produksi (majikan), dengan kaum proletariat, yang tidak memiliki sarana produksi (buruh). Kedua kelas itu, akan terus berkonflik, hingga pada akhirnya dimenangkan oleh kaum proletariat. Kapitalisme akan dihancurkan dan kelas pekerja akan membangun masyarakat tanpa kelas. Itulah masyarakat impian Marx. Dalam masyarakat impiannya itu, setiap orang akan bekerja menurut kemampuan dan menerima sesuai dengan kebutuhannya. Marx, tidak mengakui bahwa perbedaan antara kaum kapitalis dan kaum pekerja ditentukan oleh seleksi alamiah. Sebaliknya, ia yakin bahwa perbedaan di antara mereka itu ditentukan oleh sistem ekonomi (Rush & Althoff, 1997; Maran, 2001).

Teori khusus Marx, mengembangkan teori nilai kerja David Home (1711-1776) menjadi nilai lebih dan eksploitasi tenaga kerja. Semua ini menjadi basis sosiologinya yang disebut perjuangan kelas. Marx juga mengembangkan teori alienasi, keterasingan. Menurut Marx, ada tiga elemen alienasi, yaitu: (1) keterasingan pekerja dari hasil-hasil pekerjaannya, (2) keterasingan pekerja dari pekerjaannya sehingga kegiatan kerjanya sendiri menjadi sesuatu yang terasing dan dengan demikian mengasingkan si pekerja yang bersangkutan dari dirinya sendiri, dan (3) keterasingan pekerja sebagai makhluk yang bebas, sadar dan produktif. Dengan demikian, kelas pekerja

itu pun menjadi kian terasing dari masyarakat. Pekerjaan yang mereka lakukan dijadikan alat untuk menghindari kelaparan dan bukan menjadi sarana pernyataan diri. Situasi itu, pada waktunya memicu kesadaran kelas. Kaum pekerja pada akhirnya menyadari diri sebagai bagian dari kelompok-kelompok sosial atas dasar ekonomi. Situasi ini yang kemudian memunculkan konflik kelas (Rush & Althoff, 1997; Maran, 2001).

Teori metodologi Marx, berfokus pada usaha pengembangannya mengenai sosialisme ilmiah, yaitu memberikan standar keilmuan dan metode-metode yang menjadi suri tauladan bagi ilmuwan-ilmuwan berikutnya. Marx, selalu berusaha memberikan dasar yang kokoh pada teori-teorinya dengan jalan menyajikan sejumlah besar pembuktian dan pengujiannya dengan cara sistematis dan tepat teliti (Rush & Althoff, 1997).

2. Max Weber (1864-1920)

Weber adalah salah seorang pengkritik teori-teori Marx. Sumbangan Weber tidak hanya kritik-kritik pokok terhadap teori-teori Marx, tetapi juga sejumlah studi-studi khusus dan konsep-konsep, yang besar sekali artinya bagi sosiologi politik. Dalam karyanya *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (1904-1905) dan studi-studinya mengenai India, Cina, dan bangsa Yahudi, Weber berusaha menonjolkan faktor-faktor non-ekonomis, khususnya ide-ide yang menjadi faktor sosiologis yang amat penting. Status sosial atau strata sosial itu tidak hanya bisa dilandaskan pada kelas individualnya atau pada posisi ekonominya dalam satu masyarakat saja, tetapi juga pada status atau posisi sosialnya di tengah masyarakat, atau pada posisi individual di dalam struktur kekuasaan di tangan masyarakat. Semua itu, menurut Weber, bisa saling tumpang tindih, meskipun tidak perlu identik satu sama lainnya (Rush & Althoff, 1997).

Weber juga menyumbangkan beberapa ide konseptual dan ide-ide metodologis yang penting bagi sosiologi politik.

Politik, demikian penegasan Weber, adalah sarana perjuangan untuk bersama-sama melaksanakan politik, atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan, baik di antara Negara-negara maupun di antara kelompok-kelompok di dalam suatu Negara. Kemudian, Negara didefinisikan sebagai komunitas/masyarakat yang dengan sukses menuntut monopoli penggunaan kekuatan-kekuatan fisik yang sah di dalam satu teritorial tertentu. Demikian pula, Weber sangat memperhatikan masalah pelaksanaan kekuasaan dan keabsahannya. Konsep Weber mengenai legitimasi-landasan dari keabsahan kekuasaan adalah salah satu sumbangannya yang penting bagi sosiologi politik. Menurut Weber ada tiga tipe legitimasi, yaitu:

1. Tradisional (*tradisional authority*). Kekuasaan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat tradisional. Kekuasaan jenis ini mengambil keabsahannya atas dasar tradisi yang dianggap suci. Jenis kekuasaan yang berdasarkan tradisi dapat dibedakan ke dalam dua jenis kekuasaan, yaitu patriarkhalisme dan patrimonialisme. Patriarkhalisme adalah suatu jenis kekuasaan didasarkan pada senioritas. Mereka yang lebih tua atau senior dianggap secara tradisi memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Sementara, patrimonialisme adalah jenis kekuasaan yang mengharuskan seorang pemimpin bekerjasama dengan kerabat-kerabatnya atau dengan orang-orang dekat yang memiliki loyalitas pribadi kepadanya.
2. Kharismatik (*charismatic authority*). Kekuasaan kharismatik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang karena kualitas yang luar biasa yang dimilikinya. Apakah kualitas itu sungguh-sungguh ada (dimiliki) atau hanya berdasarkan dugaan orang belaka. Pihak si tertakluk menjadi tunduk dan patuh karena kepercayaan kepada kualitas luar biasa yang dimiliki orang tersebut. Para dukun, ahli guna-guna, penyihir, pemimpin suku, pemimpin partai, pada kondisi tertentu dapat berlaku dengan kekuasaan kharismatik ini.

3. Legal rasional (*rational-legal authority*). Kekuasaan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat modern. Kekuasaan ini dibangun atas dasar legitimasi (keabsahan) yang menurut pihak yang berkuasa merupakan haknya. Organisasi-organisasi modern misalnya, terutama yang bersifat politis merupakan tipe dari kekuasaan jenis ini. Si pemegang kekuasaan dalam memberikan perintah berdasarkan peraturan yang telah disepakati bersama. Keabsahan untuk membuat peraturan dan menjalankannya selalu berdasarkan pada konstitusi yang ditafsir secara resmi. Perintah-perintah yang diberikan berdasarkan norma-norma yang tidak bersifat pribadi atau perseorangan (Ritzer, 2009; Boedhi Oetoyo, dkk, 2015; Jones, dkk, 2016).

Kekuasaan yang telah diuraikan di atas, memiliki beragam bentuk struktur, namun bentuk yang paling menarik perhatian Weber adalah birokrasi, yang ia pandang sebagai tipe paling murni dari dijalankannya kekuasaan legal (Ritzer, 2009). Menurut Weber, dari sudut pandang teknis murni, birokrasi mampu mencapai tingkat efisiensi tertinggi, dan dalam hal ini secara formal dikenal sebagai sarana paling rasional untuk menjalankan kekuasaan terhadap manusia. Birokrasi membuka kemungkinan bagi tingginya tingkat kalkulabilitas hasil bagi kepala organisasi dan bagi mereka yang bertindak dalam kaitan dengan ini. Akhirnya, birokrasi lebih tinggi dalam hal efisiensi intensif dan cakupan operasionalnya dan secara formal dapat diterapkan pada segala macam tugas administrative (Ritzer, 2009). Singkatnya, birokrasi ditandai dengan sebuah cara pengaturan organisasi, misalnya tatakelola administrasi dan cara organisasi yang didasarkan pada rasionalisasi pekerjaan.

Warisan peninggalan metodologis penting lainnya dari Weber adalah konsep mengenai *verstehen* (pemahaman). Sebagai subyek, para sosiolog dapat memperoleh suatu pemahaman interpretative tentang makna perilaku tertentu. Melalui observasi yang hati-hati, mereka akan menguji pemahaman ini.

Menurut Weber, bahwa tingkah laku manusia akan lebih mudah dipahami, apabila motif-motif dan maksud-maksud mereka pun diperhitungkan. Di sini, Weber menekankan pentingnya sumbangan kekuatan ide sebagai faktor sosial.

Menurut Weber sosiologi harus bebas nilai (*value free*), tidak berpihak kepada kepentingan atau keyakinan moral pribadi. Para sosiolog harus mencegah bias personal dalam melakukan riset ilmiah. Hal ini untuk menjamin objektivitas kebenaran sosiologi. Semua itu, akhirnya mengundang kritik terhadap Weber. Pandangannya tentang sosiologi sebagai ilmu yang bebas nilai dikritik, karena penelitian terhadap motif-motif dan maksud-maksud tingkah laku manusia tentu akan menyangkut elemen interpretative, yang pada akhirnya tidak mungkin obyektif (Rush & Althoff, 1997; Maran, 2001).

B. Pengertian Sosiologi Politik

Apa pengertian sosiologi politik? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan para pakar sosiologi politik, yang sulit untuk diperdamaikan. Paling kurang ada dua pandangan tentang sosiologi politik. Pandangan pertama, sosiologi politik sebagai studi tentang Negara. Pandangan kedua, sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan (Maran, 2001). Sosiologi politik sebagai disiplin, mempelajari mata rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur-struktur sosial dan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dengan tingkah laku politik. Dengan demikian, kita melihat sosiologi politik sebagai suatu jembatan teoritis dan jembatan metodologis antara sosiologi dan ilmu politik (Suryadi, 2007).

Sebagai referensi, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang batasan sosiologi politik menurut para ahli, di antaranya:

1. Duverger (1996), sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando, di dalam semua masyarakat manusia, yang bukan saja di dalam masyarakat

- nasional, tetapi masyarakat lokal dan masyarakat internasional.
2. Sherman & Kolker (1987), sosiologi politik sebagai studi yang mempelajari mengenai partisipasi dalam pembuatan keputusan mengenai suatu kehidupan yang luas dan yang sempit. Kehidupan luas dan sempit yang dimaksud di sini merupakan kehidupan masyarakat daerah, nasional maupun internasional.
 3. Faulks (1999), sosiologi politik sebagai suatu studi yang mempelajari hubungan kekuasaan yang saling tergantung antara Negara dan masyarakat sipil. Di antara Negara dengan masyarakat sipil terdapat batas-batas kekuasaan yang saling berhubungan dalam proses perubahan sosial.
 4. Rush & Althoff (1997), Sosiologi politik adalah suatu disiplin yang mempelajari mata rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur-struktur sosial dan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dengan tingkah laku politik. Dengan kata lain, sosiologi politik adalah suatu metode yang dapat menerangkan masalah interaksi dan interelasi suatu sistem dalam masyarakat baik pada strukturnya maupun pada tindakan kulturalnya.
 5. Bottomore (1992), sosiologi politik sebagai keseluruhan pemikiran dan tindakan dalam sistem masyarakat baik pada strukturnya maupun pada realitas kulturalnya.
 6. Basrowi, dkk (2012), sosiologi politik mengkaji hubungan antara masyarakat dan Negara. Secara khusus, sosiologi politik mengkaji kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi pembuatan program-program publik yang ditetapkan pemerintah.
 7. Sahid (2011), sosiologi politik adalah bidang kajian yang menganalisis fenomena politik (kekuasaan) secara sosiologis.

Definis-definisi di atas menunjukkan adanya keberagaman mengenai pengertian sosiologi politik, sehingga agak sulit dipahami benang merahnya, seperti sosiologi politik mempelajari kekuasaan, partisipasi politik, kebijakan, hubungan masyarakat

dan Negara, hubungan politik dan masyarakat, hubungan struktur sosial dan struktur politik, hubungan tingkah laku sosial dan tingkah laku politik, dan lain-lain. Tetapi, setidaknya pengertian sosiologi politik itu dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sosiologi politik mempelajari masalah interaksi dan interelasi yang berhubungan dengan negara (*state*).
2. Sosiologi politik mempelajari masalah interaksi dan interelasi yang berhubungan dengan kekuasaan (*power*).
3. Sosiologi politik mempelajari masalah interaksi dan interelasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan (*decision making*).
4. Sosiologi politik mempelajari masalah interaksi dan interelasi yang berhubungan dengan kebijakan (*policy*).
5. Sosiologi politik mempelajari masalah interaksi dan interelasi yang berhubungan dengan pembagian (*distribution*) dan atau alokasi (*Allocation*) (Basrowi, dkk, 2012).

C. Pendekatan dan Metode

Pendekatan adalah orientasi khusus atau titik pandang tertentu yang digunakan dalam studi-studi sosiologi politik (Rush & Althoof, 1997; Sahid, 2011). Berdasarkan batasan itu, Sahid, (2011), mengemukakan tujuh pendekatan yang bisa digunakan dalam studi-studi sosiologi politik. Ketujuh pendekatan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Historis. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkapkan fakta atau peristiwa dan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah lalu. Pendekatan historis ini harus dilakukan secara sistematis dan objektif melalui proses pencarian, evaluasi dan penafsiran bukti-bukti yang dapat dipakai untuk mempelajari masa lalu. Berdasarkan bukti-bukti yang ada itu, ditarik kesimpulan mengenai masa lalu, bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi serta bagaimana keterkaitannya dengan masa kini. Dalam menarik

kesimpulan, pendekatan ini memerlukan sumber-sumber sejarah. Ada dua sumber sejarah, yaitu sumber pertama dan sumber kedua. Sumber pertama, seperti dokumen (barang peninggalan), atau artifak (benda-benda sejarah). Sumber-sumber ini adalah hasil langsung dari kejadian atau catatan para saksi mata. Termasuk juga dalam sumber pertama ini adalah narasumber sebagai pelaku peristiwa sejarah. Sumber kedua, laporan yang didasarkan pada catatan atau sumber pertama. Termasuk dalam sumber kedua adalah buku sejarah, atikel dalam ensiklopedia, dan kupasan dari hasil penelitian.

2. Pendekatan Komparatif (perbandingan). Pendekatan komparatif adalah pendekatan dengan ncara memperbandingkan data atau gejala politik mengenai fenomena yang sama atau berbeda dari suatu masyarakat tertentu dengan masyarakat lainnya. Menurut Laswel (Suyanto, 2005), menyatakan bahwa perbandingan adalah metode ilmiah yang penting dalam melakukan analisis ilmiah. Contoh, studi Almond, dkk, mengenai kebudayaan politik demokratis di lima Negara di dunia, yakni Amerika, Inggris, Jerman, Italia dan Meksiko. Dari data survai yang dilakukan di lima Negara ini kemudian diperbandingkan untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan mengenai kebudayaan politik mereka, apakah demokratis atau sebaliknya.
3. Pendekatan Institusional. Pendekatan institusional adalah pendekatan yang digunakan dalam studi yang memusatkan perhatian pada faktor-faktor kelembagaan, konstitusional, dan legalistik. Dari sudut pandangan ini tingkah laku politik selalu berlangsung di dalam satu kerangka institusional. Karena itu, baik tingkah laku maupun lembaga-lembaga tidak dapat dijelaskan secara tepat tanpa memahami keduanya sekaligus. Pendekatan ini secara implisit banyak dilakukan dalam studi-studi mengenai partai-partai politik

- dan tingkah laku legislatif.
4. Pendekatan Behavioral. Pendekatan behavioral adalah pendekatan yang memperhatikan secara khusus tingkah laku atau perangai. Pendekatan ini secara khas menekankan individu sebagai unit dasar dari analisis politik (bukan lembaga, seperti pendekatan institusional). Mengapa individu berperilaku politik tertentu dan apa yang mendorong mereka, merupakan pertanyaan dasar dari behavioral (Varma, 1999). Dalam penggunaan pendekatan ini, perlu memisahkan fakta dengan nilai-nilai dan dalam membuat generalisasi harus didasarkan verifikasi. Pendekatan ini mampu menampilkan sosok masyarakat politik yang tak terbatas oleh faktor-faktor eksternal, karena sepenuhnya ia mengkonsentrasikan pada factor-faktor dalam (perilaku) masyarakat dalam serangkaian tindakan politiknya itu. Akan tetapi, ada hal yang mesti dimengerti pula, bahwa pendekatan ini acap kali membuat penelitian menjadi kaku, baik pada tataran konseptualnya maupun analisisnya; mengingat fakta yang ada sulit diidentifikasi lewat tolak ukur yang bersifat trasparan. Contoh, rasa, bahkan prasangka yang tak dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan teoritis terasa mengental dalam pendekatan ini. Namun, sejauh tersedianya kerangka metodologis dan kerangka teoritis, pendekatan ini dapat dilakukan, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang tak dapat dihampiri melalui behavioralisme.
 5. Pendekatan Plural. Pendekatan plural melihat bahwa masyarakat terdiri atas beraneka ragam kelompok. Fokus pendekatan ini adalah pada interaksi antarkelompok tersebut. Pendekatan ini pernah dilakukan dalam berbagai studi, di antaranya oleh C. Wright Mills. Ia mengatakan bahwa interaksi kekuasaan antarkelompok tersusun secara piramidal. Sementara Robert A. Dahl sebaliknya, menyatakan bahwa kekuasaan antarkelompok relative tersebar, bukan piramidal (Varma, 1999).

6. Pendekatan Struktural. Pendekatan ini memandang bahwa fungsi-fungsi yang ada di sebuah Negara ditentukan oleh struktur-struktur yang ada di tengah masyarakat, bukan oleh mereka yang duduk di posisi lembaga-lembaga politik (Chilcote, 2000). Contoh, pada zaman kekuasaan Mataram (Islam), jabatan raja dan bawahan dipegang oleh pribumi (Jawa). Tapi, struktur masyarakat saat itu tersusun secara piramidal, yaitu Belanda dan Eropah di posisi tertinggi, kaum asing lainnya (Cina, Arab, India) di posisi tengah, sementara bangsa pribumi di posisi bawah. Dengan demikian, meskipun kerajaan secara formal diduduki pribumi, tetapi kekuasaan dipegang oleh struktur teratas, yaitu Belanda dan Eropa.
7. Pendekatan developmental. Pendekatan ini mulai populer saat muncul Negara-negara baru pasca Perang Dunia II. Pendekatan developmental menekankan pada aspek pembangunan ekonomi serta politik yang dilakukan oleh Negara-negara yang baru tersebut. Karya klasik pendekatan ini diwakili oleh Daniel Lerner melalui kajiannya di sebuah desa di Turki pada tahun 1958. Menurut Lerner, mobilitas sosial (urbanisasi, literasi, terpaan media, partisipasi politik) mendorong pada terciptanya demokrasi. Karya klasik lain ditengarai oleh karya Samuel P. Huntington dalam “Political Order in Changing Society” pada tahun 1968. Karya ini membantah kesimpulan Lerner. Bagi Huntington, mobilitas sosial tidak secara linear menciptakan demokrasi, tetapi dapat mengarah pada instabilitas politik. Menurut Huntington, jika partisipasi politik tinggi, sementara kemampuan pelembagaan politik rendah, akan muncul situasi disorder. Bagi Huntington, yang harus segera dilakukan Negara baru merdeka adalah memperkuat otoritas lembaga politik, seperti partai politik, parlemen, dan eksekutif (Huntington, 2000). Kritik terhadap pendekatan ini, mengapa dari ketidakmampuan Negara-negara baru tidak mereka sentuh, misalnya Negara dengan sumber daya

alam makmur mengapa tetap saja miskin. Kritik lain, jika pendekatan developmental yang menekankan pada aspek pembangunan bertujuan untuk memajukan ekonomi Negara baru berkembang, mengapa yang terjadi malah eksploitasi terhadap Negara berkembang (dunia ketiga) oleh Negara maju (Li, 2007). Negara dunia ketiga menjadi salah satu sarana penyedia tenaga kerja murah dan sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, jumlah penduduk yang relatif besar menjadi potensi pasar tersendiri (Norman, 2001). Inilah titik lemah pendekatan developmental yang lahir dari Rahim ideology Negara Barat (Sahid, 2001).

Di samping pendekatan sebagaimana disebutkan di atas, terdapat pula beberapa metode yang digunakan dalam studi sosiologi politik. Metode-metode tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Metode Kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan data kuantitatif (data dalam bentuk angka-angka), data dikumpulkan melalui survei dan kemudian dianalisis menggunakan teknik-teknis statistik. Contoh, studi tentang hubungan perilaku sosial dengan perilaku politik, hubungan struktur sosial dengan struktur politik, hubungan lingkungan sosial dengan partisipasi politik. Pada metode ini, para peneliti akan menggunakan telaahan berdasarkan teknik-teknik statistik yang terkadang terkesan rumit, mungkin membosankan. Kuesioner (angket), dalam studi ini sering kali ditempatkan sebagai alat pengumpul data yang cukup penting. Caranya, angket disebarakan kepada responden yang sesuai dengan permasalahan studi. Cara pembuktiannya, dengan menggunakan tes-tes statistik, untuk melihat kaitan antarfaktor, apakah hubungan tersebut bersifat kebetulan atau terjadi secara signifikan. Cara-cara pembuktian semacam ini, sekarang banyak dilakukan oleh para ahli dalam rangka mengembangkan sosiologi politik secara ilmiah.

2. Metode Kualitatif. Metode kualitatif tidak menyandarkan diri pada data kuantitatif yang berbentuk angka-angka untuk keperluan analisis data dan penarikan kesimpulan. Metode ini menghasilkan data bersifat deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilakunya yang dapat diamati. Artinya, hasil pengamatan itu tidak dapat dicurahkan lewat statistik, karena ia mungkin merupakan keyakinan, ideologi, perasaan, sifat atau kondisi emosional seseorang atau masyarakat. Wawancara, dalam studi ini sering kali ditempatkan sebagai alat pengungkap fakta yang cukup penting. Teknik analisis data, pada umumnya menggunakan teknik deskriptif analisis, yang lebih banyak menyandarkan pada kekuatan dan ketajaman berpikir logis-rasional peneliti, termasuk penguasaan konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Peranan Sosiologi Politik

Sebagai ilmu, seperti juga ilmu-ilmu lain, sosiologi politik mempunyai peranan atau manfaat, baik untuk pengembangan ilmu itu sendiri maupun bagi kehidupan manusia atau masyarakat pada umumnya. Apalagi bagi masyarakat yang sedang melaksanakan pembangunan, seperti bangsa Indonesia, sosiologi politik mempunyai peranan yang cukup penting, khususnya dalam melaksanakan pembangunan politik. Menurut sahid (2011), dalam pembangunan politik masyarakat atau bangsa, paling tidak diperlukan data mengenai hal-hal berikut:

1. Pola interaksi sosial dan pola interaksi politik. Dengan mengetahui pola interaksi sosial dan interaksi politik yang ada dalam masyarakat, maka dapat digariskan kebijakan-kebijakan tertentu untuk memperkuat pola interaksi yang mendukung pembangunan atau menetralkan pola interaksi yang menghambat pembangunan. Pola interaksi yang didasarkan efisiensi, misalnya, perlu terus diperkuat dan dikembangkan secara meluas untuk lebih memacu pembangunan. Sebaliknya,

pola interaksi yang didasarkan persaingan tidak sehat harus dinetralisasikan dan mengubahnya menjadi pola interaksi yang didasarkan pada persaingan sehat.

2. Kelompok-kelompok sosial dan politik yang menjadi bagian masyarakat. Ada kelompok-kelompok sosial dan politik yang mendukung pembangunan dan mungkin juga ada yang kurang mendukung. Hal ini perlu diketahui untuk mengambil garis kebijakan pembangunan.
3. Kebudayaan yang berintikan nilai-nilai. Di dalam masyarakat ada nilai-nilai yang mendukung pembangunan, ada yang tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap pembangunan dan ada pula yang menghambat pembangunan. Terhadap nilai-nilai kebudayaan yang menghambat pembangunan perlu proses transformasi, dan ini diperlukan kebijakan pendidikan politik yang relevan.
4. Lembaga-lembaga atau pranata-pranata sosial dan politik yang merupakan kesatuan kaidah-kaidah yang berkisar pada kebutuhan dasar manusia dan kelompok sosial atau politik.
5. Stratifikasi sosial yang merupakan perbedaan penduduk dalam kelas-kelas atau strata sosial tertentu secara vertikal. Hal ini penting untuk melihat dan menentukan pihak mana yang dapat dijadikan pelopor pembangunan atau agen pembangunan.

Pada tahap pelaksanaan, menurut Sahid (2011) perlu diadakan identifikasi terhadap kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan penelitian tentang pola-pola kekuasaan dan wewenang di dalam masyarakat, baik yang resmi maupun yang tidak. Dengan mengetahui kekuatan sosial tersebut dapat diketahui unsur-unsur mana yang dapat melancarkan pembangunan atau sebaliknya unsur-unsur mana pula yang menghambat pembangunan.

Hal yang berbeda dikemukakan oleh Basrowi, dkk (2012), bahwa peranan sosiologi politik lebih menyempitkan pada tataran

operasionalnya, yang menelaah persoalan masalah politik dalam masyarakat, interaksi antarkomponen politik, struktur sosial dan struktur politik, tingkah laku sosial dan tingkah laku politik, pembangunan politik. Kesimpulan Basrowi, dkk (2012) bahwa peranan sosiologi politik adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan mengetahui tata kelakuan politik;
2. Menjelaskan dan mengetahui interaksi antarkomponen politik;
3. Menjelaskan dan mengetahui masalah-masalah politik dalam masyarakat;
4. Menjelaskan dan mengetahui struktur sosial dan struktur politik;
5. Menjelaskan dan mengetahui tingkah laku sosial dan tingkah laku politik;
6. Menjelaskan dan mengetahui proses pembangunan politik.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peranan sosiologi politik bersifat menyeluruh dalam menjelaskan dan mengetahui berbagai persoalan yang terkandung dalam sosiologi politik. Proses sosial dan proses politik secara timbal balik saling mempengaruhi.

E. Objek Kajian Sosiologi Politik

Sosiologi politik mempunyai objek kajian yang merupakan persentuhan kedua objek bidang ilmu antara sosiologi dan ilmu politik. Objek kajian Sosiologi yaitu masyarakat, sedangkan objek kajian ilmu politik yaitu kekuasaan. Apa objek kajian sosiologi politik? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ahli sosiologi politik, yang sulit diperdamaikan. Umumnya para ahli sosiologi politik mempelajari masalah-masalah yang menjadi objek perhatian sosiologi politik seperti tersebut di bawah ini.

1. Kondisi-kondisi apakah yang menimbulkan tertib politik (*political order*) atau kekacauan politik (*political chaos*) di dalam masyarakat?

2. Mengapa sistem-sistem politik tertentu dianggap sah (legal) atau tidak sah (ilegal) oleh warga Negara?
3. Mengapa sistem-sistem politik tertentu stabil, sedangkan di pihak lain mengalami ketidakstabilan?
4. Mengapa dalam sistem pemerintahan terdapat pola-pola atau mekanisme politik yang bersifat otoriter, sedangkan di pihak lain terdapat mekanisme politik yang bersifat demokratis, dan mengapa pula terdapat sistem pemerintahan sebagai kombinasi antara keduanya?
5. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan variasi pada sistem kepartaian, taraf partisipasi politik, dan angka rata-rata pemilihan suara? (Maran, 2001; Elly & Kolip, 2015).

Berikut ini objek kajian sosiologi politik menurut beberapa ahli:

1. Bottomore (1992), menyebutkan objek kajian sosiologi politik meliputi pembahasan mengenai: (a) demokrasi dan kelas-kelas sosial, (b) gerakan-gerakan sosial, partai-partai, dan aksi politik, (c) tipe-tipe sistem politik, (d) perubahan politik dan konflik, (e) negara-negara, nasionalisme, dan pembangunan.
2. Duverger (1993) menyebutkan, objek kajian sosiologi politik meliputi berikut ini: (a) Pembahasan mengenai struktur politik, terdiri atas struktur fisik dan struktur sosial, (b) Pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab antagonisme politik, meliputi sebab-sebab individual, sebab-sebab kolektif, antagonisme menuju integrasi, serta integrasi dan kekuasaan.
3. Rush & Althoff (1997) menyebutkan, objek kajian sosiologi politik itu meliputi: (a) sosiologi politik, (b) partisipasi politik, (c) perekrutan politik, dan (d) komunikasi politik.

Dari tiga pendapat di atas, Basrowi, dkk (2012) dapat disimpulkan bahwa objek kajian sosiologi politik yaitu sebagai berikut:

1. Pembahasan mengenai proses terbentuknya hubungan kepolitikan.
2. Pembahasan mengenai perilaku politik.
3. Pembahasan mengenai sistem politik.
4. Pembahasan mengenai perkembangan dan perubahan politik.
5. Pembahasan mengenai sebab-sebab dan tujuan-tujuan politik.
6. Pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi interaksi dan interelasi politik.

BAB X

SOSIOLOGI PERKOTAAN

A. Perkembangan Sosiologi Perkotaan

Sosiologi perkotaan kajian utamanya adalah perkotaan. Apa itu kota? Dalam bahasa Inggris, mempunyai 3(tiga) kata yang menunjukkan pada pengertian kota, yaitu (1) *town*, (2) *city*, dan (3) *urban*. *Town* dan *City*, menunjukkan batasan teritorial yang bercirikan kota, sedangkan *Urban* adalah kualitas kehidupan yang bercirikan kota. *Town* dan *City* dibedakan atas dasar besarnya, dalam hal ini *City* (kota besar), dan *Town* (kota kecil). *Urban*, menunjukkan pada ciri dan cara hidup yang khas memiliki suasana kehidupan dan penghidupan modern yang dapat disebut daerah perkotaan (Kartono, 2010).

Dalam literatur Anglo-Amerika, terdapat dua istilah untuk kota, yaitu *town* dan *city*. Dalam bahasa Indonesia, *town* cenderung disepadankan dengan kota kecil, sedangkan *city*, diartikan dengan kota besar. *Town* merupakan bentuk tengah di antara kota dan desa. Penduduk *town* masih saling mengenal dengan akrab. Perilaku sosial dalam *town* lebih mirip dengan pola perdesaan apabila dibandingkan dengan pola di kota besar (*city*) atau metropolitan (Menno dan Alwi, 1992).

Ada banyak definisi yang berakitan dengan kota. Definisi kota yang agak representatif dijelaskan oleh Wirth (Imam, 1993), kota adalah sebuah pemukiman yang penduduknya relatif besar, padat, permanen, dan dihuni oleh orang yang heterogen. Pengertian ini menunjukkan bahwa kota memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan padat. Kawasan perkotaan berdasarkan jumlah penduduknya dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Kawasan perkotaan kecil, yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 10.000 hingga 100.000 jiwa;
2. Kawasan perkotaan sedang, yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 100.001 hingga 500.000 jiwa;
3. Kawasan perkotaan besar, yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih besar dari 500.000 jiwa;
4. Kawasan perkotaan metropolitan, yaitu kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih besar dari 1000.000 jiwa.

Bintarto (1984) menjelaskan bahwa kota adalah jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya materialistik. Secara fisik, kota selalu berkembang, baik melalui perembesan wilayah perkotaan maupun pemekaran kota. Wilayah perkotaan adalah suatu kota dengan wilayah pengaruhnya. Seperti hubungan kebergantungan antara suatu wilayah perkotaan dengan kota-kota kecil atau desa-desa dan sebaliknya. Wilayah kota adalah kota yang secara administratif berada di wilayah yang dibatasi oleh batas administratif yang berdasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Melihat beberapa definisi tentang kota di atas, tampaknya ada variasi sudut pandang tentang kota, yaitu ada dari segi fisik dan jumlah penduduk. Dilihat dari segi fisik, kota didefinisikan sebagai pemukiman yang mempunyai bangunan-bangunan perumahan yang berjarak relatif padat dan yang mempunyai sarana dan prasarana serta fasilitas yang relatif memadai guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan penduduk. Dari segi jumlah penduduk, kota didefinisikan berdasarkan kesepakatan mengenai jumlah minimum populasi yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan pemukiman sebagai suatu kota.

Pada beberapa Negara tidak terdapat standar yang baku tentang jumlah penduduk suatu wilayah yang disebut kota. Di Indonesia, misalnya, kota-kota umumnya dibatasi bukan oleh jumlah penduduk, tetapi lebih oleh batas administratif yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti Kota Madya, Kota Kabupaten, Kota Kecamatan, dan sebagainya. Bardo (1982), menjelaskan bahwa kota itu dapat dilihat dari dua ciri, yaitu ciri tampak (*tangible*) dan ciri tidak tampak (*intangible*). Ciri tampak, kota dilihat dari penampilan fungsinya, seperti kota untuk fungsi politik, ekonomi. Ciri tidak tampak, kota adalah kekhasan cara-cara hidupnya, seperti mengatur tempat tinggal, cara mengatur interaksi sosial, cara mengatur gaya hidup, dan sebagainya.

Setiap kota mengalami sejarah pertumbuhan dan perkembangan sehingga menjadi kota besar. Proses pembentukan kota tidak lepas dari segala aktivitas manusia. Banyak kota di dunia berawal dari desa. Dalam perjalanan waktu, karena keadaan topografis dan lokasinya, desa berkembang menjadi kota. Sejarah terbentuknya sebuah kota yang berada di suatu Negara biasanya bervariasi, tetapi memiliki inti yang sama. Terbentuknya kota juga bisa dikatakan sebagai awal sebuah tempat pertemuan antarpenduduk desa dengan penduduk di sekitar desa itu, baik untuk transaksi keperluan hidup, tempat pengumpulan barang, atau tukar menukar barang. Lama kelamaan ada yang bermukim di sekitar tempat itu dan kemudian pemukiman itu menjadi semakin besar. Berdatangan pula penduduk dari daerah sekitar ke tempat itu serta daerah lainnya, kemudian membentuk sebuah kota (Jamaludin, 2017).

Sjoberg (Meno dan Alwi, 1992), menjelaskan bahwa ada tiga tingkatan pergerakan masyarakat manusia hingga menuju menjadi masyarakat kota, yaitu:

1. *Preurban feudal society*, yaitu masyarakat feodal sebelum adanya atau menjadi kota-kota;
2. *Preindustrial feudal society*, yaitu masyarakat feodal sebelum adanya industri;

3. *Modern industrial feudal society*, yaitu masyarakat feodal dengan industry maju.

Sementara, De Goode (Meno dan Alwi, 1992), menjelaskan bahwa sebuah masyarakat berkembang menjadi kota apabila memiliki beberapa faktor berikut:

1. Jumlah penduduk keseluruhan;
2. Penguasaan atas alam lingkungan;
3. Kemajuan teknologi;
4. Kemajuan dalam organisasi sosial.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kota bisa berkembang apabila ada jumlah penduduk yang cukup besar untuk mendukung kegiatan kota itu sendiri. Kemudian, mampu menguasai sumber-sumber daya alam di sekelilingnya sehingga sanggup memanfaatkannya untuk kesejahteraan dan kemakmuran mereka. Tambahan, ditunjang pula oleh adanya bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga terciptanya inovasi dan invensi dalam rangka kemajuan ke arah lebih maju dan lebih baik.

Menurut Branch (1995), ada beberapa unsur yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kota, yaitu sebagai berikut:

1. Keadaan geografis, yaitu pengaruh letak geografis terhadap perkembangan fisik dan fungsi yang diemban oleh kota;
2. Tapak (*site*), merujuk pada topografi kota. Sebuah kota akan berkembang dengan memperhitungkan kondisi kontur bumi. Dengan demikian, pembangunan sarana dan prasarana kota akan menyesuaikan dengan topografinya agar bermanfaat secara optimal;
3. Fungsi yang diemban kota, yaitu aktivitas utama atau yang paling menonjol yang dijalankan oleh kota tersebut. Kota yang memiliki banyak fungsi, seperti fungsi ekonomi, dan fungsi kebudayaan, akan lebih cepat perkembangannya daripada kota berfungsi tunggal;

4. Sejarah dan kebudayaan yang melatarbelakangi terbentuknya kota, juga berpengaruh terhadap perkembangan kota karena sejarah dan kebudayaan mempengaruhi karakter fisik dan masyarakat kota;
5. Unsur-unsur umum, yaitu unsur-unsur yang turut mempengaruhi perkembangan kota, seperti bentuk pemerintahan dan organisasi administratif, jaringan transportasi, energi, pelayanan sosial dan pelayanan lainnya.

Kota-kota di Indonesia ternyata memiliki sejarah dan perkembangannya tersendiri. Menurut Koentjaraningkat (Meno dan Alwi, 1992), menjelaskan bahwa kota-kota di Indonesia bermula dari adanya kota-kota istana, kemudian kota pusat keagamaan, dan terakhir kota pelabuhan. Kemudian, muncul pula istilah kota administrasi.

1. Kota istana, dicirikan oleh susunan spasialnya yang mencerminkan konsepsi rakyat tentang alam semesta. Raja dan istananya dipandang sebagai pusat alam semesta dan penjaga keseimbangan. Contoh, kota Gianjar dan Klungkung di Bali, Yogyakarta dan Solo di Jawa Tengah.
2. Kota pusat keagamaan, susunan spasialnya berkisar di makam raja-raja, sebuah bangunan suci berupa candi, stupa, dan lain-lain. Contohnya, kota Gede dekat Yogyakarta.
3. Kota pelabuhan, susunan spasialnya terdiri atas bagian-bagian tempat tinggal para penguasa pelabuhan, yang dekat dengan pelabuhan. Contoh, kota pelabuhan adalah Banten, Demak, Gresik, dan Ujung Pandang (Makasar).
4. Kota administrasi, masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, khususnya ketika Belanda mulai menjajah negeri ini, maka muncullah kota-kota bentuk baru, yaitu berupa kota-kota administrasi. Susunan spasial kota administrasi ini berkisar disekelilingnya sebuah lapangan atau alun-alun. Pada lingkaran depan atau pertama sekeliling alun-alun itu terdapat rumah kediaman kepala pemerintahan daerah itu

(Gubernur, residen, bupati, dan sebagainya). Juga terdapat gedung-gedung penting, seperti gedung pemerintahan, gedung gereja, masjid, bank, dan penjara. Pada lingkaran berikutnya terdapat rumah-rumah para pamong praja, atau pejabat-pejabat eselon dalam pemerintahan.

Dari waktu ke waktu, perkembangan kota terus berubah, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk perkotaan serta meningkatnya jumlah kebutuhan kehidupan, dan meningkat pula kebutuhan ruang perkotaan yang besar. Dengan demikian, perkembangan kota, pada hakekatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hukum, politik, struktur perkembangan kota, fungsi kota, ekologi kota, tata ruang kota, urbanisasi, industri, kemiskinan, transportasi, pengangguran, pemukiman, kriminalitas, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Fenomena perkotaan tersebut merupakan pokok bahasan yang menjadi kajian bersama antara berbagai bidang ilmu yang ada, khususnya sosiologi perkotaan.

B. Pengertian Sosiologi Perkotaan

Sebagaimana disebutkan di atas, kota memang merupakan salah satu kajian sosiologi perkotaan. Namun, sebenarnya perkotaan telah menjadi kajian interdisipliner. Perkotaan tidak hanya dikaji oleh sosiologi perkotaan, tetapi dikaji oleh planologi dan geografi serta ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, ilmu komunikasi, antropologi, psikologi dan ilmu politik. Dengan pandangan seperti itu, maka di antara berbagai sudut pandangan ilmu terdapat bagian yang tumpang tindih satu sama lain dalam melihat perkotaan. Ini berarti ada bagian yang sama-sama diperhatikan, baik oleh sosiologi maupun ilmu sosial lainnya ketika mengkaji fenomena perkotaan. Sosiologi Perkotaan adalah salah satu cabang sosiologi yang mengamati pembentukan dan pertumbuhan kota serta kehidupan masyarakat dengan berbagai ragam fenomena sosial yang ada di masyarakat perkotaan.

Berikut ini definisi sosiologi perkotaan menurut beberapa ahli:

1. Damsar dan Indrayani (2017), sosiologi perkotaan adalah sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena perkotaan. Pendekatan sosiologis terdiri dari konsep-konsep, variabel-variabel, teori-teori, dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan perkotaan.
2. Hariyanto (2017), sosiologi perkotaan adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar manusia, yaitu antar individu maupun kelompok yang tinggal di kawasan perkotaan yang memiliki berbagai macam aspek, seperti ekonomi, hukum, kesehatan, dan lain sebagainya.
3. Asy'ari (1993), sosiologi perkotaan adalah ilmu sosiologi yang mengkaji dan menganalisis segi-segi kehidupan masyarakat dalam kawasan perkotaan.
4. Mansyur (1997), sosiologi perkotaan adalah mempelajari mengenai aspek masyarakat kota, baik karena sebab perpindahan maupun akibat revolusi industri.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi perkotaan adalah sebagai bagian dari sosiologi yang membahas dan menganalisis fenomena perkotaan dengan bantuan konsep-konsep sosiologi dan metode sosiologi. Definisi lain, sosiologi perkotaan adalah mengkaji dan menganalisis fenomena perkotaan dan hubungan-hubungan individu atau kelompok dalam kawasan perkotaan.

C. Metode Sosiologi Perkotaan

Kini, di kota-kota beragam masalah muncul, karena itu perlu metode penelitian untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan perkotaan tersebut. Metode penelitian berkembang dalam bentuk pendekatan, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, yang meliputi metode survei, studi kasus, studi eksperimen,

grounded research, dan sebagainya. Metode ini merupakan alat untuk mendapatkan atau memperoleh data. Melalui teori dan metode yang dimiliki, seorang peneliti mengkaji dan menganalisis fenomena perkotaan yang tumbuh dan berkembang sangat dinamis, yang menyangkut berbagai aspek kehidupan.

1. Metode Penelitian Kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metodologi ilmiah yang menggunakan angka-angka sebagai bahan-bahan keterangan data ilmiah. Dalam metodologi ini, gejala-gejala sosial dapat ditelaah melalui angka indeks, skala, tabel, dan rumusan lain yang sedikit banyak menggunakan prosedur statistik. Data yang diperoleh bersifat konkrit, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Dalam pengumpulan dan analisis data dengan pendekatan deduktif. Oleh karena itu, metode kuantitatif merupakan sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka-angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar.
2. Metode Penelitian Kualitatif. Metode kualitatif sebagai salah satu strategi penelitian yang mengungkapkan masalah sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Data penelitian berupa kata-kata, laporan-laporan, pandangan-pandangan dari penutur asli, dan sebagainya. Dalam pengumpulan dan analisis data menekankan pendekatan induktif. Oleh karena itu, metode kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Untuk melakukan penelitian sosiologi perkotaan, seorang peneliti harus mengikuti langkah-langkah penelitian secara sistematis. Berikut salah satu model penelitian, dan secara umum mengikuti langkah-langkah yang relatif sama dengan penambahan dan pengurangan tahapan, yaitu:

1. Memilih suatu topik;
2. Merumuskan masalah;
3. Meninjau bahan pustaka;
4. Merumuskan hipotesis;
5. Merumuskan definisi operasional atau definisi konsep;
6. Memilih suatu metode penelitian;
7. Mengumpulkan data;
8. Menganalisis data;
9. Menarik kesimpulan
10. Menulis dan menyebarkan hasil penelitian.

Dengan 10 (sepuluh) langkah tersebut di atas, lengkaplah suatu studi peneliti, akan tetapi suatu penemuan penelitian barulah kukuh setelah melalui pengulangan. Sebagian besar ahli menyebutkan, hanya melalui berbagai pengukuhan suatu kesimpulan penelitian dapat diterima sebagian besar secara umum (Horton & Hunt, 1984; Suyanto & Sutinah, 2005; Prasetyo & Janah, 2005).

D. Kegunaan Sosiologi Perkotaan

Dilihat dari segi kegunaannya, sosiologi perkotaan memberikan kontribusi untuk mengkaji dan menganalisis masalah perkotaan, yaitu:

1. Memberikan pengetahuan, pengertian, dan penjelasan dalam memahami fenomena perkotaan dengan pendekatan sosiologi perkotaan;
2. Memberi kontribusi bagi para ahli dalam memahami fenomena perkotaan berdasarkan teori sosiologi perkotaan;
3. Dapat melakukan penelitian dan memberikan masukan kepada pemerintah atau pihak lainnya dalam membuat kebijakan tentang fenomena perkotaan;

4. Membantu memecahkan masalah, kebijakan dan program yang berkaitan dengan masalah perkotaan (seperti kependudukan, urbanisasi, kemiskinan, transportasi, pedagang kaki lima, anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengangguran, pemukiman kumuh, kriminalitas, kenakalan remaja);
5. Menggugah partisipasi masyarakat akan tanggungjawab pembangunan dan pemeliharaan lingkungan perkotaan.

E. Objek Kajian Sosiologi Perkotaan

Objek kajian sosiologi perkotaan agak berbeda dengan sosiologi lainnya, seperti sosiologi keluarga, sosiologi agama atau sosiologi industri. Percabangang sosiologi tersebut mempunyai batasan yang jelas sebagai objek kajian. Akan tetapi, kota bukanlah suatu objek yang jelas batasannya. Di dalamnya terdapat kompleksitas yang tidak dapat dibatasi sebagai sistem sosial dengan ciri tertentu. Di dalam kota ada keluarga, ada agama, ada industri, ada pendidikan, ada ekonomi, ada hukum, ada politik, ada kesehatan, ada organisasi, dan semua objek kajian sosiologi. Bila seseorang belajar tentang interaksi atau hubungan-hubungan individu atau kelompok agama di suatu kota, haruslah kajian itu disebut sosiologi agama atau sosiologi perkotaan. Kerumitan ini muncul karena memang kota bukanlah dan tidak menjadi suatu sistem sosial yang utuh. Selain itu, kota itu sendiri tidak pernah tetap, tetapi berkembang terus seiring dengan perkembangan dan kehidupan masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, perkembangan sosiologi perkotaan selalu terbuka dan dinamis seiring dengan perkembangan dan kehidupan masyarakat perkotaan.

Selanjutnya, kita mencoba untuk memahami apa saja fenomena perkotaan yang bisa menjadi objek kajian sosiologi perkotaan. Menurut pendapat beberapa ahli yang menjadi objek kajian sosiologi perkotaan yaitu:

1. Bardo (1982), objek kajian sosiologi perkotaan meliputi:
 - a. Struktur kota;
 - b. Gaya hidup perkotaan;

- c. Organisasi sosial;
 - d. Faktor-faktor yang mempengaruhi (seperti perencanaan kota, manajemen kota, dan urban audit);
 - e. Akibat dari perkembangan pola tertentu (seperti kerusakan kota, abnormalitas kehidupan, dan sebagainya).
2. Damsar dan Indrayani (2017), objek kajian sosiologi perkotaan meliputi:
- a. Struktur sosial perkotaan (organisasi, kesatuan ekologis, kelompok, stratifikasi sosial, interaksi sosial, nilai, dan sistem nilai);
 - b. Lembaga perkotaan (lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga pendidikan);
 - c. Urbanisasi dan urbanisme;
 - d. Industrialisasi di perkotaan;
 - e. Gaya hidup perkotaan;
 - f. Kemiskinan perkotaan;
 - g. Hubungan antar-etnis, kelas, dan gender;
 - h. Ruang sosial dan publik perkotaan;
 - i. Sektor formal perkotaan;
 - j. Kapital (sosial, budaya, simbolik, dan spiritual) perkotaan;
 - k. Tanah dan lahan perkotaan;
 - l. Pemukiman dan perumahan di perkotaan.
3. Rifai (2015), objek kajian sosiologi perkotaan meliputi:
- a. Kehidupan dan aktivitas masyarakat kota;
 - b. Sejarah pertumbuhan kota;
 - c. Perbedaan kota dan desa;
 - d. Institusi kota;
 - e. Konflik sosial;
 - f. Pengangguran;
 - g. Pekerjaan atau mata pencaharian;
 - h. Lingkungan sosial perkotaan;
 - i. Kemiskinan;

- j. Pola hubungan sosial masyarakat kota;
 - k. Diferensiasi sosial;
 - l. Pelapisan sosial;
 - m. Kepadatan penduduk;
 - n. Mobilitas sosial, nilai dan sistem nilai.
4. Jamaludin (2017), objek kajian sosiologi perkotaan meliputi:
- a. Masyarakat kota;
 - b. Pola ekologi kota;
 - c. Tata ruang kota;
 - d. Struktur pemerintahan kota;
 - e. Kota dan urbanisasi;
 - f. Kota dan masyarakat industri;
 - g. Kota dan kemiskinan;
 - h. Kota dan transportasi;
 - i. Kota dan pedagang kaki lima;
 - j. Kota dan anak jalanan dan gepeng;
 - k. Kota dan pengangguran.

Dari beberapa pendapat di atas, terlihat bahwa objek kajian sosiologi perkotaan sangat banyak dan ragam. Fenomena tersebut di atas berada tidak hanya pada tataran mikro, seperti interaksi atau hubungan-hubungan sosial antar individu atau kelompok, tetapi juga ada pada tataran makro, seperti struktur sosial perkotaan, organisasi sosial, lembaga perkotaan, tanah dan lahan, pemukiman dan perumahan, konflik sosial, kemiskinan, gaya hidup, pola ekologi kota, tata ruang kota, dan sebagainya. Oleh karena itu, objek kajian sosiologi perkotaan selalu terbuka dan dimanis seiring dengan perkembangan masyarakat dan kehidupan perkotaan.

BAB XI

SOSIOLOGI PERDESAAN

A. Perkembangan Sosiologi Perdesaan

Dari berbagai sumber, di antaranya Smith & Zopf (1970), Galeski (1972), kita mengetahui bahwa sosiologi perdesaan itu tumbuh pertama sekali dan berkembang di Amerika Serikat. Pada mulanya adalah para pendeta Kristen yang hidup di daerah pedesaan (pertanian) yang menuliskan bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan di bagian utara negeri itu. Lewat tulisan seperti itu, mereka mencari pemecahan problema yang timbul di masyarakat pedesaan. Masalah-masalah tersebut timbul bersamaan dengan lahirnya industri di benua ini yang menyebabkan sebagian daerah pedesaan menjadi terbengkalai, berakhirnya masa penjajahan daerah baru ke arah barat pada tahun-tahun terakhir abad kesembilan belas, dan hal-hal lain yang mempunyai dampak pada kehidupan pedesaan (Sugihen, 1996).

Sosiologi perdesaan berkembang dengan pesat di Amerika sejak abad ke-19 yang dikembangkan oleh beberapa Universitas yang tertarik untuk mempelajari kehidupan masyarakat pedesaan secara sosiologis. Masalah-masalah yang menarik untuk dipelajari oleh para ahli sosiologi pada waktu itu bagaimana membantu memperbaiki kehidupan masyarakat pedesaan. Setelah itu, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli sosiologi perdesaan di Amerika banyak digunakan untuk keperluan-keperluan penyuluhan pertanian dan perbaikan kehidupan masyarakat pedesaan.

Jadi, Sosiologi perdesaan ini merupakan ilmu yang relatif masih muda, dan baru diakui pada tahun 1917 oleh American Sociological Society. Orang patut disebut sebagai pendekar sosiologi perdesaan

adalah Ibnu Khaldun (1332-1406 M). Ia meletakkan dasar-dasar filsafat sejarah bangsa Arab yang masih sederhana. Sementara, sebagai ahli sosiologi pedesaan yang pertama C.P Galpin (1911), di mana ia memberikan kuliah sosiologi pedesaan di Universitas of Wisconsin (Darsono, 2005). Hal ini merupakan jalan lurus bagi sosiologi pedesaan sebagai salah satu disiplin akademik.

Pada saat itu, para sosiolog agaknya sukar memberikan definisi operasional tentang sosiologi pedesaan itu. Di antara mereka, sering kali ada upaya memperdalam pengetahuan dan pemahaman mereka tentang topik-topik tertentu, mereka bahkan sering harus mengembara ke dalam wawasan ilmu-ilmu lainnya (Sugihen, 1996). Kelompok sosiolog lain, ada yang tertarik pada masalah-masalah pedesaan dan mencari berbagai alternatif untuk memecahkan problema tersebut. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Rogers, et al (1988), bahwa sosiologi pedesaan itu merupakan ilmu yang mempelajari perilaku spasial (fenomena) masyarakat (orang-orang) dalam setting pedesaan dalam hubungan kelompoknya, dengan menggunakan prinsip ilmu. Sosiologi pedesaan lebih sering dipakai di dalam pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, sosiologi pedesaan ini lebih berorientasi pada proses (perubahan) sosial dan pemecahan masalah. Sosiologi pedesaan sering juga menggunakan aspek-aspek yang bermanfaat dari ilmu-ilmu lain, seperti ilmu ekonomi, psikologi sosial, ilmu politik, antropologi, dan lain-lain.

Apa yang dikemukakan Galeski (1972), pada dasarnya tidak berbeda jauh dari apa yang dikemukakan Rogers dan kawan-kawan. Bagi Galeski (1972), sosiologi pedesaan itu cenderung deskriptif, terutama, bahwa pedesaan itu merupakan daerah pertanian, tentang pola-pola pertanian dan bertani, kehidupan keluarga di desa, tingkat kehidupan dan perkembangan penduduknya, struktur sosial yang berkaitan dengan pekerjaan, lembaga-lembaga pedesaan, adat dan kebiasaan penduduk, dan lain-lain. Hal senada, seperti yang dikemukakan oleh Smith & Zopf (1970), sosiologi pedesaan adalah

sosiologi dari kehidupan masyarakat pedesaan (sociology of rural life). Maksudnya, bahwa sosiologi pedesaan itu suatu pengetahuan yang sistematis sebagai hasil penerapan metode ilmiah di dalam upaya mempelajari masyarakat pedesaan, struktur dan organisasi sosialnya yang ada, sistem dasar masyarakat, dan proses perubahan sosial yang terjadi.

Kapan munculnya sosiologi pedesaan di Indonesia? Sebenarnya telah menjadi perbincangan luas di kalangan ahli sosiologi pedesaan di Institut Pertanian Bogor (IPB), seperti berbagai tulis Sajogyo yang dirangkum dalam buku “Ekososiologi: Deideologi Teori, Restrukturasi Aksi” (2006) dan Sediono M.P Tjondronegoro yang tersaji dalam buku “Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan” (2008) (Damsar & Indrayani, 2016). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sosiologi pedesaan diberikan pertama kali di IPB. Walaupun sosiologi pedesaan ini merupakan disiplin ilmu yang masih sangat muda, namun ilmu ini makin lama makin berkembang menuju kepada statusnya yang lebih pasti dan memiliki pendekatan, teori, objek kajian dan lapangan penelitian khusus.

Dari sejarah perkembangannya, sosiologi pedesaan ini mempelajari dan menganalisis masyarakat pedesaan secara sosiologis. Dengan demikian, studi sosiologi pedesaan, yakni sebuah usaha untuk memahami masyarakat pedesaan dari sudut interaksi sosialnya, struktur masyarakat dan lapisan-lapisan masyarakatnya, kelompok-kelompok yang ada, kebudayaan, lembaga-lembaga masyarakatnya, kekuasaan dan pembagian kewenangannya serta perubahan-perubahan yang terjadi.

B. Pengertian Sosiologi Pedesaan

Sosiologi pedesaan merupakan salah satu cabang sosiologi. Betrand (1987) menyebutnya bahwa sosiologi pedesaan merupakan sosiologi khusus yang mempelajari tentang pola hidup dan kehidupan masyarakat di pedesaan. Dengan demikian, studi sosiologi pedesaan mempunyai sasaran dalam mempelajari kehidupan masyarakat pedesaan.

Berikut ini definisi sosiologi pedesaan menurut beberapa ahli:

1. Damsar & Indrayani (2016), sosiologi pedesaan, sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena pedesaan. Pendekatan sosiologis terdiri dari konsep, variabel, teori dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan pedesaan.
2. Sastramihardja (1987), sosiologi pedesaan, mempelajari dan menganalisa kehidupan masyarakat pedesaan secara sosiologis.
3. Wisadirana (2005), sosiologi pedesaan adalah salah satu cabang dari sosiologi yang mengkaji masyarakat yang hidup di pedesaan beserta permasalahan-permasalahan sosial yang timbul.
4. Yuliati & Poernomo (2003), sosiologi pedesaan mempelajari dan menganalisis masyarakat pedesaan dan segala dinamikanya, meliputi struktur sosial, proses sosial, tata nilai, norma dan adat istiadat, pola perilaku, mata pencaharian, serta transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Singkatnya, sosiologi pedesaan merupakan ilmu kemasyarakatan yang membahas secara mendalam tentang komunitas pedesaan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi pedesaan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menganalisis kehidupan masyarakat pedesaan serta berupaya dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat pedesaan.

C. Pendekatan Sosiologi Pedesaan

Sosiologi sebagai disiplin ilmu terbagi dalam dua bagian yaitu sosiologi teoritis dan sosiologi terapan. Perbedaan dari kedua disiplin itu didasarkan kepada tujuannya. Sosiologi teoritis bertujuan untuk mencari generalisasi dan objektivitas serta bergerak dalam penelitian-penelitian dasar guna menyusun teori, tetapi kurang memperhatikan apakah ilmu itu mempunyai faedah atau tidak. Sementara, sosiologi terapan bertujuan untuk segera menjawab masalah-masalah dalam masyarakat yang menghendaki suatu

pemecahan. Kedua ilmu tersebut dalam prakteknya sulit untuk dipisah-pisahkan, karena kedua-duanya saling isi mengisi atau saling memperkuat (Sastramihardja, 1987).

Dari kedua disiplin ilmu tersebut, sosiologi perdesaan digunakan sebagai ilmu terapan atau sosiologi terapan, karena tujuan sosiologi perdesaan adalah untuk dapat memahami gejala-gejala dalam masyarakat pedesaan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat pedesaan serta sekaligus mengembangkan teori-teori tentang pedesaan, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, pelanggaran norma masyarakat, disorganisasi keluarga, anak-anak remaja, pendidikan, nilai kebudayaan, kesehatan, kependudukan, lingkungan hidup, dan lain-lain.

Berdasarkan gambaran di atas, sosiologi perdesaan sebagai ilmu terapan dalam mengembangkan ilmunya, lebih memilih pendekatan yang bersifat empiris dalam menelaah masyarakat pedesaan. Dengan pendekatan tersebut, maka dapat dipahami gejala-gejala yang ada di masyarakat pedesaan itu, sehingga dapat diambil kesimpulan bagaimana sebaiknya mengadakan usaha-usaha perbaikan kepada masyarakat pedesaan. Sosiologi perdesaan memilih pendekatan empiris karena pengaruh yang besar dari sejarah perkembangan sosiologi perdesaan itu sendiri, yaitu digunakan untuk keperluan-keperluan penyuluhan pertanian dan perbaiki kehidupan masyarakat pedesaan. Tambahan, pendekatan empiris ini, kesimpulan yang diambil harus tunduk pada kebenaran yang bersifat realitas objektif (netral), tidak memihak kepada siapa pun kecuali kepada fakta atau bukti yang objektif.

D. Peranan Sosiologi Perdesaan

Dalam suatu kehidupan masyarakat tidak seluruhnya berjalan dengan baik seperti yang dikehendaki oleh masyarakatnya. Kehidupan dalam masyarakat dapat saja berjalan dengan tidak normal dan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah. Demikian juga pengaruh perkembangan zaman yang semakin maju karena adanya modernisasi telah menimbulkan

gejala-gejala sosial yang menyimpang dari kehidupan masyarakat pedesaan yang disebut pula masalah-masalah sosial di pedesaan. Pembangunan yang merupakan perubahan yang direncanakan, yang ditujukan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat pedesaan telah membawa berbagai dampak kehidupan masyarakat pedesaan. Terdapat beberapa permasalahan di pedesaan yang perlu diketahui oleh kita bersama, antara lain: kemiskinan, pengangguran, lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sebagai ilmu, sosiologi perdesaan mempunyai peranan atau manfaat untuk mempelajari tentang masalah-masalah dan membantu memecahkan masalah-masalah tersebut yang timbul dalam masyarakat pedesaan. Hal ini sangat bermanfaat untuk merencanakan peningkatan kemakmuran masyarakat pedesaan dalam rangka pembangunan pedesaan.

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat kita lihat beberapa peranan sosiologi perdesaan dalam membantu memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat pedesaan, yaitu:

1. Menurut Wisadirana (2005), dalam kegiatan pembangunan, sosiologi perdesaan mempunyai peranan, antara lain:
 - a. Pada tahap perencanaan, berperan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial, pusat perhatian sosial, stratifikasi sosial, pusat-pusat kekuasaan serta sistem dan saluran-saluran komunikasi sosial. Misalnya, memberi data tentang rendahnya tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, tingkat ketrampilan masyarakat, ketenagakerjaan, dan lainnya.
 - b. Pada tahap pelaksanaan, berperan untuk mengidentifikasi terhadap kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat dan mengamati proses perubahan sosial yang terjadi di pedesaan. Misalnya, memberi data tentang adanya perubahan dalam sistem usaha, baik usaha tani maupun usaha ternak dan usaha lainnya.

- c. Pada tahap evaluasi, berperan dalam menganalisis efek-efek sosial dari pembangunan pedesaan tersebut. Misalnya, memberikan data tentang tingkat pendapatan dan hasil perubahan, tingkat produktifitas, perubahan sikap dan lainnya.
2. Menurut sastramihardja (1987), peranan sosiologi pedesaan, antara lain:
 - a. Membantu mengembangkan teori-teori tentang pedesaan, terutama pedesaan di Indonesia.
 - b. Dapat mengetahui dengan baik mengenai kehidupan masyarakat pedesaan yang sebenarnya.
 - c. Dapat menggunakan keahliannya mengenai pedesaan, apakah dalam sumbangan pikiran atau secara langsung untuk memperbaiki kehidupan masyarakat pedesaan dalam rangka pembangunan pedesaan.
 - d. Dengan bekal pengetahuan yang dimiliki, para sosiolog diharapkan dapat mengadakan usaha-usaha penyuluhan pertanian atau penyuluhan-penyuluhan lainnya.

E. Objek Kajian Sosiologi Pedesaan

Objek kajian sosiologi pedesaan yaitu mempelajari dan menganalisis kehidupan masyarakat pedesaan dan berusaha membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan dipotret dinamikannya, seperti interaksi sosialnya, struktur masyarakat, lapisan-lapisan masyarakat, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, kebudayaan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan pembagian kewenangannya serta perubahan-perubahan yang terjadi. Sementara, masalah di pedesaan, seperti kemiskinan, pengangguran, lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Ringkasnya, objek kajian sosiologi pedesaan yaitu kehidupan masyarakat pedesaan dan membantu memecahkan masalah-masalah di masyarakat pedesaan.

Sebagai referensi, masalah-masalah yang diselidiki sosiologi pedesaan menurut beberapa ahli:

1. Menurut Damsar & Indrayani (2916), objek kajian sosiologi pedesaan yaitu:
 - a. Struktur sosial pedesaan: (1) organisasi, (2) kesatuan ekologis, (3) kelompok, (4) stratifikasi sosial, (5) interaksi sosial, (6) nilai, dan (7) sistem nilai.
 - b. Lembaga pedesaan: (1) lembaga keluarga, (2) lembaga agama, (3) lembaga ekonomi, (4) lembaga politik, dan (5) lembaga pendidikan.
 - c. Kapital: (1) sosial, (2) budaya, (3) simbolik, dan (4) spiritual.
 - d. Mobilitas sosial.
 - e. Perubahan sosial: (1) pembangunan, (2) pemberdayaan, dan (3) transformasi.
 - f. Pemerintahan desa.
 - g. Kearifan lokal: Pengetahuan dan teknologi lokal.
2. Yulianti & Poernomo (2003), objek kajian sosiologi pedesaan, yaitu:
 - a. Kelompok sosial masyarakat pedesaan;
 - b. Organisasi sosial;
 - c. Perubahan masyarakat pedesaan;
 - d. Proses sosial masyarakat pedesaan;
 - e. Norma dan tata nilai masyarakat pedesaan;
 - f. Kepemimpinan masyarakat pedesaan;
 - g. Mobilitas sosial masyarakat pedesaan;
 - h. Mobilitas tenaga kerja masyarakat pedesaan;
 - i. Mata pencaharian masyarakat pedesaan;
 - j. Budaya dan sistem religi masyarakat pedesaan;
3. Sastramihardja (1987), objek kajian sosiologi pedesaan adalah mempelajari kehidupan masyarakat pedesaan, meliputi:
 - a. Struktur atau lapisan sosial masyarakat pedesaan;
 - b. Kelompok-kelompok sosial masyarakat pedesaan;
 - c. Nilai-nilai atau norma sosial masyarakat pedesaan;

- d. Lembaga-lembaga kemasyarakatan;
 - e. Proses-proses sosial;
 - f. Perubahan sosial budaya.
4. Sajogyo (Damsar & Indrayani, 2016), objek kajian sosiologi pedesaan, meliputi:
- a. Pembangunan pedesaan;
 - b. Kemiskinan;
 - c. Pendidikan penyuluhan;
 - d. Transmigrasi;
 - e. Industrialisasi desa;
 - f. Revolusi hijau;
 - g. Peningkatan gizi.
5. Tjondronegoro (Damsar & Indrayani, 2016), objek kajian sosiologi pedesaan, meliputi:
- a. Pembangunan pedesaan;
 - b. Agraria;
 - c. Kelembagaan;
 - d. Kependudukan dan lingkungan hidup;
 - e. Kemiskinan di pedesaan;
 - f. Perubahan sosial;
 - g. Metodologi penelitian pedesaan.

Objek kajian sosiologi pedesaan menurut para ahli di atas mencakup semua aspek masyarakat pedesaan, sehingga bisa tumpang tindih dengan objek kajian sosiologi politik, sosiologi ekonomi, sosiologi hukum, sosiologi pendidikan, sosiologi keluarga, sosiologi kebudayaan, sosiologi pertanian dan sosiologi lainnya. Sebaiknya, sosiologi pedesaan yang objek kajiannya lebih luas dan holistik seperti di atas, dilakukan revitalisasi objek kajian yang lebih sempit sehingga sosiologi pedesaan tidak mengalami tumpang tindih objek kajian dengan berbagai cabang sosiologi lainnya. Misalnya, objek kajiannya pembangunan pedesaan dan kemiskinan; kelompok sosial; lembaga-lembaga kemasyarakatan; perubahan sosial budaya masyarakat pedesaan.

BAB XII

SOSIOLOGI KOMUNIKASI

A. Perkembangan Sosiologi Komunikasi

Sosiologi komunikasi, seperti halnya sosiologi pendidikan, sosiologi agama, sosiologi ekonomi, sosiologi politik, dan sebagainya, merupakan perpaduan antara sosiologi dan komunikasi. Sosiologi komunikasi adalah bagian dari kajian sosiologi, dengan kekhususan pada pranata komunikasi sebagai objek kajiannya. Dengan kata lain, Sosiologi komunikasi mengandung makna, mengkaji masalah komunikasi dari perspektif sosiologi.

Orang yang membicarakan masalah sosiologi sudah banyak. Demikian juga, orang yang membicarakan mengenai komunikasi pun, sudah tidak terhitung jumlahnya. Dilihat dari sejarah perkembangannya, Comte (1798-1853) adalah orang pertama kali memberikan nama sosiologi pada ilmu pengetahuan yang mengkaji hubungan sosial kemasyarakatan, sehingga ia mendapatkan julukan bapak sosiologi. Sementara ilmu komunikasi, Hovland (Effendy, 2001) adalah orang pertama yang menampilkan definisi ilmu komunikasi. Hovland adalah orang yang membidani dan mengembangkan kajian awal tentang komunikasi. Baik sosiologi maupun komunikasi sudah jelas dan sudah memiliki batang tubuh (*body of knowledge*). Kedua disiplin ilmu tersebut, sudah jelas memiliki kerangka keilmuan dengan paradigma keilmuannya tersendiri. Sehubungan hal itu, kita dapat mengajukan pertanyaan, apakah sosiologi komunikasi pun memiliki kerangka keilmuannya tersendiri. Selanjutnya, bagaimana perkembangan sosiologi komunikasi itu?

Sejarah perkembangan sosiologi komunikasi menempuh dua jalur. Kajian dan sumbangan pemikiran Comte, Parsons

dan Merton merupakan sumbangan paradigma fungsional bagi lahirnya teori-teori komunikasi yang beraliran struktural fungsional. Ada sejumlah asumsi dasar yang dimiliki oleh teori fungsionalisme, yaitu:

1. Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif mantap dan stabil;
2. Elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik;
3. Setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem;
4. Setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai di antara para anggotanya (Dahrendorf, 1986).

Sementara, kajian dan sumbangan pemikiran Marx dan Habermas menyumbangkan paradigma konflik bagi lahirnya teori-teori kritis dalam kajian komunikasi. Dahrendorf (1986) meringkaskan asumsi teori konflik sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat kapan saja tunduk pada proses perubahan; perubahan sosial ada di mana-mana;
2. Setiap masyarakat kapan saja memperlihatkan perpecahan dan konflik; konflik-konflik sosial ada di mana-mana;
3. Setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan;
4. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa dari beberapa anggotanya atas orang lain.

Sosiologi sejak semula telah menaruh perhatian pada masalah-masalah yang ada hubungannya dengan interaksi sosial antara seseorang dengan orang lainnya. Apa yang disebut oleh Comte dengan *social dynamic*; kesadaran kolektif oleh Durkheim; tindakan komunikatif dan teori komunikasi oleh Habermas adalah awal mula lahirnya perspektif sosiologi komunikasi. Melihat kenyataan semacam itu, maka sebenarnya gagasan-gagasan perspektif sosiologi komunikasi telah ada bersama dengan lahirnya sosiologi itu sendiri, baik dalam perspektif struktural fungsional maupun dalam perspektif konflik.

Selanjutnya, untuk menjelaskan sejarah sosiologi komunikasi di Indonesia, penulis akan menggunakan karya tulis sebagai indikatornya. Karya tulis yang dijadikan indikatornya adalah yang langsung menyentuh pada masalah sosiologi komunikasi, dan bukan pemikiran mengenai sosiologi secara umum, atau komunikasi secara umum. Khusus untuk Indonesia, Sutaryo dari Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, menerbitkan kumpulan tulisannya mengenai sosiologi komunikasi. Tulisan yang semula adalah makalah untuk Universitas Terbuka, dan sudah disampaikan beberapa tahun sebelumnya, kemudian dibukukan pada tahun 2005. Karya ini dapat diposisikan sebagai karya sosiologi komunikasi secara umum. Dalam karya tersebut, Sutaryo menjelaskan mengenai pengertian komunikasi, komunikasi massa, sosiologi khalayak, efek komunikasi massa, komunikasi antarbudaya, dan hubungan komunikasi dengan perubahan sosial atau pembangunan (Sudarman, 2014).

Nina Syam, pakar komunikasi dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, perlu dicatat pula sebagai pemikiran sosiologi komunikasi. Pengajar yang satu ini, termasuk pakar komunikasi yang produktif. Bukan hanya ilmu komunikasi secara umum, beliau pun sudah mengeluarkan tulisannya mengenai filsafat komunikasi, sosiologi komunikasi, dan terakhir adalah sosiologi sebagai akar ilmu komunikasi. Dengan karya-karya yang melimpah, dan mencakup lingkup yang luas, termasuk di dalamnya sosiologi komunikasi, mengukuhkannya sebagai pakar komunikasi Indonesia (Sudarman, 2014).

B. Pengertian Sosiologi Komunikasi

Ada dua istilah keilmuan yang bersanding dalam kajian ini, yaitu sosiologi dan komunikasi. Sosiologi memfokuskan diri pada kajian mengenai interaksi manusia dalam masyarakat, sedangkan komunikasi adalah proses pertukaran informasi sehingga melahirkan perubahan perilaku. Kedua istilah itu, secara keilmuan sudah berdiri sendiri dan memiliki batang tubuh

keilmuannya masing-masing. Sementara sosiologi komunikasi akan berbeda maknanya dari kedua nama disiplin ilmu tersebut. Terdapat cukup banyak definisi sosiologi komunikasi yang sudah diajukan oleh para pakar.

Sudarma (2014), menggunakan definisi sosiologi komunikasi dilihat dari tiga komponen yaitu:

1. Sosiologi komunikasi diartikan sebagai penggunaan perspektif sosiologi dalam memahami peristiwa komunikasi. Artinya, komunikasi dalam konteks 'sosiologi komunikasi' diartikan sebagai peristiwa atau fenomena sosial, yang perlu dijelaskan oleh pandangan sosiologi. Dari posisi seperti ini, sosiologi komunikasi berusaha memposisikan sosiologi sebagai sebuah perspektif untuk memahami masalah-masalah komunikasi.
2. Sosiologi komunikasi dapat diartikan menggali masalah sosiologi dalam komunikasi (*sociology in communication*). Makna ini berbeda dengan penekanan yang pertama. Pada makna kedua ini, penekanannya lebih mengacu pada upaya menggali peristiwa atau nilai sosiologi dalam peristiwa komunikasi.
3. Sosiologi komunikasi bisa diartikan untuk, yaitu pandangan sosiologi untuk membantu pengembangan ilmu komunikasi atau praktik komunikasi. Kendati komunikasi diposisikan sebagai *the other*, tetapi sosiologi memiliki optimisme ada sesuatu yang bisa disumbangkan untuk kepentingan praktik komunikasi dan atau pengembangan ilmu komunikasi.

Dari definisi di atas, mengartikan sosiologi komunikasi perlu dipahami secara utuh, yaitu sebagai perspektif (*about*), dalam (*in*) dan untuk (*for*). Ketiga komponen itu, hadir dan bisa dibedakan walaupun tidak bisa dipisahkan. Dalam prakteknya, ketiga aspek itu akan hadir secara bersamaan dan saling menguatkan untuk mengukuhkan kedisiplinan ilmu sosiologi komunikasi itu sendiri. Tambahan, jika menggunakan definisi yang lebih

umum, sosiologi komunikasi sebagai bagian dari sosiologi yang membahas dan menganalisis fenomena komunikasi, dengan bantuan konsep-konsep dan metode sosiologi.

C. Pendekatan Sosiologi Komunikasi

Secara garis besar, mekanisme kerja dalam sosiologi komunikasi tidak berbeda dengan mekanisme kerja ilmu-ilmu lainnya, yaitu:

1. Metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metodologi ilmiah yang menggunakan angka-angka sebagai bahan-bahan keterangan sebagai data ilmiah. Dalam metodologi ini, gejala-gejala sosial menggunakan pengukuran melalui angka indeks, skala, tabel, dan dianalisis dengan prosedur statistik, serta bertujuan menghasilkan suatu generalisasi.
2. Metode Kualitatif. Metode kualitatif adalah metode kerja ilmiah yang mengutamakan bahan atau informasi yang nantinya akan diuji berdasarkan tingkat kualitas data. Dengan metodologi ini sukar didapat indikator atau skala pengukuran berdasarkan angka-angka yang bersifat eksak (tepat/pasti). Tujuannya menghasilkan suatu pemahaman, makna, mengembangkan teori, dan menggambarkan suatu realitas yang kompleks.

D. Manfaat Sosiologi Komunikasi

Mempelajari sosiologi komunikasi dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya adalah:

1. Mengetahui dan memahami pengertian sosiologi komunikasi;
2. Mengetahui dan memahami berbagai perspektif teori dalam sosiologi yang menjadi akar teori sosiologi komunikasi;
3. Mengetahui dan memahami hadirnya komunikasi, termasuk di dalamnya adalah hadirnya teknologi komunikasi, memberikan pengaruh nyata terhadap perilaku individu dan perkembangan masyarakat;

4. Dapat mengidentifikasi masalah sosial (keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, hukum, sosial-budaya, politik, kesehatan, dan sebagainya) sebagai akibat dari pengaruh komunikasi;
5. Mengetahui dan memahami faktor-faktor sosial yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial;
6. Mengetahui dan memahami proses pembangunan di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan pinggiran, kawasan barat-timur, kawasan pusat berbeda dengan kawasan pinggiran, kesenjangan antardaerah, dan sebagainya.

E. Objek Kajian Sosiologi Komunikasi

Sosiologi komunikasi merupakan pengembangan lanjut dari disiplin ilmu sosiologi dengan kekhususan kajian tentang komunikasi. Sosiologi komunikasi, seperti pula sosiologi keluarga, sosiologi pendidikan, sosiologi politik, sosiologi ekonomi, sosiologi lingkungan, sosiologi kesehatan, dan sebagainya, cenderung menjadi sebuah kajian yang hibrid atau perpaduan. Dalam konteks sosiologi komunikasi, hibridasi paradigma itu, terjadi antara keilmuan sosiologi dengan keilmuan komunikasi. Fokus utamanya adalah masalah komunikasi dilihat dari ilmu sosiologi.

Objek kajian sosiologi komunikasi berbeda dengan objek kajian sosiologi pada umumnya. Lingkupnya, berupa individu, kelompok, masyarakat, dunia, dan segala interaksinya. Sehingga, segala interaksinya inilah yang membedakan antara objek kajian sosiologi komunikasi dengan objek kajian sosiologi pada umumnya.

Berikut ini objek kajian sosiologi komunikasi menurut beberapa ahli:

1. Heru (2017), objek kajian sosiologi komunikasi yaitu:
 - a. Telematika dan realitas. Segala interaksi itu dapat berupa telematika dan realitasnya yang menyangkut pada persoalan teknologi media, komunikasi, hingga

persoalan konvergensi yang ditimbulkan. Perkembangan objek ini sangat berpengaruh pada perkembangan media massa yang memberikan efek pada masyarakat.

- b. Efek media. Efek media massa ini merupakan perangkat kehidupan masyarakat yang turut mengubah pola hidup masyarakat. Pada awalnya bersifat agraris, kemudian berubah menjadi kota. Pertumbuhan urbanisme pada masyarakat inilah yang merupakan salah satu dampak dari aktivitas masyarakat terhadap media massa yang bersifat modern, yang disebut dengan komunikasi massa.
- c. Norma Sosial Baru. Di dalam efek media massa ini, masyarakat akan mengalami pola hidup yang mulai bergeser, karena dampak dari teknologi dan semakin majunya teknologi. Sehingga, masyarakat akan mengalami pergeseran norma-norma sosial hingga menjadi norma-norma baru yang secara tidak langsung akan berlaku.
- d. Cyber Community. Munculnya norma-norma baru, juga membuat setiap individu ini bergerak pula bahkan masyarakat juga akan bergeser membentuk suatu komunitas yang berteknologi atau berkomunikasi melalui media teknologi.
- e. Perubahan sosial dan Komunikasi. Perubahan-perubahan pada masyarakat pun akan semakin terasa ketika yang jauh semakin dekat dan yang dekat semakin jauh. Masyarakat yang berdampingan pun akan terasa jauh, tegur sapa pun tergantikan melalui media teknologi atau media sosial, bukan secara langsung, misalnya dengan tetangga.
- f. Hukum Bisnis Media. Munculnya hukum atau undang-undang IT. Hal inilah sebagai contoh salah satu norma-norma baru yang muncul akibat dari efek media massa.

2. Bungin (2006), di dalam sosiologi komunikasi terdapat 4 (empat) konsep sekaligus menjadi objek kajian yaitu:
 - a. Sosiologi yang mempelajari hubungan antar individu sebagai makhluk sosial dengan segala aktivitas dan gejala sosial yang dapat menyebabkan adanya perubahan sosial.
 - b. Masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu, hidup berdampingan dalam satu wilayah dan terikat oleh norma-norma yang berlaku.
 - c. Komunikasi yang merupakan suatu media penyampai pesan. Dalam komunikasi sendiri memiliki beberapa unsur di antaranya adalah komunikator sebagai penyampai informasi, pesan sebagai informasi, media sebagai alat informasi, komunikan sebagai receiver, dan efek sebagai pengaruh dari informasi tersebut.
 - d. Media informasi yang merupakan alat untuk berkomunikasi. Media komunikasi ini dapat berupa online maupun cetak ataupun lisan yaitu dari mulut ke mulut. Di dalam media pun juga terdapat bahasa sebagai penyalur informasi agar sampai ke receiver.
3. Sasrawan (2012), objek kajian sosiologi komunikasi yaitu:
 - a. Gejala, pengaruh dan masalah sosial yang disebabkan oleh komunikasi;
 - b. Akibat-akibat sosial yang ditimbulkan oleh komunikasi;
 - c. Aspek komunikasi apa yang menyebabkan timbulnya masalah sosial;
 4. Sudarma (2014), tema-tema sosiologi komunikasi yaitu antara lain:
 - a. Filsafat sosiologi komunikasi;
 - b. Perspektif-perspektif sosiologi;
 - c. Media, masyarakat dan kebudayaan;
 - d. Masyarakat: relasi media dan masyarakat;
 - e. Struktur, proses dan dinamika sosial;

- f. Media dan siklus hidup: memimpikan dinamika konstruktif;
- g. Masyarakat dan internet: perspektif sosiologi;
- h. Sosiologi media jejaring sosial;
- i. Wanita, gender dan media;
- j. Media, masyarakat dan mistisisme;
- k. Organisasi sosial dan komunikasi;
- l. Media dan kekerasan;
- m. Media dan bencana;
- n. Sosiologi teknologi: analisis terhadap perkembangan teknologi komunikasi;
- o. Dinamika media dan perubahan sosial;
- p. Media di Indonesia: antara demokratisasi dan hypermedia;
- q. Penelitian dalam sosiologi komunikasi.

BAB XIII

SOSIOLOGI PARIWISATA

A. Perkembangan Sosiologi Pariwisata

Kegiatan pariwisata menyangkut manusia dan masyarakat, maka pariwisata sangat sesuai untuk dijadikan objek dari sosiologi. Kemudian, berkembanglah kajian-kajian sosiologi tentang pariwisata, yang selanjutnya menjadi cabang sosiologi tersendiri, yang disebut dengan sosiologi pariwisata. Secara singkat, sosiologi pariwisata sebagai bagian dari sosiologi yang membahas dan menganalisis fenomena pariwisata dengan bantuan konsep-konsep sosiologi.

Analisis sosiologis terhadap pariwisata sangat penting dilakukan dengan mengingat berbagai alasan berikut:

1. Pariwisata telah menjadi aktivitas sosial ekonomi dominan dewasa ini, bahkan disebut-sebut sebagai industri terbesar sejak akhir abad 20 (WTO, 2000) yang juga menyangkut pergerakan barang, jasa dan manusia dalam skala terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Sejak beberapa dasawarsa terakhir, pariwisata memang telah terbukti menjadi industri terbesar di berbagai belahan dunia.
2. Pariwisata bukanlah suatu kegiatan yang beroperasi dalam ruang hampa. Pariwisata sangat terkait dengan masalah sosial, politik, ekonomi, keamanan, ketertiban, keramah-tamahan, kebudayaan, kesehatan, dan seterusnya, termasuk berbagai intitusi sosial yang mengaturnya.
3. Pariwisata bersifat sangat dinamis, sehingga setiap saat memerlukan analisis atau kajian yang lebih tajam. Sebagai suatu aktivitas dinamis, pariwisata memerlukan kajian terus- menerus (termasuk dari aspek sosial budaya), yang

juga harus dinamis, sehingga pembangunan pariwisata bisa memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, khususnya masyarakat lokal.

4. Pariwisata tidaklah eksklusif, dalam arti bahwa pariwisata bukan saja menyangkut suatu bangsa tertentu (Barat), melainkan juga dilakukan oleh hampir semua ras, etnik, dan bangsa, sehingga pemahaman aspek-aspek sosial budaya sangat penting.
5. Pariwisata selalu mempertemukan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda, yang mempunyai perbedaan dalam norma, nilai, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya. Pertemuan manusia atau masyarakat dengan latar belakang sosial-budaya yang berbeda akan menghasilkan berbagai proses akulturasi, dominasi, asimilasi, adopsi, adaptasi, dan seterusnya dalam kaitan hubungan antarbudaya, yang tentu saja merupakan salah satu isu sentral dalam sosiologi.
6. Dewasa ini pariwisata sudah hampir menyentuh semua masyarakat dunia, sampai kepada masyarakat-masyarakat yang dulu dikenal sebagai masyarakat terpencilpun kini sudah dirambah pariwisata dengan berbagai derajat pengaruh. Pariwisata telah terbukti menjadi salah satu prime mover dalam perubahan sosial budaya, sedangkan perubahan sosial budaya merupakan aspek kemasyarakatan yang menjadi salah satu fokus kajian sosiologi.
7. Berkembangnya berbagai lembaga, baik di tingkat lokal, regional, ataupun internasional, yang terkait dengan pariwisata, juga merupakan salah satu perhatian dalam sosiologi, sebagaimana sebelumnya sosiologi telah membahas berbagai aspek modernisasi dan dependensi dari hubungan antarnegara (Pitana dan Gayatri, 2005).

Kajian sosiologis terhadap pariwisata bukanlah suatu fenomena baru. Di Jerman, sudah mulai sejak tahun 1930, dengan munculnya tulisan I. Von Wiese, Ogilvic (1933) dan Norval (1936), bahkan dapat dirunut sampai tahun 1899 dari

karya L. Badio (Cohen, 1984). Tetapi kajian yang serius baru mulai pada saat pariwisata telah menjadi kekuatan besar dalam perubahan sosial budaya, yaitu sejak tahun 1960-an, mulai dari karya HJ. Knebel (1960) (Cohen, 1984). Kajian sosiologis-antropologis terhadap pariwisata mendapatkan fakta empiris tahun 1963, ketika Nunez membahas masalah pariwisata dan weekendismo di daerah pariwisata Mexico. Kajian empiris mula-mula dilakukan oleh Nunez (1963) dan Forster (1964), sedangkan Boorstin (1964) sudah mulai mengarah kepada pengembangan teori tentang kepalsuan (*pseudo-experience* dan *inauthenticity*). Analisis kritis terhadap pariwisata dilakukan oleh Mishan (1969), Young (1973), Turner dan Ash (1975), dan lain-lain (Pitana dan Gayatri, 2005).

Dari waktu ke waktu, aspek sosiologis dalam pembangunan pariwisata semakin mendapatkan perhatian, karena semakin meningkatnya kesadaran bahwa pembangunan pariwisata tanpa pertimbangan yang matang dari aspek sosial-budaya justru akan bisa membawa malapetaka bagi masyarakat, khususnya di daerah pariwisata. Sosiologi sebagaimana kita ketahui berusaha memahami struktur, sistem sosial, lembaga, kelompok sosial, dinamika dalam proses sosial yang terjadi, hubungan timbal balik individu dan individu, individu dan kelompok/masyarakat serta hubungan antar kelompok/masyarakat. Singkatnya, sosiologi mempelajari segi dan bidang-bidang yang menunjukkan dan menggambarkan kegiatan, peranan, hubungan sosial individu-individu dalam kepariwisataan.

Tambahan, aspek sosiologi di dalam mempelajari pariwisata, juga memperhatikan berbagai faktor lingkungan yang lebih luas, seperti faktor politik, geografi, ekologi, dan berbagai faktor yang terlibat dalam pariwisata, sehingga analisis menjadi lebih komprehensif dan bermakna.

Analisis sosiologis yang komprehensif dan teoritis dilakukan oleh Cohen (1972), yang secara eksplisit mengembangkan

sosiologi pariwisata. Dalam tulisannya yang berjudul *Towards as Sociology of International Tourism*, yang dimuat dalam jurnal *Social Research*, mengembangkan tipologi wisatawan, yang kemudian dilanjutkan dengan kajian wisatawan dari perspektif fenomenologi (Pitana dan Gayatri, 2005).

Kajian yang cukup fundamental dalam pengembangan sosiologi pariwisata dilakukan oleh MacCannel (1976), yang mengajukan hipotesis bahwa wisatawan dalam perjalanannya selalu berusaha mencari sesuatu yang *authentic*, meskipun istilah itu sendiri menjadi perdebatan hangat. Untuk pariwisata banyak dikembangkan atraksi yang bersifat *staged authenticity* (otentisitas panggung) (Pitana dan Gayatri, 2005).

Wisatawan dalam pariwisata menjadi komponen utama, sebab semua layanan wisata sesungguhnya terpusat pada wisatawan. Tidak ada perjalanan wisata tanpa kehadiran wisatawan. Secara definitif, wisatawan disebut sebagai seseorang dan atau sekelompok orang (juga pegawai pemerintah, tentara, polisi, dan sebagainya) yang meninggalkan tempat kediaman permanen kurang dari satu tahun (sementara waktu) melintas batas wilayah (regional, Negara) tidak mencari nafkah, untuk bersenang-senang, olah raga, penyembuhan, bisnis, pertemuan-pertemuan, dengan membelanjakan uang di tempat yang dikunjungi (Norwal, 1994; Oglive, 1994, dalam Soemanto, 1999).

Kajian-kajian sosiologis terhadap pariwisata berkembang pesat pada dasawarsa 1970-an, sampai munculnya kumpulan tulisan yang menjadi satandard dalam studi pariwisata, yaitu *Tourism: Pasport to Departement* (de Kadt, 1979) dan *Host and Guest: the Antropology of Tourism* (Smith, 1977), 1989. Namun sampai paruh terakhir dasawarsa 1970-an, studi sosiologis dan antropologis tentang pariwisata hanya merupakan bagian kecil, hanya lampiran dari studi-studi yang lebih besar, yang umumnya menekankan aspek fisik dan ekonomis (Cohen, 1984; Crick, 1989, dalam Pitana dan Gayatri, 2005).

Dekade 1980-an mengalami kemajuan yang pesat dalam studi sosiologi pariwisata, dengan aplikasi berbagai perspektif sosiologis, baik yang bersifat empiris maupun teoritis. Cara pandang ahli sosiologi terhadap pariwisata juga sangat bervariasi. Ada yang memandang pariwisata sebagai salah satu bentuk pelarian atau penolakan terhadap modernitas (Krippendorf, 1986; Rojek, 1993), sebagai bentuk ziarah modern (Dann, 1989), sebagai pengembangan neo-kolonialisme dan neo-imperialisme, sebagai ego-enhancement, dan lain-lain, Nash, 1989, dalam Pitana dan Gayatri, 2005).

B. Pengertian Sosiologi Pariwisata

Ada dua istilah keilmuan yang bersanding dalam kajian ini, yaitu sosiologi dan pariwisata. Kedua istilah itu, secara keilmuan sudah berdiri sendiri dan memiliki batang tubuh keilmuannya masing-masing. Sebagaimana kita ketahui, objek studi utama sosiologi, yaitu struktur masyarakat, kelompok sosial, lembaga sosial, hubungan-hubungan timbal balik individu, peranan, dan sebagainya. Sementara, kegiatan pariwisata melibatkan orang, sekelompok orang, lembaga dan dinamika interaksi sosial yang dilakukannya untuk mencapai atau memenuhi kepentingan kegiatan pariwisata.

Sebagai referensi, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang batasan sosiologi pariwisata menurut para ahli, di antaranya:

1. Pitana dan Gayatri (2005), Sosiologi pariwisata adalah cabang dari sosiologi yang mengkaji masalah-masalah kepariwisataan dalam berbagai aspeknya. Dapat juga dikatakan bahwa sosiologi pariwisata adalah kajian kepariwisataan dengan menggunakan perspektif sosiologi, yaitu penerapan prinsip, konsep, hukum, paradigma, dan metode sosiologis di dalam mengkaji masyarakat dan fenomena pariwisata.
2. Soemanto (1999), Sosiologi pariwisata adalah sebagai studi tentang individu dan masyarakat, organisasi dan lembaga sosial yang berhubungan dengan layanan kebutuhan perjalanan wisata bagi wisatawan dan kegiatan kepariwisataan.

3. Cohen (1984), Sosiologi pariwisata: *concerned with the study of touristic motivation, roles, relationships, and institution and their impact on tourists and the societies who receive them.*

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi pariwisata adalah sebagai bagian dari sosiologi yang membahas dan menganalisis fenomena pariwisata, dengan bantuan konsep-konsep dan metode sosiologi.

C. Pendekatan Sosiologi Pariwisata

Kegiatan sosial yang digerakkan oleh industri pariwisata telah berkembang cepat dan mengundang ketertarikan bagi penyelidikan dan pengamatan. Sosiologi sangat tertarik untuk ambil bagian dalam mempelajari pariwisata. Sifat multibidang dari pariwisata juga mengundang daya tarik bagi disiplin-disiplin ilmu yang lain. Dari catatan dinyatakan bahwa sejumlah disiplin ilmu memiliki perhatian dan melakukan pendekatan terhadap studi pariwisata, yaitu pendidikan, administrasi hotel dan restoran, transportasi, bisnis, hukum, pemasaran, perencanaan kota dan regional, pertamanan dan rekreasi, pertanian, ekologi, geografi, politik, antropologi, psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata memiliki bidang kegiatan yang luas dan kompleks yang memasuki aspek-aspek kehidupan manusia.

Menurut Soemanto (1999), pendekatan sosiologis tentang pariwisata dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Mendeskripsikan, menjelaskan dan memahami hubungan antara kekuatan (potensi) pariwisata, yaitu orang, kelompok, organisasi/badan usaha kepariwisataan dan masyarakat serta objek dan daya tarik wisata, organisasi, kelembagaan pemerintah juga mobilitas sosial yaitu kunjungan wisatawan ke daerah-daerah tujuan wisata;
2. Analisis terhadap kekuatan (potensi), mutu dan karakteristik pelayanan wisata, organisasi, kelembagaan, interaksi sosial dari lembaga pelayanan, serta permasalahan memiliki hubungan dengan sistem pengembangan pariwisata.

Kajian dan analisis sosiologis mengenai pariwisata itu dilakukan melalui penelitian, dalam bentuk pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan penelitian tersebut meliputi metode survey, studi kasus, studi eksperimen, studi dokumen, metode deskriptif, metode historis, metode perkembangan, metode korelasi, metode komparatif, grounded research, dan sebagainya.

D. Manfaat Sosiologi Pariwisata

Mempelajari sosiologi pariwisata dapat memberikan manfaat, di antaranya adalah:

1. Mengetahui dan memahami pengertian, objek, ruang lingkup, konsep dan teori sosiologi pariwisata;
2. Mengetahui dan memahami berbagai perspektif teori dalam sosiologi yang menjadi akar teori sosiologi pariwisata;
3. Pengembangan teori sosiologi dan juga aspek terapannya untuk membantu pengembangan usaha-usaha pariwisata dengan meningkatkan dampak positif, serta mengeleminir dampak negatif bagi terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat yang lebih baik;
4. Mampu mengidentifikasi dan pemecahan masalah terhadap fenomena dan permasalahan sosial yang timbul terkait pariwisata, baik aspek sosial-ekonomi, sosial-budaya, maupun lingkungan

E. Objek Kajian Sosiologi Pariwisata

Seperti kita ketahui, bahwa sosiologi pariwisata ini begitu luas aspek-aspeknya, sehingga menyebabkan begitu banyaknya hal-hal yang memerlukan kajian. Di samping itu, telah dinyatakan bahwa sosiologi pariwisata menghadapi tantangan yang besar dalam menjelaskan, menjawab, dan mendeskripsikan fenomena dan permasalahan pariwisata. Analisis sosiologis mengenai pariwisata harus dipertanggungjawabkan hasilnya, baik menurut tuntutan disiplin ilmu maupun untuk kepentingan praktis yang berkaitan dengan pengembangan usaha pariwisata di masyarakat.

Objek kajian sosiologi pariwisata menurut beberapa ahli, di antaranya:

1. Cohen (1984), objek kajian sosiologi pariwisata, yaitu:
 - a. Wisatawan;
 - b. Hubungan antara wisatawan dengan masyarakat lokal;
 - c. Struktur dan fungsi sistem pariwisata;
 - d. Dampak-dampak pariwisata.
2. Soemanto (1999), objek kajian sosiologi pariwisata, yaitu:
 - a. Sudut pandang teori sosiologi yang cocok dan relevan untuk menjelaskan fenomena, permasalahan, dan isu kepariwisataan;
 - b. Waktu luang dan kegiatan kepariwisataan;
 - c. Struktur sosial dan lembaga kepariwisataan;
 - d. Komunitas dan kelompok usaha pariwisata;
 - e. Interaksi sosial: kerjasama, persaingan dan konflik kepariwisataan;
 - f. Dampak sosial kepariwisataan;
 - g. Masalah-masalah kepariwisataan;
 - h. Desa wisata;
 - i. Pariwisata dan penanggulangan kemiskinan;
 - j. Penelitian sosiologi pariwisata.

BAB XIV

SOSIOLOGI INDUSTRI

A. Perkembangan Sosiologi Industri

Secara historis, kemunculan sosiologi industri tidak bisa dilepaskan dari revolusi industri, yang berlangsung di beberapa masyarakat Barat, terutama pada abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Revolusi industri bukanlah peristiwa tunggal melainkan terdiri dari beberapa perkembangan yang saling terkait dan berpuncak pada transformasi dunia Barat dari sistem pertanian menuju sistem industri besar-besaran. Para petani meninggalkan lahan pertanian dan beralih ke pekerjaan di sektor industri yang ditawarkan oleh pabrik-pabrik besar. Pabrik itu sendiri ditransformasikan oleh rangkaian panjang kemajuan teknologi. Birokrasi ekonomi besar semakin banyak memberikan jasa yang dibutuhkan oleh industri dan sistem ekonomi kapitalis yang tengah tumbuh. Dalam ekonomi ini, yang menjadi kondisi ideal adalah pasar bebas tempat diperjualbelikannya bermacam-macam produk industri. Dalam sistem ini, hanya sedikit yang memperoleh laba besar, sementara itu mayoritas yang lain bekerja berjam-jam dengan upah rendah. Reaksi terhadap sistem industri dan kapitalisme ini secara umum berimbas dan mengarah pada gerakan buruh maupun berbagai gerakan radikal yang ditujukan untuk menghapuskan sistem kapitalis (Ritzer dan Goodman, 2009).

Industrialisasi mempunyai pengaruh yang cukup besar pada perubahan tata kehidupan masyarakat. Industrialisasi mengubah bentuk kesejahteraan masyarakat, cara manusia berinteraksi, cara berpikir hingga pengelompokan dan penggolongan manusia di dalam masyarakat. Kehadiran industrialisasi, perubahan

yang paling nyata adalah perubahan dalam struktur pekerjaan dan organisasi kerja di dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, runtuhnya kekuasaan monarki dan kekuasaan sentralistik gereja mengubah cara pandang masyarakat dari tradisional ke arah lebih rasional (Watson, 1997). Sementara itu, pada struktur makro, perubahan-perubahan besar juga terjadi. Tatahan politik Negara dan cara Negara dalam menangani dan mensejahterakan warga negaranya juga mengalami perombakan serius. Struktur masyarakat juga memunculkan dua kelompok yang sangat kontras satu sama lain yakni kelompok pemilik modal dan kelompok buruh di mana pola hubungan sosial di antara keduanya belum pernah ditemukan sebelumnya dalam sejarah (Nugroho, 2007).

Pada masa kini, tidak ada satu masyarakat atau Negara pun yang tidak menggunakan industri sebagai mesin penggerak perubahan sosial ekonominya. Negara-negara maju, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Amerika Serikat, Kanada, atau Jepang, jauh lebih awal bahkan menjadi pelopor dari industrialisasi. Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura merupakan pendatang baru dalam industrialisasi yang tidak kalah pesat pertumbuhannya. Sementara itu, ratusan Negara sedang berkembang lain di Asia, Afrika dan Amerika Latin, juga menempuh cara yang sama untuk mengubah kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Industrialisasi menjadi sebuah keniscayaan bagi langkah perubahan kehidupan (Nugroho, 2007).

Ketika industrialisasi menjadi sebuah fenomena sosial ekonomi yang sangat meluas menggantikan ekonomi pertanian, wajah persoalan dari kehidupan masyarakat juga berubah. Awal maraknya pertumbuhan industri sering kali diikuti oleh munculnya berbagai masalah sosial yang sangat serius. Baik di Eropa, Amerika Utara maupun Negara-negara industri yang lebih lambat dalam perkembangan industrinya, awal

pertumbuhan industri kerap menciptakan masalah kesenjangan sosial ekonomi maupun konflik-konflik sosial yang lebih kompleks. Singkatnya, industrialisasi telah memicu gejolak di tengah masyarakat Barat, dan mempengaruhi para sosiolog. Empat tokoh utama dalam sejarah awal teori sosiologi, seperti Marx, Weber, Durkheim dan Simmel, amat memperhatikan perubahan-perubahan ini dan masalah yang ditimbulkannya bagi masyarakat secara keseluruhannya. Mereka menghabiskan hidupnya untuk mempelajari masalah-masalah ini, dan dalam banyak kasus mereka berusaha mengembangkan program yang akan membantu memecahkan masalah-masalah tersebut (Ritzer dan Goodman, 2009).

Masalah-masalah sosial kompleks yang bermunculan sepanjang perkembangan industrialisasi, sejak kelahirannya yang pertama di Eropa, mendorong perkembangan sosiologi sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang sangat relevan dengan situasi sejarahnya. Berbagai kajian mengenai perubahan-perubahan sosial di berbagai tingkatan sosial berkembang secara pesat di Eropa, Amerika Utara, maupun Negara-negara berkembang di Asia dan Amerika Latin. Hampir sebagian besar studi-studi dalam sosiologi tumbuh sebagai akibat dari perubahan sosial yang dihasilkan oleh revolusi industri ini. Sosiologi industri dalam hal ini tumbuh menjadi sebuah subdisiplin tersendiri yang secara sangat khusus memusatkan perhatian analisisnya pada persoalan-persoalan sosial yang muncul di dalam ranah pekerjaan dan sosial yang lebih luas terkait dengan kegiatan produksi dari industri (Nugroho, 2007).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan sejarahnya, sosiologi industri adalah ilmu yang lahir di tengah revolusi industri. Kehadiran industri yang paling nyata adalah perubahan dalam struktur pekerjaan dan organisasi kerja dari sistem pertanian menuju sistem industri di dalam masyarakat. Dampaknya, struktur masyarakat muncul dua kelompok baru,

yakni kelompok pemilik modal dan kelompok buruh, Selain itu, juga telah mengubah bentuk kesejahteraan masyarakat, cara manusia dalam berinteraksi, cara berpikir hingga pengelompokan dan penggolongan manusia di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat masyarakat maupun khusus di dalam struktur pekerjaan dan organisasi kerja memberi sumbangan yang berarti bagi pengembangan sosiologi industri.

B. Pengertian Sosiologi Industri

Ada dua istilah keilmuan yang bersanding dalam kajian ini, yaitu sosiologi dan industri. Sosiologi sebagaimana kita ketahui, memfokuskan diri pada kajian memahami struktur, sistem sosial, lembaga, kelompok sosial, dinamika sosial dalam proses yang terjadi, hubungan timbal balik individu dan individu, individu dan kelompok/masyarakat serta hubungan antar kelompok/masyarakat. Sementara, industri adalah semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk mengolah bahan mentah yang ada menjadi bahan setengah jadi atau mengolah bahan setengah jadi tersebut menjadi barang yang sudah benar-benar jadi sehingga memiliki berbagai kegunaan yang lebih tinggi bagi kepentingan manusia (Utomo, 2017). Bagi orang yang berminat untuk mendalami makna dari kedua disiplin ilmu itu, dapat melakukan kajian intensif pada spesifikasi keilmuannya sendiri.

Terdapat banyak definisi sosiologi industri yang sudah diajukan oleh para ahli. Dalam wacana ini, kita tidak memiliki ruang yang cukup untuk menampilkan ragam pandangan dan analisis definisi tersebut. Di sini disampaikan pengertian umum sosiologi industri menurut beberapa ahli, yaitu:

1. Sulastri (2015), Sosiologi industri adalah cabang dari ilmu sosiologi yang mengkaji hubungan antara fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan kegiatan industri. Pada hakekatnya sosiologi industri lebih menekankan pada perkembangan industri seiring dengan perkembangan

masyarakat. Hal ini mengingat antara industri dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat, karena adanya industri akan menimbulkan berbagai perubahan sosial dalam masyarakat.

2. Marx dan Weber, Sosiologi industri memusatkan perhatian pada pola-pola hubungan dan struktur sosial yang muncul di dalam lingkungan sosial industri. Pada periode-periode selanjutnya, kajian-kajian terhadap subjek permasalahan ini berkembang lebih jauh hingga menembus batas-batas wilayah disiplin ilmu. Interaksi antara sub-tansi-subtansi sosiologis dengan disiplin lain, seperti ekonomi, manajemen, politik, hukum, psikologis, antropologi menjadi lebih terbuka (Nugroho, 2007).
3. Warsito (2015), Sosiologi industri adalah cabang dari ilmu sosiologi yang membahas karakter dan arti dunia kerja serta kehidupan manusia yang terlibat di dalamnya. Permasalahan yang berhubungan dengan industri tidak hanya segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan kegiatan kerjanya tapi juga banyak hal lain yang secara tidak langsung akan mempengaruhi aktivitas kerja dalam industri tersebut.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi industri adalah sebagai bagian dari sosiologi yang membahas dan menganalisis fenomena industri, dengan bantuan konsep-konsep dan metode sosiologi.

C. Pendekatan Sosiologi Industri

Menurut Terry (1997), dalam mengkaji sosiologi industri melalui pendekatan metode kuantitatif dan metode kualitatif.

1. Metode kuantitatif adalah metode kerja ilmiah yang menggunakan angka-angka sebagai bahan-bahan keterangan data ilmiah. Dalam metodologi ini, fenomena sosial dapat ditelaah melalui angka indeks, skala, tabel. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik sehingga dapat disimpulkan hipotesis

yang dirumuskan terbukti atau tidak. Metode kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel tersebut diambil.

2. Metode Kualitatif adalah metode kerja ilmiah yang mengutamakan bahan atau informasi yang nantinya akan diuji berdasarkan tingkat kualitas data. Dengan metodologi ini sukar didapat indikator atau skala pengukuran berdasarkan angka-angka yang bersifat eksak (tepat/pasti). Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksi menjadi hipotesis atau teori. Metode ini, digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, metode kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

D. Manfaat Sosiologi Industri

Mempelajari sosiologi industri dapat memberi manfaat, di antaranya adalah:

1. Mengetahui dan memahami pengertian, objek, ruang lingkup, konsep dan teori sosiologi industri;
2. Mengetahui dan memahami berbagai perspektif teori dalam sosiologi yang menjadi akar teori sosiologi industri;
3. Mengetahui dan memahami sejarah pertumbuhan industri, dan pengaruhnya terhadap lingkungan sosial, termasuk di dalamnya bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, pendidikan, dan keagamaan;
4. Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah terhadap fenomena dan permasalahan sosial yang timbul terkait perkembangan industri di masyarakat.

E. Objek Kajian Sosiologi Industri

Cakupan teori yang terdapat di dalam sosiologi industri sangat luas. Tapi, tampaknya para ahli sepakat bahwa sosiologi industri mengkaji dan menganalisis hubungan antara fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dengan kegiatan industri. Artinya, terdapat pengaruh timbal balik antara kegiatan industri dengan masyarakat, seperti peranan industri dalam perubahan sosial, aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pokok ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi), hubungan industri dengan berbagai struktur yang ada dalam masyarakat, dan sebagainya. Berikut ini dikemukakan objek kajian sosiologi industri menurut beberapa ahli:

1. Watson (1997), objek kajian sosiologi industri meliputi:
 - a. Kerja (work):
 - 1) Pengalaman kerja;
 - 2) Nilai dan orientasi kerja;
 - 3) Persoalan gender dalam pekerjaan;
 - b. Pekerjaan (Okupasi):
 - 1) Struktur pekerjaan;
 - 2) Hubungan antara kelas sosial dengan pekerjaan;
 - 3) Perubahan pembagian kerja;
 - 4) Karir pekerjaan;
 - 5) Komunitas kerja;
 - c. Organisasi:
 - 1) Persoalan birokrasi;
 - 2) Struktur organisasi dan teknologi;
 - 3) Kekuasaan dan otoritas di dalam organisasi;
 - 4) Budaya organisasi;
 - d. Hubungan kerja:
 - 1) Konflik dan kerjasama di tempat kerja;
 - 2) Penyesuaian kelompok dan individu;
 - 3) Strategi serikat buruh;
 - 4) Strategi sumberdaya manusia;

2. Iqbal Djajadi dkk (2007), objek kajian sosiologi industri meliputi:
 - a. Prinsip-prinsip dasar sosiologi industri;
 - b. Sistem produksi;
 - c. Pekerjaan;
 - d. Buruh industri;
 - e. Struktur sosial dan kedudukan buruh;
 - f. Hubungan industrial;
 - g. Gerakan buruh dan serikat buruh;
 - h. Konflik industrial;
 - i. Penyelesaian konflik industrial;
3. Sulastri (2015), objek kajian sosiologi industri meliputi:
 - a. Analisis tingkah laku manusia dalam hubungan kerja di industri:
 - a. Hubungan kerja dalam industri;
 - b. Organisasi industri;
 - c. Manajemen industri;
 - d. Leadership dalam industri;
 - e. Analisis kegiatan manusia dengan latar belakang sosial-ekonomi dan kultural yang berbeda-beda:
 - 1) Tipologi masyarakat industri;
 - 2) Perkembangan masyarakat industri;
 - 3) Hubungan birokrasi dengan industri;
 - 4) Analisis dampak lingkungan;
 - 5) CSR (*Coorporate Social Responsibility*).

Objek kajian sosiologi industri di atas sangat luas dan beragam, karena teori-teori yang digunakan di dalam sosiologi industri memiliki keragaman berdasarkan asal pemikirannya. Sebagian teori berasal sepenuhnya dari akar pemikiran para pelopor sosiologi, seperti Durkheim, Weber dan Marx. Durkheim mempengaruhi teori-teori yang dikembangkan dalam sosiologi industri melalui tiga konsep penting, yakni integrasi, solidaritas dan anomie. Weber, memusatkan perhatiannya pada tindakan-

tindakan yang bermakna, perubahan historis, dan konflik-konflik ekonomi politik. Sementara, Marx, paling banyak membahas secara langsung konsep-konsep dan isu-isu sosial dalam lingkup sosiologi industri. Inti pemikiran Marx, bertolak dari konsep materialisme dan perjuangan kelas.

Namun, ada sejumlah teori yang dikembangkan oleh para ahli psikologi atau manajemen dan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan pemikiran-pemikiran sosiologi. Teori-teori seperti manajemen ilmiah (*scientific management*) tidak diangkat dari basis pemikiran sosiologis, melainkan lebih dipengaruhi oleh asumsi-asumsi psikologis. Namun demikian, teori-teori seperti ini penting untuk mendapatkan perhatian, karena pengembangan teori ini telah menciptakan suatu kondisi sosial dan terminologi-terminologi yang menjadi objek pengamatan yang sangat penting dari sosiologi industri.

BAB XV

SOSIOLOGI KAPITAL

A. Perkembangan Sosiologi Kapital

Menelusuri perjalanan sosiologi kapital sebagai suatu disiplin ilmu bukanlah pekerjaan yang mudah. Literatur dan bahan bacaan yang konfrehensif serta layak dijadikan rujukan masih terbatas. Namun tulisan ini yang dijadikan landasan adalah tokoh sosiologi, antara lain Marx (1818-1883), Durkheim (1858-1917), Simmel (1858-1918), Weber (1864-1920), Damsar dan Indrayani (2019).

Marx merupakan peletak dasar utama sosiologi kapital dalam sosiologi. Dia menulis buku yang sangat tebal khusus membicarakan capital, yaitu *Capital: A Critique of Political Economy* (1867-1967) (Damsar & Indrayani, 2019). Sumbangan Marx, yaitu menemukan kapitalis di dalam komoditas. Menurutnya, suatu masyarakat didominasi oleh objek-objek yang nilai utamanya adalah pertukaran yang memproduksi kategori-kategori masyarakat tertentu. Dua tipe utama yang menjadi perhatian Marx adalah proletar dan kapitalis (Ritzer & Goodman, 2009). Mari kita ikuti pemikiran Marx tentang proletar dan kapitalis.

Proletar adalah para pekerja yang menjual kerja mereka dan tidak memiliki alat-alat produksi sendiri. Mereka tidak memiliki sarana-sarana sendiri dan pabrik-pabrik sendiri. Marx kemudian percaya bahwa proletariat bahkan akan kehilangan ketrampilan mereka seiring dengan meningkatnya mesin-mesin yang menggantikan ketrampilan mereka. Proletariat hanya hanya memproduksi demi pertukaran, maka mereka juga konsumen. Mereka tidak memiliki sarana-sarana untuk memproduksi

kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, maka mereka harus menggunakan upah yang mereka peroleh untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Proletariat tergantung sepenuhnya pada upahnya untuk bertahan hidup. Hal inilah yang membuat proletariat tergantung pada orang yang memberi upah.

Orang yang memberi upah itu adalah kapitalis. Kapitalis adalah orang-orang yang memiliki alat-alat produksi. Sebelum kita mengerti sepenuhnya apa itu kapitalis, kita harus mengerti dulu apa itu kapital. Menurut Marx, kapital adalah uang yang menghasilkan lebih banyak uang. Dengan kata lain, kapital lebih merupakan uang yang diinvestasikan ketimbang uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Hal ini akan terlihat lebih jelas dengan memperhatikan apa yang dipandang Marx sebagai “titik tolak kapital”, “sirkulasi komoditas”. Marx mendiskusikan dua tipe sirkulasi komoditas. Sirkulasi bentuk pertama adalah ciri kapital, yaitu Uang – Komoditas – Uang (dengan jumlah yang lebih besar) ($M1 - C - M2$). Sirkulasi bentuk kedua bukan ciri kapital, yaitu Komoditas – Uang – Komoditas ($C1 - M - C2$).

Dalam sirkulasi komoditas nonkapitalis, sirkuit $C1 - M - C2$ -lah yang menonjol. Di antara contoh sirkuit $C1 - M - C2$ adalah nelayan yang menjual tangkapannya ($C1$) dan kemudian menggunakan uang (M) untuk membeli roti ($C2$). Dengan kata lain, tujuan utama pertukaran di dalam sirkulasi nonkapitalis adalah komoditas yang bisa kita gunakan dan nikmati.

Sebaliknya, sirkulasi komoditas kapitalis ($M1 - C - M2$) memiliki tujuan untuk memproduksi lebih banyak uang. Komoditas-komoditas dibeli untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk digunakan. Di dalam sirkuit kapitalis, yang dirujuk oleh Marx sebagai membeli untuk menjual. Aktor individual membeli sebuah komoditas dengan uang, kemudian mempertukarkannya kembali demi uang yang lebih banyak. Di sini, seorang pemilik toko akan membeli ($M1$) ikan (C) untuk menjual kembali demi lebih banyak uang ($M2$). Untuk

meningkatkan keuntungan selanjutnya, pemilik toko mungkin membeli kapal dan perlengkapan memancing dan membayar upah nelayan. Tujuan dari sirkulasi ini tidaklah konsumsi nilai-guna, sebagaimana di dalam sirkulasi sederhana komoditas, melainkan uang yang lebih banyak. Properti-properti tertentu dari komoditas yang digunakan untuk memperoleh uang adalah tidak relevan. Komoditas bisa jadi berupa ikan atau kerja. Kebutuhan dan keinginan manusia yang sebenarnya tidaklah relevan. Inti persoalan adalah apa yang akan menghasilkan lebih banyak uang (Ritzer & Goodman, 2009).

Jadi, kapital adalah uang yang menghasilkan lebih banyak uang. Namun, Marx mengungkapkan kepada kita bahwa kapital bukan hanya itu; kapital juga merupakan sebuah relasi sosial tertentu. Dengan kata lain, uang hanya akan menjadi kapital karena adanya relasi sosial antara proletariat yang bekerja dan harus membeli produk dengan orang lain yang menginvestasikan uangnya. Di dalam ide kapital, terdapat suatu relasi sosial antara orang-orang yang memiliki alat produksi dan orang-orang kerja upahan yang dieksploitasi (Ritzer & Goodman, 2009).

Sumbangan tokoh sosiologi lainnya terhadap perkembangan sosiologi kapital adalah Durkheim (1858-1917), Simmel (1858-1918) dan Weber (1864-1920). Sumbangan Durkheim mengenai pembagian kerja. Perkembangan pembagian kerja tersebut didukung oleh semakin menguatnya konsensus yang bersifat abstrak dan umum serta hukum yang bersifat restitutif, seperti hukum administrasi, hukum bisnis, dan hukum sipil. Hal tersebut menyebabkan konflik tidak muncul dan masyarakat dapat dipertahankan melaluinya. Simmel, tidak langsung meletakkan dasar dan memberikan sumbangan terhadap perkembangan sosiologi kapital, namun ia telah menyentuh salah satu aspek dari kapital, yaitu kapital finansial berupa uang, *The Philosophy of Money* (1907-1978) merupakan karya monumental sosiologi Simmel dan sebagai buku rujukan utama dalam memahami

sejarah perkembangan uang dari sudut sosiologi (Damsar & Indrayani, 2019). Weber memberikan sumbangan signifikan terhadap perkembangan sosiologi kapital. Tulisannya mengenai etika Protestan merupakan salah satu akar pemikiran sosiologis tentang kapital insani. Etika Protestan menurut Weber merupakan motor penggerak perkembangan kapitalisme di Barat. Etika Protestan mengajarkan pada para pemeluknya bahwa untuk dapat mencapai kesuksesan di dunia, manusia harus memiliki semangat, bekerja keras dan harus hidup hemat. Pandangan ini bagi umat Protestan muncul karena kepanikan di kalangan manusia akan nasib dirinya setelah mengalami kematian. Bagi umat Protestan, Tuhan hanya akan memberikan peluang kepada hambanya yang mau bekerja keras (Ritzer & Goodman, 2009).

Dalam perkembangannya, menurut Damsar dan Indrayani (2019), konsep kapital tidak hanya diterjemahkan dengan modal atau finansial saja, tetapi juga mencakup kapital insani (*human capital*), kapital sosial (*social capital*), kapital budaya (*cultural capital*) dan kapital simbolik (*symbolic capital*). Di sinilah titik tolak sumbangan konsep kapital terhadap perkembangan sosiologi kapital.

B. Pengertian Sosiologi Kapital

Ada dua istilah keilmuan yang bersanding dalam kajian ini, yaitu sosiologi dan kapital. Kedua istilah itu, secara keilmuan sudah berdiri sendiri dan memiliki batang tubuh keilmuannya masing-masing. Terdapat cukup banyak definisi sosiologi dan kapital yang sudah diajukan para ahli. Dalam wacana ini, kita tidak memiliki ruang yang cukup untuk menampilkan ragam pandangan dan menganalisis definisi tersebut. Sesuai dengan ruang tulis yang ada, di sini disampaikan pengertian umum dan makna sosiologi, kapital dan sosiologi kapital.

Sosiologi sebagaimana kita ketahui, memfokuskan diri pada kajian memahami struktur, sistem sosial, lembaga, kelompok

sosial, dinamika sosial dalam proses yang terjadi, hubungan timbal balik individu dan individu, individu dan kelompok/masyarakat serta hubungan antar kelompok/masyarakat. Sementara, kapital secara etimologis berasal dari kata “capital”, yang akar katanya dari kata latin, “caput” berarti “kepala”. Artinya dipahami pada abad ke-12 dan ke-13, sebagai dana, persediaan barang, sejumlah uang, dan bunga uang pinjaman (Berger, 1990). Dalam bahasa Indonesia, kapital diterjemahkan sebagai modal. Modal dalam bahasa Indonesia, merujuk pada Wikipedia, berakar dari bahasa Tamil, yaitu mutal, yang berarti “dasar”, “kaki”, “bagian bawah”, “puntung”. Modal memiliki banyak arti yang berhubungan dalam ekonomi, finansial, dan akunting. Namun “capital” tidak langsung diterjemahkan sebagai modal, tetapi tetap menggunakan bahasa aslinya dengan tulisan Indonesia, yaitu kapital (Damsar & Indrayani, 2019).

Menurut Damsar & Indrayani (2019), sosiologi kapital dapat dibuatkan rumusan pengertiannya melalui dua cara. Pertama, Sosiologi kapital dimengerti sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan kapital. Dalam hubungan tersebut, dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi kapital. Juga sebaliknya, bagaimana kapital mempengaruhi masyarakat. Dengan pemahaman tersebut, maka sosiologi kapital mengkaji masyarakat, yang di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial, dalam hubungannya dengan kapital. Hubungan tersebut dilihat dari sisi saling mempengaruhi. Masyarakat sebagai realitas eksternal-objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kapital (finansial, insani, sosial, budaya dan simbolik). Misalnya, kapital seperti apa yang boleh ditransaksikan, bagaimana proses transaksi dilakukan, dan di mana transaksi tersebut berlangsung. Tuntunan tersebut biasanya berasal dari budaya, termasuk di dalamnya hukum dan agama. Dalam agama Islam, misalnya terdapat jenis transaksi halal dan haram. Halal dan haramnya

suatu transaksi terkait dengan barang yang ditransaksikan dan cara melakukan transaksi. Bila transaksi terhadap (barang) kapital yang dikategorikan haram misalnya babi, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi haram. Contoh lain, setiap transaksi kapital (finansial) yang dikenakan suatu bunga terhadap suatu transaksi, maka transaksi tersebut disebut sebagai aktivitas riba. Setiap aktivitas yang berdimensi riba dipandang haram menurut Islam. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat merupakan suatu realitas yang di dalamnya terjadi proses interaksi dan terdapat pola interaksi sosial. Hubungan antara kapital dan masyarakat, termasuk di dalamnya ada proses dan pola interaksi, bersifat saling mempengaruhi atau pengaruh timbal balik, yaitu masyarakat mempengaruhi capital, dan sebaliknya kapital mempengaruhi masyarakat.

Kedua, sosiologi kapital didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena kapital. Dari definisi ini terdapat dua hal yang harus dijelaskan, yaitu pendekatan sosiologis dan fenomena kapital. Pendekatan sosiologis yaitu konsep-konsep, variabel-variabel, teori-teori, dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan kapital seperti kapital finansial, kapital insani, kapital sosial, kapital budaya, kapital simbolik, kepercayaan, kerjasama, pendidikan, solidaritas, dan resiprositas. Selanjutnya, yang dimaksud dengan fenomena kapital merupakan gejala dari cara bagaimana kapital dibentuk, dikembangkan, dipertahankan, diubah, dan hilang dalam proses, ruang, dan waktu. Cara yang dimaksud di sini yaitu semua aktivitas pendidikan, sosialisasi, dan konstruksi sosial dari kapital (finansial, insani, sosial, budaya dan simbolik).

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sosiologi kapital sebagai bagian dari sosiologi yang membahas dan menganalisis fenomena kapital, di dalamnya termasuk mempelajari hubungan antar masyarakat dan kapital, dengan bantuan konsep-konsep dan metode sosiologi.

C. Pendekatan Sosiologi Kapital

Ada dua pendekatan yang dipakai para ahli sosiologi kapital untuk mempelajari masalah-masalah yang menjadi objek kajian sosiologi kapital, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Dengan metode ini kita bisa menemukan bagaimana jawaban-jawaban mereka atas permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dengan kata lain, pendekatan ini memberikan suatu perspektif yang diperlukan bagi studi sosiologi kapital atau mempelajari fenomena sosial dalam lingkup kajian sosiologi kapital.

1. Metode Kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metodologi ilmiah yang menggunakan angka-angka sebagai bahan-bahan keterangan data ilmiah. Dalam metodologi ini, fenomena sosial dapat ditelaah melalui angka indeks, skala, tabel, dan rumusan lain yang sedikit banyak menggunakan statistik. Metode ini umumnya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang representatif. Proses penelitian bersifat deduktif, di mana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji melalui pengumpulan data lapangan. Untuk mengumpulkan data digunakan instrumen penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak. Metode ini pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel tersebut diambil.
2. Metode Kualitatif. Metode kualitatif adalah metode kerja ilmiah yang mengutamakan bahan atau informasi yang nantinya akan diuji berdasarkan tingkat kualitas data. Dengan metodologi ini, sukar didapat indikator atau skala pengukuran berdasarkan angka-angka yang bersifat eksak (tepat/pasti). Metode kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti sendiri. Untuk dapat

menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan mendalam terhadap situasi yang diteliti. Teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan atau simultan. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksi menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Metode kualitatif ini tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

D. Manfaat Sosiologi Kapital

Mempelajari sosiologi kapital dapat memberi manfaat, di antaranya adalah:

1. Mengetahui dan memahami pengertian, objek, ruang lingkup, konsep dan teori sosiologi kapital;
2. Mengetahui dan memahami berbagai perspektif teori dalam sosiologi yang menjadi akar teori sosiologi kapital;
3. Mengetahui, memahami dan mampu menjelaskan sosiologi kapital sebagai ilmu murni dan sekaligus ilmu terapan. Sosiologi kapital sebagai ilmu murni, karena dalam materinya memberikan kontribusi bagi kompetensi, keahlian, dan kemampuan dalam memahami fenomena kapital berdasarkan teori sosiologi kapital. Sementara, sosiologi kapital sebagai ilmu terapan, karena sosiologi kapital dapat membantu mengevaluasi keefektifan kebijakan dan program, menawarkan penyelesaian masalah, mengusulkan cara untuk memperbaiki kebijakan dan program yang berkaitan dengan kapital, atau memberikan gagasan dan tindakan

- alternatif dalam strategi menciptakan kepercayaan dalam berbagai dimensi kehidupan;
4. Mampu mengidentifikasi dan pemecahan masalah terhadap fenomena sosial dan permasalahan sosial yang timbul terkait dengan kapital, yang mencakup kapital insani, kapital sosial, kapital budaya, dan kapital simbolik.

E. Objek Kajian Sosiologi Kapital

Dalam bahasa Indonesia, kapital diterjemahkan sebagai modal. Modal memiliki banyak arti yang berhubungan dengan ekonomi, finansial, dan akunting. Berdasarkan konsep tersebut, tidak bisa dikatakan bahwa sosiologi kapital merupakan ranting dari sosiologi ekonomi, dengan alasan ekonomi banyak membahas persoalan kapital. Tetapi sosiologi pendidikan juga membahas aspek kapital dari berbagai dimensinya dalam fenomena pendidikan. Oleh karena itu, jalan tengahnya bahwa sosiologi kapital telah menjadi cabang baru yang akarnya berasal dari sosiologi dan berbagai sosiologi lainnya, seperti sosiologi ekonomi, sosiologi pendidikan dan sosiologi politik.

Dalam kaitan ini, objek kajian sosiologi kapital adalah mengkaji dan menganalisis fenomena kapital yang berkembang dalam proses interaksi sosial, hubungan antara kapital dan masyarakat yang bersifat saling mempengaruhi atau pengaruh timbal balik. Artinya, masyarakat mempengaruhi kapital, dan sebaliknya kapital mempengaruhi masyarakat.

Terlepas dari berbagai pandangan yang berbeda tentang objek kajian sosiologi kapital yang dikemukakan oleh para ahli, sebagai referensi perlu kita kemukakan sebagai bahan bacaan dan dijadikan rujukan. Menurut Damsar dan Indrayani (2019), Objek kajian sosiologi kapital dititik beratkan pada fenomena kapital, yaitu:

1. Kapital;
2. Kapital insani;

3. Kapital finansial;
4. Kapital sosial;
5. Kapital budaya;
6. Kapital simbolik;
7. Pendidikan;
8. Sosialisasi;
9. Kepercayaan;
10. Ketrampilan;
11. Keahlian;
12. Jaringan;
13. Kerjasama.

BAB XVI

SOSIOLOGI LINGKUNGAN

A. Perkembangan Sosiologi Lingkungan

Diakui bersama bahwa lingkungan kita saat ini masuk dalam kondisi kritis, jika tidak mau dinyatakan rusak di mana-mana. Tidak hanya bentuk kritis lingkungan fisik seperti kritis air, tanah, udara, bahkan iklim, tetapi juga kritis lingkungan biologis dan tentunya, lingkungan sosial. Krisis lingkungan biologis terlihat dari semakin punahnya tumbuh-tumbuhan dan satwa-satwa langka di sekitar kita. Aneka macam perburuan dan perdagangan satwa langka merupakan biang kerok penyebab krisis lingkungan biologis itu (Dwi Susilo, 2008). Tambahan, masalah kerusakan lingkungan yang banyak terjadi, antara lain: kerusakan hutan, erosi tanah, kepunahan satwa liar (fauna), kepunahan tumbuh-tumbuhan (flora), penurunan stok ikan dan udang, serta pencemaran limbah rumah tangga dan pabrik (Iskandar, 2001). Akibat eksploitasi lingkungan dengan tidak memikirkan daya dukung yang dimiliki, lingkungan pun akhirnya terkorbankan. Beragam bencana alam menjadi pemandangan yang sering kita jumpai dengan menyisakan beragam penderitaan dan kerugian. Dengan kata lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, manusia yang sangat bergantung pada kelestarian lingkungan, tetapi memperlakukan lingkungan dengan kurang bijak, merasa berbagai akibatnya.

Fenomena ini seharusnya lebih menyadarkan kita untuk mengoreksi pola pikir dan tindakan-tindakan sosial kita selama ini. Kemudian, sambil tidak tinggal diam, kita bisa berbuat sesuatu untuk memikirkan masa depan lingkungan, baik berbentuk tindakan di tingkat kognitif, afeksi, psikomotorik,

teoritis, maupun tindakan praktis. Sebab, persoalan-persoalan lingkungan jelas karena perilaku manusia, terutama sebagai konsekuensi interaksi atau hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Manusia dan lingkungan sekitarnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan; manusia dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Misalnya, manusia dan aktivitasnya dapat mempengaruhi lingkungan biofisik, berupa udara, air, tanah, hutan dan satwa liar. Sebaliknya, lingkungan biofisik yang telah mendapatkan perlakuan manusia itu akan mempengaruhi kehidupan manusia sendiri. Misalnya, udara dilibatkan dalam cara pernapasan; air untuk minum, mandi, mencuci, mengairi pertanian dan perikanan; tanah untuk pertanian dan permukiman; hutan untuk sumber keperluan kayu; dan satwa liar untuk sumber protein.

Interaksi atau hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan terus berlanjut. Masyarakat menyadari bahwa merusak lingkungan ternyata sama halnya mereka tidak memikirkan masa depan lingkungan. Rusaknya lingkungan dan terjadinya bencana alam yang tidak terhindarkan, menyadarkan sebagian masyarakat, cepat atau lambat, akan rusaknya sistem sosial kita. Dalam pandangan Sosiolog, Giddens dan Beck (Dwi Susilo, 2008) mengingatkan kita bahwa krisis lingkungan dan bencana-bencana lingkungan sebagai akibat penerapan teknologi yang tidak bertanggungjawab. Akhirnya, permasalahan lingkungan mendapat perhatian yang besar di hampir semua Negara. Ini terutama terjadi dalam dasawarsa 1970-an setelah diadakannya Konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm dalam tahun 1972. Dalam konferensi Stockholm telah disetujui banyak resolusi tentang lingkungan hidup yang digunakan sebagai landasan tindak lanjut. Salah satu di antaranya ialah didirikannya badan khusus dalam PBB yang ditugasi untuk mengurus permasalahan lingkungan, yaitu United Nations Enviromental Programme, disingkat UNEP. Badan ini bermarkas besar di

Nairobi, Kenya. Suatu tonggak sejarah tentang permasalahan lingkungan hidup.

Hingga kini pun, pembicaraan tentang lingkungan terus berlanjut. Di samping diadakan seminar-seminar tentang lingkungan, yang dihadiri banyak ilmuwan dari berbagai Universitas, pejabat pemerintah, cendekiawan dan tokoh masyarakat, juga dilakukan kajian-kajian dalam rangka menciptakan masyarakat yang berkemanusiaan dan berkelanjutan. Dimulai kajian-kajian lingkungan dari perspektif bidang ekonomi, politik, hukum, sosial-budaya, pendidikan, agama, dan sebagainya. Tetapi, khusus untuk kajian sosiologi lingkungan bisa dikatakan sangat minim. Atau, mungkin tidak hanya untuk sosiologi lingkungan, kajian-kajian sosiologi lain pun, sumbangan untuk lingkungan masih tergolong kurang. Hal ini memunculkan anggapan bahwa sosiologi, khususnya sosiologi lingkungan bisa dikatakan terlambat menanggapi perkembangan kajian-kajian lingkungan. Pada hal ilmu-ilmu sosial lain, seperti ilmu hukum telah melakukan kajian-kajian lingkungan jauh lebih awal, seperti mengkaji aturan dan hukum lingkungan. Demikian juga, ekonomi yang menyatakan bahwa persoalan lingkungan muncul pada manusia berasal dari metabolisme fisik masyarakat modern.

Menelusuri literatur dan bahan bacaan yang konprehensif dan dapat dijadikan rujukan, tercatat bahwa beberapa ilmu sosial lain telah melakukan kajian-kajian tentang lingkungan. Tahun 1970, para filosof menegaskan kajian pada wilayah etika. Kemudian di akhir 1970, ilmuwan politik menyelidiki tentang proses pemerintah dan pembangunan kapasitas institusional. Pertengahan awal tahun 1980, psikologi masuk pada kajian tentang kesadaran ekologis (*ecological awareness*) dan perilaku personal terhadap persoalan lingkungan. Pada tahun 1975-1980, sosiologi baru mulai meneliti tentang pergeseran nilai yang dianggap benar dari materialis ke orientasi nilai post materialis dan tahun 2007, juga diteliti gerakan sosial kontemporer (Dwi Susilo, 2008).

Perhatian sosiologi terhadap masalah-masalah lingkungan sebenarnya muncul jauh sebelum apa yang dinamakan sosiologi lingkungan. Keberadaannya dicanangkan oleh Riley Dunlap dan William Catton di tahun 1978. Di tahun itu, mereka menulis dua artikel, kemudian disusul oleh sebuah artikel lagi setahun setelahnya. Peristiwa itu, menandai upaya didirikan suatu cabang sosiologi yang mengkaji masalah lingkungan dan kemudian mereka beri nama “Environment Sociology” (Dwi Susilo, 2008).

Sosiologi lingkungan Dunlap dan Catton dibangun dari beberapa konsep yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

1. Persoalan-persoalan lingkungan dan ketidakmampuan sosiologi konvensional untuk membicarakan persoalan-persoalan tersebut merupakan cabang dari pandangan dunia yang gagal menjawab dasar-dasar biofisik struktural sosial dan kehidupan sosial;
2. Masyarakat modern tidak berkelanjutan sebab mereka hidup pada sumber daya yang sangat terbatas dan penggunaan di atas pelayanan ekosistem jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan ekosistem memperbaharui dirinya. Dalam tingkatan global ini diperparah dengan pertumbuhan populasi secara pesat;
3. Masyarakat menuju tingkatan lebih besar atau lebih kurang berhadapan dengan kondisi yang rentang ekologis;
4. Ilmu lingkungan modern telah mendokumentasikan kepelikan persoalan lingkungan tersebut dan menimbulkan kebutuhan akan penyesuaian besar-besaran jika krisis lingkungan ingin dihindari;
5. Pengenalan dimensi-dimensi krisis lingkungan yang menyumbang pada “pergeseran paradigma” dalam masyarakat secara umum, seperti yang terjadi di dalam sosiologi (penolakan pandangan dunia barat dominan dan penerimaan sebuah paradigma ekologi baru);

6. Perbaikan dan reformasi lingkungan akan dilahirkan lewat perluasan paradigma ekologi baru di antara publik, massa, dan akan dipercepat oleh pergeseran paradigma yang dapat dibandingkan antara ilmuwan sosial dan ilmuwan alam (Dwi Susilo, 2008).

Dari konsep di atas dapatlah dikemukakan bahwa kelahiran sosiologi lingkungan ini ditandai dengan menyatakan bahwa paradigma antroposentrisme tentang hubungan manusia dengan lingkungan tidak relevan lagi. Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapat perhatian. Segala sesuatu yang lain di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia. Oleh karena itu, alam pun dilihat hanya sebagai objek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri (Keraf, 2002).

Ilmuwan sosiologi meyakini bahwa manusia memang berbeda dengan makhluk lain, seperti tumbuhan dan binatang. Jika kedua makhluk tersebut benar-benar hidup sekedar mengikuti hukum alamiah, manusia tidak. Manusia bisa mengontrol dan menciptakan kebudayaan. Dunlap dan Catton mengakui bahwa kemampuan lingkungan fisik mempengaruhi kehidupan manusia, bukan seperti paradigma antroposentrisme. Namun, ada beberapa keterbatasan manusia ketika berhadapan dengan lingkungan biofisik. Jadi, sosiologi lingkungan menerima lingkungan fisik sebagai sesuatu yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan manusia. Paradigma

baru ini oleh mereka disebut sebagai New Environmental Paradigm (NEP). Kemudian, paradigma tersebut diubah menjadi New Ecological Paradigm untuk menegaskan dasar ekologis suatu masyarakat (Dwi Susilo, 2008). Semenjak itu, hampir seluruh pendukung sosiologi lingkungan menyandarkan diri pada paradigma baru tersebut.

Sembilan tahun setelah pendirian sosiologi lingkungan, Buttel (1996) mencoba menelusuri apakah ada arah di luar NEP yang dikembangkan para sosiolog lingkungan. Dalam tulisannya, Buttel (1996) menyatakan bahwa sosiologi lingkungan bisa dikembangkan dari sosiologi perdesaan. Bahkan, ia menegaskan bahwa silsilah sosiologi lingkungan baik beberapa atau keseluruhan merupakan keahlian khusus dalam sosiologi perdesaan. Sebagai tambahan, Buttel (1996) menyatakan pula bahwa kajian-kajian sosiologi lingkungan merupakan pengembangan dari sosiologi sumber daya alam (*natural resources sociology*) yang mengkaji taman dan waktu luang, manajemen tanah umum, perencanaan penggunaan tanah, dan sejenisnya. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sosiologi lingkungan sebagai bagian dari sosiologi, sebagai ilmu pengetahuan baru dibandingkan dengan sosiologi lainnya, tampaknya masih berkembang terus dan kajian-kajiannya tetap mencakup banyak wilayah penelitian.

B. Pengertian Sosiologi Lingkungan

Ada dua istilah keilmuan yang bersanding dalam kajian ini, yaitu sosiologi dan lingkungan. Sosiologi sebagaimana kita ketahui, menfokuskan diri pada kajian memahami struktur, sistem sosial, lembaga, kelompok sosial, dinamika sosial dalam proses yang terjadi, hubungan timbal balik individu dan individu, individu dan kelompok/masyarakat serta hubungan antar kelompok/masyarakat. Sementara, lingkungan hidup atau lebih singkat lingkungan saja, merupakan penelaahan terhadap sikap dan perilaku manusia, dengan segenap tanggungjawab dan kewajiban maupun haknya untuk mencermati lingkungan hidup

dengan sebaik-baiknya. Sikap dan perilaku ini sangat diperlukan untuk memungkinkan kelangsung peri kehidupan secara keseluruhan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (Soerjani, dkk, 2006). Pendapat lainnya, lingkungan adalah sistem kehidupan yang merupakan kesatuan ruang dengan segenap pengada (entity) baik pengada ragawi abiotik atau benda (materi), maupun pengada insani, biotik atau makhluk hidup termasuk manusia dengan perilakunya, keadaan (tatanan Alam baca kosmologi), daya (peluang, tantangan dan harapan) yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta kesejateraan makhluk hidup lainnya (UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Tampaknya para ahli telah sepakat bahwa sosiologi lingkungan memusatkan kajiannya pada adanya keterkaitan antara lingkungan dan perilaku manusia. Inti permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya. Lingkungan tempat manusia hidup selain berupa lingkungan alam juga berupa lingkungan sosialbudayanya. Dengan demikian, manusia akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, sepanjang ia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Manusia tidak bisa bebas mengembangkan diri tanpa menyesuaikan dengan lingkungan, atau kebebasan manusia pasti lingkungan sedikit banyak akan membatasi. Para ahli sosiologi bisa menjelaskan hubungan antara manusia dengan lingkungan, karena masalah lingkungan muncul tidak dengan sendirinya, melainkan sebagai akibat atau tindakan yang diperbuat manusia. Dalam konteks ini para ahli sosiologi diharapkan menaksir bukti-bukti ilmiah mengenai hubungan manusia dengan lingkungan itu. Dalam hubungan ini amatlah penting memahami cara-cara manusia melakukan upaya penyesuaian diri itu.

Dalam wacana ini, di sini disampaikan pengertian umum dari sosiologi lingkungan. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk membuka rangsangan pemikiran yang lebih luas dari para

pembaca mengenai hal ini, sehingga terdorong untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap hakikat dari sosiologi lingkungan itu. Berikut ini definisi sosiologi lingkungan menurut beberapa ahli:

1. Pahrudin (2015), sosiologi lingkungan adalah sebagai cabang sosiologi yang memusatkan kajiannya pada adanya keterkaitan antara lingkungan dan perilaku sosial manusia.
2. Dwi Susilo (2008), Sosiologi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi lingkungan sebagai bagian dari sosiologi yang membahas dan menganalisis fenomena lingkungan, dengan bantuan konsep-konsep dan metode sosiologi.

C. Pendekatan Sosiologi Lingkungan

Pendekatan adalah cara pandang atau cara memahami fenomena sosial tertentu berdasarkan keyakinan orang yang mempelajari objek tersebut. Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan dalam melakukan kajian-kajian sosiologi lingkungan, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif.

1. Metode Kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metodologi ilmiah yang menggunakan angka-angka sebagai bahan-bahan keterangan data ilmiah. Dalam metodologi ini, fenomena sosial dapat ditelaah melalui angka indeks, skala, tabel, dan rumusan lain yang sedikit banyak menggunakan analisis statistik. Penelitian pada umumnya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang representatif. Proses penelitian bersifat deduktif, di mana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji melalui pengumpulan data lapangan. Untuk mengumpulkan data digunakan instrumen penelitian. Data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik, sehingga dapat disimpulkan hipotesis

yang dirumuskan terbukti atau tidak. Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel tersebut diambil.

2. Metode Kualitatif. Metode kualitatif adalah metode kerja ilmiah yang mengutamakan bahan atau informasi yang nantinya akan diuji berdasarkan tingkat kualitas data. Dengan metodologi ini sukar didapat indikator atau skala pengukuran berdasarkan angka-angka yang bersifat eksak (tepat/pasti). Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial, maka teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksi menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

D. Manfaat Sosiologi Lingkungan

Mempelajari sosiologi lingkungan dapat memberi manfaat, di antaranya adalah:

1. Mengetahui dan memahami pengertian, objek, ruang lingkup, konsep dan teori sosiologi lingkungan;
2. Mengetahui dan memahami berbagai perspektif teori dalam sosiologi yang menjadi akar dari teori sosiologi lingkungan;

3. Mampu memberikan penjelasan secara rasional tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan, lewat pemaparan kajian-kajian di lapangan;
4. Menumbuhkan kembali kearifan lokal tradisional dalam semua bentuk di masyarakat, baik pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan, adat kebiasaan maupun etika untuk menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis;
5. Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya memikirkan masa depan lingkungan dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan masa depan lingkungan;
6. Mampu mengidentifikasi dan pemecahan masalah terhadap fenomena dan permasalahan sosial yang timbul terkait masalah lingkungan hidup.

E. Objek Kajian Sosiologi Lingkungan

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa sosiologi lingkungan memusatkan kajiannya pada adanya keterkaitan antara lingkungan dan perilaku manusia. Dengan demikian, manusia akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, sepanjang ia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Manusia tidak bisa mengembangkan diri tanpa menyesuaikan dengan lingkungannya. Definisi tersebut sangat luas wilayah cakupannya. Hannigan (Jalal, 2002) mengkritik bahwa sosiologi lingkungan sulit mencapai tingkatan teoretisasi sebagaimana telah dicapai oleh sosiologi lainnya, seperti sosiologi ekonomi, sosiologi politik, sosiologi pendidikan, sosiologi hukum, sosiologi kesehatan, dan sebagainya. Setelah melancarkan kritik-kritiknya, Hannigan (Jalal, 2002), menyarankan agar objek kajian sosiologi lingkungan hanya pada dua wilayah saja, yaitu:

1. Penyebab dan dampak dari hancurnya lingkungan;
2. Pertumbuhan, perkembangan kesadaran, dan gerakan lingkungan.

Namun demikian, sebagai tanda perkembangan berikutnya, sosiologi lingkungan tetap mencakup banyak wilayah penelitian. Di saat yang sama dengan keluarnya anjuran Hannigan, Tindall (Dwi Susilo, 2008), menyebutkan ada delapan objek kajian sosiologi lingkungan, yaitu:

1. Penilaian dampak sosial;
2. Penelitian desain lingkungan;
3. Pendekatan ekonomi politik;
4. Pendekatan organisasional;
5. Ekologi manusia baru;
6. Psikologi sosial masalah lingkungan;
7. Konstruksi sosial masalah lingkungan, teori tindakan kolektif, dan gerakan sosial.

Tindall, tampaknya paling siap dengan skema subdominannya. Mungkin karya ini bisa dikatakan sebagai meta teori sosiologi lingkungan terbaik yang pernah dibuat. Dua puluh tahun setelah karya Dunlap dan Catton, Goldman dan Schurman (Dwi Susilo, 2008) mengajukan objek kajian sosiologi lingkungan, terdiri dari:

1. Maxisme ekologis yang menyatakan kerusakan lingkungan merupakan dampak perkembangan kapitalisme;
2. Ekologi politik baru yang berupaya membongkar relasi kuasa dalam hubungan antarmanusia sebagai pengelola-pengguna pada konteks suatu lingkungan yang dipolitisasi;
3. Feminisme lingkungan yang berupaya membongkar ide-ide dominan maskulin mengenai klasifikasi pengalaman, seraya berupaya menghapuskan ketimpangan yang diproduksi oleh ide-ide itu.
4. Ilmu pengetahuan dan kekuasaan yang banyak meminjam kerangka hubungan antara klaim pengetahuan dengan kekuasaan.

Terdapat cukup banyak objek kajian sosiologi lingkungan, seperti yang telah disebutkan di atas. Objek kajian sosiologi

lingkungan cukup ragam pandangan dan menganalisisnya. Di sini akan disampaikan juga pandangan Dwi Susilo (2008) tentang objek kajian sosiologi lingkungan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk membuka rangsangan pemikiran yang lebih luas dari para pembaca mengenai objek kajian sosiologi lingkungan tersebut, sehingga terdorong untuk melakukan kajian lebih lanjut.

Dwi Susilo (2008), dalam pemikiran awalnya mengemukakan bahwa terbuka wawasan mengenai hubungan manusia dan lingkungan, kemudian bisa menyimpulkan sendiri langkah apa sajakah yang strategis untuk menyelamatkan masa depan lingkungan itu. Ia menemukan kesadaran bahwa mengkaji sosiologi lingkungan sebaiknya tidak hanya sekedar untuk keperluan mengajar saja. Kemudian, ia berupaya mengkaji secara disiplin, baik lewat studi literatur, diskusi-diskusi dengan pihak-pihak yang berkompeten maupun melakukan penelitian-penelitian. Ia mengajukan pertanyaan, bagaimana cara terbaik mengajarkan lingkungan bagi banyak kalangan yang beragam latar belakang? Dimulai dengan memahami batasan kajian sosiologi lingkungan, kemudian dia menawarkan temuan-temuan lewat pengkajian dan pengembangan data yang bersifat aktual, baik yang didapat dari buku-buku terkini, jurnal, sumber-sumber media, maupun internet. Menurut Dwi Susilo, sebagai komunitas, yang mempunyai latar belakang ilmu sosiologi, para pengkajinya masih “tiarap”, sedangkan sebagai individu mereka nyalinya kecil, tidak berani melakukan terobosan dan kecenderungan melakukan repetisi-repetisi saja. Dia menyarankan, sebagai ahli sosiologi sebaiknya mampu membuat dan merancang sosiologi yang lebih kreatif dan lebih digdaya. Dwi Susilo, mengajukan objek kajian sosiologi lingkungan terdiri dari:

1. Memahami sosiologi lingkungan:
 - a. Lingkungan dalam kajian ilmu sosial;
 - b. Perkembangan kajian-kajian;
 - c. Sosiologi lingkungan paradigmatic;

2. Hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan:
 - a. Dominasi lingkungan pada kehidupan manusia;
 - b. Perilaku manusia dalam perspektif dominasi lingkungan;
 - c. Penerapan teori kemungkinan;
 - d. Teori ekologi budaya;
3. Manusia: sang penakluk lingkungan:
 - a. Ilmu pengetahuan modern harus bertanggungjawab;
 - b. Tentang antroposentrisme;
 - c. Lingkungan mulai rusak;
 - d. Akibat lingkungan rusak, bencana pun terjadi di mana-mana;
4. Manusia: Pejuang lingkungan:
 - a. Paham biosentrisme;
 - b. Paham ekosentrisme: memperjuangkan keseimbangan;
 - c. Paham ekofeminisme: melawan androsentrime;
 - d. Arti penting gerakan politik dalam perjuangan lingkungan;
 - e. Kasus di Indonesia;
5. Manusia: Perancang keberlanjutan lingkungan:
 - a. Melembagakan kembali kearifan lokal tradisional;
 - b. Mewaspadaai modernisasi dan kemunculan masyarakat berisiko;
 - c. Mengampanyekan *sustainable society*.

Objek kajian sosiologi lingkungan yang diajukan oleh Dwi Susilo, adalah upaya membongkar paradigma antroposentrisme menuju ke paradigma pembangunan berkelanjutan. Paradigma antroposentrisme memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Segala sesuatu yang lain di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia. Alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Pembongkaran paradigma antroposentrisme ini, membuat suatu jalan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Cita-cita dan agenda utama pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah upaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya dan aspek lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup harus dipandang sebagai terkait erat satu sama lain, sehingga unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan lainnya. Pembangunan berkelanjutan yang mau dicapai adalah menggeser titik berat pembangunan dari hanya pembangunan ekonomi menjadi juga mencakup pembangunan sosial-budaya dan lingkungan hidup. Pembangunan sosial-budaya dan lingkungan hidup mendapat perhatian yang sama bobotnya dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial-budaya dan lingkungan hidup tidak boleh dikorbankan demi dan atas nama pembangunan ekonomi (Keraf, 2002).

BAB XVII

SOSIOLOGI PEMBANGUNAN

A. Perkembangan Sosiologi Pembangunan

Sebagaimana kita ketahui, objek studi utama sosiologi yaitu struktur masyarakat, kelompok sosial, lembaga sosial, hubungan-hubungan timbal balik individu, peranan, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, analisis sosiologis telah jauh berkembang dan banyak dipergunakan oleh para ilmuwan sosial, khususnya sosiolog untuk menganalisis berbagai fenomena sosial sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, muncullah berbagai bidang kajian sosiologis yang secara khusus mengarahkan perhatiannya terhadap fenomena-fenomena yang khusus. Misalnya, sosiologi agama (menganalisis agama dari perspektif sosiologi), sosiologi hukum (mengkaji fenomena hukum dari perspektif sosiologi), sosiologi komunikasi (menganalisis fenomena komunikasi dari perspektif sosiologi), sosiologi pembangunan (menganalisis fenomena pembangunan dari perspektif sosiologi).

Khusus sosiologi pembangunan yang hendak kita jelaskan di sini, objek kajiannya luas, yakni pembangunan. Fenomena dan masalah pembangunan memerlukan bidang kajian lain, seperti politik dan ekonomi. Para ilmuwan sosiologi, seperti Marx, Weber, umumnya banyak menggunakan kedua ilmu itu untuk menganalisis fenomena pembangunan. Teori evolusi Comte, Spencer, dan Parsons menjelaskan bahwa masyarakat berkembang secara kontinu, dengan pola yang tetap dan mengikuti tahapan tertentu. Oleh karena itu, kajian pembangunan memang seyogyanya dilakukan secara multidisiplin. Hingga saat ini, konsep pembangunan telah menjadi ideologi yang

menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih tenteram, serta lebih menjamin kelangsung hidup di hari depan. Dalam konteks ke-Indonesia-an, harapan tersebut diwujudkan dengan kata “adil” dan “makmur”. Dengan demikian, menurut Sanit (1987) proses dan usaha pembangunan memiliki arti humanisasi, yaitu memanusiakan manusia atau masyarakat.

Sosiologi pembangunan berkembang pesat sejak awal 1960-an. Sebagai bagian dari sosiologi, sosiologi pembangunan sangat dipengaruhi oleh pokok-pokok pikiran ahli sosiologi klasik seperti Marx, Weber, dan Durkheim. Perkembangan sosiologi pembangunan semakin pesat seiring dengan gagalnya program pembangunan yang disponsori oleh Amerika Serikat pada Negara-negara dunia ketiga. Kegagalan pembangunan dunia ketiga tersebut memicu sebuah tanda tanya besar bagi peneliti sosial untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya.

Pada perkembangan selanjutnya, sosiologi pembangunan membawa dampak pada lahirnya dimensi-dimensi baru dalam konsep pembangunan. Webster (1984) menyebutkan lima dimensi yang perlu diungkapkan dalam sosiologi pembangunan, antara lain: (1) posisi Negara miskin dalam hubungan sosial dan ekonominya dengan Negara-negara lain, (2) ciri khas atau karakter dari suatu masyarakat yang mempengaruhi pembangunan, (3) hubungan antara proses budaya dan ekonomi yang mempengaruhi pembangunan, (4) aspek sejarah dalam proses pembangunan atau perubahan sosial yang terjadi, (5) penerapan berbagai teori perubahan sosial yang mempengaruhi kebijakan pembangunan nasional pada Negara-negara berkembang (Mashud, 2015; Jamaludin, 2016).

Sosiologi pembangunan juga menimbulkan hubungan interaksi pada masyarakat dan interaksi tersebut menimbulkan adanya gotong royong. Aktivitas gotong royong dalam berbagai dimensi memberikan implikasi semangat dan nilai (value) untuk

saling memberikan jaminan atas hak dan kelangsungan hidup antar sesama warga masyarakat yang masih melekat cukup kuat.

Sosiologi pembangunan mencoba melengkapi kajian ekonomi yang selama ini hanya didasarkan pada produksi dan efisiensi dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Pembangunan sebagai sebuah perubahan sosial yang terencana tidak hanya dijelaskan secara kuantitatif dengan pendekatan ekonomi semata, namun terdapat aspek tersembunyi jauh pada diri masyarakat, seperti persepsi, gaya hidup, motivasi dan budaya yang mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan peluang-peluang yang ada. Sosiologi pembangunan juga berusaha untuk menjelaskan berbagai dampak baik positif maupun negatif dari pembangunan terhadap sosial budaya masyarakat. Berbagai introduksi baik yang berupa teknologi dan nilai-nilai baru dalam proses pembangunan tentu akan membawa dampak pada bangunan sosial yang sudah ada sejak lama (Mashud, 2015).

Sejarah perkembangan sosiologi pembangunan di Belanda diawali dengan menggunakan pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan sosiologi historis. Sosiologi historis menggunakan perspektif pertumbuhan dalam mengungkap permasalahan dengan teori dan konsep sosiologi. Berbagai penelitian yang menggunakan pendekatan historis pada awal perkembangannya menjadi daerah kolonial sebagai objek kajian. Beberapa penelitian yang mengambil objek kajian di Indonesia menjelaskan tentang berbagai dampak pembangunan seperti lahirnya konsep *shared proverty* oleh Geertz.
2. Pendekatan ekonomi politik. Aliran ini berangkat dari keterbelakangan yang dialami oleh Negara dunia ketiga. Pendekatan ekonomi politik memberikan gambaran secara ekonomi antara Negara maju dan Negara miskin. Objek penelitian pendekatan ekonomi politik adalah Negara Negara dunia ketiga di Amerika Latin. Kelompok yang menggunakan aliran ini kemudian mengembangkan teori dependensi.

3. Pendekatan sosiologi modernisasi. Aliran ini kemudian berkembang menjadi teori modernisasi. Dalam kajian pembangunan, teori modernisasi merupakan teori yang paling dominan menentukan wajah pembangunan. Ada dua teori besar yang mempengaruhi teori modernisasi, yaitu teori evolusi dan teori fungsional. Menurut teori evolusi, perubahan sosial bersifat linier, terus maju dan perlahan, yang membawa masyarakat berubah dari tahap primitif menuju tahap yang lebih maju. Jika tilikan modernisasi didasarkan atas teori fungsional, teori modernisasi mengandung asumsi bahwa modernisasi merupakan proses sistematis, transformasi, dan terus menerus. Sebagai proses sistematis, modernisasi merupakan proses melibatkan seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi, sekularisasi, sentralisasi.
4. Pendekatan tradisi antropologi Marxis. Pokok kajian pendekatan ini adalah cara produksi yang dominan di Amerika Latin. Perspektif cara berproduksi tidak dapat menghasilkan pemecahan pada masalah-masalah pembangunan dan kebijakan pembangunan.
5. Pendekatan sosiologi terapan. Pendekatan ini fokusnya pada kajian pembangunan secara mikro. Para ahli sosiologi terapan berusaha memberikan data praktis tingkat lokal kepada pengambil kebijakan. Kelemahan pendekatan ini adalah miskin akan teori serta hasil penelitian yang didapat kurang bisa ditarik menjadi sebuah model yang general (Mashud, 2015).

B. Pengertian Sosiologi Pembangunan

Ada dua istilah keilmuan yang bersanding dalam kajian ini, yaitu sosiologi dan pembangunan. Sebagaimana kita ketahui, fokus utama sosiologi adalah mempelajari struktur masyarakat, sistem sosial, lembaga, kelompok sosial, dinamika sosial dalam proses yang terjadi, hubungan timbal balik individu dan individu, individu dan kelompok/masyarakat serta hubungan antar

kelompok/masyarakat. Sementara pembangunan mempunyai pengertian yang sangat luas. Secara sederhana, pembangunan adalah perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, serta pembangunan bangsa.

Selanjutnya, kita akan fokuskan pembahasan ini pada pengertian sosiologi pembangunan. Ada banyak definisi sosiologi pembangunan menurut para ahli, di antaranya:

1. Weber (1864-1920), sosiologi pembangunan adalah kajian sosial yang memberikan dampak positif pada lahirnya metode baru dalam pembangunan manusia dan lingkungannya.
2. Mashud (2015), sosiologi pembangunan adalah kajian tentang hal ihwal yang dapat mempengaruhi pembangunan dan dampak yang ditimbulkannya dalam aktivitas pembangunan.
3. Fadhilah (2009), sosiologi pembangunan adalah bagian sosiologi yang mengkaji dan menjelaskan berbagai dampak baik positif maupun negatif dari pembangunan terhadap kondisi sosial-budaya masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi pembangunan adalah sebagai bagian dari sosiologi yang membahas dan menganalisis fenomena pembangunan, dengan bantuan konsep-konsep dan metode sosiologi.

C. Pendekatan Sosiologi Pembangunan

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pembangunan mempunyai arti yang sangat luas. Secara sederhana, pembangunan adalah perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Dengan kata lain, pembangunan berarti perubahan. Permasalahannya, apakah perubahan itu mengarah ke kondisi yang lebih baik (progress) ataukah sebaliknya, kemunduran

(regress) dari pembangunan terhadap sosial budaya masyarakat. Ada beberapa perspektif sosiologi yang acap dirujuk para sosiolog dalam menjelaskan fenomena sosial yang terjadi sebagai berikut:

1. Perspektif Fungsional. Teori ini mengandaikan bahwa suatu masyarakat itu dipandang sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerjasama secara terorganisasi, yang bekerja dalam suatu cara yang relatif teratur menurut seperangkat aturan dan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat tersebut. Teori ini menekankan masyarakat dilihat sebagai keseluruhan, tidak bisa dilihat secara parsial, harmoni, konsisten dan keseimbangan dalam masyarakat.
2. Perspektif konflik. Teori ini mengandaikan masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya; setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegritas sosial; dan menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Teori konflik ini menolak anggapan bahwa masyarakat ada dalam situasi stabil dan tidak berubah.
3. Perspektif interaksionis Simbolik. Teori ini menekankan bahwa manusia mampu berpikir secara kompleks dan berbuat sesuai dengan kemampuannya dalam memanfaatkan dan menginterpretasi simbol. Individu dan masyarakat adalah mutually-interdependent. Artinya, individu secara aktif berpartisipasi membentuk masyarakat, dan masyarakat mempengaruhi perilaku individu. Untuk memahami fenomena di masyarakat, maka sosiologi harus memberikan perhatian pada aktivitas sehari-hari masyarakat.
4. Perspektif Etnomethodologi. Teori ini memfokuskan perhatian pada proses bagaimana masyarakat secara bersama-sama memberikan makna terhadap realitas yang didapatkan melalui interaksi dan pengalaman sehari-hari.

Dengan kata lain, sosiologi harus mempelajari bagaimana manusia dalam masyarakat memaknai dunia kehidupannya sehari-hari dalam interaksi dengan masyarakat, bagaimana individu menginterpretasikan objek, kejadian dan proses.

Beberapa perspektif sosiologi di atas hanyalah bagian kecil dari sekian perspektif lain yang merupakan instrument, alat atau model analisis yang sering dirujuk para sosiolog dalam menjelaskan dan memprediksi fenomena sosial yang terjadi. Namun, suatu penjelasan teoritik tidaklah cukup, atau tidak bisa disebut sebagai penjelasan ilmiah manakala tidak melalui apa yang disebut dengan metode penelitian ilmiah. Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam sosiologi yang sering digunakan untuk menuntun proses pembangunan dapat lebih objektif dan efisien.

1. Metode kuantitatif adalah metode ilmiah yang menggunakan angka-angka sebagai bahan-bahan keterangan sebagai data ilmiah. Dalam metodologi ini, fenomena sosial dapat ditelaah melalui angka indeks, skala, tabel, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar.
2. Metode kualitatif adalah metode kerja ilmiah yang mengutamakan bahan atau informasi yang nantinya akan diuji berdasarkan tingkat kualitas data. Dengan metodologi ini sukar didapat indikator atau skala pengukuran berdasarkan angka-angka yang bersifat eksak (tepat/pasti). Dengan demikian, metode kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Metode kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangan terhadap teori.

D. Manfaat Sosiologi Pembangunan

Mempelajari sosiologi pembangunan dapat memberikan manfaat, di antaranya adalah:

1. Mengetahui dan memahami pengertian, objek, ruang lingkup, konsep dan teori sosiologi pembangunan;
2. Mengetahui dan memahami berbagai perspektif teori dalam sosiologi yang menjadi akar teori sosiologi pembangunan;
3. Dapat menerapankan teori sosiologi untuk membantu usaha-usaha mempercepat proses pembangunan dan dampak yang akan ditimbulkan dari pembangunan terhadap sosial-budaya masyarakat;
4. Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah terhadap unsur-unsur yang dapat melancarkan dan menghambat pembangunan di bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, keagamaan, lingkungan, dan bidang lainnya.

E. Objek Kajian Sosiologi Pembangunan

Tampaknya para ahli telah sepakat bahwa sosiologi pembangunan memfokuskan kajiannya tentang hal ihwal yang dapat mempengaruhi pembangunan. Sosiologi pembangunan juga berusaha untuk menjelaskan berbagai dampak baik positif maupun negatif dari pembangunan terhadap sosial budaya masyarakat. Jika merujuk dari pengertian di atas, maka objek kajian sosiologi pembagunan menurut para ahli, di antaranya:

1. Mashud (2015), objek kajian sosiologi pembangunan antara lain:
 - a. Meneliti faktor-faktor yang menyebabkan dan mempercepat prose pembangunan serta dampak yang akan ditimbulkannya. Sejumlah faktor yang mempengaruhi proses pembangunan itu adalah ilmu pengetahuan, ideologi, media massa, dan akulturasi. Sementara, dampak negatif pembangunan adalah alineasi, meningkatnya kriminalitas, prostitusi, dan angka perceraian yang meningkat;

- b. Meneliti dan mengidentifikasi unsur-unsur sosial budaya masyarakat (termasuk kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat) yang dapat mempengaruhi (mendorong dan memperlambat) proses pembangunan;
 - c. Meneliti dan mengidentifikasi agen of change masyarakat dalam proses pembangunan. Termasuk ke dalam agen of change ini, misalnya orang-orang terdidik, eksekutif, militer, para guru, dan kelompok pemuda;
 - d. Meneliti proses pembangunan (mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya), tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sebaran manfaat pembangunan bagi masyarakat dan distorsi-distorsi (penyimpangan-penyimpangan yang terjadi);
 - e. Meneliti keseiringan tujuan pembangunan dan realitas kualitas kehidupan masyarakat, termasuk misalnya terjadinya polarisasi, marjinalisasi, alineasi, dan distorsi dalam proses pembangunan;
 - f. Meneliti tentang bagaimana komunikasi pembangunan dilakukan. Pembangunan sebagai suatu inovasi (baru) bagi masyarakat dan bagaimana inovasi pembangunan menyebar dan tersebar (difusi) ke masyarakat;
 - g. Meneliti tentang tingkat penerimaan dan penolakan masyarakat terhadap pembangunan dan beberapa faktor sosiologis yang melandasi penerimaan dan penolakan;
 - h. Meneliti faktor lokal (internal masyarakat) dan faktor eksternal masyarakat yang dapat mempengaruhi proses pembangunan.
2. Pudjiwati Sajogyo (1985), objek kajian sosiologi pembangunan antara lain:
 - a. Modernisasi;
 - b. Prinsip-prinsip sosiologi pembangunan beserta aspek-aspeknya;
 - c. Teori mengenai struktur sosial;

- d. Teori mengenai stratifikasi sosial;
 - e. Ciri-ciri masyarakat tradisional dan masyarakat modern;
 - f. Teori perubahan sosial;
 - g. Perubahan sosial yang akan mendukung program pembangunan;
 - h. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat;
 - i. Strategi perubahan sosial bagi masyarakat;
 - j. Perencanaan untuk perubahan (planning of change).
3. Jamaludin (2016), objek kajian sosiologi pembangunan antara lain:
- a. Pengertian dan ruang lingkup pembangunan;
 - b. Peranan negara dan masyarakat dalam pembangunan;
 - c. Teori modernisasi;
 - d. Teori ketergantungan (dependency theory);
 - e. Teori pasca-ketergantungan;
 - f. Teori pembangunan berkelanjutan (sustainable development theory);
 - g. Teori pembangunan manusia;
 - h. Industrialisasi dan pembangunan;
 - i. Kependudukan dan pembangunan;
 - j. Dinamika pembangunan di Indonesia;
 - k. Alternatif model pembangunan;

BAB XVIII

SOSIOLOGI ORGANISASI

A. Perkembangan Sosiologi Organisasi

Sejak permulaannya, sosiologi memiliki perhatian mendalam pada organisasi dan tempat kerja sebagai isu utama dalam memahami masyarakat dan kehidupan sosial. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat memandang organisasi sebagai wahana jalinan hubungan kerja antarpribadi dalam suatu kelompok. Mengapa para sosiolog mempelajari organisasi sebagai objek kajian? Alasannya, di dalam organisasi menggambarkan adanya interaksi atau hubungan antarpribadi dalam mencapai suatu tujuan. Di dalam organisasi, manusia mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerjasama. Mengapa manusia perlu bekerjasama? Alasannya, ketidakterbatasan kebutuhan manusia dan keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhan telah menghadapkan manusia pada kebutuhan untuk bekerjasama dalam suatu wadah yang disebut organisasi. Organisasi telah dibentuk sejak manusia berada di muka bumi, didorong oleh motif di atas. Dilihat dari proses pembentukannya, organisasi dapat terbentuk, karena alasan:

1. Secara spontan, misalnya kerjasama yang dibentuk tanpa aturan dalam menolong kecelakaan atau bencana alam;
2. Secara seksama atas kerjasama secara formal yang didasarkan pada pertimbangan yang matang, misalnya organisasi formal seperti Perguruan tinggi, Pemerintah daerah, organisasi Partai politik.

Sosiologi sebagai ilmu tentang kemasyarakatan menunjukkan bahwa setiap masyarakat sangat memerlukan kehadiran pelbagai bentuk-bentuk organisasi dan institusi sosial yang dapat memenuhi

kebutuhan mereka. Misalnya, masyarakat membutuhkan sekolah untuk melayani pendidikan; rumah sakit untuk melayani penderita; plaza untuk pembelanjaan; bank untuk menyimpan dan mengambil uang; hotel untuk menginap; alat-alat transportasi untuk perjalanan; telepon untuk berkomunikasi; kantor pemerintah untuk melayani urusan pemerintahan/pembangunan dan kemasyarakatan, dan sebagainya. Tidak mengherankan apabila seluruh masyarakat memusatkan perhatiannya terhadap organisasi, terutama melalui tampilan peran, tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan konsep berpikir itu, maka para sosiolog menaruh perhatian yang sangat besar terhadap organisasi.

Pada saat sekarang, perkembangan studi sosiologi semakin menarik dengan berkembangnya bidang-bidang kajian lainnya, termasuk sosiologi organisasi. Indikator perkembangan itu bisa dilihat melalui peningkatan jumlah orang yang berminat mengetahui dinamika atau perkembangan masyarakat. Ditambah lagi, dalam masyarakat semakin bertumbuh pula beragam organisasi formal yang bekerja untuk melayani masyarakat.

Tema tentang organisasi, dalam perspektif sosiologi organisasi, dapat dihipotesis dari banyak aspek yang sangat bergantung atas cara pandang para ahli. Sebagian ahli mungkin mendekati organisasi dari segi struktur birokrasi dan dampaknya terhadap anggota pada semua tingkat kekuasaan dan kewenangan. Ahli yang lain, memperhatikan secara khusus faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan bentuk, ukuran, cara kerja organisasi dan setting organisasi.

Berikut ini disajikan pendapat dan tulisan dari peletak fondasi sosiologi sebagai berikut:

1. Max Weber. Bagi Weber, sosiologi mengkaji organisasi untuk mengetahui perilaku manusia dalam organisasi, bagaimana manusia dipimpin dan dikelola, bagaimana manusia berelasi dengan lingkungan sosial mereka, dan mengapa beberapa organisasi lebih sukses daripada yang lainnya. Weber

berkontribusi dalam sosiologi organisasi melalui konsep birokrasi dan konsep kekuasaan dan wewenang. Weber mengatakan bahwa kita dapat saja membangun tipe ideal birokrasi yang berpusat pada pikiran dan tindakan individu dalam birokrasi. Ia menyebutkan beberapa ciri utama tipe ideal birokrasi, yaitu:

- a. Terdiri dari rangkaian organisasi fungsi-fungsi resmi (badan) yang terikat oleh aturan;
- b. Setiap badan memiliki ranah kompetensi spesifik. Badan tersebut membawa serta serangkaian kewajiban untuk melakukan berbagai fungsi, kekuasaan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, dan cara-cara pemaksaan yang diperlukan bagi dilakukannya pekerjaan tersebut;
- c. Badan-badan tersebut terorganisasi ke dalam sistem hierarkis;
- d. Badan-badan tersebut mungkin membawa serta kualifikasi teknis yang mengharuskan persiapannya memperoleh pelatihan yang tepat;
- e. Staf yang mengisi badan-badan tersebut tidak memiliki sarana produksi yang terkait dengannya, anggota staf dibekali dengan manfaat benda-benda yang mereka perlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut;
- f. Pegawai tidak diizinkan mengubah posisi, ia tetap menjadi bagian dari organisasi;
- g. Tindakan, keputusan, dan aturan administratif dirumuskan dan dicatat secara tertulis (Ritzer, dkk, 2009).

Selanjutnya, Weber mengungkapkan birokrasi yang efektif. Birokrasi yang efektif adalah:

- a. Ada prosedur birokrasi; yang mungkin membatasi inisiatif, memastikan keputusan berdasarkan kriteria umum, kriteria prosedur;

- b. Memiliki program pelatihan untuk para pegawai atau anggota organisasi; untuk memastikan semua pegawai memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
 - c. Membuat tugas pokok dan fungsi, gaji, dan jam kerja pegawai untuk meminimalkan korupsi;
 - d. Kinerja diukur berdasarkan penilaian publik untuk mengurangi resiko adanya koneksi kekerabatan atau memanfaatkan posisi secara personal (Shaikh, Islami, dan Jatoi, 2018).
2. Talcott Parsons. Menurut Parsons organisasi membantu masyarakat menyelesaikan masalah dengan menyediakan instrumen yang mampu menyelesaikan pekerjaan dan mencapai tujuan tertentu. Parsons melihat organisasi terdiri dari tiga tingkatan, yaitu:
 - a. Tingkatan rendah yang berfokus pada efisiensi teknis;
 - b. Managerial tingkatan menengah yang berkoordinasi dan beradaptasi dengan sumber daya teknis tersebut;
 - c. Tingkat atas atau institusional yang melegitimasi organisasi kepada masyarakat yang lebih luas (Heckscher, 2009).
3. Amitai Etzioni. Etzioni mengembangkan tradisi Weberian dan Parsonian dalam sosiologi organisasi. Dia membedakan tiga bentuk organisasi berdasarkan keterlibatan dan kepatuhan, yaitu:
 - a. Sistem kepatuhan paksaan;
 - b. Sistem kepatuhan utilitarian. Contohnya, perusahaan bisnis yang memiliki pekerja yang memiliki keterlibatan kalkulatif, patuh terhadap organisasi karena dihargai secara materi, misalnya pekerja di kantor;
 - c. Sistem kepatuhan normatif. Contoh, seorang kyai atau ustadz memberikan ceramah atau pengajian setiap minggu kepada paraJemaah, karena perintah Allah SWT (Nurochim, 2020).

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beragam pandangan tentang organisasi, yang pada gilirannya dapat memperkaya studi organisasi. Tetapi, sebagaimana kita ketahui, aspek-aspek kajian dalam organisasi adalah individu, hubungan antarpribadi, dan dampak langsung maupun tidak langsung perilaku individu maupun sosial terhadap organisasi. Hubungan tersebut, apakah dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas organisasi, kepemimpinan, tingkat supervisi, otonomi fungsional organisasi dalam pembagian kerja. Selain itu, juga karakteristik organisasi yang meliputi materi, pusat kekuasaan dan kewenangan pengambilan keputusan, kerumitan spesialisasi tugas dan fungsi, atau hubungan antar pusat kekuasaan dengan spesialisasi tugas dan fungsi.

B. Pengertian Sosiologi Organisasi

Ada dua istilah keilmuan yang bersanding dalam kajian ini, yaitu sosiologi dan organisasi. Sosiologi sebagaimana kita ketahui, memfokuskan diri pada kajian memahami struktur, sistem sosial, lembaga, kelompok sosial, dinamika sosial dalam proses yang terjadi, hubungan timbal balik individu dan individu, individu dan kelompok/masyarakat serta hubungan antar kelompok/masyarakat. Sementara, organisasi menurut para ahli, di antaranya:

1. Barnard (1938), organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih;
2. Flipppo, organisasi adalah sistem hubungan antara sumber daya yang memungkinkan pencapaian sasaran;
3. Mooney, organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama;
4. Preston dan Zimmerer, organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Djarmiko, 2005).

Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap organisasi terdapat tiga unsur pokok, yaitu:

1. Orang-orang (sekumpulan orang);
2. Kerjasama;
3. Mempunyai tujuan yang akan dicapai.

Bagi orang yang berminat untuk mendalami makna dari kedua disiplin ilmu itu, dapat melakukan kajian intensif pada spesifikasi keilmuannya sendiri. Pada dasarnya, makna istilah sosiologi organisasi sebagaimana yang digunakan dalam wacana ini, akan berbeda maknanya dari kedua disiplin ilmu tersebut. Sosiologi organisasi memfokuskan diri pada mempelajari pola interaksi atau hubungan sosial antarmanusia dalam organisasi maupun antarorganisasi. Sosiologi organisasi dalam prakteknya mengikuti hukum-hukum interaksi atau hubungan sosial yang berlaku dalam sosiologi, sehingga dengan demikian organisasi menjadi menarik untuk dikaji dengan pendekatan sosiologi. Dalam wacana ini, sosiologi organisasi disampaikan dalam pengertian umum saja. Hal ini dimaksudkan untuk membuka rangsangan pemikiran yang lebih luas dari para pembaca ini.

Menurut Liliweri (1997), Sosiologi organisasi adalah wahana jalinan hubungan kerja antarpribadi dalam organisasi maupun antarorganisasi, di mana para anggotanya mempunyai tugas dan fungsi tertentu yang saling berkaitan. Dari definisi tersebut, ada tiga unsur utama, yaitu: (1) Kajian terhadap individu, (2) Hubungan antarpribadi dalam organisasi, (3) Kajian terhadap organisasi. Sementara dalam wacana ini, sosiologi organisasi didefinisikan sebagai bagian dari sosiologi yang membahas dan menganalisis fenomena organisasi, dengan bantuan konsep-konsep dan metode sosiologi.

C. Pendekatan Sosiologi Organisasi

Pendekatan di sini adalah sudut pandang dalam mempelajari masalah-masalah yang menjadi objek kajian sosiologi organisasi. Biasanya para ahli sosiologi, pendekatan yang dipakai untuk mempelajari masalah-masalah yang menjadi objek kajian

sosiologi organisasi yaitu pendekatan metode kuantitatif dan metode kualitatif.

1. Metode Kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metodologi ilmiah yang menggunakan angka-angka sebagai bahan-bahan keterangan data ilmiah. Dalam metodologi ini, fenomenal sosial dapat ditelaah melalui angka indeks, skala, tabel, dan rumusan lain yang sedikit banyak menggunakan statistik. Fenomena sosial ini dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala tersebut bersifat sebab akibat. Penelitian ini pada umumnya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang representatif. Proses penelitian bersifat deduktif, di mana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji melalui pengumpulan data lapangan. Untuk mengumpulkan data digunakan instrument penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak. Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel tersebut diambil.
2. Metode Kualitatif. Metode kualitatif adalah metode kerja ilmiah yang mengutamakan bahan atau informasi yang nantinya akan diuji berdasarkan tingkat kualitas data. Dengan metodologi ini sukar didapat indikator atau skala pengukuran berdasarkan angka-angka yang bersifat eksak (tepat/pasti). Dalam penelitian ini, memandang fenomena sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (reciprocal). Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah. Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang

apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara bergabung. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksi menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

D. Manfaat Sosiologi Organisasi

Mempelajari sosiologi organisasi dapat memberi manfaat, di antaranya adalah:

1. Mengetahui dan memahami pengertian, objek, ruang lingkup, konsep dan teori sosiologi organisasi;
2. Mengetahui dan memahami berbagai perspektif teori dalam sosiologi yang menjadi akar teori sosiologi organisasi;
3. Mengetahui dan memahami pentingnya kehadiran pelbagai bentuk organisasi dan institusi sosial yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, sekolah untuk melayani pendidikan, rumah sakit untuk melayani penderita, bank untuk menyimpan dan mengambil uang, kantor pemerintah

- untuk melayani urusan pemerintahan/pembangunan dan kemasyarakatan, dan sebagainya;
4. Mampu mengidentifikasi dan pemecahan masalah terhadap fenomena dan permasalahan sosial yang timbul terkait organisasi;
 5. Mengetahui dan memahami secara lebih dalam keberadaan, peranan, tugas dan fungsi organisasi yang ada di masyarakat dan juga pengaruhnya terhadap kepemimpinan, perilaku individu, kebudayaan, nilai, norma suatu masyarakat.
 6. Mengetahui dan memahami aspek-aspek dinamika organisasi yang selalu berubah sering dengan perubahan lingkungan sosial atau perubahan sosial.

E. Objek Kajian Sosiologi Organisasi

Sebagaimana halnya dengan ilmu sosial lainnya, objek sosiologi adalah masyarakat dilihat dari sudut interaksi atau hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia tersebut di dalam masyarakat. Demikian pula terhadap sosiologi organisasi yang menyoroti individu, hubungan antarpribadi dalam organisasi dan organisasi itu sendiri.

Menurut Liliweri (1997), objek kajian sosiologi organisasi dititik beratkan pada tiga aspek, yaitu:

Tabel 2.

Tiga Unit Kajian Organisasi Formal dan Beberapa Objek Kajian Khusus

Individu	Hubungan Antarpribadi dalam Kelompok Kerja	Organisasi Besar
1. Motivasi individu	1. Insentif untuk kelompok kerja	1. Komitmen terhadap organisasi
2. Produktivitas individu	2. Hasil kerja kelompok	2. Efektivitas organisasi
3. Sasaran pribadi	3. Sasaran kelompok kerja	3. Sasaran organisasi
4. Kemampuan pribadi untuk beradaptasi	4. Sistem sanksi terhadap kelompok fleksibilitas kerja	4. Kemampuan organisasi untuk beradaptasi

1. Kajian Terhadap Individu

Tidak dapat disangkal bahwa individu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam organisasi, dia merupakan unsur manajemen dan SDM yang melaksanakan semua kegiatan organisasi. Adalah logis kalau seluruh proses kegiatan organisasi dapat ditentukan oleh kehadiran individu yang berkarya dalam organisasi.

2. Kajian Terhadap Hubungan Antarpribadi dalam Kelompok Kerja

Ada beberapa fokus yang dapat dibicarakan dalam kajian tentang hubungan antarpribadi dalam kelompok kerja. Sebagai contoh variabel-variabel: pengaruh kohesi kelompok terhadap hubungan antarpribadi, relasi antarpribadi dalam pekerjaan, hubungan kerja kelompok kecil dalam pekerjaan industri dan bisnis. Juga, hasil kerja/produktivitas kerja kelompok, jumlah pekerjaan yang diindikatori oleh jumlah surat yang diselesaikan, jumlah dan jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat umum, komposisi kelompok kerja (misalnya usia, jenis kelamin, homogenitas pendidikan dan status sosial ekonomi).

3. Kajian Terhadap Organisasi Formal

Kajian terhadap organisasi formal meliputi usaha untuk menggambarkan karakteristik organisasi, apalagi karakteristik dan kualitas itu bersifat unik, sebagai wahana pengelompokan beragam manusia yang masing-masing memiliki kepribadian individu maupun kelompok. Sebagai contoh, studi tentang organisasi formal dapat ditinjau dari segi ukuran organisasi. Apakah ukuran organisasi ditentukan oleh jumlah anggota; apakah tingkat pendapatan/gaji ditentukan oleh tingkat pendidikan, atau harus sebanding dengan ketersediaan fasilitas kesejahteraan. Studi tentang karakteristik organisasi meliputi materi, pusat kekuasaan dan kewenangan pengambilan keputusan, kerumitan spesialisasi

tugas dan fungsi, atau hubungan antara pusat kekuasaan dengan spesialisasi tugas dan fungsi. Kajian terhadap organisasi formal meliputi: (1) hubungan antarmanusia dalam organisasi demi kepentingan organisasi, (2) dampak langsung maupun tidak langsung perilaku individu maupun sosial terhadap organisasi.

BAB XIX

SOSIOLOGI ANAK

A. Perkembangan Sosiologi Anak

Menelusuri perjalanan sosiologi anak sebagai suatu disiplin ilmu bukanlah pekerjaan mudah. Oleh karena itu, literatur dan bahan bacaan yang komprehensif yang layak dijadikan rujukan sangat terbatas. Untuk itulah, perkembangan studi sosiologi anak terbatas hanya pada menguraikan problema sosial anak.

Sebagaimana kita ketahui, sosiologi terutama menelaah gejala-gejala dalam masyarakat, seperti norma-norma, kelompok sosial, lapisan masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan, proses sosial, perubahan sosial dan kebudayaan. Mengapa problema sosial anak mendapatkan sorotan di dalam sosiologi? Dewasa ini, khususnya di Indonesia, masyarakat sedang mengalami perubahan-perubahan yang terus menerus. Sudah barang tentu di dalam perubahan-perubahan itu membawa dampak positif dan negatif. Salah satu hal yang sangat penting adalah usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif. Pertanyaannya, sampai seberapa jauh sosiologi mempunyai peranan dalam hal itu?

Walaupun sosiologi meneliti gejala-gejala kemasyarakatan, sosiologi juga perlu mempelajari masalah-masalah sosial. Sebab, masalah sosial merupakan hasil dari proses perkembangan masyarakat. Sementara masyarakat merupakan objek kajian sosiologi. Dengan demikian, sosiologi juga berusaha mempelajari masalah-masalah sosial seperti kejahatan, konflik etnik, kemiskinan, perceraian, problema sosial anak, dan sebagainya. Hanya dalam hal ini, sosiologi bertujuan untuk menemukan sebab-sebab terjadinya masalah sosial, tetapi tidak terlalu menekankan

pada pemecahan atau jalan ke luar dari masalah-masalah tersebut. Artinya, Sosiologi dapat pula ikut serta membantu mencari jalan keluar yang mungkin dapat dianggap efektif. Sosiologi berusaha untuk memahami kekuatan-kekuatan dasar yang berada di balik masalah yang tampak. Sementara, usaha-usaha perbaikannya merupakan bagian dari pekerjaan sosial (social work). Pekerjaan sosial berusaha untuk menanggulangi gejala-gejala sosial dalam masyarakat, atau untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Masalah sosial merupakan akibat interaksi sosial antar individu, antara individu dengan kelompok, atau antarkelompok. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial, yang bersumber pada faktor-faktor: (1) ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, (2) biologis, seperti penyakit, (3) psikologi, seperti penyakit syaraf, bunuh diri, disorganisasi jiwa, (4) kebudayaan, seperti perceraian, kenakalan anak-anak, konflik etnik, keagamaan. Dengan demikian, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Sebagai suatu permasalahan sosial, adalah isu tentang problema sosial anak. Masalah anak-anak belum mendapatkan perhatian yang sepenuhnya dari masyarakat. Tentu, masalah anak-anak belum sepopuler isu mengenai kemiskinan, kejahatan, pelacuran, homoseksualitas, narkoba dan sebagainya. Tingginya angka problema sosial anak mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat. Akan tetapi, suatu kecelakaan kereta api yang meminta korban banyak lebih mendapatkan sorotan masyarakat. Namun demikian, sejak situasi kritis mulai merambah ke berbagai wilayah dan ketika berita-berita tentang kasus pelanggaran hak anak makin sering muncul di media massa, kesadaran dan perhatian terhadap problema sosial anak tampak mulai meningkat.

Belakangan ini, ada kesan kuat, bahwa persoalan seperti anak yang bekerja di sektor berbahaya, siswa putus sekolah, anak yang dilacurkan, anak korban pemerkosaan incest, anak jalanan, anak pengungsi, dan lain-lain tak lagi dipahami hanya sekedar kasus yang insidental atau temporer belaka, melainkan telah diakui sebagai sebuah fenomena sosial yang membutuhkan perhatian secara serius, baik dari pemerintah maupun masyarakat luas (Suyanto, 2019).

Problema sosial anak pada dasarnya adalah masalah sosial, karena situasi, kondisi, tekanan kultural atau struktur masyarakat, mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acap kali hak-haknya dilanggar. Menurut Suyanto (2019), ciri-ciri yang umumnya diidap oleh anak-anak bermasalah yaitu: (1) inferior, mereka biasanya tersisih dari kehidupan normal dan terganggu proses tumbuh-kembangnya secara wajar, (2) rentan, mereka sering menjadi korban situasi dan bahkan terlempar dari masyarakat, dan (3) marginal, karena dalam kehidupan sehari-harinya biasanya mereka mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi, mudah diperlakukan salah dan bahkan acapkali pula kehilangan kemerdekaannya.

Di Indonesia, diperkirakan secara kualitatif maupun kuantitatif jumlah problema sosial anak kian bertambah dan mencemaskan. Potret buram dan berbagai permasalahan yang dihadapi anak-anak antara lain: ancaman eksploitasi, perampasan kemerdekaan, penelantaran, penganiayaan, dan berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak. Krisis ekonomi dan konflik sosial-politik yang berkepanjangan bukan saja melahirkan instabilitas politik dan tekanan kemiskinan yang semakin menyengsarakan, tetapi juga melahirkan ketidakstabilan, kemerosotan status sosial anak, serta menghabiskan sejumlah besar dana pembangunan yang seharusnya untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lain bagi anak-anak (Suyanto, 2019).

Di media massa, hampir setiap hari kita bisa membaca kisah tentang anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, anak-anak teraniaya, anak-anak yang tereksplorasi akibat pekerjaan yang menumpuk dan di luar kemampuannya sebagai anak-anak, dan kisah-kisah lain yang intinya memperlihatkan bahwa di balik dunia anak yang seolah-olah begitu ceria, ternyata ada sisi-sisi kelam yang niscaya akan menguras air mata kita semua. Cuma, masalahnya sekarang: apakah menangani permasalahan anak-anak cukup hanya dengan sikap berbelas kasihan dan cucuran air mata? Jawabannya tidak. Para ahli, khususnya para sosiolog berharap menggugah sekaligus mengajak para pendidik, mahasiswa, pemerhati anak-anak bersedia meluangkan waktu bersama-sama berdiskusi dan berusaha mencari pemecahan terbaik untuk menangani permasalahan anak-anak. Selama ini, isu masalah anak-anak hanya dipahami secara parsial dan ada pemahaman yang keliru atau salah, bahwa masalah anak-anak akan segera dapat terselesaikan dengan sendirinya jika urusan kesejahteraan masyarakat, kemiskinan telah tertangani. Apakah benar demikian? Ternyata tidak selalu.

Masalah anak-anak di Indonesia tersebar merata di beberapa wilayah. Dari wilayah yang jauh dari peradaban hingga pusatnya peradaban. Tidak pandang wilayah, perdesaan atau perkotaan, semua ada dan cenderung meningkat. Misalnya, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Kusmanto, 2013).

Meningkatnya masalah anak-anak tersebut, sesungguhnya merupakan lampu kuning bagi sebuah Negara, bangsa akan masa

depannya. Bagaimana pun keberadaan anak tersebut merupakan satu generasi yang melanjutkan astafet penyelenggaraan suatu Negara. Oleh karena itu, jika satu generasi dalam satu Negara, bangsa bermasalah, maka akan menjadi problema serius pada keberlangsungan suatu Negara pada waktu tertentu. Apabila jika kondisi yang tidak dikehendaki tersebut berlarut-larut, dalam perjalanan kehidupan tumbuh dan berkembangnya anak, maka dampaknya akan sangat luas dan lama. Sudah saatnya atau seharusnya keluarga dan masyarakat memiliki kontribusi yang sangat signifikan atas perkembangan masalah anak-anak. Keduanya harus memahami kebutuhan akan tumbuh dan berkembangnya anak, kalau tidak maka anak akan mengalami masalah yang berat atas kehidupannya. Kehidupan anak bisa dipahami dalam tiga perspektif, yaitu tentang dirinya, keluarga dan masyarakat.

Siapa peletak fondasi sosiologi anak itu? Di sini tidak melakukan penelusuran sejarah asal usul atau perkembangan sosiologi anak. Akan tetapi, di sini akan memaparkan beberapa ahli yang berjasa dalam membangun fondasi sosiologi anak, sehingga menjadi rujukan oleh penerus sosiologi anak pada masa berikutnya. Berikut beberapa ahli yang dipandang berjasa dalam meletakkan fondasi sosiologi anak.

1. Studi yang dilakukan Hillis, et al (2016), berjudul *Global Prevalence of Past-Year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimal Estimates*, memperkirakan setidaknya 64 persen dari populasi anak-anak Asia, mengalami sekurang-kurangnya satu bentuk tindakan kekerasan yang terkategori berat. Bahkan, jika tindakan kekerasan yang dinilai lebih ringan, seperti memukul pantat dan menampar wajah ikut dihitung, maka angkanya menjadi lebih besar lagi, yakni mencapai 80 persen lebih populasi anak di Asia atau secara absolut sekitar 888 juta anak-anak.
2. Berdasarkan laporan *Global Report 2017: Ending Violence in Childhood*, diperkirakan sekitar 73,7 persen anak

Indonesia berusia 1-14 tahun pernah mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan atas nama pendisiplinan (violence discipline). Anak yang dinilai nakal oleh orang tuanya, jangan heran jika mereka menjadi sasaran dan objek tindak kekerasan yang tujuannya diklaim sebagai upaya melakukan domestifikasi layaknya menghadapi hewan-hewan liar yang tidak memiliki hati.

3. Kempe (1962), menulis di *Journal of the America Medical Association*, dan melaporkan bahwa dari 71 rumah sakit yang ia teliti, ternyata terjadi 302 kasus tindak kekerasan terhadap anak-anak, di mana 33 anak dilaporkan meninggal akibat penganiayaan yang dialaminya, dan 85 mengalami kerusakan otak yang permanen. Akibat tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tetapi termasuk juga luka memar atau pembengkakan sekalipun dan diikuti kegagalan anak untuk berkembang baik secara fisik maupun intelektual.
4. Dalam kajian yang lain, Fontana (1973), mengemukakan bahwa orang tua yang biasanya melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anaknya merupakan orang tua yang memiliki ciri seperti berikut: secara emosional belum matang, menderita gangguan emosional, secara mental tidak sempurna, orang tua yang terlalu berpegang pada disiplin, orang tua yang memang memiliki kepribadian yang sadisme dan berperilaku kriminal dan pecandu minuman alkohol (Suyanto, 2019).

Khusus untuk Indonesia, Suyanto, dari Universitas Airlangga Surabaya, paling tepat dipandang berjasa dalam meletakkan fondasi sosiologi anak. Dia telah menerbitkan dua buku tentang masalah anak-anak, yaitu pertama tentang *Masalah Sosial Anak* (2013), Penerbit Predana Media Group, dan kedua *Sosiologi Anak* (2019), penerbit Predana Media Group. Di samping buku yang telah diterbitkan, dia juga sangat tekun dan ulet melakukan penelitian-

penelitian serial tentang kehidupan anak-anak rawan, khususnya tentang anak perempuan yang dilacurkan dan anak-anak korban pemerkosaan incet yang didanai dari Tahir Foundation. Kemudian, sejak diangkat menjadi dosen di Jurusan sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Air Langga dua puluh tahun lalu hingga saat ini, adalah juga pengajar matakuliah Masalah Sosial Anak (Sosiologi Anak). Dengan karya-karya yang melimpah, dan mencakup lingkup yang luas, termasuk di dalamnya sosiologi anak, pantas mengukuhkannya sebagai pakar sosiologi, terutama sosiologi anak.

Berikut beberapa ahli Indonesia yang dipandang berjasa dalam meletakkan fondasi sosiologi anak, yang telah melakukan sejumlah penelitian tentang problema sosial anak.

1. Suyanto (2019), masalah anak-anak di Indonesia tersebar secara merata di berbagai wilayah, baik di perdesaan maupun perkotaan. Semuanya cenderung meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh masalah anak-anak ini meliputi: anak korban perkosaan, anak-anak yang dilacurkan, buruh anak, anak jalanan, pengungsi anak, anak yang diterlantarkan, anak korban kekerasan, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*), mereka bukan saja sering tidak dipenuhi hak-hak dasarnya dan diterlantarkan, tetapi juga dilanggar hak-haknya: diperlakukan kasar dan menjadi korban *child abuse*.
2. Studi yang dilakukan Ahimsa Putra, dkk (1999), dari pusat studi Pariwisata UGM di enam ibu kota propinsi di Indonesia menemukan bahwa secara garis besar terdapat tiga bentuk kekerasan yang selama ini menimpa dan dialami anak-anak, yaitu: kekerasan fisik sebanyak 160 kasus, kekerasan mental, antara lain diusir, diludahi, atau dicaci maki sebanyak 72 kasus, dan kekerasan seksual, mulai dari sekedar dirayu, dicolek, dirangkul paksa, dioral sek, disodomi hingga diperkosa sebanyak 27 kasus. Menurut Ahimsa Putra, angka

di atas sudah barang tentu merupakan angka minimal, karena studi tersebut memang tidak bermaksud melakukan sebuah survey, melainkan lebih merupakan sebuah upaya awal untuk pintu masuk mengetahui persoalan ini secara lebih mendalam.

3. Penelitian Mustain (1997), tentang tindakan kekerasan dalam keluarga di Surabaya. Masih banyaknya praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mustain menemukan bahwa yang paling sering menjadi sasaran kemarahan dan kejengkelan orang tua (baca: ayah) adalah anak-anak. Jika ayah sedang marah tidak jarang anak ditendang dan ditempeleng. Yang menarik adalah hampir tidak ada reaksi yang berarti dari orang lain (tetangga) terhadap perlakuan kasar dan keras tersebut. Para tetangga menilai persoalan kekerasan terhadap anak yang dilakukan tetangganya ialah urusan intern mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan dalam rangka mendidik anak-anaknya yang dinilai membandel dan membangkang kepada orang tuanya.
4. Menurut Basoeki (1999), beberapa faktor penyebab banyak terjadi penganiayaan anak dan penelantaran anak di antaranya: (1) orang tua yang dulu dibesarkan dengan kekerasan cenderung meneruskan pendidikan tersebut kepada anak-anaknya, (2) kehidupan yang penuh stress seperti terlalu padat kemiskinan, sering berkaitan dengan tingkah laku agresif dan menyebabkan terjadinya penganiayaan fisik terhadap anak, (3) isolasi sosial, tidak adanya dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar, tekanan sosial akibat situasi kritis ekonomi, tidak bekerja dan masalah perumahan akan meningkatkan kerentanan keluarga yang akhirnya akan terjadi penganiayaan dan penelantaran anak.
5. Menurut Fatimah (1992), mengungkapkan setidaknya terdapat enam kondisi yang menjadi faktor pendorong atau penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak-anak, yaitu: (1) faktor ekonomi, dapat menciptakan berbagai masalah, seperti pemenuhan kebutuhan

sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah, dan sebagainya, (2) masalah keluarga yang kurang harmonis, (3) perceraian, menimbulkan problema kerumahtanggaan, seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah, dan sebagainya. (4) kelahiran anak di luar nikah, menimbulkan masalah di antara kedua orang tuanya, (5) permasalahan jiwa atau psikologis, mereka senantiasa berada dalam situasi kecemasan dan tertekan akibat mengalami depresi atau stress, (6) tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai (Suyanto, 2019).

B. Pengertian Sosiologi Anak

Ada dua istilah keilmuan yang bersanding dalam kajian ini, yaitu sosiologi dan anak. Sosiologi sebagaimana kita ketahui, memfokuskan diri pada kajian memahami struktur, sistem sosial, lembaga, kelompok sosial, dinamika sosial dalam proses yang terjadi, hubungan timbal balik individu dan individu, individu dan kelompok/masyarakat, serta hubungan antar kelompok/masyarakat. Sementara, yang dimaksud dengan anak di sini adalah anak baik secara kualitatif maupun kuantitatif tergolong bermasalah, seperti anak korban perkosaan, anak-anak yang dilacurkan, buruh anak, anak jalanan, pengungsi anak, anak yang ditelantarkan, anak korban kekerasan, anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dan sebagainya.

Untuk mendapatkan rumusan atau definisi sosiologi anak, kita perlu melakukan telaahan terhadap pengertian awal dari sosiologi dan anak tersebut. Pembentukan kepribadian anak agar bisa berperan secara baik di lingkungan keluarga dan masyarakatnya, tidak bisa mengesampingkan dimensi sosiologis dan psikologis anak. Secara sosiologis, anak butuh kemampuan untuk belajar peran dan status yang dimilikinya. Anak butuh belajar untuk berinteraksi sosial dengan orang lain di sekitarnya. Dalam proses interaksi tersebut anak harus mampu memahami

diri dan orang lain, sehingga bisa menghargai, menghormati, memberi dan membutuhkan, bertoleransi dan banyak aspek sosiologis yang lain. Proses ini menjadi cara dan jalan bagi anak dalam memahami situasi sosial masyarakatnya secara lebih luas, agar ia bisa diterima dan menerima orang lain dalam kehidupannya.

Dalam wacana ini, disampaikan pengertian umum dari makna sosiologi anak ini. Menurut Suyanto (2019), sosiologi anak menyelidiki problema sosial anak. Karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultural maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acap kali pula dilanggar hak-haknya. Inferior, rentan dan marginal merupakan beberapa ciri yang umumnya diidap oleh anak-anak tergolong bermasalah. Sementara, penulis secara sederhana mendefinisikan sosiologi anak sebagai bagian dari sosiologi yang membahas dan menganalisis problema sosial anak, dengan bantuan konsep-konsep dan metode sosiologi.

C. Pendekatan Sosiologi Anak

Pendekatan di sini adalah sudut pandang yang dipakai oleh para ahli untuk mempelajari masalah-masalah yang menjadi objek kajian sosiologi anak. Sosiologi anak menyelidiki problema sosial anak. Para ahli dalam menyelidiki problema sosial anak, umumnya menggunakan dua pendekatan, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif.

1. Metode Kualitatif. Metode kualitatif adalah metode kerja ilmiah yang mengutamakan bahan atau informasi yang nantinya akan diuji berdasarkan tingkat kualitas data. Dengan metodologi ini, sukar didapat indikator atau skala pengukuran berdasarkan angka-angka yang bersifat eksak (tetat/pasti). Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas,

sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih luas dan bermakna. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

2. Metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metodologi ilmiah yang menggunakan angka-angka sebagai bahan-bahan keterangan sebagai data ilmiah. Dalam metodologi ini, fenomena sosial dapat ditelaah melalui angka indeks, skala, tabel, dan rumusan lain yang sedikit banyak menggunakan statistik. Fenomena sosial itu dapat diklasifikasikan, konkrit, teramat, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Penelitian pada umumnya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang representatif. Proses penelitian bersifat deduktif, di mana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji melalui pengumpulan data lapangan. Untuk mengumpulkan data digunakan instrumen penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak. Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel tersebut diambil.

D. Manfaat Sosiologi Anak

Mempelajari sosiologi anak dapat memberi manfaat, di antaranya adalah:

1. Mengetahui dan memahami pengertian, objek, ruang lingkup, konsep dan teori sosiologi anak;
2. Mengetahui dan memahami berbagai perspektif teori dalam sosiologi yang menjadi akar teori sosiologi anak;
3. Mengetahui dan memahami potret buram dan berbagai problema sosial anak di Indonesia. Kemudian, menggugah dan mengajak para pendidik, mahasiswa, dan pemerhati anak bersedia meluangkan waktu bersama-sama berdiskusi dan berusaha mencari pemecahan terbaik untuk menangani problema sosial anak;
4. Menggugah dan mengajak keluarga dan masyarakat memiliki kontribusi yang sangat signifikan atas berkembangnya problema sosial anak. Keluarga dan masyarakat harus memahami kebutuhan akan tumbuh dan berkembangnya anak. Kalau tidak, maka anak akan mengalami masalah yang berat atas kehidupannya. Kehidupan anak bisa dipahami dalam tiga perspektif, yaitu tentang dirinya, keluarga dan masyarakat;
5. Mampu mengidentifikasi dan pemecahan masalah terhadap fenomena dan permasalahan sosial yang timbul terkait problema sosial anak di berbagai wilayah Indonesia.

E. Objek Kajian Sosiologi Anak

Sosiologi anak fokusnya menyelidiki problema sosial anak. Problema sosial anak dari waktu ke waktu terus meningkat seiring kemajuan zaman. Perlu ada upaya terus menerus dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan Negara. Tiga pilar tersebut harus saling kerjasama untuk satu tujuan menyelamatkan kehidupan dan masa depan anak. Problema sosial anak yang terus meningkat harus diselesaikan secara komprehensif dan lintas sektoral.

Di Indonesia, secara kelembagaan sesungguhnya Negara telah mengakomodasi kebutuhan penyelesaian problema sosial anak, dalam bentuk regulasi, kelembagaan, program dan anggaran. Akan tetapi, tidak bisa mengesampingkan dimensi sosiologis dan psikologi anak. Secara sosiologis, anak butuh kemampuan untuk belajar peran dan status yang dimilikinya. Anak butuh belajar untuk interaksi sosial dengan orang lain di sekitarnya.

Suyanto (2019), mengajukan objek kajian sosiologi anak dititikberatkan pada 15 aspek sebagai berikut:

1. Pengertian anak rawan;
2. *Child abuse* (anak korban tindak kekerasan): sumber dan faktor penyebabnya;
3. Karakteristik pelaku dan anak korban *child abuse* serta pola terjadinya;
4. Dampak tindak kekerasan terhadap anak;
5. Pekerja anak (disektor berbahaya);
6. Anak jalanan;
7. Anak putus sekolah dan siswa rawan drop out;
8. Anak terlantar;
9. Anak perempuan korban pelecehan dan kekerasan seksual;
10. Anak korban INSET (hubungan seksual yang terjadi antara kerabat dekat, biasanya antara anggota keluarga);
11. Anak korban PEDOFILIA (hubungan seksual yang dilakukan pada orang yang berada di bawah umur dewasa secara hukum);
12. Anak yang dilacurkan;
13. Perdagangan dan penculikan anak;
14. Pengungsi anak;
15. Membangun kepedulian terhadap nasib dan upaya perlindungan anak rawan.

Objek kajian sosiologi anak yang diajukan oleh Suyanto adalah potret buram dan berbagai problema sosial anak di Tanah Air. Apa yang disajikan di atas, diharapkan bukan hanya

memberikan pengetahuan tentang anak yang menjadi korban tindak kekerasan (child abuse) dan berbagai situasi problematik yang mereka alami, tetapi juga bermaksud menggugah dan sekaligus mengajak para pendidik, mahasiswa, pemerhati anak bersedia meluangkan waktu bersama-sama berdiskusi dan berusaha mencari pemecahan terbaik untuk menangani problema sosial anak. Demikian juga, keluarga dan masyarakat harus memiliki kontribusi yang sangat signifikan atas berkembangnya problema sosial anak. Kalau tidak, maka anak akan mengalami masalah yang berat atas kehidupannya.

BAB XX

SOSIOLOGI KORUPSI

A. Perkembangan Sosiologi Korupsi

Korupsi dalam sejarah manusia bukanlah hal baru. Ia lahir berbarengan dengan umur manusia itu sendiri. Ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, di sanalah awal mula terjadinya korupsi. Penguasaan atas suatu wilayah dan sumber daya alam oleh segelintir kalangan mendorong manusia untuk saling berebut dan menguasai. Berbagai taktik dan strategi pun dilaksanakan. Perebutan manusia atas sumber daya alam dan politik inilah awal muali terjadinya ketidakadilan. Pada hal kebutuhan untuk bertahan hidup kian menanjak, tapi kesempatan untuk memenuhinya semakin terbatas. Sejak saat itu, moralitas dikesampingkan. Orientasi hidup yang mengarah pada keadilan berubah menjadi kehidupan saling menguasai dan mengeksploitasi. Dalam sejarah, kita dapat menemukan banyak catatan yang terkait dengan kondisi tersebut (Wijayanto & Zachrie, 2009).

Di India, korupsi sudah menjadi permasalahan serius sejak 2300 tahun yang lalu. Hal ini terbukti dengan adanya tulisan seorang Perdana Menteri Chandragupta tentang 40 cara untuk mencuri kekayaan Negara. Kerajaan China, pada ribuan tahun yang lalu telah menerapkan kebijakan yang disebut “Yang-lian”, yaitu hadiah untuk pejabat Negara yang bersih, sebagai insentif untuk menekan korupsi. Pada abad ke-14, Abdul Rahman berpendapat bahwa akar korupsi adalah keinginan hidup bermewah-mewah di kalangan elit penegang kekuasaan, sehingga mereka menghalalkan berbagai cara untuk membiayai gaya hidup mereka (Wijayanto & Zachrie, 2009).

Di Indonesia, korupsi mulai terjadi sejak zaman kerajaan. Bahkan, VOC bangkrut pada awal abad ke-20 akibat korupsi yang merajalela di tubuhnya. Setelah proklamasi kemerdekaan, banyak petinggi Belanda yang kembali ke tanah airnya, posisi kosong mereka kemudian diisi oleh kaum pribumi pegawai pemerintah Hindia Belanda yang tumbuh dan berkembang di lingkungan korup. Kultur korupsi tersebut berlanjut hingga masa pemerintah Orde Lama. Di awal pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Terlepas dari upaya tersebut, Presiden Soeharto tumbang karena isu korupsi (Wijayanto & Zachrie, 2009).

Dalam dua puluh tahun terakhir, cara pandang dunia terhadap masalah korupsi mengalami perubahan drastis. Korupsi dipandang sebagai masalah, dan penanganan korupsi menjadi perhatian serius. Menurut Wijayanto & Zachri (2009), ada beberapa faktor yang mendorong perubahan paradigma korupsi: (1) berakhirnya perang dingin, (2) kejatuhan presiden Filipina, Ferdinand Marcos, oleh *people power* pada tahun terakhir kekuasaannya, 1986, (3) kegagalan konsep pembangunan di banyak Negara berkembang, terutama di Afrika, (4) munculnya berbagai NGO antikorupsi di dunia, terutama pada periode 1990-an. Institusi seperti Transparency International dan lain-lain mengeluarkan berbagai peringkat dan skor persepsi korupsi serta *integrity index* di berbagai Negara di seluruh dunia, (5) runtuhnya ekonomi Negara-negara Asia pada ekonomi krisis 1997.

Berdasarkan paparan di atas, korupsi merupakan permasalahan utama banyak bangsa di dunia. Bagi bangsa Indonesia, bukan saja merupakan problema ekonomi dan politik, tetapi juga merupakan problema budaya. Manakala korupsi sudah begitu merajalela, ada kesan negatif, publik menganggap korupsi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Tanpa upaya pemberantasan yang sistematis, korupsi akan benar-benar menjadi bagian dari

kehidupan masyarakat. Pendekatan budaya dapat dilaksanakan melalui pendidikan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pesan-pesan moral bisa dititipkan dalam berbagai kesenian daerah, seperti wayang, madihin, film, poster, dan sebagainya. Idealnya, pendekatan budaya dimulai sedini mungkin sehingga peran keluarga dan masyarakat memiliki kontribusi sangat signifikan bagi sukses tidaknya pendekatan ini. Kehidupan anak bisa dipahami dalam tiga perspektif, yaitu tentang dirinya, keluarga dan masyarakat.

Kemunculan sosiologi korupsi kaitannya dengan pemikiran Berger dan Berger (Sunoto, 2000), bahwa pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman atau masalah. Dalam rangka mengatasi masalah, seperti korupsi ini, maka orang mulai melakukan renungan sosiologi. Pola ini tampaknya terulang kembali seperti kelahiran ilmu sosiologi di belahan Eropa. Revolusi Perancis dan revolusi industri di Eropa pada waktu itu, telah mengalami serangkaian perubahan dan perubahan itu telah memunculkan krisis sosial yang akut, ditandai oleh munculnya berbagai masalah sosial sehingga orang butuh ilmu baru, maka lahirlah sosiologi sebagai ilmu (Ritzer, 2009). Berkenaan dengan itu, tidak mengherankan jika masalah korupsi ini telah melahirkan kajian sosiologi korupsi. Demikian pula, korupsi merupakan isu multidimensional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pada tahun 1954 masalah korupsi ini telah dikaji oleh Vilhem Aubert dalam suatu jurnal sosiologi terkemuka. Tulisannya sangat sosiologis. Aubert menggambarkan sikap yang berkembang di kalangan profesional dalam konteks pelaksanaan tata aturan tertentu yang berujung pada korupsi. Penggambarannya tentang apa yang terjadi di Amerika, belum menyentuh Negara-negara berkembang. Pada hal korupsi justru sangat kuat terjadi pada Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Atmadja & Atmadja, 2019). Kajian ini sangat penting karena dapat dipandang sebagai benih-benih akademik bagi sosiologi korupsi.

Alatas pada tahun 1975 menulis buku berjudul “Sosiologi Korupsi”. Kemudian dilanjutkan dengan bukunya yang kedua berjudul “Korupsi Sifat, Sebab, Fungsi” pada tahun 1983. Kedua buku itu sangat penting karena memberikan wawasan yang luas, tidak saja tentang korupsi pada era masyarakat kontemporer di Asia, tetapi juga pada masa lalu antara lain pada kekaisaran Romawi dan Cina Kuno (Atmadja & Atmadja, 2019). Dalam konteks Indonesia peran Wijayanto dan Zachrie sangat penting. Keduanya mengedit sebuah buku tentang “Korupsi Mengkorupsi Indonesia: Sebab, akibat, dan Prospek Pemberantasan” (2009). Buku tersebut memuat 31 artikel tentang korupsi dilihat dari perspektif ekonomi, bisnis, lingkungan, sejarah, politik, administrasi publik, hukum, civil society, budaya, agama, pendidikan dan global. Apa yang dilakukan oleh Wijayanto dan Zachrie dapat dipandang sebagai langkah awal bagi kemunculan sosiologi yang khususnya mengkaji tentang korupsi secara luas yang di dalamnya menyinggung tentang korupsi yang terjadi di Indonesia.

Dalam perjalanan selanjutnya, Atmadja & Atmadja menulis buku berjudul “Sosiologi Korupsi” (2019). Buku tersebut sangat baik karena mengkaji korupsi dari perspektif sosiologis, yang mencakup aspek sosiologi dan sosiologi korupsi; pengertian korupsi, penyebab dan polanya; melacak akar korupsi dan superstruktur ideologi; melacak akar korupsi dalam sejarah; korupsi pada era masyarakat konsumsi; koruptor=kafir adharma=raksasa=kurawa=lupa Pancasila; Pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi.

Karya tulisan Alatas, Wijayanto & Zachrie, Atmadja & Atmadja, secara tegas menggunakan istilah sosiologi korupsi dalam konteks pengkajian masalah korupsi, termasuk korupsi yang berlangsung di Indonesia. Ketiga karya tulis ini dapat dipandang sebagai langkah awal untuk mencoba meletakkan dasar bagi kajian korupsi dengan menggunakan pendekatan

sosiologi sehingga menghasilkan cabang sosiologi baru, yakni sosiologi korupsi. Kelahiran sosiologi korupsi tidak hanya karena korupsi memunculkan krisis dalam masyarakat, tetapi terkait pula dengan hakikat dan seluk beluk korupsi sebagai gejala sosial yang kompleks. Kondisi ini mengakibatkan sosiologi umum mengalami kesulitan memahami masalah korupsi secara luas dan mendalam sehingga kehadiran sosiologi korupsi menjadi sangat penting.

B. Pengertian Sosiologi Korupsi

Ada istilah keilmuan yang bersanding dalam kajian ini, yaitu sosiologi dan korupsi. Sosiologi sebagaimana kita ketahui, memfokuskan diri pada kajian memahami struktur, sistem sosial, lembaga, kelompok sosial, dinamika sosial dalam proses yang terjadi, hubungan timbal balik individu dan individu, individu dan kelompok/masyarakat serta hubungan antara kelompok/masyarakat. Sementara korupsi menurut beberapa ahli:

1. Definisi korupsi yang paling banyak diacu, termasuk oleh World Bank dan UNDP, adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Wijayanto & Zachrie, 2009).
2. Puspito et al (2011), korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.
3. Rahardjo, korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati. Tatanan itu bisa berwujud pemerintahan, administrasi atau manajemen (Yamin, 2016).
4. Pope (2003), korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.

Dengan demikian, korupsi sesungguhnya mengilustrasikan satu keadaan yang menyeramkan, menyedihkan rakyat,

memberikan efek yang sangat buruk bagi kehidupan, membuat kondisi menjadi labil, menciptakan kegaduhan hidup, dan sebagainya. Kondisi atas korupsi tersebut adalah menciptakan sebuah suasana dan keadaan yang tidak sehat alias sakit.

Bertolak dari pengertian di atas, maka definisi sosiologi korupsi menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Haryatmoko (2011), sosiologi korupsi adalah cabang sosiologi umum yang tidak saja mengkaji sistem interaksi sosial koruptif sebagai kejahatan yang melanggar integritas yang berlaku pada institusi, tetapi juga kerugian yang ditimbulkannya pada masyarakat dan Negara.
2. Atmadja & Atmadja (2019), sosiologi korupsi sebagai bagian dari sosiologi umum, harus berpatokan pada model kajian dan penjelasan mengikuti pemikiran yang berlaku pada sosiologi umum, yakni:
 - a. Tindakan para agen dalam korupsi mengacu kepada karakter sosial. Artinya, tindakan mereka ditandai oleh saling mempengaruhi antarmanusia yang terlibat di dalam tindakan korupsi;
 - b. Tindakan berstruktur. Artinya, tindakan yang berpola, berdinamika, dan terikat pada suatu tujuan;
 - c. Adanya interaksi sosial. Tindakan korupsi ada keterkaitannya dengan elemen-elemen interaksi sosial lainnya dengan suatu institusi maupun dengan instansi lain dalam masyarakat;
 - d. Tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi bersifat analisis. Artinya, Korupsi berusaha mengaitkan elemen-elemen tindakan sosial koruptif yang dilakukan oleh berbagai agen secara sistematis yang berlangsung pada suatu instansi;
 - e. Sistematis. Artinya, dalam menjelaskan suatu tindakan sosial korupsi menempatkan dirinya sebagai disiplin yang mengikuti aturan-aturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi korupsi adalah sebagai bagian dari sosiologi yang membahas dan menganalisis fenomena korupsi, dengan bantuan konsep-konsep dan metode sosiologi.

C. Pendekatan Sosiologi Korupsi

Masalah korupsi memiliki kompleksitas yang tinggi, baik penyebab, prosedural maupun akibatnya. Korupsi berdimensi sosial-budaya. Artinya, korupsi merupakan isu multidimensional yang mempunyai komponen politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang sering melibatkan para pemegang kekuasaan, sehingga memberantas korupsi bukanlah perkara mudah. Dengan adanya kenyataan ini, maka Atmadja & Atmadja (2019) mengusulkan untuk mengkaji masalah sosial termasuk masalah korupsi lebih baik memakai pendekatan multiperspektif. Pendekatan multiperspektif adalah gagasan yang melihat suatu masalah sosial dari berbagai sudut pandang teoritis. Dalam konteks ini ahli sosiologi tidak lagi hanya memakai teori-teori sosial konvensional, seperti fungsionalisme struktural, interaksionisme simbolik dan sejenisnya, tetapi bisa pula memakai teori-teori kontemporer dalam mengkaji masalah sosial. Pendekatan ini sangat penting karena mampu memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap kompleksitas suatu gejala sosial. Menurut Kellner (Atmadja & Atmadja, 2019), penggabungan berbagai pendekatan yang kuat seperti Marxisme, feminisme, post-strukturalisme, dan berbagai cara pandang teoritis kontemporer lainnya dapat menghasilkan berbagai analisis yang lebih jelas dan terperinci serta lebih berguna daripada yang dihasilkan oleh satu perspektif saja.

Untuk memahaminya, pendekatan yang digunakan adalah metodologi-metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini, ada dua pendekatan yang umumnya digunakan oleh para ahli yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif.

1. Metode Kualitatif. Metode kualitatif adalah metode kerja ilmiah yang mengutamakan bahan atau informasi yang nantinya akan

diuji berdasarkan tingkat kualitas data. Dengan metodologi ini sukar didapat indikator atau skala pengukuran berdasarkan angka-angka yang bersifat eksak (tepat/pasti). Teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Penelitian kualitatif tidak mengenal pembatasan yang kaku, tapi dapat memakai sudut pandang aneka teori, baik teori konvensional maupun teori kritis, bahkan bisa pula memakai teori berbasis agama, agar kompleksitas masalah sosial dapat dipahami secara integralistik.

2. Metode Kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metodologi ilmiah yang menggunakan angka-angka sebagai bahan-bahan keterangan sebagai data ilmiah. Dalam metodologi ini, fenomena sosial dapat ditelaah melalui angka indeks, skala, tabel, dan rumusan lain yang sedikit banyak menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif, memandang fenomena sosial itu dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Proses penelitian bersifat deduktif, di mana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji melalui pengumpulan data lapangan. Untuk mengumpulkan data digunakan instrumen penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak. Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel tersebut diambil.

D. Manfaat Sosiologi Korupsi

Mempelajari sosiologi korupsi dapat memberi manfaat, di antaranya adalah:

1. Mengetahui dan memahami pengertian, objek, ruang lingkup, konsep dan teori sosiologi korupsi;
2. Mengetahui dan memahami berbagai perspektif teori dalam sosiologi yang menjadi akar teori sosiologi korupsi;
3. Memberi pemahaman tentang seluk beluk korupsi kepada mahasiswa sebagai calon intelektual, calon pemimpin masa depan, dengan harapan, mereka tidak saja tahu tentang korupsi, tetapi menjadi seorang intelektual yang antikorupsi;
4. Mengetahui dan memahami bahwa korupsi berdimensi sangat luas dan kompleks, meliputi dimensi pendidikan, ekonomi, hukum, politik, sosial budaya, administrasi publik, civil society; dan sering melibatkan para pemegang kekuasaan sehingga memberantas korupsi bukanlah perkara mudah. Oleh karena itu, perlunya membangun integralistik diberbagai aspek kehidupan bangsa sebagai langkah untuk memberantas korupsi;
5. Mampu menjadi inspirasi bagi mahasiswa dan dapat membangun kesadaran bersama bahwa korupsi dapat diberantas.

E. Objek Kajian Sosiologi Korupsi

Korupsi merupakan isu multidimensional yang mempunyai komponen pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan administrasi publik. Dengan demikian, pembahasan sosiologi korupsi berdimensi sangat luas dan kompleks. Kondisi ini berimplikasi pada objek kajian sosiologi korupsi itu sendiri. Menurut para ahli, objek kajian sosiologi korupsi dititik beratkan pada aspek-aspek berikut.

1. Alatas (1981), objek kajian sosiologi korupsi, yaitu:
 - a. Makna korupsi;

- b. Fungsi korupsi;
 - c. Sebab-sebab korupsi;
 - d. Pencegahan korupsi.
2. Atmadja & Atmadja (2019), objek kajian sosiologi korupsi yaitu:
- a. Pengertian (etimologis dan terminologis). Penyebab dan bagaimana pola korupsi yang terjadi dalam masyarakat dan/ atau Negara;
 - b. Aspek-aspek kesejarahan yang secara disadari maupun tidak atau yang secara langsung maupun tidak, berkontribusi bagi adanya korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan/atau bernegara;
 - c. Aspek-aspek kebudayaan dalam masyarakat yang berkontribusi bagi adanya korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan/atau bernegara.
 - d. Posisi korupsi dilihat dari sudut pandang dualisme kultural. Apakah korupsi bersifat disfungsional atau bisa pula bersifat fungsional secara laten bagi masyarakat.
 - e. Cara-cara yang bisa ditempuh (selain pendekatan hukum) guna menanggulangi masalah korupsi dalam masyarakat dan/atau negara.
3. Muslihudin & Rostikawati (2020), objek kajian sosiologi korupsi yaitu:
- a. Pengertian korupsi;
 - b. Bentuk korupsi;
 - c. Ciri-ciri korupsi dan pertumbuhannya;
 - d. Sebab-sebab korupsi;
 - e. Korupsi dan politik;
 - f. Korupsi dan hukum;
 - g. Dampak korupsi;
 - h. Pemecahan dan pemberantasan korupsi.
4. Wijayanto & Zachrie (2009), objek kajian sosiologi korupsi, yaitu:

- a. Korupsi;
- b. Perspektif ekonomi, bisnis, dan lingkungan;
- c. Perspektif sejarah, politik, dan administrasi publik;
- d. Perspektif hukum;
- e. Perspektif civil society;
- f. Perspektif budaya, agama dan pendidikan;
- g. Perspektif global.

Objek kajian sosiologi korupsi di atas dimensinya sangat luas dan kompleks. Namun di balik itu semua, hal-hal yang memerlukan perhatian kita bersama adalah berkontribusi bagi pemecahan masalah korupsi. Sebab korupsi sebagai penyakit masyarakat perlu dicarikan jalan pemecahannya agar masyarakat tidak terjebak pada kemiskinan dan usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dari korupsi.

BAB XXI

SOSIOLOGI KONFLIK

A. Perkembangan Sosiologi Konflik

Di dalam realitas masyarakat, konflik sebagai gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan masyarakat, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya, konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu. Di mana saja dan kapan saja selama kehidupan sosial masih ada, maka konflik akan selalu menyertainya. Dalam pandangan ilmu-ilmu sosial, masyarakat dilihat sebagai arena konflik dan integrasi yang akan senantiasa ada sejalan dengan perjalanan kehidupan sosial itu sendiri. Adanya perbedaan kekuasaan dapat dipastikan menjadi sumber konflik di dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat yang kompleks dan heterogen. Dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki unsur-unsur kesamaan keinginan, tujuan hidup, ideologi, dan pandangan satu sama lainnya. Tidak hanya itu, sumber daya yang langka, terutama sumber daya ekonomi di dalam masyarakat akan membangkitkan kompetisi di antara pelaku ekonomi yang memperebutkannya dan bukan mustahil bisa berujung pada pertikaian akibat persoalan distribusi sumber daya tersebut yang tidak pernah merata. Kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda dalam masyarakat akan saling mengejar tujuan yang berbeda dan saling bersaing. Kondisi semacam ini, dalam banyak kasus kerap menyebabkan terjadinya konflik terbuka. Dari setiap konflik tersebut ada beberapa di antaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga beberapa di antaranya yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan.

Konflik dalam pandangan sebagian orang dipahami oleh adanya perbedaan-perbedaan. Perbedaan tersebut di antaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan sebagainya. Meskipun ada pembahasan perihal perbedaan tersebut, namun tidaklah mudah mengakui keberadaan konflik tersebut. Konflik lebih banyak dipahami sebagai keadaan tidak berfungsinya elemen-elemen masyarakat, seperti pendidikan, keluarga, agama, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan sebagainya. Atau, elemen-elemen masyarakat, karena adanya gejala penyakit masyarakat, sehingga tidak bisa terintegralistik secara sempurna. Tetapi, secara empirik, konflik sering tidak diakui oleh banyak orang, karena orang lebih memilih stabilitas sebagai hakikat masyarakat. Terlepas dari faktor-faktor yang melatarbelakanginya, konflik merupakan suatu gejala, di mana individu atau kelompok menunjukkan sikap atau perilaku bermusuhan terhadap individu atau kelompok lain, sehingga mempengaruhi kinerja dari salah satu atau semua pihak yang terlibat.

Konflik secara etimologi berasal dari bahasa Latin “Con”, yang berarti bersama dan “Fligere”, yang berarti benturan atau tabrakan. Jadi, konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain sebagainya, yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih (Elly & Kolip, 2013). Menurut Chang bahwa akar konflik ada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, masalah uang, dan masalah kekuasaan. Selain unsur-unsur di atas, emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya konflik sosial (Elly & Kolip, 2013).

Dalam realita, adakalanya konflik yang berwujud pada aksi kekerasan dalam masyarakat, karena Negara belum memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang melembaga. Sebaliknya, adakalanya konflik tak berwujud kekerasan, seperti perdebatan saja, berarti Negara sudah mempunyai mekanisme penyelesaian

konflik yang melembaga. Misalnya melalui saluran badan perwakilan rakyat, pers, pengadilan, dan sebagainya.

Konflik itu bisa bersifat laten alias terpendam, tetapi bisa pula bersifat manifest alias terbuka. Jika mengacu pada pemikiran di atas, konflik bisa pula bermula dari perbedaan kepentingan yang materi-ekonomi, akan tetapi bisa pula bermula dari perbedaan dan pertentangan kepentingan ideologi atau asas moral yang serba simbolik. Apapun wujudnya, konflik itu selalu merefleksikan tidak adanya toleransi atas eksistensi pihak lain, suatu intoleransi yang timbul hanya karena adanya perbedaan dan bahkan pertentangan kepentingan atau paham dengan pihak lain itu. Tiadanya toleransi seperti itu, mungkin saja Cuma bermula dari rasa cemburu, iri hati, kebencian dan curiga, akan tetapi yang pada akhirnya akan berujung pada timbulnya rasa khawatir akan terancamnya eksistensi atau posisinya yang selama ini dominan (Soetandyo, 2006).

Dalam kehidupan masyarakat lokal atau perdesaan yang eksklusif, dengan sifat hubungannya yang serba tatap muka dan mempribadi, konflik yang manifest sangat terbuka, seperti bersilang selisih pendapat, bahkan bisa jadi benturan fisik. Bentuk seperti ini amatlah dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas dan merusak suasana rukun yang berasaskan prinsip kekeluargaan atau kegotongroyongan. Akan tetapi, dalam kehidupan yang telah mulai berubah menuju kehidupan yang serba terbuka, disebabkan oleh berbagai invensi dan inovasi teknologi dalam bidang transportasi dan komunikasi serta prinsip individualisasi, maka konflik yang manifest lebih tertutup. Perbedaan pendapat adalah hak dan toleransi.

Konflik tidak selalu berimplikasi negatif. Artinya, konflik menjadi penyebab perusakan integrasi dan kesatuan masyarakat. Sebaliknya, konflik berimplikasi pada timbulnya integrasi dan sumber perubahan pada masyarakat. Bentuk ekspresi pikiran dan tuntutan yang berlainan atau yang bertentangan merupakan

mekanisme terjadinya perubahan-perubahan di dalam masyarakat sehingga masyarakat mengalami perkembangan dan kemajuan. Semua kreativitas, inovasi dan perkembangan dalam kehidupan individu, kelompok dan masyarakat lahir dari konflik yang terjadi antara kelompok dengan kelompok, individu dengan individu, dan emosi dengan emosi dalam diri individu. Benturan ide, misalnya, akan menimbulkan pemikiran baru yang lebih baik daripada sebelum adanya perbenturan. Oleh karena itu, benturan pemikiran tersebut jika berjalan dalam gerak dialektika sosial yang terkendali oleh sebuah lembaga yang memiliki kekuatan pengendali justru akan melahirkan dinamika sosial yang mengarah pada kondisi yang konstruktif (Elly & Kolip, 2013). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konflik mempunyai fungsi positif. Konflik memang tidak mengubah sistem sosial itu sendiri, namun konflik menciptakan perubahan-perubahan di dalam sistem, dan konsekwensinya sistem itu bisa lebih efektif.

Teori konflik banyak dikembangkan oleh para ahli, tetapi apabila dirunut secara historis, elemen-elemen dasarnya berakar dari pada pemikiran dua sosiolog besar, yaitu Marx dan Weber. Keduanya memang menunjukkan perbedaan pendapat, bahkan tak jarang saling memperdebatkan pokok-pokok pikirannya, akan tetapi keduanya sama-sama menaruh perhatian terhadap dua hal utama, yaitu : (1) *the way social positions bestow more or less power on their incumbents*, dan (2) *the role of ideas in creating on undermining the legitimacy of social position* (Wallce and Wolf, 1986).

Berikut ini disajikan beberapa proposisi teori konflik sebagai berikut:

1. Semakin tidak merata distribusi sumber di dalam suatu sistem, akan semakin besar konflik kepentingan antara segmen dominan dan segmen lemah di dalam suatu sistem.
2. Apabila segmen yang lebih lemah (*subordinate*) semakin menyadari akan kepentingan kolektif mereka, maka akan semakin besar kemungkinannya mereka itu akan

mempertanyakan keabsahan distribusi sumber yang tidak merata.

3. Apabila segmen yang lemah (subordinate) di dalam suatu sistem semakin sadar akan kepentingan kelompok mereka, maka semakin besar kemungkinan mereka memperlakukan keabsahan distribusi sumber-sumber, dan semakin besar pula kemungkinannya mereka mengorganisasi untuk memulai konflik secara terang-terangan terhadap segmen-segmen dominan suatu sistem.
4. Apabila segmen-segmen yang lemah (subordinate) semakin dipersatukan oleh keyakinan umum dan semakin berkembang struktur kepemimpinan politik mereka, maka segmen dominan dan segmen yang dikuasai yang lebih lemah akan semakin terpolarisasi (Wirawan, 2013).

Berangkat dari penjabaran pokok persoalan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konflik dapat dirumuskan sebagai bentuk gejala yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapatan, persaingan, dan pertentangan dalam usaha mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan. Misalnya, rasa adil, rasa aman dan tenteram, pangan dan sandang tercukupi, perumahan, hak berpartisipasi, kebebasan berbicara dan berkumpul, informasi, pendidikan yang memadai, fasilitas kesehatan yang memadai, upah yang wajar, harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, jaminan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, dan sebagainya.

Bertolak dari kondisi ini, maka sosiologi sebagai ilmu masyarakat harus melakukan renungan sosiologi dengan sasaran membentuk cabang khusus dalam sosiologi, yakni sosiologi konflik. Sosiologi umum mengalami kesulitan memahami masalah konflik secara luas dan mendalam, sehingga kehadiran sosiologi konflik menjadi sangat penting.

Berikut beberapa tokoh yang dipandang berjasa dalam meletakkan fondasi sosiologi konflik sebagai berikut:

1. Marx. Marx melihat konflik sosial terjadi di antara kelompok atau kelas daripada individu. Hakekat konflik antarkelas tergantung pada sumber pendapatan mereka. Kepentingan ekonomi mereka bertentangan karena kaum proletariat hanya memiliki sedikit hak milik, dan memproduksi komoditas-komoditas demi keuntungan sejumlah kecil kaum kapitalis. Konflik pada dasarnya muncul dalam upaya memperoleh akses terhadap kekuatan produksi. Tetapi, apabila ada kontrol dari masyarakat, maka konflik akan bisa dihapus. Artinya, bila kapitalisme digantikan dengan sosialisme, kelas-kelas akan terhapus dan pertentangan kelas akan berhenti (Sutaryo, 1992).
2. Weber. Menurut Weber, tindakan-tindakan manusia itu didorong oleh kepentingan-kepentingan, tetapi bukan saja oleh kepentingan yang bersifat material seperti dikatakan Marx, melainkan juga oleh kepentingan-kepentingan ideal. Weber melihat masyarakat sebagai kenyataan yang sangat kompleks. Weber memang tidak berusaha menjawab pertanyaan tentang apa yang membuat masyarakat menjadi kompak, melainkan dia melihat dan menjelaskan bahwa dalam perjalanan sejarah suatu waktu muncul kekompakan sosial dalam masyarakat, sesudahnya muncul konflik dan perpecahan yang berkeping-keping, kemudian muncul perubahan sosial dalam suatu institusi sosial. Di dalam masyarakat memang ada saat di mana konflik muncul, ada saat di mana terjadi integrasi yang sangat baik. Sepanjang manusia itu adalah seseorang individu yang dengan bebas memberikan arti dan interpretasi terhadap kenyataan yang ada di luarnya; dan sepanjang tatanan-tatanan yang ada dalam masyarakat itu menuntut penyesuaian dari individu, maka konflik akan selalu mungkin terjadi (Lawang, 1986).
3. Dahrendorf. Menurut Dahrendorf bahwa kepentingan merupakan elemen dasar dalam kehidupan sosial. Apabila kepentingan itu saling bertabrakan (baik yang manifest

maun laten), maka sudah barang tentu akan terjadi konflik. Kepentingan buruh tani dan pekerja pabrik misalnya, tuntutan kenaikan upah agar dapat mempertahankan hidupnya. Kepentingan majikan/pemilik modal berusaha meningkatkan kekayaannya dengan berbagai macam cara. Mudah diduga bahwa potensi konflik telah terkandung di dalamnya, yang pada gilirannya, jika persyaratan-persyaran memungkinkan maka akan menjadi konflik terbuka (Lawang, 1986).

4. Cohen. Menurut Cohen bahwa kehidupan sosial menghasilkan konflik yang berstruktur. Ini sangat erat hubungannya dengan pendapat Dahrendorf yang menyatakan bahwa konflik selalu terjadi dalam suatu struktur atau sistem tertentu yang secara umum dapat dilihat pada lapisan atas dengan lapisan bawah. Konflik ini terjadi karena kepentingan yang berbeda. Maka mudah dipahami, jika dalam model Dahrendorf dinyatakan bahwa konflik itu selalu ada di dalam masyarakat antara lapisan atas dan lapisan bawah (Lawang, 1986).
5. Collins. Collins mengambil contoh pada lingkungan keluarga. Hubungan antara kelompok umur secara khusus antara yang muda dengan yang tua juga sebagai penyebab konflik. Collins memandang penyebab konflik itu adalah perbedaan sumber yang dimiliki berbagai kelompok umur. Orang dewasa mempunyai bermacam-macam sumber termasuk pengalaman, kekuatan, dan kemampuan memuaskan kebutuhan fisik dari yang muda. Secara berlawanan, salah satu sumber dari orang muda yang dimiliki adalah daya tarik secara fisik. Dengan demikian, karena kelompok umur yang lebih tua mempunyai sumber yang lebih banyak daripada kelompok muda, berarti anak muda didominasi oleh orang dewasa (Wirawan, 2013).
6. Simmel. Simmel melihat dalam kehidupan sosial, bahwa individu tidak hanya mau melibatkan diri dalam konflik, tetapi bersemangat untuk berkonflik. Kalau isu-isu yang penting tidak ada, orang mau berkonflik karena isu yang

kecil atau sepele. Simmel mengatakan, kalau hubungan intim mungkin cukup kuat untuk memungkinkan percekocokan atau malah untuk hidup bersama, maka tidak mengherankan bahwa intensitas konflik secara berbanding langsung dengan tingkat solidaritas atau persamaan dalam hubungan itu. Simmel mengatakan bahwa ungkapan permusuhan di dalam konflik membantu fungsi-fungsi positif, sepanjang konflik itu dapat mempertahankan perpecahan kelompok dengan cara menarik orang-orang yang sedang konflik. Jadi, konflik itu dipahami sebagai suatu alat yang berfungsi untuk menjaga kelompok sepanjang dapat mengatur sistem-sistem hubungan (Wirawan, 2013).

7. Coser. Bagi Coser, konflik yang terjadi di dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatifnya saja, tetapi dapat juga menimbulkan dampak positif. Oleh karena itu, konflik bisa menguntungkan bagi sistem yang bersangkutan. Bagi Coser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dan tidak perlu diingkari keberadaannya. Konflik merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan, dan bahkan mempertegas sistem sosial yang ada. Contoh yang paling jelas untuk memahami fungsi positif konflik adalah hal-hal yang menyangkut dinamika hubungan antara “in-group” (kelompok dalam) dengan “out group” (kelompok luar). Proposisi yang dikemukakan oleh Coser yaitu, kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam (in-group) akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar (Sutaryo, 1992).

B. Pengertian Sosiologi Konflik

Ada dua istilah keilmuan yang bersanding dalam kajian ini, yaitu sosiologi dan konflik. Sosiologi sebagaimana kita ketahui, memfokuskan diri pada kajian memahami struktur, sistem sosial, lembaga, kelompok sosial, dinamika sosial dalam proses yang

terjadi, hubungan timbal balik individu dan individu, individu dan kelompok/masyarakat, serta hubungan antar kelompok/masyarakat. Sementara, konflik menurut beberapa ahli:

1. Konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih (Elly & Kolip, 2013).
2. Dalam kamus Bahasa Inggris, kata konflik dimaksudkan beragam pula yakni: percekocokan yang serius, perbedaan yang serius dua atau lebih keyakinan, ide atau kepentingan (Afrizal, 2018).
3. Menurut UU No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, dalam pasal 1 ayat (1) dinyatakan konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
4. Minnery (1985), konflik merupakan interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling tergantung, namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan.
5. Pace & Faules (1994), konflik menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami.
6. Folger & Poole (1984), konflik dapat dirasakan, diketahui, diekspresikan melalui perilaku-perilaku komunikasi.

Makna sosiologi konflik akan berbeda maknanya dari kedua disiplin ilmu tersebut, yaitu sosiologi dan konflik. Di sini disampaikan pengertian umum dari sosiologi konflik. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk membuka rangsangan pemikiran yang lebih luas dari para pembaca, sehingga terdorong

untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap sosiologi konflik. Sosiologi konflik didefinisikan sebagai bagian dari sosiologi yang membahas dan menganalisis fenomena konflik, dengan bantuan konsep-konsep dan metode sosiologi. Fenomena konflik, seperti antara buruh dan majikan (biasanya berkaitan dengan soal upah kerja dan jaminan sosial), konflik politik (pemilihan umum, proses penyusunan undang-undang dan anggaran pendapatan dan belanja Negara, proses pemilihan dan pengangkatan pejabat tinggi Negara, demonstrasi, pengajuan petisi, penolakan terhadap keputusan yang dibuat oleh pemerintah), inter dan antar masyarakat, antara Negara dan rakyat, konflik etnis, konflik agraria atau tanah, konflik pribadi, konflik antar kelas, konflik rasial, konflik antara agama, dan sebagainya. Sementara, konflik berdasarkan pihak yang terlibat di dalamnya, seperti konflik di dalam diri individu, konflik antar individu, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, konflik antar organisasi, konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda.

C. Pendekatan Sosiologi Konflik

Pendekatan yang dimaksud di sini adalah titik pandang atau sudut pandang yang dipakai para ahli sosiologi konflik untuk mempelajari masalah-masalah yang menjadi objek kajian sosiologi konflik. Jika dikaji secara cermat, konflik ini tidak hanya beraspek sosial atau politik, tetapi bersifat kompleksitas, seperti adanya perbedaan suku bangsa, daerah, agama, ras, perbedaan profesi (seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, tokoh agama, sopir, cendekiawan, dan sebagainya). Kondisi ini, maka penyelesaian konflik harus menggunakan pendekatan yang holistik atau komprehensif. Mashud (2006), mengusulkan ada empat bentuk penyelesaian konflik, yaitu negoisasi, mediasi, arbitrase dan pengadilan. Negoisasi umumnya terjadi apabila di antara pihak-pihak yang bertikai terjadi perundingan secara langsung. Bentuk

penyelesaian ini merupakan cara yang efektif karena inisiatif berasal dari dalam. Tetapi keadaan ini dimungkinkan jika pihak-pihak yang terlibat mempunyai kekuatan yang relatif seimbang. Sebaliknya, jika perundingan diwarnai oleh ketidak seimbangan kekuatan, selain sulit tercapainya kesepakatan, kesepakatan sering kali tercapai karena bentuk hubungan yang bersifat dominan. Jika demikian, hal ini dapat mengakibatkan kesepakatan tidak berumur panjang. Mediasi, yaitu pihak ketiga tugas utamanya adalah untuk mengusahakan suatu penyelesaian secara damai. Kedudukan pihak ketiga hanyalah sebagai penasehat belaka. Dia tak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan-keputusan penyelesaian konflik tersebut. Arbitrasi, konflik diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau oleh suatu badan yang berkedudukan lebih tinggi dari pihak-pihak yang konflik, seperti terlihat dalam penyelesaian masalah konflik perburuhan (buruh dan majikan). Pengadilan, yaitu penyelesaian konflik atau sengketa di pengadilan.

Limbong (2012), menawarkan ada empat pendekatan menyelesaikan konflik, yaitu: pendekatan hukum, politik, ekonomi (kesejahteraan) dan sosial budaya.

1. Pendekatan Hukum. Terpenuhinya rasa keadilan bagi para korban konflik. Pendekatan hukum ini mengutamakan hak-hak korban konflik dalam bentuk pemulihan, kompensasi, dan restitusi hak asasi mereka. Dengan hukum, masyarakat dituntun untuk hidup adil terhadap satu sama lain.
2. Pendekatan Politik. Konflik disalurkan melalui mekanisme penyelesaian konflik yang telah disepakati bersama, yaitu lembaga-lembaga pemerintahan yang demokratis, seperti badan perwakilan rakyat, partai politik, pemerintah, pengadilan, dan pers, sehingga gejala konflik tidak mengancam eksistensi masyarakat yang ada. Penyelesaian konflik yang disalurkan lewat mekanisme politik merupakan contoh dari konflik positif.

3. Pendekatan ekonomi (kesejahteraan). Konflik diselesaikan melalui perbaikan ekonomi sehingga masyarakat menjadi sejahtera. Masyarakat sejahtera yaitu terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Beberapa skema yang dapat dilakukan, seperti ada usaha ekonomi produktif, kredit mikro, arisan, dan sebagainya.
4. Pendekatan sosial budaya. Menempatkan institusi dan mekanisme sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai instrumen alternatif menyelesaikan konflik. Setiap masyarakat, terutama masyarakat lokal atau perdesaan mempunyai bahasa, adat istiadat, budaya, organisasi sosial rakyat, tokoh adat, pemimpin adat, yang tentunya berbeda-beda menurut masing-masing daerah. Dalam hal konflik, penyelesaiannya mengacu pada kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Misalnya, konflik pertanahan, jika pendekatan sosial budaya, mungkin tidak akan ada korban yang tidak kita harapkan. Masyarakat perdesaan mempunyai banyak pilihan atau jalan menuju keadilan, terutama yang ditawarkan melalui pendekatan sosial budaya. Sebaliknya, jika menggunakan pendekatan sistem hukum formal, hanyalah salah satunya, terutama kawasan perkotaan. Pilihan terhadap hukum formal dinilai terlalu mahal, lamban, dan sebagainya.

Untuk memahaminya pendekatan di atas, maka dalam prakteknya perlu digunakan metodologi-metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini, ada dua pendekatan yang umumnya digunakan oleh para ahli yaitu pendekatan metode kualitatif dan metode kuantitatif.

1. Metode Kualitatif. Metode kualitatif adalah metode kerja ilmiah yang mengutamakan bahan atau informasi yang nantinya akan diuji berdasarkan tingkat kualitas data.

Dengan metodologi ini, sukar didapat indikator atau skala pengukuran berdasarkan angka-angka yang bersifat eksak (tepat/pasti). Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data secara gabungan. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

2. Metode Kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metodologi ilmiah yang menggunakan angka-angka sebagai bahan-bahan keterangan sebagai data ilmiah. Dengan metodologi ini, fenomena sosial dapat ditelaah melalui angka indeks, skala, tabel, dan rumusan lain yang sedikit banyak menggunakan statistik. Penelitian pada umumnya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang representatif. Proses penelitian bersifat deduktif, di mana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji melalui pengumpulan data lapangan. Untuk mengumpulkan data digunakan instrumen penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik sehingga dapat disimpulkan

hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak. Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel tersebut diambil.

D. Manfaat Sosiologi Konflik

Mempelajari sosiologi konflik dapat memberi manfaat, di antaranya adalah:

1. Mengetahui dan memahami pengertian, objek, ruang lingkup, konsep dan teori sosiologi konflik;
2. Mengetahui dan memahami berbagai perspektif teori dalam sosiologi yang menjadi akar teori sosiologi konflik;
3. Membantu pemerintah atau pihak terkait lainnya memberikan analisis terhadap berbagai fenomena konflik dan kekerasan melalui tradisi ilmu sosiologi;
4. Membantu pemerintah atau pihak terkait lainnya menganalisis konflik yang muncul di masyarakat, memetakannya, mencari akar konflik, dan menggunakan analisis itu untuk berupaya memberikan solusi melalui skema resolusi konflik yang berkesinambungan;
5. Membantu pemerintah atau pihak terkait lainnya mencegah kemungkinan munculnya konflik di masyarakat, untuk dapat dikelola sehingga tidak menimbulkan kekerasan.

E. Objek Kajian Sosiologi Konflik

Sosiologi konflik berdimensi sangat luas dan kompleks. Kondisi ini berimplikasi pada objek kajian sosiologi konflik. Konflik ini mencakup: konflik politik, konflik antara buruh dan majikan, konflik inter dan antar masyarakat, konflik antara Negara dan rakyat, konflik etnik, konflik agraria atau pertanahan, konflik pribadi, konflik antar kelas, konflik rasial, konflik antar agama, dan sebagainya. Sementara, konflik berdasarkan yang terlibat di dalamnya, seperti konflik di dalam diri individu, konflik antar individu, konflik antar individu

dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, konflik antar organisasi, konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda. Dalam konteks ini, memberikan pembatasan bahwa pokok-pokok masalah sebaiknya yang dikaji dan dijadikan objek kajian sosiologi konflik yakni:

1. Pengertian, tujuan dan fungsi konflik;
2. Perspektif teori konflik;
 - a. Karl Marx
 - b. Max Weber
 - c. Ralf Dahrendorf
 - d. Bruce J. Cohen
 - e. Rendhall Collins
 - f. George Simmel
 - g. Lewis A. Cosser
3. Akar, jenis dan tahapan konflik;
4. Analisis dampak konflik: hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya;
5. Kendala penyelesaian konflik;
 - a. Faktor internal
 - b. Faktor eksternal
6. Pendekatan mencegah munculnya konflik;
 - a. Pendekatan hukum
 - b. Pendekatan politik
 - c. Pendekatan ekonomi (kesejahteraan)
 - d. Pendekatan sosial budaya
7. Strategi penyelesaian konflik apabila telah terlanjur terjadi;
 - a. Negosiasi
 - b. Mediasi
 - c. Arbitrasi
 - d. Pengadilan
8. Kasus konflik: inter dan antar masyarakat;
 - a. Pengertian konflik

- b. Akar konflik
 - c. Kendala penyelesaian konflik
 - d. Strategi penyelesaian konflik
9. Kasus konflik: Negara dan rakyat;
- a. Pengertian konflik
 - b. Akar konflik
 - c. Kendala penyelesaian konflik
 - d. Strategi penyelesaian konflik
10. Kasus konflik: pengusaha dan buruh;
- a. Pengertian konflik
 - b. Akar konflik
 - c. Kendala penyelesaian konflik
 - d. Strategi penyelesaian konflik
11. Kasus konflik: agraria atau pertanian
- a. Pengertian konflik
 - b. Akar konflik
 - c. Kendala penyelesaian konflik
 - d. Strategi penyelesaian konflik
12. Kasus konflik: lingkungan hidup
- a. Pengertian konflik
 - b. Akar konflik
 - c. Kendala penyelesaian konflik
 - d. Strategi penyelesaian konflik
13. Kasus konflik: Partai politik
- a. Pengertian konflik
 - b. Akar konflik
 - c. Kendala penyelesaian konflik
 - d. Strategi penyelesaian konflik

DAFTAR PUSTAKA

- Abrams, Philip, 1982. *Historical Sociology*. Ithaca N.Y : Cornell University Press.
- Abustam, M.Idrus, 1992. *Partisipasi Angkatan kerja dan Pengalokasian Waktu dalam Rumah Tangga Petani Menurut Situasi Sosial Ekonomi di Daerah Pedesaan Sulawesi selatan: Laporan Penelitian*. Ujung Pandang: FPIPS IKIP.
- Adi, Rianto, 2012. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Adimihardja, Kusnaka, 1993. *Kebudayaan dan Lingkungan*. Bandung: Ilham Jaya.
- Adiwijaya, Saputra & Berkat, 2015. *Sosiologi Lingkungan*. Palangka Raya: Academy.
- Afrizal, 2018. *Sosiologi Konflik*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Ahmadi, Abu, 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Alatas, Syed Hussein, 1981. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer*. Terjemahan Usman. Jakarta: LP3ES.
- Alatas, Syed Hussein, 1987. *Korupsi Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Terjemahan Nirwono. Jakarta: LP3ES.
- Anwar, Yesmir & Adang, 2017. *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: Aditama.
- Asyari, Sapari Imam, 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Atmadja & Atmadja, 2019. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bardo, John W., 1982. *Urban Sociology a Systematic Introduction*. Itasca, IL: F. E. Peacock.

- Basrowi; Sukidin & Susilo, 2012. *Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Beilharz, Peter, 2002. *Teori – teori Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Betrand, Alvin L., et.al., 1958. *Rural sociology: an Analysis of Contemporary Rural Life*. New York, NY: McGraw-Hill Book Company.
- Bintarto, R., 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bottomore, Tom, 1992. *Sosiologi Politik*. Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Cipta Rineka.
- Bouman, PJ., 1976. *Pengantar Sosiologi: Pengertian-pengertian dan masalah-masalah*. Penerjemah Sugito & Sujitno. Yogyakarta: yayasan Kanisius.
- Bookover, Wilbur B. Erickson, Edsel L., 1977. *Sociology of Education*. Hamewood, Illinois: The Dorsey Press.
- Bungin, M. Burhan, 2006. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chairuddin. OK., 1991. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cohen, Erik, 1984. *The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings*. *Annal of Tourism Research* 30: 236-66.
- Coleman, James S , 2009. *Teori Sosial*. Bandung : Nusa Media.
- Coser, Lewis, 1997. *The Function of Social Conflict*. New York : Free Press.
- Dahrendorf, Ralf, 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Damsar, 1997. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Damsar, 2011. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Damsar & Indrayani, 2016. *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. Jakarta : Kencana.
- Damsar & Indrayani, 2017. *Pengantar Sosiologi Perkotaan*. Jakarta : Kencana.

- Damsar & Indrayani, 2019. *Pengantar Sosiologi Kapital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dirdjosisworo, Sudjono, 1983. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Djajadi, Iqbal, dkk., 2007. *Sosiologi Industri*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Djarmiko, Yayat Hayati, 2005. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Duverger, Maurice, 1993. *Sosiologi Politik*. Terjemahan Daniel Dhakidae. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dwi Susilo, Rachmad K., 2008. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dwi Susilo, Rachmad K., 2012. *Sosiologi Lingkungan & SDM*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Effendy, Onong Uchyana, 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Adytia Bakti.
- Elly & Kolip, 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Elly & Kolip, 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenada Media group.
- Evers, Hans-Dieter & Korff, 2002. *Urbanisme di Asia Tenggara*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia.
- Faulks, Keith, 1999. *Political Sociology: A Critical Introduction*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Galeksi, Boguslow, 1972. *Conflict and Change as an Aspect of Development Sociologia Ruralis XII (3/4): 252-272*.
- Giddens, Anthony, Daniel Bell, Michel Force, Etc, 2004. *Sosiologi: Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Giddens, Anthony, 2005. *The Consequences of Modernity*. Stanford : Stanford University.
- Goode, William J., 1995. *Sosiologi Keluarga*. Terjemahan Lailahanoum. Jakarta: Bumi Aksara.

- Gunawan, Ary H., 2000. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan, Ilham, 1993. *Postur Korupsi di Indonesia: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politis*. Bandung: Angkasa.
- Gurvitch, Georges, 1988. *Sosiologi Hukum*. Terjemahan Sumantri Mertodipuro & Moh. Radjab. Jakarta: Bhratara.
- Hariyono, Paulus, 2007. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haryanto, Sindung, 2011. *Sosiologi Ekonomi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Haryatmoko, 2011. *Etika Politik untuk Integrasi Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Haryatmoko, 2014. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.
- Hendropuspito, DOC., 1990. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Heru, 2017. *Sosiologi Komunikasi: Pengertian dan Ruang Lingkupnya*. <https://pakarkomunikasi.com/author/heru>.
- Horton, Paul B. & Hunt, 1984. *Sosiologi*. Terjemahan Aminuddin Ram & Tita Sobari. Jakarta: Erlangga.
- Ihromi, TO., 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irving, M. Zeitlin, 1995. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Iskandar, Johan, 2001. *Manusia, Budaya dan Lingkungan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Ishomuddin, 2002. *Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jalal, 2002. *Menuju Sosiologi Lingkungan atau Sosiologi Ramah Lingkungan*. Makalah disajikan pada Seminar Nasional IV Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI), tanggal 28-29 Agustus 2002 di Bogor Jawa Barat.
- Jamaludin, Adon Nasrullah, 2016. *Sosiologi pembangunan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Jamaludin, Adon Nasrullah, 2017. *Sosiologi Perkotaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Johnson, Alvin S., 1994. *Sosiologi Hukum*. Terjemahan Rinaldi Simamora. Jakarta: Rineka Cipta.
- Johnson, Dayle Paul, 1986. *Teori Sosiologi : Klasik dan Modern*. Jakarta : Penerbit Gramedia.
- Jones, Pip, Liza Bradbury & Shaun Le Boutillier, 2016. *Pengantar Teori – Teori Sosial*. Jakarta : Pustaka Obor Indonesia.
- Kartono, Drajat T., 2010. *Sosiologi Perkotaan*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Kartono, Kartini, 1977. *Psikologi Wanita: Mengenal Wanita Sebagai Ibu dan Nenek*. Bandung: Mandar Maju.
- Keraf, A. Sonny, 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Khairudin, H., 2002. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Nurcahaya.
- Komara, Endang, 2019. *Teori Sosiologi Antropologi*. Bandung : PT. Reflika Aditama.
- Laeyendecker, L, 1983. *Tata Perubahan dan Keseimbangan : Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. Jakarta : Gramedia.
- Lawang, Robert MZ, 1986. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Karunika.
- Liliweri, Alo, 1997. *Sosiologi Organisasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Limbong, Bernhard, 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta : Margaretha Pustaka.
- Maclelland, David, C., 1987. *Memacu Masyarakat Berprestasi*. Jakarta: Intermedia.
- Mansyur, M. Cholil, (t.th). *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Maran, Rafael Raga, 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Martono, Nanang, 2016. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Mashud, Mustain, 2006. *Membangun harmoni antara Industri dan Masyarakat Melalui Analisis Dampak Sosial. Dalam Ancaman Konflik Sosial di Jawa Timur*. Surabaya: Dewan Pakar Propinsi Jawa Timur.
- Mashud, Mustain, 2015. *Sosiologi Pembangunan*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Muslihudin & Rostikawati, 2020. *Sosiologi Korupsi*. Pirwokerto: FISIP UNSOED.
- Narwoko, J.Dwi & Suyanto, 2004. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Nasution S., 1983. *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Jemmar.
- Natawidjaya, R. Sukmadinata, 2007. *Ilmu Rujukan Filsafat, Teori dan Praksis*. Bandung: UPI.
- Nugroho, Hari, 2007. *Sosiologi Industri*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Oetoyo, Baldhi, dkk, 2015. *Teori Sosiologi Klasik*. Tangerang Selatan : Universitas terbuka.
- Pahrudin, 2011. *Sosiologi Lingkungan: Sebuah Pengantar*. <https://roedijambi.wordpress.com>.
- Paloma, Margaret M, 2003. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Pinata, I Gde & Gayatri, 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Podgorecki, Adam & Whelan, 1987. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Terjemahan Widyarningsih dan Kartasapoetra. Jakarta: Bina Aksara.
- Poerwanto, Hari, 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pope, Jeremy, 2003. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integrasi Nasional*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia.
- Prasetyo, Bambang & Jannah, 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif: teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Rahardjo, Satjipto, 1977. *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: angkasa.
- Rahardjo, Satjipti, 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Raho, Bernard, 2013. *Agama dalam Perspektif Sosiologi*. Jakarta: Obor.
- Rifai, Muhammad, 2011. *Sosiologi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman, 2009. *Teori Sosiologi*. Terjemahan Nurhadi. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Ritzer, George & Barry Smart, 2014. *Teori Sosial*. Bandung : Nusa Media.
- Rogers, Everen M., 1962. *Diffussion of Innovations*. New York, NY: The Free Press of Glencoe.
- Rosmalia, Dewi & Sriani, 2017. *Sosiologi Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Rush, Michael & Althoff. 1977. *Pengantar Sosiologi Politik*. Terjemahan Kartini kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sahid, Komarudin, 2011. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sajogyo, Pudjiwati, 1985. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana IKIP.
- Salim, Emil, 1993. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Salman, Otje & Susanto, 1993. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Salomon, Michael, 1992. *Industrial Relations: Theory and Practice*. New York: Prentice Hall.
- Sanderson, Stephen K., 1993. *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sarwono, Solita, 1993. *Sosiologi Kesehatan. Beberapa Konsep Beserta Aplikasinya*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sasrawan, Hedi, 2012. *Sosiologi Komunikasi*. Artikel. <https://Hedisasrawan.blogspot.com/2012>.
- Sastramihardja, Hatta, 1987. *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Karunika.
- Silalahi, Ulber, 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: UNPAR Press.
- Smelser, Neil J. & Swedberg, 1994. *The Handbook of Economic Sociology*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Soedjono D., 1982. *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Alumni.
- Soekadijo, RG., 1995. *Anatomi Pariwisata: Memahami pariwisata sebagai Systemic Linkage*. Jakarta: Gramedia.
- Soekadijo, RG., 1997. *Wisata Minat Khusus*. Yogyakarta: PAU Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.
- Soekanto, Soerjono, 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soerkanto, Soerjono, & Abdullah, 1980. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, 1982. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 1988. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 1989. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Soemanto, RB., 1999. *Sosiologi Pariwisata*. Tangerang: Universitas terbuka.
- Soemardjan, Selo & Soemardi (ed), 1951. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Penerbit FEUI.
- Soemarwoto, Otto, 1997. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.

- Soerjani, Mohamad; Yuwono & Fardiaz, 2006. *Lingkungan Hidup*. Jakarta: IPPL.
- Sudarma, Momon, 2014. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugihen, Bahrein T., 1996. *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi & Wahyu, 2001. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sulastri, 2015. *Sosiologi Industri*. [Http://blog-sosiologi3blogspot.com](http://blog-sosiologi3blogspot.com).
- Sumadiria, AH., 2014. *Sosiologi Komunikasi Massa*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sunarto, Kamanto, 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sunarto, Kamanto, 2014. *Sosiologi Kesehatan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Suparlan, Parsudi, 1984. *Manusia, kebudayaan dan Lingkungannya*. Jakarta: CV.Rajawali.
- Suparlan, Parsudi, 1993. *Keharmonisan Keluarga*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Suryadi, Budi, 2005. *Pengantar Ekonomi Politik*. Banjarmasin: Insan Ventura.
- Suryadi, Budi, 2006. *Ekonomi Politik Modern*. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Suryadi, Budi, 2009. *Sosiologi Ekonomi dan Komunikasi Massa*. Banjarbaru: Scripta Cendekia.
- Susanto, Astrid S., 1984. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Binacipta.
- Suseno, Franz Magnis, 1999. *Berfilsafat dari Konteks*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Sutaryo, 1992. *Dinamika Masyarakat dalam Perspektif Konflik*. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Suyanto, Bagong, 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suyanto, Bagong, 2017. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Suyanto, Bagong, 2019. *Sosiologi Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sztompka, Piotr, 2017. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta : Penerbit Kencana.
- Turner, Bryans, 1991. *Religion and Social Theory*. Thousand Oaks, Calif : Sage.
- Turner, Bryans, 2012. *Teori Sosial dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Twaddle, Andrew C & Hessler, 1987. *A Sociology of Health. Second Edition*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Utami, Tri Niswati & Harahap, 2019. *Sosioantropologi Kesehatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Varma, SP., 1999. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Press.
- Vembriarto, ST., 1982. *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: yayasan Paramita.
- Wallace, A. Ruth & Wolf. 1986. *Contemporary Sociological Theory, The Continuiting Classical Traditional*. New Jersey, Prentice Hall, Inc: Englewood Cliffs.
- Warsito, 2015. *Sosiologi Industri*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Watson, Tonny J., 1997. *Sociology, Work and Industry*. London: Routledge.
- White K., 2011. *Sosiologi Kesehatan dan Penyakit*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 1995. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2006. *Konflik dan Mediasi. Dalam Ancaman Konflik Sosial di Jawa Timur*. Surabaya: Dewan Pakar Propinsi Jawa Timur.

- Wijayanto & Zachrie (ed), 2009. *Korupsi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wirawan, IB, 2013. *Teori – Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Wisadirana, Dassono, 2005. *Sosiologi Pedesaan*. Malang: UMM Press.
- Wulansari, C Dewi, 2013. *Sosiologi: Konsep dan Teori*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yamin, M., 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Yuliati, yayuk & Poernomo, 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

BIODATA PENULIS



Prof. Dr.H.Wahyu, MS adalah Guru Besar Sosiologi pada FKIP ULM Banjarmasin. Lahir di Bandung, 10 September 1955. Lulus Sarjana Muda (BA) PKN dan Hukum IKIP Bandung tahun 1977; Sarjana PKN dan Hukum (Drs) IKIP Bandung tahun 1979; Magister Sains (MS) Sosiologi/Ilmu Sosial dari Pascasarjana UNPAD Bandung tahun 1986 dan Doktor (Dr) Sosiologi/Ilmu Sosial dari

Pascasarjana UNPAD Bandung tahun 2001. Jabatan yang pernah didudukinya adalah Ketua Program Studi PMP dan KN (1990-1995); Ketua Jurusan Pendidikan IPS (1995-1996); Kepala Pusat penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Lembaga Penelitian Unlam (1996-1997); Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi (2003-2008); Pembantu Dekan I FKIP Unlam (2008-2015); dan Dekan FKIP ULM (2015-2019).

Hasil pemikirannya telah dituangkan dalam beberapa buku, yaitu : *Wawasan ISD* (Karya Anda Surabaya, 1986); *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi* (Karya Anda Surabaya, 1987); *Bimbingan Penulisan Skripsi* (Tarsito Bandung, 1990); *Pengantar Pemahaman Kelompok* (Sarjana Indonesia Surabaya, 1991); *Pengantar Ilmu-ilmu Sosial* (Editor, Lambung Mangkurat University Press, 1995); *Pengantar Ilmu Pengetahuan Sosial* (Editor, Lambung Mangkurat University Press, 1996); *Perubahan Sosial dan Pembangunan* (HACC Jakarta, 2005); *Pengelolaan SDA dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Budaya dan Kearifan Lokal* (Editor, Unlam Press, 2007); *Mewacanakan Pendidikan IPS* (Kontributor, Niaga sarana Mandiri Bandung,

2013); *Pendidikan Karakter* (Kontributor, Widya Aksara Press Bandung, 2011); *Pendidikan Karakter* (Kontributor, Niaga Sarana Mandiri Bandung, 2014); *Fenomena Sosial: Perspektif Sosiologi* (CV. Aswaja Pressindo Yogyakarta, 2014); *Building Nation Character Through Education* (Kontributor, FKIP Unlam Press, 2014); *Analisa Konteks Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Berbasis Muatan Lokal di Kalimantan Selatan* (Kontributor, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 2015); *Ethnopedagogy* (Kontributor, FKIP Unlam Press, 2015); *Pendidikan IPS Berbasis Kearifan Lokal* (Kontributor, Wahana Jaya Abadi Bandung, 2015); *Strategi Penanganan Konflik Perebutan Tanah* (Inteligenzia Media Malang, 2016); *Membangun Pendidikan* (FKIP ULM Banjarmasin, 2017); *Pendidikan Berkearifan Lokal: Teori dan Praktik Pendidikan Karakter* (Inteligenzia Media Malang, 2019); *Sosiologi: Tokoh, Teori dan Berbagai Pemikirannya* (Tahura Media Banjarmasin, 2020).

Tulisan lainnya tersebar di majalah Vidya Karya FKIP Unlam; Kalimantan Scientie Unlam; gagasan Jurusan Pendidikan IPS FKIP Unlam; Jurnal PKN FKIP Unlam; Jurnal Komunitas; Meddika STIE Nasional Banjarmasin; Harian Banjarmasin Post. Kegiatan ilmiah yang sering diikuti adalah seminar/simposium di tingkat Program Studi; Jurusan; Fakultas; Universitas; Wilayah; Regional dan Nasional. Kegiatan dalam bidang penelitian masalah Konflik Sosial; Penanggulangan Gelandangan dan pengemis (bekerjasama Lemlit Unlam dan Dinas Sosial Propinsi Kalsel).

Dalam Organisasi Profesi, Anggota Dewan Riset Nasional (2005-sekarang); Ketua Dewan Riset Daerah Propinsi Kalsel (2005-sekarang); Anggota Dewan Pakar HISPISI Pusat (2012-sekarang); Ketua HISPISI Propinsi Kalsel (2013-sekarang); Anggota Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Se-Indonesia (2008-sekarang) dan Ketua Dewan Pakar Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) Propinsi Kalsel (2014-sekarang).